

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 3

TAHUN : 2019

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025;

b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu ditinjau;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang

Nomor...

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

12. Undang-Undang...

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

20. Peraturan...

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;

30. Peraturan...

30. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 273);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BOGOR
dan
BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2005 – 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati...

3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bogor untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Pasal 2

- (1) RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (2) Periodisasi pembangunan jangka panjang daerah dibagi dalam tahapan pembangunan jangka menengah daerah, dengan tahun perencanaan yang disesuaikan dengan masa jabatan Bupati.

Pasal 3

RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD pada saat belum disusun RPJMD.

BAB III

SISTEMATIKA RPJPD

Pasal 4

RPJPD disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan.

BAB II...

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Berisi tentang penjelasan mengenai aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Berisi tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi daerah.

BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH

Berisi tentang visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah.

BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

Berisi tentang arah kebijakan dan sasaran pokok daerah

BAB VI : PENUTUP

Pasal 5

Isi beserta uraian RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD.
- (2) Evaluasi dilakukan sebagai bahan penyusunan RPJPD periode berikutnya.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

Program Pembangunan Daerah Periode Tahun 2005-2025 disusun dan dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.

**BAB V
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 8

Seluruh kebijakan perencanaan pembangunan dan penganggaran Daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah

Nomor...

Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27) sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 27 Juni 2019

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 27 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2019 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOGOR PROVINSI JAWA BARAT (3/104/2019)

Salinan sesuai dengan salinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN

R. IRWAN PURNAWAN, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 196904021998031007

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-5
1.3 Hubungan Antar Dokumen Perubahan RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya	I-8
1.4 Maksud dan Tujuan	I-9
1.5 Sistematika Penulisan	I-10
 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Aspek Geografis dan Demografi	II-1
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	II-1
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah	II-8
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana.....	II-27
2.1.4 Kondisi Umum Demografi	II-31
2.1.5 Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	II-41
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-51
2.3 Aspek Daya Saing Daerah	II-72
2.4 Aspek Pelayanan Umum.....	II-75
2.4.1 Layanan Urusan Wajib Dasar	II-75
2.4.2 Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	II-88
2.4.3 Layanan Urusan Pilihan	II-94
2.5 Evaluasi terhadap RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 sampai dengan tahap ke -3 (Periodisasi Tahun 2005-2018)	II-129
2.6 Pencapaian Suistainable Development Goals (SDGS)	II-153
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH.....	III-1
3.1 Permasalahan Pembangunan	III-1
3.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	III-1
3.1.2 Aspek Daya Saing Daerah	III-3
3.1.3 Aspek Pelayanan Umum	III-3
3.2 Isu-Isu Strategis.....	III-15
3.2.1 Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025	III-16
3.2.2 Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat	

Tahun 2005-2025	III-31
3.2.3 Penelaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	III-33
3.3 Isu-Isu Strategis Kabupaten Bogor.....	III-35
BAB IV VISI DAN MISI DAERAH.....	IV-1
4.1 Visi.....	IV-1
4.2 Misi	IV-2
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH.....	V-1
5.1 Arah Kebijakan Daerah.....	V-1
5.1.1 Arah Kebijakan Masa Lalu.....	V-2
5.1.2 Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan ke IV (Periode Bupati/Wakil Bupati Tahun 2018-2023)	V-3
5.1.3 Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke V (Periode Bupati/Wakil Bupati Tahun 2023-2025)	V-10
5.1.4 Arah Kebijakan Daerah Menurut RTRW Kabupaten Bogor	V-16
5.1.5 Arah Kebijakan Daerah Terkait Pembentukan Daerah	V-25
5.2 Sasaran Pokok.....	V-25
5.2.1 Sasaran Pokok Tahapan Masa Lalu (Tahun 2005-2018) ..	V-25
5.2.2 Sasaran Pokok Tahapan Keempat dan Kelima (Tahun 2018-2025)	V-29
5.3 Program Unggulan Daerah.....	V-35
5.3.1 Program Unggulan Daerah Lima Tahunan Ke II (2008-2013)	V-35
5.3.2 Program Unggulan Daerah Lima Tahunan Ke III (2013-2018)	V-237
5.3.3 Program Unggulan Daerah Lima Tahunan Ke IV dan V (2018-2025)	V-43
BAB VI PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Berdasarkan Kemiringan Lereng.....	II-3
Tabel 2.2	Rata-rata Suhu, Kelembaban Udara, dan Curah serta Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Bogor, 2016.....	II-4
Tabel 2.3	Luas Wilayah Sungai dan DAS	II-6
Tabel 2.4	Luasan Berdasarkan Jenis Batuan di Kabupaten Bogor..	II-7
Tabel 2.5	Luasan Berdasarkan Jenis Tanah di Kabupaten Bogor....	II-7
Tabel 2.6	Zonasi Arah Pengembangan Komoditas Unggulan Kabupaten Bogor.....	II-9
Tabel 2.7	Potensi Daya Tarik Wisata Kabupaten Bogor Berdasarkan Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2018	II-15
Tabel 2.8	Sebaran Geosite pada Kawasan Pengembangan Geopark di Kabupaten Bogor	II-19
Tabel 2.9	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bogor Menurut lapangan Usaha dan Skala Usaha Tahun 2018 (Juta Rupiah).....	II-23
Tabel 2.10	Jumlah Unit Usaha Menurut Skala Usaha dan Lapangan Usaha, Tahun 2018**)	II-25
Tabel 2.11	Pembagian Kluster Komoditas Unggulan Sekunder UMK Unggulan	II-26
Tabel 2.12	Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Bogor 2018	II-28
Tabel 2.13	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin, Pertumbuhan Penduduk Tahun 2018	II-32
Tabel 2.14	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bogor Tahun 2018	II-38
Tabel 2.15	Jumlah Penduduk Kabupaten Bogor Menurut Kelompok Umur dan Angka Ketergantungan, Tahun 2017	II-40
Tabel 2.16	Perbandingan jumlah penduduk dan luas lahan sawah di Kabupaten Bogor	II-41
Tabel 2.17	Daya dukung pangan beras Kabupaten Bogor tahun 2018.....	II-42
Tabel 2.18	Daya Dukung Pangan (beras) Kabupaten Bogor tahun 2023.....	II-43

Tabel 2.19	Ketersediaan, kebutuhan, dan selisih air bersih per kecamatan di Kabupaten Bogor	II-47
Tabel 2.20	Kualitas Air Sungai Berdasarkan Parameter Fisika dan Biologi di Kabupaten Bogor Tahun 2016	II-50
Tabel 2.21	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 atas Dasar Harga Konstan (Triliun)	II-51
Tabel 2.22	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 atas Dasar Harga Berlaku (Triliun)	II-53
Tabel 2.23	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bogor Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2013-2018.....	II-54
Tabel 2.24	Inflasi Kabupaten Bogor dan Gabungan 7 Kota Jawa Barat periode Januari – September Tahun 2018 (2012=100)	II-56
Tabel 2.25	PDRB per Kapita Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018	II-57
Tabel 2.26	Indeks Gini Di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018	II-58
Tabel 2.27	Realisasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018	II-63
Tabel 2.28	Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018	II-65
Tabel 2.29	Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.....	II-69
Tabel 2.30	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.....	II-69
Tabel 2.31	Persentase Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.....	II-70
Tabel 2.32	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.....	II-71
Tabel 2.33	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.....	II-71
Tabel 2.34	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018	II-72
Tabel 2.35	Jumlah Pengeluaran Konsumsi RT per Kapitadi Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018	II-73

Tabel 2.36	Nilai Tukar Petani di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018	II-73
Tabel 2.37	Rasio Ketergantungan di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018	II-74
Tabel 2.38	Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018	II-76
Tabel 2.39	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.....	II-76
Tabel 2.40	Persentase Sekolah Pendidikan Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018	II-76
Tabel 2.41	Rasio Guru dan Murid berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018	II-77
Tabel 2.42	Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu dan Penduduk di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.....	II-78
Tabel 2.43	Rasio dokter per satuan penduduk (per 1000) di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.....	II-78
Tabel 2.44	Jumlah Tenaga Medis dan Penduduk di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018	II-79
Tabel 2.45	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.....	II-81
Tabel 2.46	Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018	II-81
Tabel 2.47	Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.....	II-82
Tabel 2.48	Rasio Tempat Pemakaman Umum dan Penduduk Tahun 2013-2017	II-83
Tabel 2.49	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018	II-83
Tabel 2.50	Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2017.....	II-84
Tabel 2.51	Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2017.....	II-85
Tabel 2.52	Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018	II-85
Tabel 2.53	Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Bogor Tahun 2013- 2018	II-86

Tabel 2.54	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018	II-86
Tabel 2.55	Penanganan Bencana di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018	II-87
Tabel 2.56	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.....	II-88
Tabel 2.57	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.....	II-88
Tabel 2.58	Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018	II-89
Tabel 2.59	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.....	II-89
Tabel 2.60	Rasio Penduduk ber-KTP, Akte Kelahiran, Akte Nikah di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.....	II-90
Tabel 2.61	Rasio Koperasi Aktif di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018	II-91
Tabel 2.62	Jumlah nilai investasi berskala nasional (trilyun) di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.....	II-91
Tabel 2.63	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.....	II-92
Tabel 2.64	Kebudayaan di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.....	II-92
Tabel 2.65	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.....	II-93
Tabel 2.66	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.....	II-94
Tabel 2.67	Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018	II-94
Tabel 2.68	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018	II-95
Tabel 2.69	Cakupan Bina Kelompok Petani di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018	II-96
Tabel 2.70	Eksport Bersih Perdagangan (US\$) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018	II-97
Tabel 2.71	Cakupan Binaan Kelompok Pedagang/Usaha Informal di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2017	II-97

Tabel 2.72	Jumlah Produksi dan Konsumsi Ikan di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.....	II-98
Tabel 2.73	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018	II-99
Tabel 2.74	Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.....	II-130
Tabel 2.75	Capaian Indikator SDGs Kabupaten Bogor Tahun 2018 .	II-154
Tabel 4.1	Keterkaitan Visi dan Misi Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025	IV-5
Tabel 5.1	Visi, Misi dan Arah Kebijakan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025.....	V-16
Tabel 5.2	Sasaran Pokok dan Indikator Kinerja Kabupaten Bogor 2005 – 2025	V-34



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kedudukan RPJPD Kabupaten Bogor Terhadap Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya ..	I- 9
Gambar 2.1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bogor	II-1
Gambar 2.2	Peta Morfologi Kabupaten Bogor.....	II-3
Gambar 2.3	Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Bogor	II-4
Gambar 2.4	Peta Curah Hujan Kabupaten Bogor	II-5
Gambar 2.5	Peta DAS di Kabupaten Bogor	II-6
Gambar 2.6	Peta Geologi Kabupaten Bogor.....	II-8
Gambar 2.7	Peta Jenis Tanah Kabupaten Bogor	II-8
Gambar 2.8	Sebaran Zonasi Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan Zonasi Industri Kecil	II-26
Gambar 2.9	Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Bogor Berdasarkan BPBD dan BKP5K Kabupaten Bogor Tahun 2017	II-27
Gambar 2.10	Peta Kawasan Banjir Kabupaten Bogor.....	II-29
Gambar 2.11	Peta Keretakan Tanah Kabupaten Bogor.....	II-30
Gambar 2.12	Peta Kawasan Peka Erosi Kabupaten Bogor	II-31
Gambar 2.13	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bogor, 2017-2018	II-33
Gambar 2.14	Sex ratio Kabupaten Bogor Menurut Kecamatan Tahun 2017	II-34
Gambar 2.15	Jumlah dan Distribusi Penduduk menurut Tipe Daerah di Kabupaten Bogor, Tahun 2017	II-35
Gambar 2.16	Distribusi Penduduk Kabupaten Bogor Menurut Kecamatan, Tahun 2018	II-36
Gambar 2.17	Kepadatan Penduduk menurut Tipe Daerah di Kabupaten Bogor Tahun 2017	II-37
Gambar 2.18	Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Bogor, Tahun 2017	II-38
Gambar 2.19	Piramida Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, Tahun 2018.....	II-39
Gambar 2.20	Kebutuhan air bersih di Kabupaten Bogor tahun 2017	II-44

Gambar 2.21 Ketersediaan air bersih di Kabupaten Bogor tahun 2017	II-45
Gambar 2.22 Peta selisih ketersediaan air bersih di Kabupaten Bogor.....	II-46
Gambar 2.23 Pola spasial sebaran ambang batas daya dukung air Kabupaten Bogor tahun 2017	II-46
Gambar 2.24 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2012-2018 (%)	II-55
Gambar 2.25 Nilai Inflasi Rata-rata Kabupaten Bogor Tahun 2011-2018	II-56
Gambar 2.26 PDRB per Kapita Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 (Juta).....	II-57
Gambar 2.27 Gini ratio menurut Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Barat Tahun 2016	II-59
Gambar 2.28 Indeks Williamson Kabupaten Bogor 2013-2017.....	II-60
Gambar 2.29 Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan di Kabupaten Bogor Tahun 2011-2018	II-62
Gambar 2.30 IPM Kecamatan Kabupaten Bogor Tahun 2017	II-64
Gambar 2.31 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bogor 2013-2018*	II-65
Gambar 2.32 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bogor 2013-2018*	II-66
Gambar 2.33 Angka Harapan Hidup Kabupaten Bogor 2013-2018	II-67
Gambar 2.34 Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Bogor 2012-2018	II-68
Gambar 5.1 Tema/Fokus Pembangunan Dua Puluh Tahunan..	V-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Bogor merupakan satu dari 514 kabupaten/kota di Indonesia yang diwajibkan untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), mengikuti tahun berlakunya RPJPN tahun 2005-2025, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa seluruh daerah otonom, baik provinsi maupun kabupaten/kota wajib menyusun dokumen RPJPD sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Hal ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817). Untuk itu, Kabupaten Bogor telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27), dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Disamping itu, RPJPD Kabupaten Bogor juga disusun dengan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025.

Seiring dengan perkembangan kemajuan pembangunan, serta adanya dinamika dalam kebijakan nasional serta perubahan-perubahan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme dan tatacara penyusunan perencanaan pembangunan di daerah, yaitu

dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) yang mengatur secara rinci tatacara penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan perubahan RPJPD Provinsi Jawa Barat melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. Namun Kabupaten Bogor belum melakukan perubahan RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut, serta belum melakukan penyelarasan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tersebut.

Disamping itu, penting dan wajibnya melakukan perubahan RPJPD Kabupaten Bogor, juga didasarkan pada terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana perencanaan daerah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut. Oleh karena itu, seiring pula dengan perubahan kewenangan daerah hingga diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka pada tahun 2019 ini, Pemerintah Kabupaten

Bogor melaksanakan perubahan RPJPD Tahun 2005-2025, dengan sisa masa berlaku selama tujuh tahun. Hal ini diperbolehkan berdasarkan ketentuan Pasal 342 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa dalam rangka efektivitas, maka perubahan RPJPD tidak dapat dilakukan jika sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.

Secara keseluruhan, RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 telah melalui tiga periode, yaitu periode lima tahun pertama (2005-2008), dan periode lima tahun kedua (2008-2013) serta periode lima tahun ketiga (2013-2018). Adapun saat ini sedang memasuki periode lima tahun ketiga (2018-2023), tepatnya di awal periode yaitu tahun 2019. Adapun perubahan RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 dilakukan atas dasar :

Pertama, telah diubahnya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016 – 2036. Peraturan Daerah tentang RTRW merupakan salah satu dasar dalam penyusunan RPJPD, sehingga dokumen RPJPD harus diselaraskan dengan substansi RTRW daerah, dimana perubahan RTRW ini dilakukan untuk mengakomodir adanya tuntutan terhadap perubahan ruang dalam memenuhi kebutuhan pembangunan Kabupaten Bogor.

Kedua, diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang secara mendasar telah mengubah pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten/kota dengan desa meskipun Desa bukan daerah otonom, dimana desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketiga, diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara mendasar telah merubah kewenangan antara pusat dan daerah, serta kewenangan daerah antara provinsi

dengan kabupaten/kota. Disamping itu, peraturan perundang-undangan ini telah mengubah pembagian urusan dan bidang urusan yang semula hanya urusan wajib dan pilihan menjadi urusan konkuren yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta diklasifikasikannya perangkat penunjang, pendukung, serta kewilayahan. Selain itu dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tatacara penyusunan dokumen perencanaan diubah dengan mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Keempat, adanya kondisi kekinian dan eskalasi yang muncul sebagai akibat adanya perubahan-perubahan dan kebijakan-kebijakan baru di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya, baik pengaruh tersebut berskala internasional, nasional, provinsi, maupun skala kabupaten, menuntut Kabupaten Bogor melakukan penyesuaian dan penyelarasan untuk mencapai target yang telah ditentukan di tingkat nasional dan Jawa Barat.

Dengan dasar tersebut, diharapkan Perubahan RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 dapat memenuhi harapan tujuan bernegara, sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran

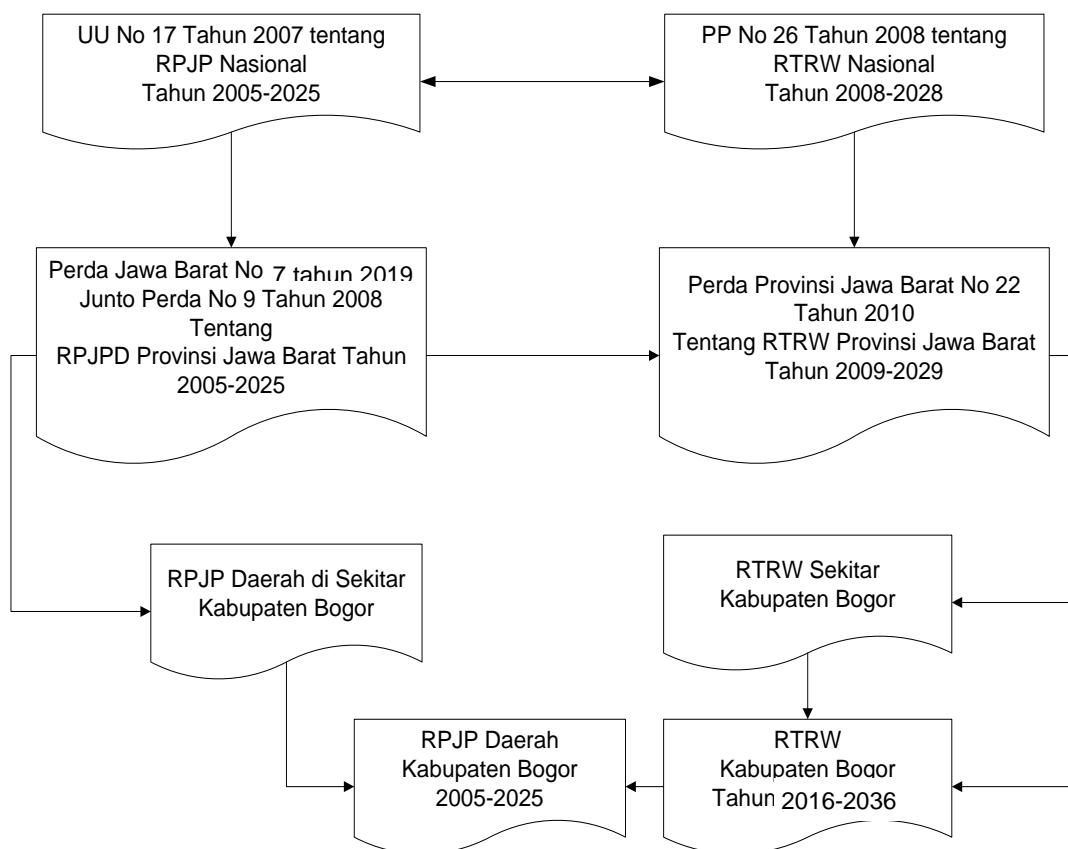
- Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 100 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimum;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96).

1.3 Hubungan Antar Dokumen Perubahan RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya

Perubahan RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 disusun dengan mengacu kepada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat serta mempedomani RTRW Kabupaten Bogor serta memperhatikan RPJPD dan RTRW Kabupaten dan Kota lainnya. RPJPN dan RPJPD provinsi diacu dalam hal kesesuaian dan keselarasan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Bogor dengan visi,

misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional dan provinsi Jawa Barat.

RTRW Kabupaten Bogor dipedomani dalam hal penyelarasan antara visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Bogor dengan arah dan kebijakan RTRW Kabupaten Bogor. Adapun memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya dilakukan melalui penyelarasan antara arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dan pemanfaatan struktur serta pola ruang kabupaten/kota lain sekitarnya. Hubungan antara dokumen ditampilkan pada Gambar 1.1. berikut:



Gambar 1.1
Kedudukan RPJPD Kabupaten Bogor Terhadap Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

1.4 Maksud dan Tujuan

Secara umum, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) disusun dengan maksud memberikan arah dan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Bogor dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi,

misni, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan yang disepakati bersama.

Secara khusus, tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah :

1. Memberikan pedoman pada penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
2. Memberikan pedoman pada penyusunan perencanaan tahunan daerah sebelum disusunnya RPJMD.
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar SKPD, antar pemerintahan, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan;
4. Mendorong terciptanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
5. Mewujudkan rencana pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bogor.
6. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005–2025 disusun dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan;

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

memuat penjelasan mengenai aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah;

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis

memuat tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bogor sampai tahun 2025;

Bab IV Visi dan Misi Daerah

memuat visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Bogor;

Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah

yang memuat sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk masing-masing misi berikut tahapan dan prioritas;

Bab VI Penutup

BAB II

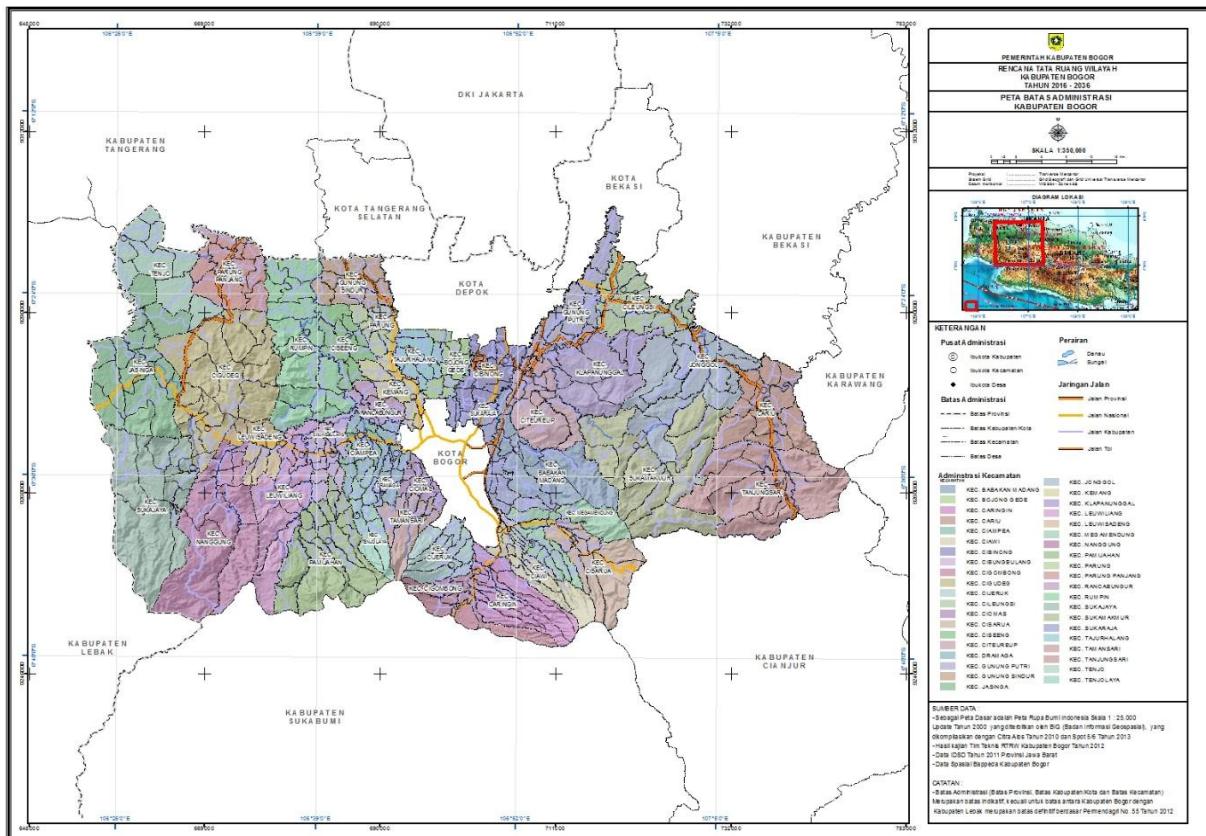
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1 Wilayah Administratif

Kabupaten Bogor secara geografis terletak di antara $16^{\circ}21'$ - $107^{\circ}13'$ Bujur Timur dan $6^{\circ}19'$ - $6^{\circ}47'$ Lintang Selatan. Kabupaten Bogor terdiri dari 40 kecamatan dan 435 desa/kelurahan dengan luas wilayah 298.620,26 Ha.



Sumber : KLHS Perubahan RPJPD Kab. Bogor Tahun 2005-2025

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bogor

Secara administratif, Kabupaten Bogor berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- sebelah utara : berbatasan dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan (Provinsi Banten), Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kota Depok;
- sebelah timur : berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Cianjur;

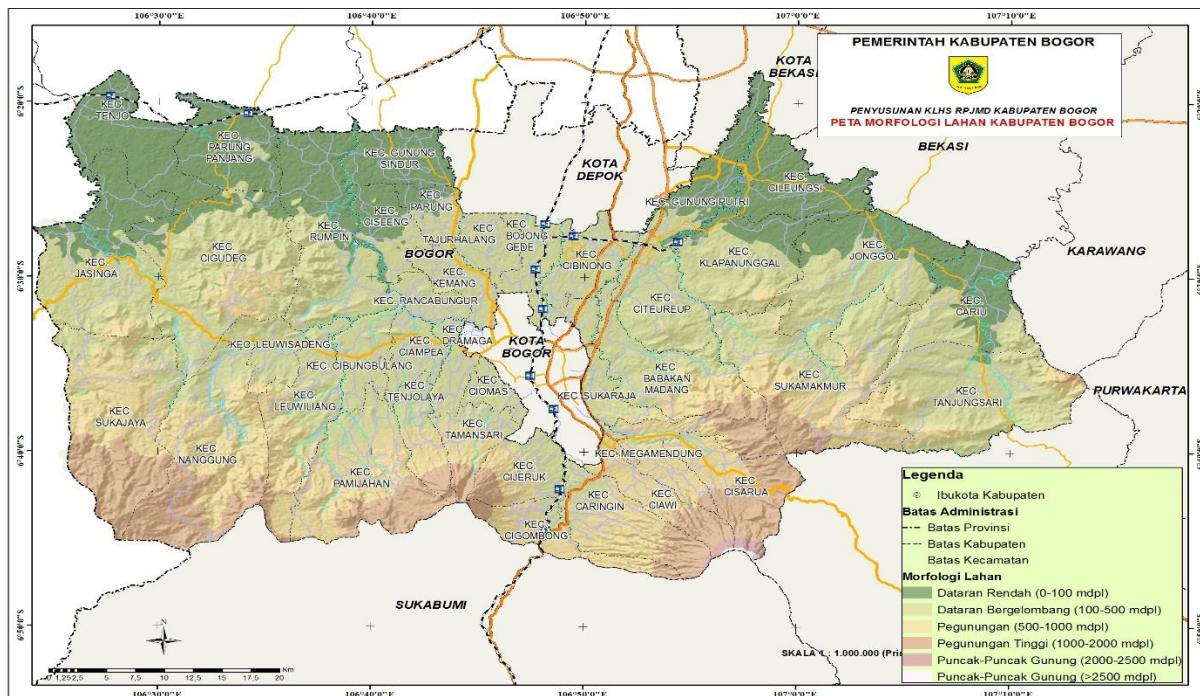
- sebelah selatan : berbatasan dengan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi;
- sebelah barat : berbatasan dengan Kabupaten Lebak (Provinsi Banten);
- sebelah tengah : berbatasan dengan Kota Bogor.

2.1.1.2. Kondisi Fisik Wilayah

a. Topografi

Secara topografi, Kabupaten Bogor memiliki tipe morfologi wilayah yang bervariasi, dari dataran yang relatif rendah di bagian utara hingga dataran tinggi di bagian selatan, yaitu sekitar 29,28% berada pada ketinggian 15-100 meter di atas permukaan laut (dpl), 42,62% berada pada ketinggian 100-500 meter dpl, 19,53% berada pada ketinggian 500-1.000 meter dpl, 8,43% berada pada ketinggian 1.000-2.000 meter dpl dan 0,22% berada pada ketinggian 2.000-2.500 meter dpl.

Selain itu, kondisi morfologi Kabupaten Bogor sebagian besar berupa dataran tinggi, perbukitan dan pegunungan dengan batuan penyusunnya didominasi oleh hasil letusan gunung, yang terdiri dari andesit, tufa dan basalt. Gabungan batu tersebut termasuk dalam sifat jenis batuan relatif lulus air dimana kemampuannya meresapkan air hujan tergolong besar. Jenis pelapukan batuan ini relatif rawan terhadap gerakan tanah bila mendapatkan siraman curah hujan yang tinggi. Selanjutnya, jenis tanah penutup didominasi oleh material vulkanik lepas agak peka dan sangat peka terhadap erosi, antara lain Latosol, Aluvial, Regosol, Podsolik dan Andosol. Oleh karena itu, beberapa wilayah rawan terhadap tanah longsor.



Sumber : KLHS Perubahan RPJPD Kab. Bogor Tahun 2005-2025

Gambar 2.2 Peta Morfologi Kabupaten Bogor

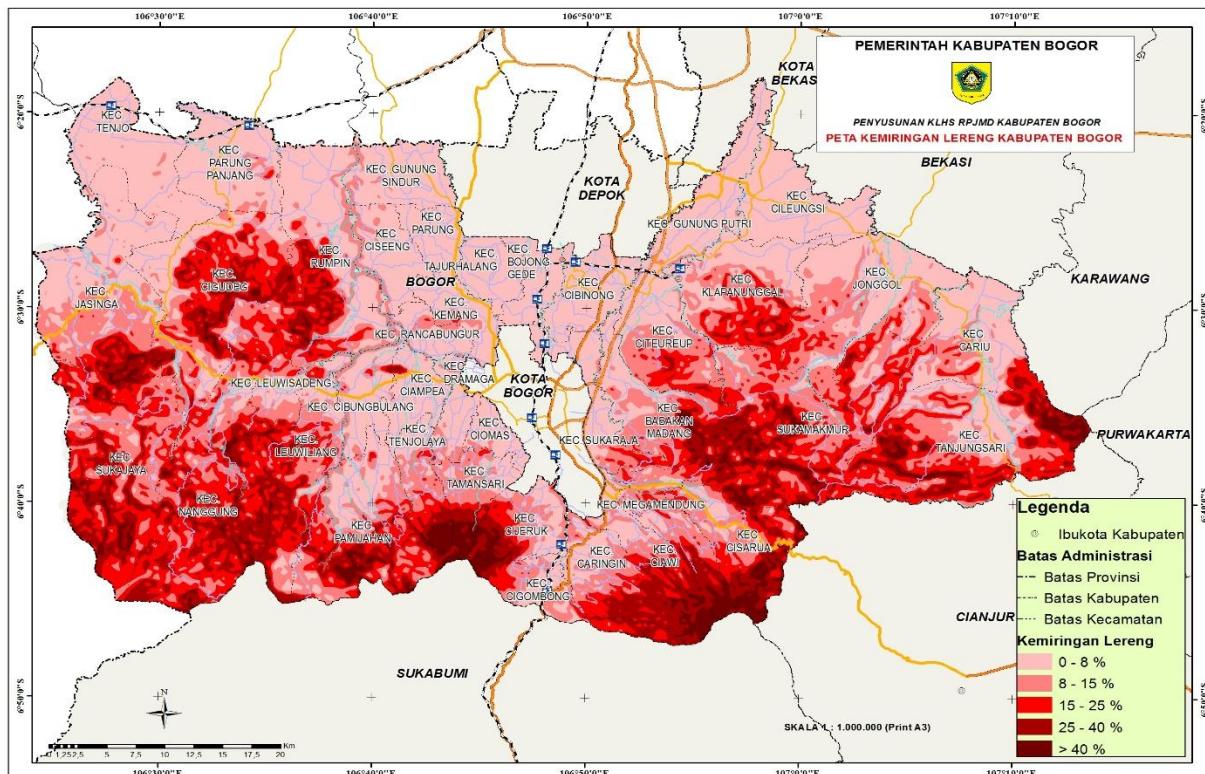
b. Kemiringan Lereng

Wilayah Kabupaten Bogor berada pada ketinggian lereng yang bervariasi antara 0-8% hingga >40%. Secara keseluruhan, kelas kemiringan 0-8% merupakan yang terluas di Kabupaten Bogor yakni 130.320,76 Ha dan yang terkecil pada kelas kemiringan lereng >40% yakni seluas 9.800,52 Ha. Secara lebih lengkap, data luas Kabupaten Bogor berdasarkan Kemiringan Lereng disajikan pada Tabel dan Gambar berikut:

Tabel 2.1
Luas Berdasarkan Kemiringan Lereng

No	Kelas Lereng (%)	Percentase	Luas (Ha)
1	0 – 8	43,64%	130.320,76
2	8-15	23,38%	69.806,34
3	15-25	17,94%	53.580,79
4	25-40	11,76%	35.113,54
5	> 40	3,28%	9.800,52
Total		100%	298.620,26

Sumber : KLHS Perubahan RPJPD Kab. Bogor Tahun 2005-2025



Sumber : KLHS Perubahan RPJPD Kab. Bogor Tahun 2005-2025

Gambar 2.3
Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Bogor

c. Klimatologi

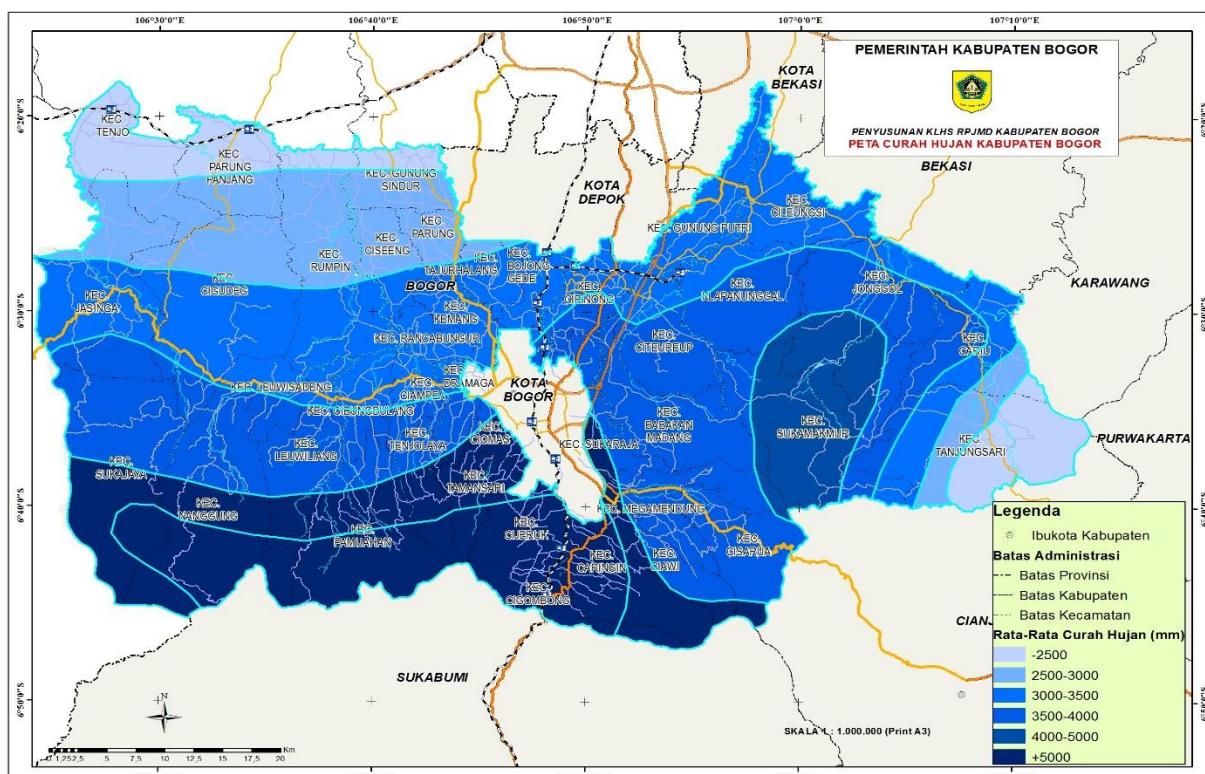
Secara klimatologis, wilayah Kabupaten Bogor termasuk iklim tropis sangat basah di bagian selatan dan iklim tropis basah di bagian utara, dengan rata-rata curah hujan tahunan 2.500–5.000 mm/tahun, kecuali di wilayah bagian utara dan sebagian kecil wilayah timur curah hujan kurang dari 2.500 mm/tahun. Suhu rata-rata di wilayah Kabupaten Bogor adalah 20°- 30°C, dengan rata-rata tahunan sebesar 25°C. Kelembaban udara 70% dan kecepatan angin cukup rendah, dengan rata-rata 1,2 m/detik dengan evaporasi di daerah terbuka rata-rata sebesar 146,2 mm/bulan

Tabel 2.2
Rata-rata Suhu, Kelembaban Udara, dan Curah serta Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Bogor, 2016

Bulan	Suhu Udara			Kelembaban Udara			Curah Hujan	Hari Hujan
	Maks	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata		
Januari	26,4	32,1	23,7	53	98	86	462	23
Februari	25,7	30,8	23,3	64	98	89	507	26
Maret	26,5	32	23,7	55	98	86	450	24
April	26,7	32,7	24	55	98	85	558	26

Bulan	Suhu Udara			Kelembaban Udara			Curah Hujan	Hari Hujan
	Maks	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata		
Mei	27,1	32,6	24,1	50	97	84	330	16
Juni	26,2	31,9	23,1	50	99	84	373	30
Juli	26,1	32	22,8	52	97	83	293	29
Agustus	26,1	32,2	22,7	40	97	82	316	26
September	26,2	31,8	23,2	53	97	83	439	28
Oktober	26	31,1	23	54	98	86	398	29
November	26	31,5	23,3	58	98	87	355	30
Desember	26	30,9	23	55	97	82	117	27
Rata-rata	24,4	29,6	21,8	50	91	79	462	23

Sumber : Kabupaten Bogor Dalam Angka tahun 2017



Sumber : KLHS Perubahan RPJPD Kab. Bogor Tahun 2005-2025

Gambar 2.4 Peta Curah Hujan Kabupaten Bogor

d. Hidrologi

Sedangkan secara hidrologis, wilayah Kabupaten Bogor terbagi ke dalam 9 Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu: (1) DAS Cidurian; (2) DAS Cimanceuri; (3) DAS Cisadane; (4) DAS Ciliwung; (5) DAS Cileungsi; (6) DAS

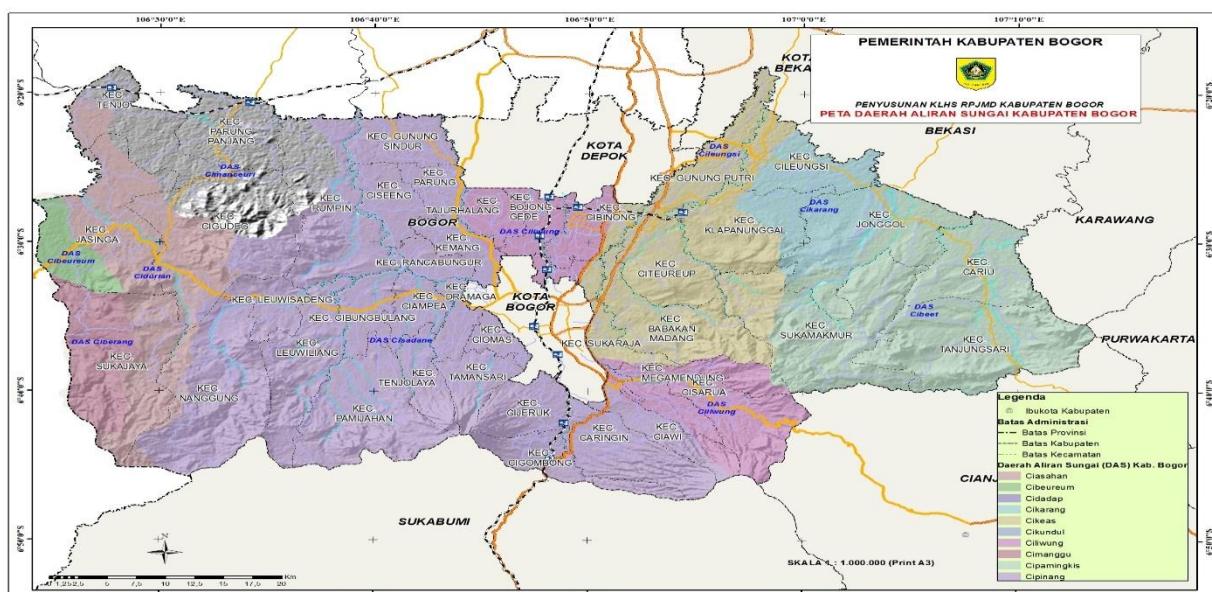
Cikarang; (7) DAS Cibeet; (8) DAS Ciberang; (9) DAS Ciberureum. Data mengenai luas wilayah sungai dan DAS disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Luas Wilayah Sungai dan DAS

No	Wilayah Sungai Dan DAS	Percentase (%)	Luas (ha)
1	WS Cidanau - Ciujung - Cidurian	13,90%	41.505,98
	DAS Cibeureum	1,41%	4.207,46
	DAS Ciberang	2,99%	8.938,77
	DAS Cidurian	9,50%	28.359,75
2	WS Ciliwung – Cisadane	66,16%	197.572,13
	DAS Cileungsi	12,75%	38.069,83
	DAS Ciliwung	8,67%	25.899,88
	DAS Cimanceuri	8,47%	25.293,48
	DAS Cisadane	36,27%	108.308,94
3	WS Citarum	19,94%	59.542,14
	DAS Cibeet	14,86%	44.377,92
	DAS Cikarang	5,08%	15.164,23
	Total	100,00%	298.620,26

Sumber : RTRW Kabupaten Bogor

Daerah aliran sungai terluas adalah DAS Cisadane dengan luas 108.308,94 Ha, kemudian disusul oleh DAS Cibeet dengan luas 44.377,92 Ha.



Sumber : KLHS Perubahan RPJPD Kab. Bogor Tahun 2005-2025

Gambar 2.5
Peta DAS di Kabupaten Bogor

e. Geologi dan Jenis Tanah

Kondisi geologi Kabupaten Bogor terdiri dari jenis batuan batu gamping, batuan intrusi, batuan tersier, endapan permukaan, gunung api muda dan gunung api tua. Jenis batuan gunung api muda merupakan yang terluas di Kabupaten Bogor. Selanjutnya, jenis tanah penutup didominasi oleh material vulkanik lepas agak peka dan sangat peka terhadap erosi, antara lain Latosol, Aluvial, Regosol, Podsolik dan Andosol. Oleh karena itu, beberapa wilayah rawan terhadap tanah longsor.

Tabel 2.4
Luasan Berdasarkan Jenis Batuan di Kabupaten Bogor

No	Jenis Batuan	Persentase (%)	Luas (ha)
1	Batu Gamping	2,42%	7.223,40
2	Batuan Intrusi	2,89%	8.615,26
3	Batuan Tersier	6,67%	19.925,32
4	Endapan Permukaan	24,08%	71.906,73
5	Gunung Api Muda	47,55%	141.980,41
6	Gunung Api Tua	16,40%	48.969,15
Total		100,00%	298.620,26

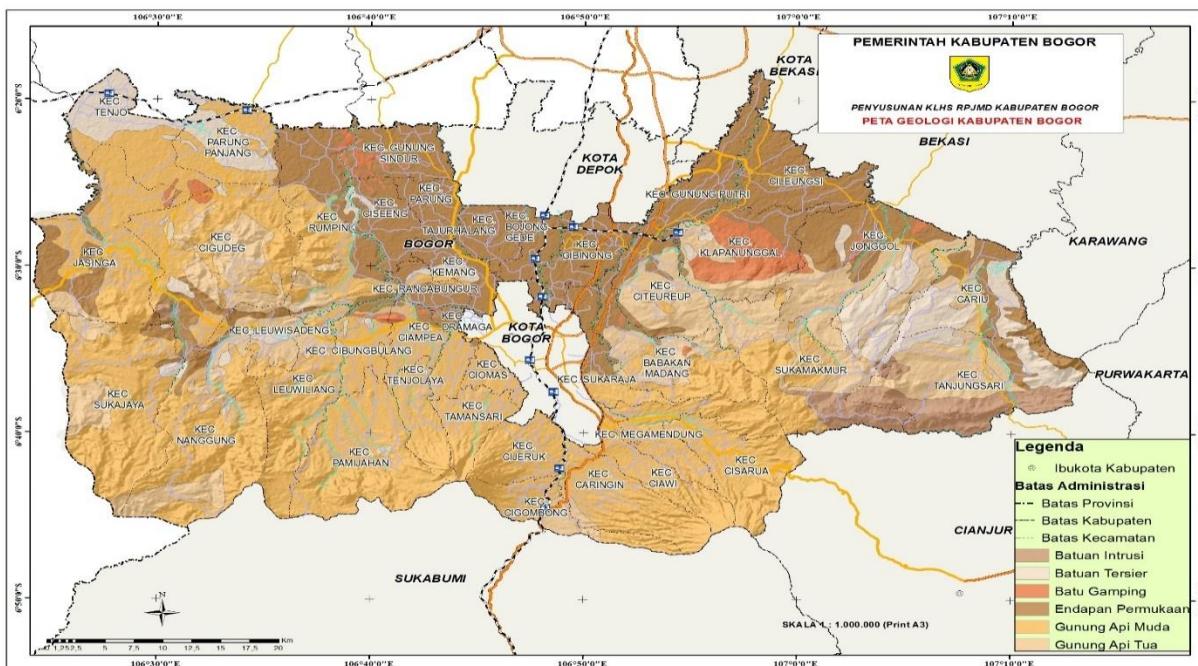
Sumber : RTRW Kabupaten Bogor

Jenis tanah di Kabupaten Bogor terdapat 16 jenis yang tersebar di seluruh wilayah. Assosiasi Latosol merah dan latosol coklat kemerahan dengan luas 74.488,47 Ha mendominasi jenis tanah di bagian utara. Luasan jenis tanah di Kabupaten Bogor dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Luasan Berdasarkan Jenis Tanah di Kabupaten Bogor

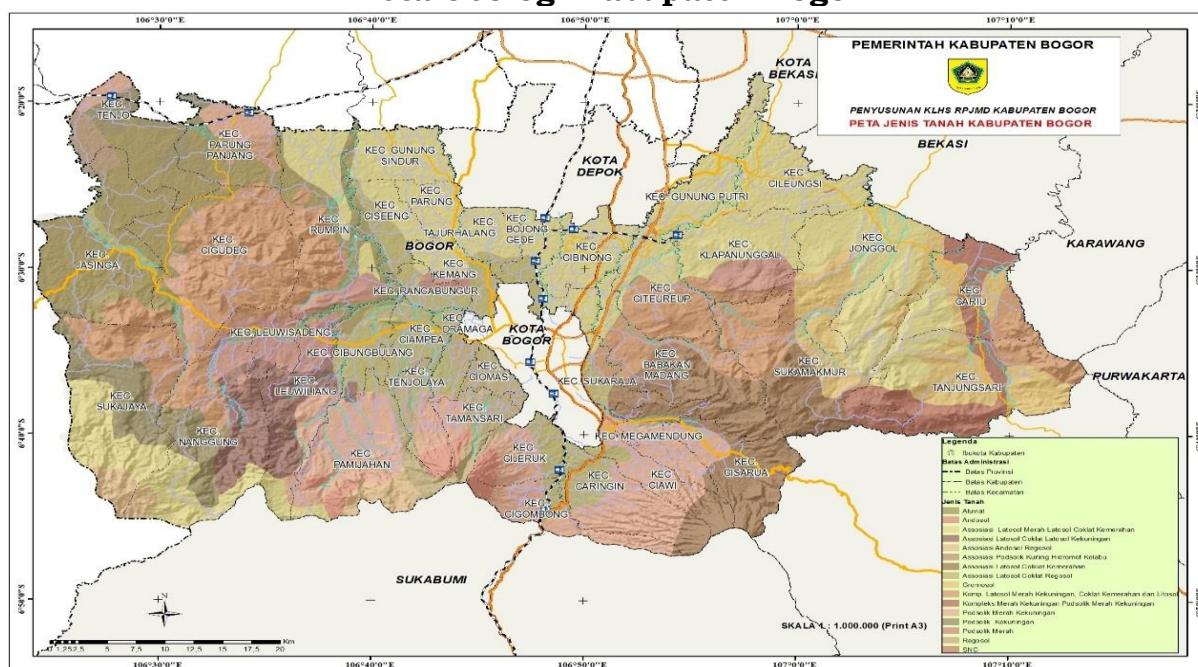
No	Jenis Tanah	Persentase (%)	Luas (ha)
1	Aluvial	9,35%	27.915,97
2	Andosol	1,07%	3.188,24
3	Asso Lat mrh lat clk kemrh	24,94%	74.488,47
4	Asso andosol regosol	1,31%	3.914,10
5	Asso Lat clk lat kekuningan	3,05%	9.116,70
6	asso Lat clk lat kemerahan	7,43%	22.175,73
7	asso Lat clk regosol	7,47%	22.311,77
8	Asso podsolik kng hidromof kelabu	0,63%	1.890,28
9	Gromosol	5,19%	15.503,31
10	Komp Lat red kekng lat ckl kmrh dan lits	15,17%	45.310,18
11	Komp red merah kekng pod merah kekng	3,14%	9.385,37
12	Pod merah kekuningan	10,71%	31.993,87
13	Podsolik kekuningan	3,85%	11.506,28
14	Podsolik merah	3,31%	9.890,23
15	Regosol	2,68%	7.999,74
16	SNG	0,68%	2.030,02
Total		100%	298.620,26

Sumber : RTRW Kabupaten Bogor



Sumber : KLHS Perubahan RPJPD Kab. Bogor Tahun 2005-2025

Gambar 2.6
Peta Geologi Kabupaten Bogor



Sumber : KLHS Perubahan RPJPD Kab. Bogor Tahun 2005-2025

Gambar 2.7
Peta Jenis Tanah Kabupaten Bogor

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Bogor memiliki sumberdaya alam yang cukup besar. Salah satu potensi perlu dikembangkan adalah pertanian dengan luas lahan 39.000 Ha atau 13,06 % dari luas Kabupaten Bogor. Selain potensi produksi tanaman pangan tanaman, produksi tanaman perkebunan dan produksi perikanan air tawar dapat dilihat dari luasan sawah produktif,

perkebunan dan kawasan perikanan. Pemerintah Kabupaten Bogor sangat memperhatikan pengembangan pertanian dan pembangunan perdesaan pada khususnya melalui kebijakan Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Perdesaan (RP3) yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2009 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang *Revitalisasi* Pertanian. Berdasarkan peraturan ini pengembangan pertanian dan pembangunan perdesaan di Kabupaten Bogor dibagi dalam beberapa Zona sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.6
Zonasi Arah Pengembangan Komoditas Unggulan Kabupaten Bogor

Zona	Kecamatan	Arah Pengembangan
1.	Rumpin, Cigudeg, Parung Panjang, Jasinga, Tenjo	Agrosilvopastoral , yaitu pengembangan <i>agroforestry</i> yang didukung oleh sektor pertanian tanaman pangan dan peternakan
2.	Sukajaya, Nanggung, Leuwiliang, Leuwisadeng, Cibungbulang, Pamijahan	Agroekowisata yang didukung oleh sektor pertanian tanaman pangan dan perikanan. Pola pengembangan komoditas strategis: agropolitan dan minapolitan
3.	Ciampea, Tenjojaya, Dramaga, Ciomas	Industri non-farm yang didukung dengan sektor pertanian, perikanan, kehutanan, dan peternakan
4.	Tajurhalang, Kemang, Rancabungur, Parung, Ciseeng, Gunung Sindur	Industri perdesaan dan pengembangan UMKM , yang tetap berbasiskan pada produk atau komoditas pertanian secara luas serta perikanan berbasis minapolitan
5.	Tamansari, Cijeruk, Cigombong, Caringin	Diversifikasi pertanian dan agroekowisata
6.	Ciawi, Cisarua, Megamendung, Sukaraja, Babakan Madang	Ekowisata yang dikerjasamakan dengan berbagai pihak dalam rangka membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat
7.	Cileungsi, Klapanunggal, Gunung Putri, Citeureup, Cibinong, Bojonggede	Pertanian perkotaan dan industri . Pengembangan <i>urban agriculture</i> bertitik tolak pada produk atau komoditas pertanian yang sudah diusahakan oleh warga. Pengembangan industri besar dikaitkan dengan ada rencana pengembangan Cibinong Raya
8.	Sukamakmur, Cariu, Tanjungsari, Jonggol	Lumbung pangan melalui peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pemukiman

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Bogor,2018

Selain meningkatkan produksi tujuan pengembangan pertanian dan pembangunan perdesaan juga diarahkan agar dilakukan secara efektif dan efisien serta mempunyai daya jual yang tinggi atau mempunyai daya saing yang tinggi sesuai amanat Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2010 tentang Peningkatan Daya Saing Produk Kabupaten Bogor. Periode tahun 2018 – 2023 ke depan setiap kecamatan didorong untuk mengembangkan satu

komoditi unggulan primer (pertanian, peternakan dan perikanan), satu komoditi unggulan sekunder (UKM pengolahan) dan satu komoditi unggulan tersier (jasa pariwisata).

1. Pertanian Tanaman Pangan

Beberapa potensi yang dimiliki wilayah Kabupaten Bogor untuk dikembangkan pada lapangan usaha pertanian terutama komoditi unggulan tanaman pangan, antara lain : Talas, Ubi Kayu, dan Ubi Jalar. Pengembangan Talas sangat bergantung pada lokasi (spesifik lokasi). Produksi Talas tahun 2018 mencapai 12.690 ton, sentra komoditi unggulan talas di Kecamatan Cigombong dengan lokasi pengembangan terdapat di Kecamatan Tamansari, Cijeruk, Dramaga, Caringin, Cibungbulang dan Pamijahan. Sedangkan produksi ubi kayu pada tahun 2018 mencapai 101.276 ton, sentra komoditi terdapat di Babakan Madang dan Sukaraja dengan lokasi pengembangan terdapat di Kecamatan Cibungbulang, Cibinong, Citeureup dan Sukamakmur. Varietas yang telah dikembangkan adalah Varietas bentul, bulkok, hijau dengan pertimbangan varietas tersebut mempunyai potensi hasil produksi yang cukup tinggi yaitu 50-100 ton/ha dengan kadar pati 25-31%, sedangkan untuk varietas yang biasa ditanam oleh petani hanya mampu memproduksi sebesar 20 - 25 ton/ha, sehingga peluang terjadinya peningkatan produksi cukup tinggi. Komoditi unggulan tanaman pangan lainnya adalah ubi jalar. Jenis yang dikembangkan adalah varietas AC kuning dan AC putih dengan pertimbangan bahwa varietas ini memiliki potensi produktivitas yang relatif tinggi dan tahan terhadap penyakit boleng, dengan lokasi pengembangan terdapat di Kecamatan Tamansari, Ciampela, Tenjolaya, Pamijahan, Cibungbulang, Pamijahan, Leuwiliang dan Leuwisadeng. Produksi ubi jalar yang dihasilkan selama tahun 2018 sebanyak 52.839 ton, hal ini dipengaruhi oleh jenis penggunaan varietas unggul, bantuan sarana produksi (saprodi), dan tindakan pengamanan produksi selama masa panen hingga pasca panen. Belum terbentuk sentra ubi jalar, tetapi akan diarahkan di Kecamatan Ciomas. Penumbuhan agribisnis komoditas ubi jalar dan ubi kayu telah berhasil meningkatkan nilai ekonomis produk dari umbi segar menjadi tepung halus atau tepung tapioka setelah adanya bimbingan teknis dan bantuan alat pengolahan

dari Pemerintah Kabupaten Bogor. Dengan kegiatan ini diharapkan para petani dapat meningkatkan nilai tambah dari komoditas sekaligus dapat meningkatkan pendapatan para petani.

2. Pertanian Hortikultura

Beberapa potensi yang dimiliki wilayah Kabupaten Bogor untuk dikembangkan pada lapangan usaha pertanian terutama komoditi unggulan hortikultura, antara lain : Jambu Biji, Pepaya, Rambutan, Manggis, Tanaman Obat, Tanaman Hias dan Nanas. Produksi Jambu Biji Kristal tahun 2018 mencapai 5.217 ton, dengan sentra komoditi unggulan diarahkan ke Kecamatan Rancabungur dan Dramaga, sedangkan lokasi pengembangan terdapat di Kecamatan Tamansari, Jasinga, Cigombong, Cigudeg dan Pamijahan. Sentra komoditi unggulan tanaman Pepaya dikembangkan di Kecamatan Rancabungur, sedangkan wilayah pengembangan meliputi Kecamatan Caringin, Jasinga, Cigudeg dan Tenjo, dengan produksi mencapai 6.140 ton pada tahun 2018. Komoditas Rambutan banyak dikembangkan di Kecamatan Gunung Putri, Tenjo dan Rumpin, dengan produksi mencapai 17.376 ton pada tahun 2018. Komoditas Manggis pemasarannya sampai ke mancanegara seperti Thailand, Singapura, Malaysia, dan ke negara-negara Timur Tengah. Pengembangan Manggis telah menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) *Good Agricultural Practices* dalam budidayanya. Lokasi sentra komoditi unggulan manggis terdapat di Kecamatan Leuwiliang, Leuwisadeng, Cigudeg Sukamakmur dan Jasinga wilayah pengembangannya di Kecamatan Nanggung, dengan produksi mencapai 6.543 ton pada tahun 2018. Sentra komoditi unggulan tanaman obat diarahkan di Kecamatan Cileungsi dengan wilayah pengembangan di Kecamatan Gunung Putri, Tenjo, Ciseeng, Nanggung dan Gunung Sindur. Sentra komoditi unggulan tanaman hias diarahkan di Kecamatan Tamansari dengan wilayah pengembangan meliputi Kecamatan Megamendung, Gunung Sindur dan Ciseeng.

3. Perkebunan

Komoditi unggulan perkebunan yang dikelola masyarakat adalah : kopi, karet, pala dan cengkeh. Produksi kopi pada tahun 2018 sebanyak 3.210 ton. Sentra komoditi unggulan kopi ada di Kecamatan

Sukamakmur, Tanjungsari, Pamijahan, Cisarua, Cigombong, Babakan Madang, Megamendung dan Cariu. Kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Tanaman karet yang memiliki tingkat pertumbuhan normal siap disadap pada umur 5 tahun dengan masa produksi selama 25-35 tahun. Pada tahun 2018 produksi karet rakyat sebesar 109 ton. Sentra komoditi unggulan karet adalah Kecamatan Jasinga, wilayah pengembangannya terdapat di Kecamatan Tanjungsari. Sentra komoditi unggulan pala diarahkan di Kecamatan Sukajaya, sedangkan sebagai wilayah pengembangannya adalah Kecamatan Leuwisadeng, Caringin, Cigombong, Ciawi, Cijeruk dan Tamansari. Produksi pala pada tahun 2018 sebesar 366 ton, daging pala banyak digunakan sebagai bahan manisan pala baik kering maupun basah. Selain itu biji pala juga mempunyai potensi ekonomis sebagai rempah-rempah untuk obat dan bumbu dapur. Sentra komoditi unggulan cengkeh diarahkan di Kecamatan Nanggung dengan wilayah pengembangan di Kecamatan Pamijahan, Leuwiliang, Leuwisadeng, Cijeruk, Caringin, dan Cijeruk adapun produksi cengkeh tahun 2018 sebesar 168 ton. Sentra komoditi cengkeh yaitu di Kecamatan Caringin, Cariu, Cigudeg, Cijeruk, Jasinga, Leuwiliang, Leuwisadeng, Nanggung dan Pamijahan.

4. Perikanan

Budidaya perikanan air tawar baik untuk produksi ikan konsumsi, pembibitan maupun ikan hias mampu menjadi tumpuan pemenuhan kebutuhan akan ikan konsumsi, bibit ikan dan ikan hias di Kabupaten Bogor. Pada tahun 2018 produksi ikan konsumsi sebanyak 122.131 ton dan Benih ikan konsumsi sebanyak 5.545.494 RE, dengan komoditi unggulan ikan lele, ikan gurame dan ikan mas. Komoditas lele dikembangkan di Kecamatan Ciseeng, Parung dan Kemang. Komoditas gurame merupakan unggulan yang dikembangkan di Dramaga dan Bojonggede. Selain itu, daerah potensial lainnya adalah Parung. Sedangkan komoditas ikan mas merupakan unggulan yang dikembangkan di Kecamatan Pamijahan dan Leuwiliang. Komoditas unggulan lainnya adalah ikan hias air tawar dengan produksi pada tahun 2018 sebesar 283.469 RE. Sentra komoditi

unggulannya diarahkan di Kecamatan Ciampela dan Cibinong, dengan lokasi pengembangan di Kecamatan Parung.

5. Peternakan

Komoditas unggulan usaha peternakan pada tahun 2018 antara lain sapi perah yang mencapai populasi sebanyak 8.269 ekor, dengan produksi susu Kabupaten Bogor Tahun 2018 sebesar 18.014.842 liter atau 132,78% dari target sebesar 13.567.384 liter. Sentra komoditi unggulannya terdapat di Kecamatan Cisarua dan Megamendung, dengan wilayah pengembangan di Kecamatan Pamijahan, Cibungbulang dan Cijeruk. Pengembangan sapi perah saat ini sudah mampu melakukan diversifikasi produk, yaitu selain susu juga yoghurt dan bahan makanan lainnya. Komoditas peternakan lainnya yang dikembangkan sebagai komoditas unggulan tahun 2018 adalah sapi potong dengan populasi sebanyak 18.853 ekor. Sentra komoditi unggulannya terdapat di Kecamatan Jonggol dan Cariu, dengan daerah pengembangannya di Kecamatan Tanjungsari. Konsumsi protein hewani asal ternak Kabupaten Bogor sebesar 6,29 gram/kapita/hari. Konsumsi protein hewani salah satunya didukung oleh produksi daging, susu dan produksi telur. Mengenai komoditi telur yang dominan didukung oleh produksi dari ayam ras petelur dengan populasi ayam ras petelur pada tahun 2018 sebanyak 4.823.943 ekor. Adapun produksi telur di Kabupaten Bogor sebesar 47.405.812 kg.

6. Pariwisata

Daya tarik wisata Kabupaten Bogor merupakan perpaduan antara karakter alamnya yang kuat, kebudayaan dan kepurbakalaan. Kawasan Puncak merupakan kawasan primadona yang sampai saat ini belum tergantikan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional, Kabupaten Bogor masuk dalam perencanaan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Bogor-Halimun dan sekitarnya dengan 2 (dua) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yaitu KSPN Gunung Gede-Pangrango dan KSPN Gunung Halimun Salak, serta 2 (dua) Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN), yaitu KPPN

Bogor-Ciawi dan KPPN Alam Perkotaan Bogor-Depok. Dalam konteks perencanaan Provinsi Jawa Barat sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pariwisata Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor masuk dalam perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) Ekowisata Alam Puncak dan sekitarnya, serta 2 (dua) Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP), yaitu KPPP alam perkotaan Bogor Depok dan sekitarnya, serta KPPP Ekowisata Gunung Halimun Salak-Gede Pangrango dan sekitarnya.

Dalam dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bogor yang disusun pada tahun 2014, pengembangan pariwisata diarahkan menjadi 5 (lima) Destinasi Pariwisata Kabupaten, 8 (delapan) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten dan 15 (lima belas) Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten sebagai berikut :

- 1) **Destinasi wisata perkotaan**, terdiri dari KSP Cibinong, KSP Sentul dan KSP Minapolitan serta KPP Parung, KPP Cibinong, dan KPP Sentul. Daya tarik unggulannya adalah Fasilitas perkotaan, Taman Budaya Sentul, Sentul City, Sirkuit Sentul, Jungle Land, Wana Wisata Gunung Pancar, Giri Tirta Kawah Hitam, Air Panas Tirta Sanita dan Kawasan Minapolitan;
- 2) **Destinasi wisata MICE dan rekreasi**, terdiri dari KSP Puncak, KSP Tamansari dan KSP Lido, serta KPP Puncak, KPP Tamansari dan KPP Lido. Daya tarik unggulannya adalah Wana Wisata Curug Panjang, Curug Cilember, Taman Wisata Riung Gunung, Agrowisata Gunung Mas, PTPN Ciliwung, Curug Kembar, Wana Wisata Citamiang, Telaga Warna, Curug Tujuh Cilember, Kopo, Tugu Utara, Tugu Selatan, Curug Nangka, Curug Sawer, Setu Tamansari, Bumi Perkemahan Sukamantri, Tirta Zamzam, PPKA Bodogol, Curug Jingkrak, Telaga Malingping, Lido, Pancawati, Curug dan Cikaracak;
- 3) **Destinasi wisata warisan budaya dan pendidikan**, terdiri dari KSP Ciaruteun serta KPP Jasinga, KPP Parungpanjang, KPP Batutulis dan KPP Dramaga. Daya tarik unggulannya adalah Batutulis Ciaruteun, Pasir Angin Cibungbulang, Situs Kampung Muara dan Situs Kerajaan Horotan;

- 4) **Destinasi wisata kreatif**, terdiri dari KPP Gunungputri, KPP Tanjungsari dan KPP Sukamakmur. Daya tarik unggulannya adalah Setu Gunungputri, Outbond Cioray, Tebing Cagak, Goa Landak, Goa Bajing, Goa Gajah, Goa Sangiang, Goa Lalai, Karst Tajur dan Air Panas Cigekbrong;
- 5) **Destinasi wisata ekowisata**, terdiri dari KSP Gunung Salak Endah serta KPP Halimun dan KPP Gunung Salak Endah. Daya tarik unggulannya adalah PTPN Cianten/Puraseda, Air Panas GSE Lokapurna, Curug Cigamea, Curug Seribu, Curug Ngumpet, Curug Cihurang, Kawah Ratu, Air Panas Ciparay dan Curug Luhur.

Pada Tabel 2.7. di bawah ini dijelaskan secara rinci jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2018 baik wisatawan yang berasal dari dalam negeri (domestik), maupun wisatawan yang berasal dari luar negeri (mancanegara) berdasarkan masing-masing Daya Tarik Wisata yang ada di Kabupaten Bogor.

Tabel 2.7
Potensi Daya Tarik Wisata Kabupaten Bogor Berdasarkan Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2018

No.	Pengelola/ Objek Wisata	Kunjungan Wisatawan		
		WISNUS	WISMAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
A	Kecamatan Caringin			
	Resort Pengelolaan Taman Nasional (RPTN) Bodogol/ TNGGP	730	-	730
1	Konservasi Alam Bodogol Caringin	-	-	-
2	Curug Cisureun	-	-	-
3	Curug Cipadaranten	-	-	-
4	Curug Cikaweni	-	-	-
5	Curug Santa Monika	-	-	-
6	Wisata Arum Jeram	17.563	1.432	18.995
	- RPTN Cimande (TNGGP)	291	-	291
7	Curug Cikaracak	-	-	-
B	Kecamatan Megamendung			
	- RPTN Tapos	-	-	-
8	Curug Naga	-	-	-
9	Wana Wisata Curug Panjang (Perum Perhutani KPH Bogor)	37.295	211	37.506
10	Taman Wisata Matahari (Swasta)	1.170.441	24.635	1.195.076
C	Kecamatan Cisarua			
	- RPTN Cisarua	893	-	893

No.	Pengelola/ Objek Wisata	Kunjungan Wisatawan		
		WISNUS	WISMAN	JUMLAH
11	Curug Beret	-	-	-
12	Boru Bolang	-	-	-
13	Baru Jeruk	979	-	979
14	Bumi Perkemahan Citamiang	1.141	-	1.141
15	Curug Kembar Batu Layang (Perhutani)	587	-	587
16	Trek Sepeda Puncak Kondang (Perhutani)	1.740	-	1.740
17	Taman Safari Indonesia	1.740.861	151.259	1.892.120
18	Telaga Warna	48.784	3.412	52.196
19	Wisata Agro Gunung Mas	441.568	-	441.568
20	Taman Wisata Riung Gunung	-	-	-
21	Curug Cilember	235.224	41.947	277.171
22	Taman Melrimba	30.600	12.300	42.900
23	Wisata Alam Gunung Kencana (Perhutani)	6.770	-	6.770
D	Kecamatan Babakan Madang			
24	Curug Barong Lewihejo (Perhutani dan LMDH)	25.786	41	25.827
25	Curug Putri Kencana (Perhutani dan LMDH)	6.838	5	6.843
26	Sirkuit Sentul	-	-	-
27	TWA Gunung Pancar	78.370	82	78.452
28	Sentul Eco Edu Tourism Forest	16.758	-	16.758
29	Alam Fantasi/ Taman Budaya	46.641	-	46.641
30	JungleLand	498.319	7.520	505.839
31	Agrowisata Bukit Hambalang	80.816	-	80.816
32	Air panas Gunung Pancar	-	-	-
E	Kecamatan Sukamakmur			
33	Curug Arca	-	-	-
34	Curug Ciherang	58.857	26.892	85.749
35	Curug Cipamingkis	30.415	403	30.818
36	Curug Cibereum	508	-	508
F	Kecamatan Tenjolaya			
37	Aldepos	18.749	-	18.749
G	Kecamatan Tamansari			
38	Curug Luhur	-	-	-
39	Curug Nangka	-	-	-
H	Kecamatan Pamijahan			
40	Pemandian Air Panas GSE	29.506	18	29.524
41	Curug Cigamea	15.934	9	15.943
42	Curug Seribu	12.068	225	12.293
43	Curug Ngumpet	22.601	59	22.660
44	Wana Wisata Buper Gunung Bunder	196	-	196
45	Ekowisata Kawah Ratu	-	-	-
46	Curug Batu ampar	-	-	-
47	Curug Ciparay	-	-	-
48	Wisata Alam Mustika Manik	20.410	19	20.429
49	Curug Cihurang	-	-	-
50	Curug Pangeran	82.558	123	82.681
51	Wisata Alam Ranggon Hills	35.926	38	35.964

No.	Pengelola/ Objek Wisata	Kunjungan Wisatawan		
		WISNUS	WISMAN	JUMLAH
52	Cipanas Karang Endah	4.000	-	4.000
53	Curug Gua Lumut	6.660	-	6.660
54	Curug Balong Endah	11.718	5	11.723
I	Kecamatan Ciampaea			
55	Kampung wisata Cinangneng	-	-	-
56	Gunung Kapur Ciampaea	4.000	-	4.000
57	Kampung Wisata Rumah Joglo	-	-	-
J	Kecamatan Cigudeg			
58	Goa Gudawang	7.100	-	7.100
K	Kecamatan Leuwiliang			
59	Panorama Pabangbon	95.494	-	95.494
60	Curug Cikuluwung	500	-	500
61	Bukit Bintang	28.661	-	28.661
62	Bakukung	775.495	-	775.495
L	Kecamatan Cibungbulang			
63	Curug Lembah Pelangi	-	-	-
64	Taman Air Gunung Handeleum	-	-	-
M	Kecamatan Rumpin			
65	Gunung Munara	500	20	520
N	Kecamatan Parung			
66	Pemandian Air Tirta Sayaga	142.415	936	143.351
O	Kecamatan Cileungsri			
67	Taman Wisata Mekarsari	206.352	15.016	221.368
P	Kecamatan Cijeruk			
68	Cibalung Happyland	75.651	-	75.651
69	Warso Farm	-	-	-
Q	Kecamatan Cigombong			
70	Telaga Malimping	667	-	667
71	Taman Teknologi Pertanian (TTP)	1.151	-	1.151
72	Rekreasi Lido	-	-	-
R	Kecamatan Citeureup			
73	Kebun Wisata Pasir Mukti	44.244	-	44.244
74	Goa Garunggang	20	-	20
75	Goa cikekenceng	324	-	324
S	Kecamatan Klapanunggal			
76	Goa Cidomba	94	-	94
77	Goa Ciasem	87	-	87
78	Goa Cikarae	141	-	141
T	Kecamatan Tanjungsari			
79	Penangkaran Rusa/ WW Giri Jaya	819	-	819
U	Kecamatan Cariu			
80	Curug Green Canyon Cariu	10.000	60	10.060
81	Curug Cilalay	3.500	20	3.520
V	RHU (REKREASI HIBURAN UMUM)			
	Gunung Geulis Golf	11.291	22.123	33.414
	PSP Golf	46.040	4.596	50.636

No.	Pengelola/ Objek Wisata	Kunjungan Wisatawan		
		WISNUS	WISMAN	JUMLAH
	Palm Hills Golf	35.486	19.325	54.811
	Lido Golf (renovasi rumput)	-	-	-
	Water Kingdom	141.142	-	141.142
	Villa Khayangan	237.071	-	237.071
	Gelanggang Olah raga (Kolam Renang)	134.168	640	134.808
	Gelanggang Olah raga (Arena Futsal)	38.098	-	38.098
	Gelanggang Olah raga (Fitness)	7.076	-	7.076
	Arena Bernyanyi (Karaoke)	5.730	-	5.730
	Refleksi	170.711	2.000	172.711
	Desa Wisata (25 Desa wisata)	110.149	4.560	114.709
TOTAL		7.173.278	339.931	7.513.209

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor, tahun 2018

7. Pengembangan Geopark

Geopark merupakan konsep pengembangan kawasan yang sederhana dan relatif mudah, murah, fleksibel & efektif dalam melestarikan dan melindungi warisan bumi yang sekaligus dapat mensejahterakan rakyat. Sejak Tahun 2015 Konsep Geopark sudah menjadi program Unesco, melalui Jejaring Internasional *Unesco Global Geopark*. Dalam membangun Geopark suatu kawasan memiliki unsur-unsur geologi terkemuka (*outstanding*), didalamnya termasuk mempunyai nilai *arkeologi*, *ekologi* (*biodiversity*) dan budaya (*cultural*), pada pengelolaannya masyarakat lokal dan otoritas setempat bekerjasama melindungi dan meningkatkan fungsi warisan alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kabupaten Bogor merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang dikaruniakan kekhasan secara Geografis. Terdapat empat gunung yang mengelilingi Kabupaten Bogor yaitu Gunung Gede, Gunung Pangrango, Gunung Salak dan Gunung Halimun. Selain itu Kabupaten Bogor berada tidak jauh dari Ibu Kota Negara Republik Indonesia DKI Jakarta. Berdasarkan posisi geografis ini Kabupaten Bogor mempunyai fungsi penting secara regional yaitu : (a) Merupakan salah satu kantung permukiman penduduk Jabodetabek (15% penduduk tinggal di Kab. Bogor); (b) Penyediaan Lahan Pertanian sebagai upaya menjaga ketahanan pangan (39 rb. ha lahan pertanian) dan (c) Perlindungan tata air untuk wilayah sekitarnya.

Hal ini tentunya berdampak pada konsep pengembangan wilayah di Kabupaten Bogor, pada satu sisi terjadi tarik menarik kepentingan pemanfaat wilayah untuk kebutuhan meningkatkan pendapatan daerah demi kesejahteraan masyarakat di sisi lain ada kewajiban mempertahankan fungsi kawasan sebagai kawasan perlindungan tata air yang berarti terbatasnya ruang untuk berusaha. Konsep Geopark diharapkan dapat menjawab berbagai rencana pengembangan kawasan yang dapat *generate* pendapatan daerah tanpa harus kehilangan fungsi perlindungan tata air.

Potensi *geo diversity*, *bio diversity* dan *cultural diversity* yang dimiliki oleh Kabupaten Bogor yang dapat dijadikan calon pengembangan kawasan geopark tersaji pada table 2.8 dibawah ini.

Tabel 2.8
Sebaran Geosite pada Kawasan Pengembangan Geopark di Kabupaten Bogor

NO	KECAMATAN	LUAS (Ha)	GEOSITE		
			GEO HERITAGE	BIO HERITAGE	CULTURAL HERITAGE
1	CIAMPEA	3.304,42	Gunung Kapur Ciampea		Kampung wisata Cinangneng
					Kampung Wisata Rumah Joglo
					Cakrawala Nuansa Nirwana
2	JASINGA	14.340,74	Curug Idas	Panorama Pabangbon	Situs Garisul (makam raja-raja Islam)
			Setu Kadongdong	KK Dungus Iwul	Makam Mbah Muhyidin
			Curug Bandung Pangradin	KK Yan Lapa	Situs Mbah Sohib
			Setu Jantungeun	KDHTK Haur Bentes	Situs Gedong Sawah, ds Pamagersari
			Curug Perang Jugalayaja	Perkebunan Sawit	
			Sungan Cidurian	Perkebunan Karet	
3	LEUWILANG	9.103,30	Curug Lontar	Bukit Bintang	Trek Motorcross
			Curug Cipuraseda	Perkebunan Manggis Rakyat	Situs PLTA Karacak
			Curug Cikoneng/Muara Tiliu	PTPN VIII Cianten	Arung Jeram Cianten
			Curug Lontar	Camping Ground Cianten	Situs Waduk Gunung Bubut
			Curug Cicandra		Situs Bendung Cianten
			Curug Cibeureum		
			Air Panas Cipanas		

NO	KECAMATAN	LUAS (Ha)	GEOSITE		
			GEO HERITAGE	BIO HERITAGE	CULTURAL HERITAGE
4	LEUWISADENG	3.539,12	Kawasan Gunung Api Purba	Perkebunan Manggis	Situs Moseleum Van Motman
5	NANGGUNG	16.369,12	Eks Pertambangan bawah tanah Antam	Taman Nasional Gunung Halimun Salak (Pengamatan elang, Pengamatan Oa, Habitat Anggrek Raksasa, Hutan Hujan Tropis, Aneka fauna)	Pendopo Bupati
			Curug Sawer	Perkebunan The Nirmala (Sinas Mas)	Situs Pasir Jambu
			Leuwi Bongbang	Nirmala Rose	Situs Kramat Mbah Kudung
			Setu Nirmala	Agromedika	Situs Kramat Mbah Langgar
			Curug Macan	Persawahan dengan terasering	Kampung Malasari
					Kampung Malani (Pencak silat, Pertanian)
					Desa Wisata Malasari
6	PAMIJAHAN	12.486,01	Pemandian Air Panas GSE, Kp Ciparay	Wana Wisata Buper Gunung Bunder	Desa Wisata Ciasihan
			Curug Cigamea, Kp Rawa Bogo ds Gunung Sari	Wisata Alam Mustika Manik	Desa Wisata Gunungsari
			Curug Seribu, Kp Rawa lega ds Gunungsari	Wisata Alam Ranggon Hills	Situs Pancuran Tujuh
			Curug Ngumpet, Kp Cimodal ds Gunungsari		Situs Kuta Gegelang
			Ekowisata Kawah Ratu		Tugu Eyang Cakrabuana
			Curug Batu ampar		Desa Wisata Ciasmara
			Curug Ciparay		
			Curug Batu Kursi		
			Curug Saderi		
			Curug Cihurang		
			Curug Pangeran		
			Curug Gua Lumut		
			Sumber air panas Cipanas Karang		
			Gunung Menir		DW Dodol
7	TENJO	8.321,53			

NO	KECAMATAN	LUAS (Ha)	GEOSITE		
			GEO HERITAGE	BIO HERITAGE	CULTURAL HERITAGE
8	TENJOLAYA	3.681,50	Curug Ciampea (<i>Green Lagoon</i>)	Wisata Edukasi dan Konservasi Tanaman Obat Lokal	Aldepos
			Curug Segitiga		Desa Wisata Tapos 1
			Curug Dua		Desa Wisata Gunung Malang
			Curug Gendang		Kawasan Situs Cibalay (Situs Endong Kasang, Balai Kambang, Kebon Kopi, Jami Piciing, Batu Bergores, Cipangantehan, Pasir Manggis dan Arca Domas)
			Curug Goong		
			Curug Sawer		
			Curug Cipeteuy		
9	TAMANSARI	3.885,69	Curug Luhur	Rumah Ulat Sutra	Kampung Budaya Sindang Barang
			Curug Nangka	Taman Kupu-kupu	Pura Jagatkarta
				Tanaman Hias	Viara SNI
					Desa Wisata Tamansari
					Desa Wisata Pasir Eurih
					Desa Wisata Sukajadi
					Highland Park Resort
					Situs Pasir Kramat Calobak
					Situs Batu Tapak
10	SUKAJAYA	16.090,48	Kampung Teletubies, kiara pandak	Perkebunan Kelapa Sawit	Kampung Adat Urug, desa kiara pandak
			Curug Ciaspa, kiara pandak	Pemandangan Persawahan	Batu Tapak, kiara pandak
			Curug Kembang, Pasir madang	Pemandangan Sungai Cibadak	Desa Wisata Kiara Sari
					Pembuatan Gula Kawung
					Pembuatan Sapu Awis
11	RUMPIN	13.696,17		Gunung Munara	Desa Wisata Gobang
					Kampung Rol Panongan
12	CISEENG	4.129,07		Minapolitan	Desa wisata Ciseeng
13	CIGUDEG	17.771,23	Goa Gudawang	Pemandangan Persawahan	Situs Batu Tapak tenjoleat
			Curug Rahong	Pemandangan Perkebunan Sawit, ds cigudeg	Batu Dakon Sumur Tujuh
			Curug Sigeulis, ds wargajaya	Pemandangan Perkebunan Karet, ds cigudeg	Batu Tapak
			Kawasan pertambangan (karst)		DPW Cipining Angklung Gubrag

NO	KECAMATAN	LUAS (Ha)	GEOSITE		
			GEO HERITAGE	BIO HERITAGE	CULTURAL HERITAGE
			Setu Cinyiru		
			Danau Quarry		
14	CIBUNGBULANG	3.845,42	Curug Lembah Pelangi		Taman Air Gunung Handeleum
					Prasasti Ciaruteun
					Situs Museum Pasir Angin
15	PARUNG		Pemandian Air Panas Tirta Sanita		

Sumber : Dokumen Pengusulan Geopark Pongkor, 2018

Didasarkan pada semangat yang tinggi dari berbagai pihak, sehingga Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan langkah strategis untuk menghadirkan konsep Geopark di Kabupaten Bogor dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor 556/177/kpts/perUU/2018 tentang Penetapan Kawasan Geopark Pongkor pada tanggal 26 Maret 2018. Kemudian setelah melalui berbagai penilaian persyaratan, maka pada tanggal 30 November 2018 Geopark Pongkor ditetapkan sebagai Geopark Nasional bersama dengan 8 (delapan) kawasan Geopark Nasional lainnya, yaitu Geopark Silokek, Geopark Sianok, Geopark Maninjau dan Sawahlunto di Sumatera Barat, Geopark Natuna di Kepulauan Riau, Geopark Pongkor di Jawa Barat, Geopark Karangsambung dan Geopark Karangbolong di Jawa Tengah, Geopark Banyuwangi di Jawa Timur dan Geopark Meratus di Kalimantan Selatan.

Lebih istimewanya lagi, Kabupaten Bogor dipercaya menjadi tuan rumah dalam penyampaian sertifikat tersebut yang disampaikan langsung oleh Menteri Pariwisata, Arief Yahya. Penunjukkan geopark Pongkor sebagai tuan rumah menunjukkan bahwa Geopark Pongkor memiliki nilai terbaik diantara 8 (delapan) geopark nasional lainnya. Target berikutnya dari Geopark Pongkor adalah mendapatkan sertifikat Unesco Global Geopark (UGG), menyusul empat Geopark lain yang sudah lebih dulu berstatus UGG, yaitu Geopark Gunung Batur, Geopark Gunung Sewu, Geopark Ciletuh dan Geopark Gunung Rinjani.

8. Pengembangan UMKM di Kabupaten Bogor

Pemerintah dengan berbagai kebijakannya selalu mendorong usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk terus berkembang dan berkesinambungan. Menurut World Bank, sumber penghidupan masyarakat Indonesia sangat bergantung pada sektor UMKM. UMKM ini terkonsentrasi pada sektor perdagangan, pangan, olahan pangan, tekstil dan garmen, kayu dan produk kayu, serta produksi mineral non-logam. Kontribusi sektor UMKM dalam PDRB Kabupaten Bogor pada 2018 yaitu sebesar 28,45%. Sektor usaha UMKM memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia khususnya Kabupaten Bogor, karena dengan sektor ini menyerap banyak tenaga kerja, sehingga dengan majunya sektor usaha UMKM akan dapat mengurangi angka pengangguran. Sejalan dengan langkah pemerintah untuk lebih memberdayakan ekonomi rakyat, keterlibatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam proses pembangunan ekonomi perlu dicermati, mengingat tingkat produktivitas UMKM harus terus dikembangkan disamping Usaha Besar. Tantangan persaingan yang ketat dalam hal mutu/kualitas maupun jumlah produksi UMKM dibanding dengan barang-barang lain termasuk produk impor/luar kabupaten Bogor, masih menjadi prioritas dalam memperluas akses pasar di dalam maupun di luar negeri.

Pada tahun 2018 peranan UMKM dalam PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Bogor diprediksi mencapai Rp 63,03 triliun atau berkontribusi sebesar 28,45 persen dari total PDRB Kabupaten Bogor yang terdiri atas usaha mikro sebesar Rp 17,09 triliun (7,72 %), usaha kecil sebesar Rp 20,77 triliun (9,38 %) dan menengah sebesar Rp 25,16 triliun (11,36 %).

Tabel 2.9
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bogor
Menurut Lapangan Usaha dan Skala Usaha Tahun 2018)**
(Juta Rupiah)

Lapangan Usaha		Mikro	Kecil	Menengah	Besar	Jumlah	UMKM
I	SEKTOR PRIMER	4.275.581	3.759.318	3.890.772	5.628.689	17.554.359	11.925.671
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.044.977	3.181.401	2.921.501	1.259.776	11.407.655	10.147.879
B	Pertambangan dan	230.604	577.917	969.271	4.368.913	6.146.704	1.777.792

Lapangan Usaha		Mikro	Kecil	Menengah	Besar	Jumlah	UMKM
	Penggalian						
II	SEKTOR SEKUNDER	3.093.338	6.868.215	13.641.548	116.913.143	140.516.243	23.603.100
C	Industri Pengolahan	2.565.204	4.096.163	8.453.742	102.870.525	117.985.635	15.115.110
D	Pengadaan Listrik dan Gas	458	7.410	9.662	263.930	281.460	17.530
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	245	7.342	23.597	207.741	238.926	31.185
F	Konstruksi	527.430	2.757.299	5.154.546	13.570.947	22.010.223	8.439.276
III	SEKTOR TERSIER	9.725.168	10.144.845	7.627.083	35.979.754	63.476.850	27.497.096
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.213.186	3.185.229	4.460.770	18.862.716	29.721.902	10.859.185
H	Transportasi dan Pergudangan	3.646.028	2.756.682	686.657	1.301.810	8.391.177	7.089.366
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	701.435	618.962	984.417	3.490.151	5.794.965	2.304.814
J	Informasi dan Komunikasi	1.756.895	1.426.266	309.850	563.910	4.056.922	3.493.012
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	16.756	22.936	46.413	1.060.905	1.147.010	86.105
L	Real Estat	144.712	138.755	68.880	1.324.383	1.676.730	352.346
M,N	Jasa Perusahaan	6.689	8.444	17.083	396.766	428.982	32.216
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	40.001	485.801	238.070	2.887.053	3.650.926	763.873
P	Jasa Pendidikan	59.306	732.850	402.020	2.690.030	3.884.207	1.194.177
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	22.685	89.123	73.764	874.304	1.059.876	185.572
R,S,T, U	Jasa lainnya	117.473	679.796	339.160	2.527.724	3.664.154	1.136.430
Produk Domestik Regional Bruto		17.094.087	20.772.377	25.159.403	158.521.586	221.547.453	63.025.867
Persentase		7,72	9,38	11,36	71,55	100,00	28,45

Sumber : Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018

Ket: **) Angka Sangat Sementara

Dari total 63,03 triliun kontribusi UMKM terhadap PDRB Kabupaten Bogor, sebesar Rp 11,93 triliun merupakan kontribusi dari sektor primer. Kontribusi UMKM pada sektor sekunder sebesar Rp 23,60 triliun. Sedangkan kontribusi UMKM terhadap nilai tambah sektor tersier adalah sebesar 27,50 triliun. Dengan demikian, berdasarkan distribusi persentasenya, peran UMKM terlihat menonjol pada sektor tersier, yaitu sebesar 43,63 persen dari total PDRB UMKM Rp 63,03 triliun.

Banyaknya unit UMKM menuntut pemerintah daerah untuk lebih memberdayakan peluang ini sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka pengangguran sekaligus sebagai upaya peningkatan roda pembangunan ekonomi.

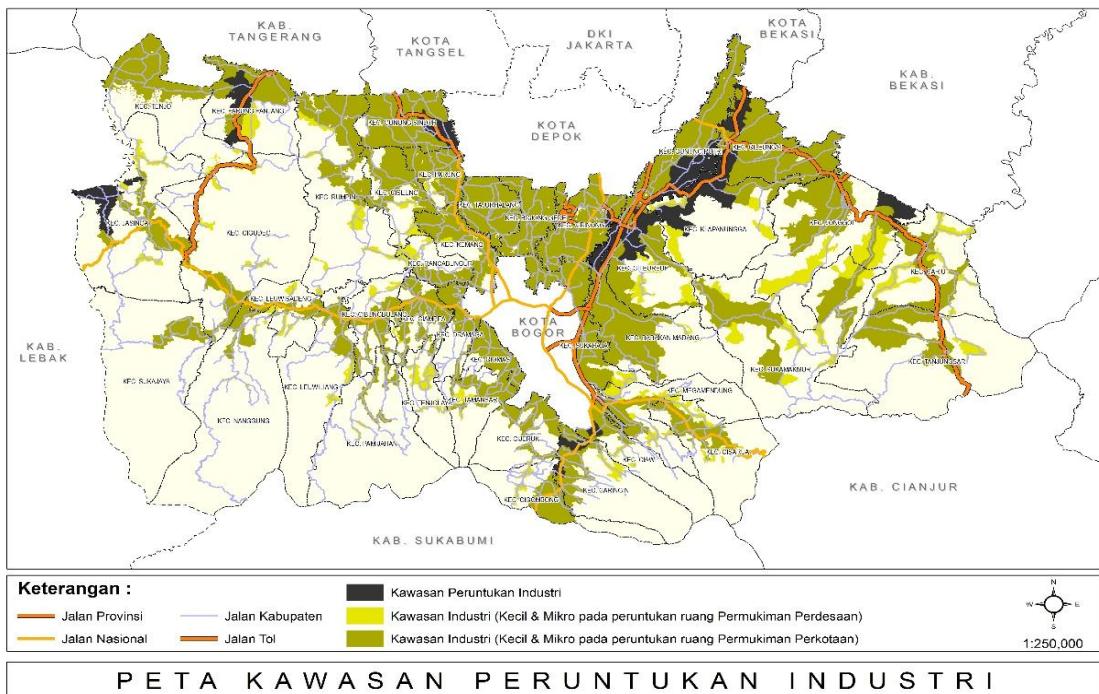
Tabel 2.10
Jumlah Unit Usaha Menurut Skala Usaha
dan Lapangan Usaha, Tahun 2018)**

Lapangan Usaha		Mikro 2018	Kecil 2018	Menengah 2018	Besar 2018	Jumlah 2018
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	131.658	1.944	191	11	133.804
B	Pertambangan dan Penggalian	820	49	9	55	933
C	Industri Pengolahan	23.655	3.492	1.605	308	29.059
D	Pengadaan Listrik dan Gas	167	68	7	10	253
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	656	77	44	5	782
F	Konstruksi	17.657	2.739	1.252	150	21.798
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	130.753	9.565	1.028	198	141.544
H	Transportasi dan Pergudangan	58.453	3.159	38	14	61.665
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	57.546	2.837	610	76	61.069
J	Informasi dan Komunikasi	222.162	11.766	315	8	234.251
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.020	164	67	66	1.316
L	Real Estat	13.849	1.506	238	91	15.683
M,N	Jasa Perusahaan	3.205	527	186	205	4.122
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.598	997	107	12	8.714
P	Jasa Pendidikan	5.066	638	166	56	5.926
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.297	179	19	19	1.515
R,S,T,U	Jasa lainnya	13.539	1.634	111	55	15.339
Produk Domestik Regional Bruto		689.101	41.341	5.993	1.339	737.773

Sumber : Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018

Ket: **) Angka Sangat Sementara

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036, sebagaimana terlihat dalam gambar peta bahwa Sebaran Zonasi Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan Zonasi Industri Kecil tersebar pada Zonasi Peruntukan Ruang Perdesaan (PD) dan Peruntukan Ruang Perkotaan (PP) sebagai berikut.



Sumber : RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036

Gambar 2.8
Sebaran Zonasi Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan Zonasi Industri Kecil

Berdasarkan Dokumen Pengembangan Komoditas UMK Unggulan Kecamatan Tahun 2014 dan 2015, bahwa rencana pengembangan UMK unggulan dengan 1). Meningkatkan pengembangan produk UMK, 2). Meningkatkan SDM dan kelembagaan, 3). Meningkatkan pemasaran dan kemitraan dan 4). Meningkatkan sarana dan prasarana UMK.

Tabel 2.11
Pembagian Kluster Komoditas Unggulan Sekunder UMK Unggulan

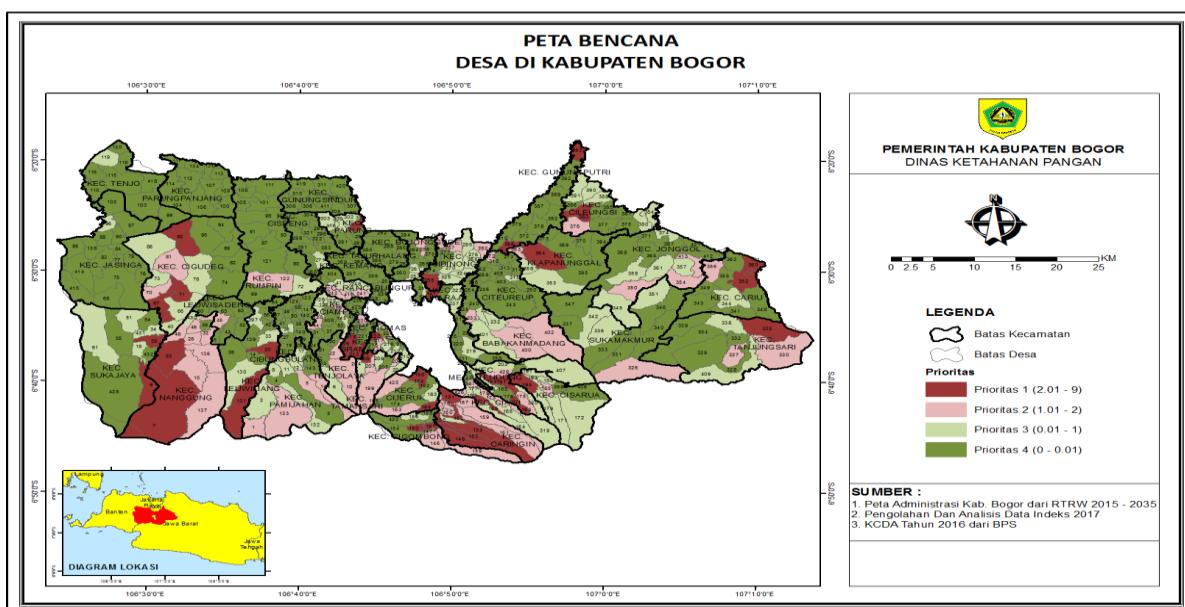
No.	Kecamatan	Kluster Komoditas Unggulan Sekunder (UMK)
1	Pamijahan, Tenjolaya, Ciawi, Cisarua, Sukaraja, Megamendung, Cigombong, Cigudeg, Tajurhalang, Tenjo, Rumpin, Gunung Sindur, Jonggol, Cariu, Parung, Parung Panjang, Rancabungur.	Aneka Makanan
2	Bojonggede, Cibinong, Dramaga, Cileungsi, Sukamakmur, Babakan Madang	Aneka Minuman
3	Caringin, Cijeruk, Kemang, Ciomas dan Tamansari, Cibungbulang	Alas Kaki
4	Klapanunggal	Kerajinan/Boneka
5	Gunung Putri	Kerajinan/Sangkar Burung
6	Ciampea	Kerajinan/Tas
7	Citeureup	Kerajinan/Logam
8	Jasinga, Tanjungsari	Kerajinan/Kayu

No.	Kecamatan	Kluster Komoditas Unggulan Sekunder (UMK)
9	Ciseeng, Nanggung	Kerajinan/Logam
10	Sukajaya	Konveksi
11	Leuwisadeng dan Leuwiliang	Bata Merah

Sumber : Dokumen Pengembangan Komoditas UMK Unggulan Kecamatan, Bappeda Tahun 2014 dan 2015

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah Kabupaten Bogor ini cukup luas, selain itu, letak geografi dan topografi lahannya yang labil sehingga rawan terjadi bencana seperti longsor, angin kencang atau angin ribut (puting beliung), banjir dan bencana lainnya. Berdasarkan data indeks risiko bencana Indonesia 2013, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan wilayah Kabupaten Bogor urutan no. 281 dari 496 Kabupaten/Kota atau tingkat kerentanan tinggi daerah rawan bencana di Indonesia (Gambar 2.9).



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor Tahun 2017

Gambar 2.9
Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Bogor Berdasarkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor Tahun 2017

Kabupaten Bogor berada di peringkat kelima setelah Bogor sebagai daerah rawan bencana di Indonesia. Sementara, total kejadian bencana di wilayah Bogor sepanjang tahun 2018 sebanyak 634 kejadian bencana, dengan rincian 39 bencana banjir, 156 bencana longsor, 188 bencana puting beliung, 232 kebakaran, dan 251 bencana lainnya. Kejadian bencana tersebut tersebar di 40 kecamatan yang berada di Kabupaten Bogor.

Tabel 2.12
Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Bogor 2018

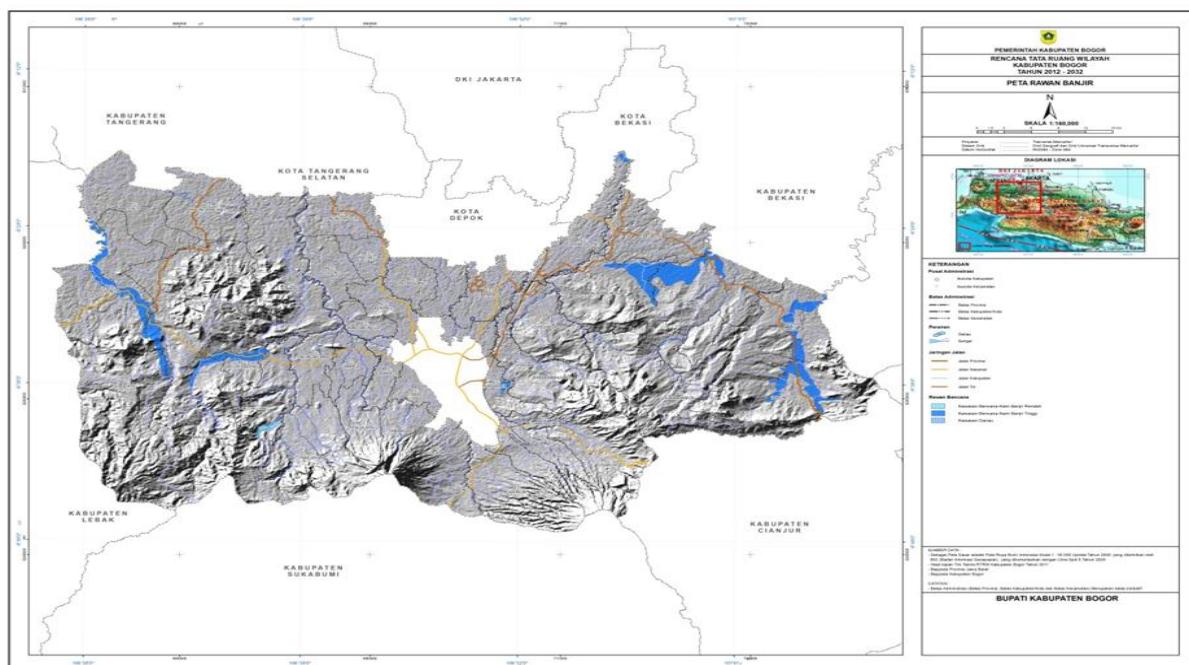
No	Kecamatan	Bencana Alam						Kategori
		Lonsor	Banjir	DLL	P.Beliung	Total		
10	Nanggung	4	0	10	0	14	Agak Rawan	
20	Leuwiliang	2	0	3	0	5	Rawan	
21	Leuwisadeng	2	0	1	3	6	Cukup	
30	Pamijahan	12	0	5	12	29	Tahan	
40	Cibungbulang	0	1	8	5	14	Tahan	
50	Ciampea	2	0	8	10	20	Cukup	
51	Tenjolaya	0	0	0	2	2	Cukup	
60	Dramaga	9	0	1	5	15	Cukup	
70	Ciomas	13	3	4	19	39	Rawan	
71	Tamansari	2	0	2	7	11	Agak Rawan	
80	Cijeruk	12	0	10	15	37	Sangat Rawan	
81	Cigombong	9	1	7	12	29	Sangat Rawan	
90	Caringin	15	1	11	20	47	Sangat Rawan	
100	Ciawi	14	6	4	7	31	Rawan	
110	Cisarua	12	6	8	4	30	Cukup	
120	Megamendung	15	2	11	10	38	Sangat Rawan	
130	Sukaraja	5	4	3	3	15	Cukup	
140	Babakan Madang	4	0	16	9	29	Tahan	
150	Sukamakmur	2	1	9	0	12	Tahan	
160	Cariu	0	0	4	1	5	Cukup	
161	Tanjungsari	0	0	2	3	5	Cukup	
170	Jonggol	0	0	3	1	4	Cukup	
180	Cileungsi	0	0	2	0	0	Cukup	
181	Klapanunggal	2	0	10	2	14	Tahan	
190	Gunung Putri	0	0	13	2	15	Tahan	
200	Citeureup	2	0	8	4	14	Rawan	
210	Cibinong	1	4	13	4	22	Rawan	
220	Bojong Gede	4	1	3	4	12	Cukup	
221	Tajur Halang	0	0	3	0	3	Cukup	
230	Kemang	3	0	3	4	10	Cukup	
231	Rancabungur	3	1	7	3	14	Cukup	
240	Parung	0	0	1	1	2	Cukup	
241	Ciseeng	0	0	3	0	3	Cukup	
250	Gunung Sindur	0	0	2	0	2	Cukup	
260	Rumpin	0	0	8	1	9	Cukup	
270	Cigudeg	2	1	7	7	17	Tahan	
271	Sukajaya	2	0	15	3	20	Rawan	
280	Jasinga	3	7	16	2	28	Tahan	
290	Tenjo	0	0	7	1	8	Tahan	
300	Parung Panjang	0	0	0	1	1	Cukup	

Sumber: BPBD Kabupaten Bogor Tahun 2018

Tabel 2.12 menunjukkan bahwa daerah yang rawan bencana dalam kategori sangat rawan adalah Kecamatan Cijeruk, Cigombong, Caringin, dan Megamendung. Kecamatan Cijeruk, Cigombong, Caringin, dan Megamendung rawan angin puting beliung. Kecamatan Leuwiliang, Ciomas, Ciawi, Citeureup, Cibinong dan Sukajaya masuk dalam kategori rawan dengan penyebab longsor dan angin puting beliung. Kecamatan Nanggung

dan Tamansari masuk dalam kategori agak rawan dengan penyebab longsor dan angin puting beliung.

Kawasan rawan banjir, berdasarkan keterangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, banjir adalah bencana alam kedua yang paling sering terjadi di Kabupaten Bogor. Dari peta di bawah, dapat dilihat, daerah yang rawan terkena banjir di Kabupaten Bogor tidaklah banyak, namun hampir semuanya berlokasi di daerah sekitar sungai, atau yang menjadi bagian dari badan sungai. Kecamatan yang tingkat rawan bencana banjirnya tinggi adalah Kecamatan Jasinga, Leuwisadeng, Jonggol, Klapanunggal, Cariu, dan Tanjungsari, serta sedikit bagian Kecamatan Gunung Putri. Sedangkan untuk potensi rawan bencana rendah berada di Kecamatan Leuwiliang.

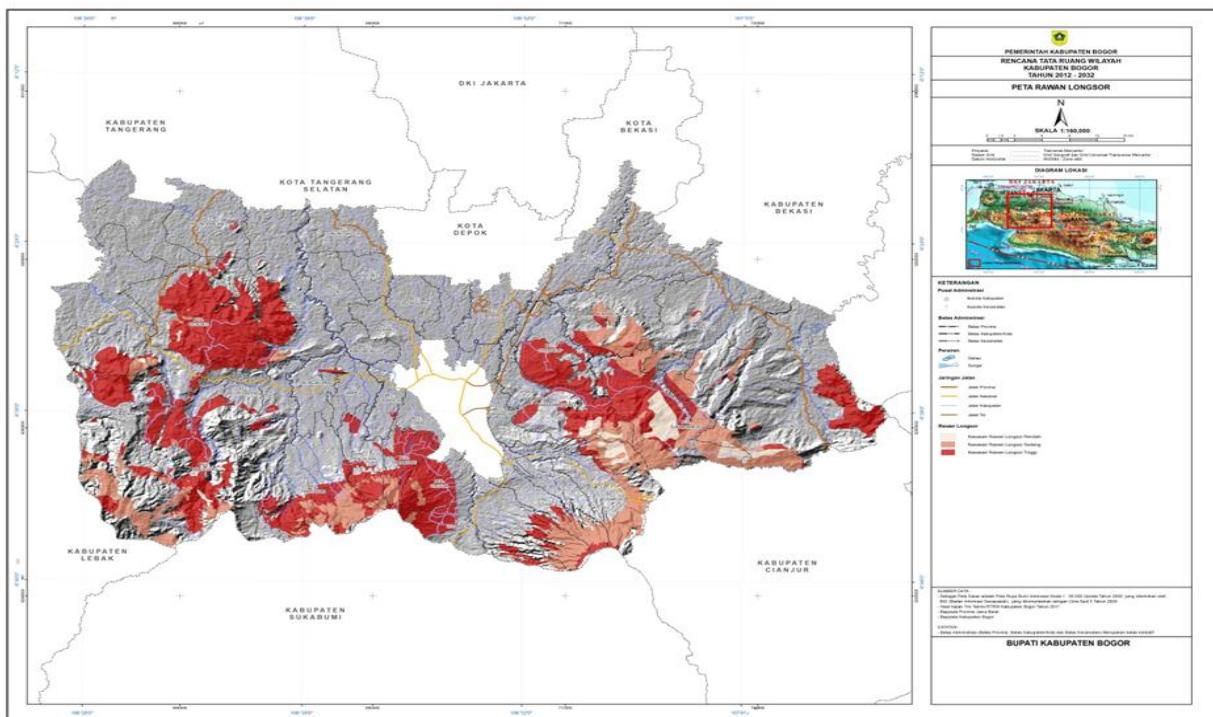


Sumber : RTRW Kab. Bogor 2016-2036

Gambar 2.10
Peta Kawasan Banjir Kabupaten Bogor

Kawasan rawan gempa, Kerentanan tanah atau kerentanan gerakan tanah menunjukkan potensi suatu kawasan mengalami bencana akibat gerakan tanah seperti gempa. Di Kabupaten Bogor, hampir di semua area berpotensi menjadi kawasan rawan gerakan tanah. Beberapa kecamatan yang berpotensi tinggi mengalami gerakan tanah adalah Kecamatan Citeureup, Klapanunggal, Jonggol, Babakan Madang, dan Sukajaya. Sedangkan di wilayah Utara seperti Cibinong, Bojong Gede, Tajurhalang, dan

Gunung Sindur termasuk yang potensinya sangat rendah. Selengkapnya karakteristik kerentanan gerakan tanah dapat dilihat pada peta berikut.



Sumber : RTRW Kab. Bogor 2016-2036

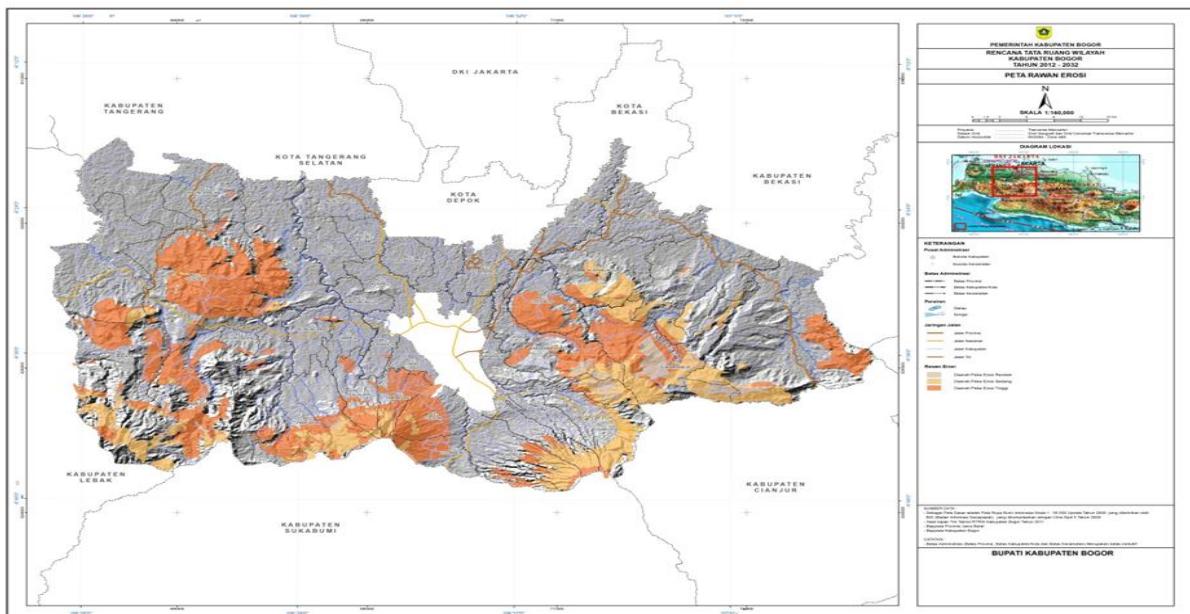
**Gambar 2.11
Peta Keretakan Tanah Kabupaten Bogor**

Kawasan rawan letusan gunung berapi, terletak di :

1. Gunung Salak di Kecamatan Cigombong, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Tenjolaya, dan Kecamatan Pamijahan;
2. Gunung Gede - Pangrango di Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung, dan Kecamatan Caringin; dan
3. Gunung Halimun di Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Nanggung, dan Kecamatan Sukajaya.

Kawasan rawan gerakan tanah, Bencana longsor, adalah bencana ketiga yang paling sering terjadi di Kabupaten Bogor. Jika dianalisis lebih jauh, tingginya frekuensi kejadian longsor salah satunya diakibatkan oleh topografi lahan di Kabupaten Bogor yang berbukit-bukit, serta rusaknya kawasan perbukitan saat ini karena telah banyak menjadi kawasan terbangun dan pembangunan akses (Jalan-jalan arteri), seperti di daerah Ciawi, Cisarua, dan Megamendung. Selain itu, banyaknya kawasan tambang di kecamatan tertentu menjadi pemicu lain terjadinya longsor. Pengaruh kawasan tambang ini lebih besar terhadap kejadian erosi, sehingga

kebanyakan di kawasan tambang seperti di Kecamatan Cigudeg dan Citeureup menjadi daerah peka erosi tinggi. Potensi bencana longsor dapat terlihat salah satunya dari peta peka erosi berikut.



Sumber : RTRW Kab. Bogor 2016-2036

Gambar 2.12
Peta Kawasan Peka Erosi Kabupaten Bogor

2.1.4. Kondisi Umum Demografi

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Bogor tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 sebesar 2,20 persen. Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas akan membawa ke arah kemajuan pembangunan, sebaliknya penduduk yang tidak berkualitas akan menjadi beban dalam pembangunan.

Tabel 2.13
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin, Pertumbuhan Penduduk 2018

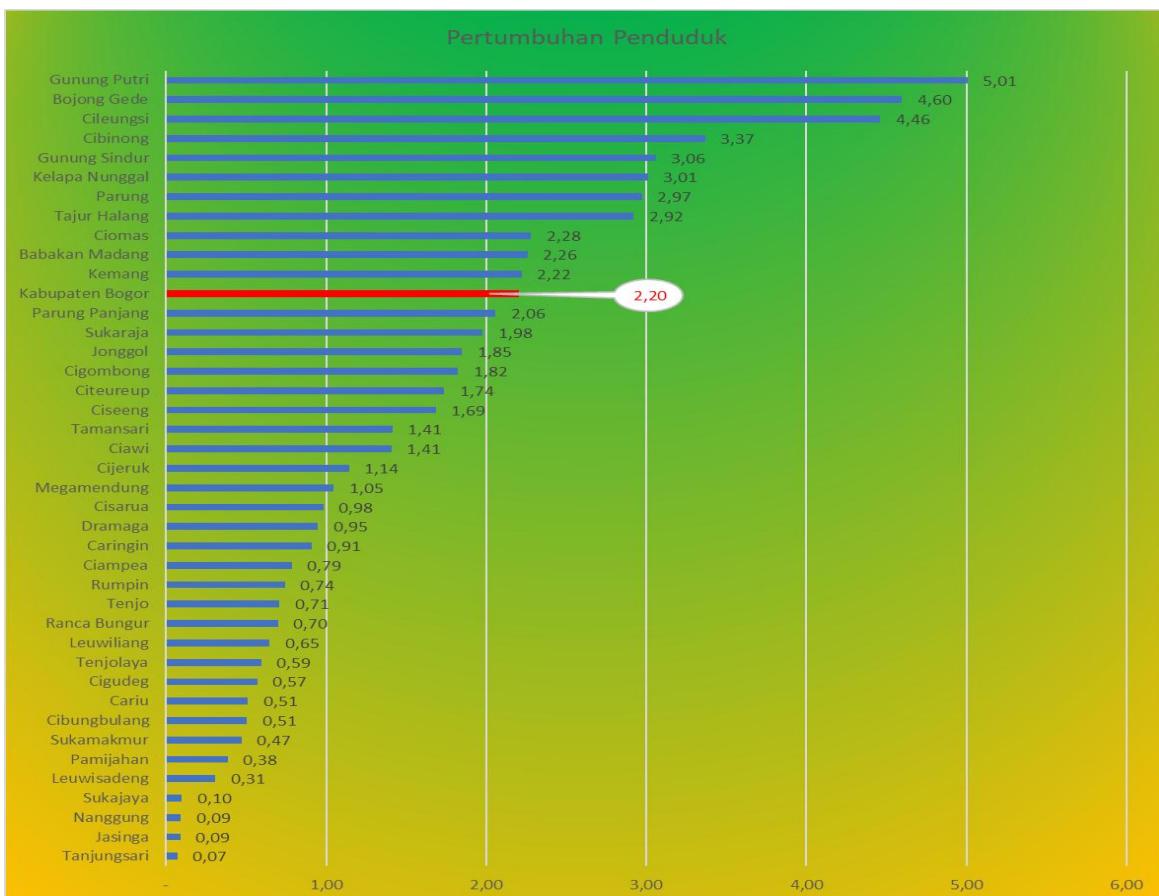
Wilayah Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Pertumbuhan Penduduk
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan	
	2.018	2.018	2.018	
Nanggung	45.080	42.220	87.300	0,09
Leuwiliang	63.508	59.635	123.143	0,65
Leuwisadeng	38.965	35.953	74.918	0,31
Pamijahan	73.047	69.422	142.469	0,38
Cibungbulang	69.156	65.365	134.521	0,51
Ciampea	83.031	78.716	161.747	0,79
Tenjolaya	30.328	29.089	59.417	0,59
Dramaga	56.546	55.628	112.174	0,95
Ciomas	94.305	90.642	184.947	2,28
Tamansari	54.876	51.520	106.396	1,41
Cijeruk	46.481	42.515	88.996	1,14
Cigombong	53.868	51.714	105.582	1,82
Caringin	64.989	61.866	126.855	0,91
Ciawi	61.453	57.629	119.082	1,41
Cisarua	65.061	60.777	125.838	0,98
Megamendung	56.724	52.072	108.796	1,05
Sukaraja	107.104	102.562	209.666	1,98
Babakan Madang	65.576	61.959	127.535	2,26
Sukamakmur	41.177	38.744	79.921	0,47
Cariu	22.905	22.781	45.686	- 0,51
Tanjungsari	26.298	25.581	51.879	0,07
Jonggol	74.593	72.365	146.958	1,85
Cileunsgsi	183.421	179.490	362.911	4,46
Kelapa Nunggal	64.039	60.829	124.868	3,01
Gunung Putri	235.316	241.096	476.412	5,01
Citeureup	120.013	115.503	235.516	1,74
Cibinong	223.770	217.627	441.397	3,37
Bojong Gede	179.357	172.655	352.012	4,60
Tajur Halang	64.750	62.121	126.871	2,92
Kemang	58.319	55.714	114.033	2,22
Ranca Bungur	28.187	26.452	54.639	0,70
Parung	75.871	71.560	147.431	2,97
Ciseeng	59.944	56.181	116.125	1,69
Gunung Sindur	69.515	66.356	135.871	3,06
Rumpin	73.440	68.070	141.510	0,74
Cigudeg	66.106	60.588	126.694	0,57
Sukajaya	30.065	27.816	57.881	0,10
Jasinga	49.847	46.852	96.699	0,09
Tenjo	37.170	35.037	72.207	0,71
Parung Panjang	69.077	64.927	134.004	2,06
Kabupaten Bogor	2.983.278	2.857.629	5.840.907	2,20

Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018

Tabel 2.13 menunjukkan bahwa di Kecamatan Gunung Putri memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu 476.412 jiwa dengan pertumbuhan sebesar 5,01% dari total penduduk Kabupaten Bogor. Kecamatan Cibinong menempati urutan kedua dengan jumlah penduduk 441.397 jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 3,37%. Jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Cariu dengan jumlah penduduk 45.686 jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0,51% dari total penduduk Kabupaten Bogor. Kecamatan Tanjungsari menempati urutan terendah kedua dengan jumlah penduduk 51.879 jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0,07%.

➤ Pertumbuhan Penduduk

Perubahan jumlah penduduk antar tahun menggambarkan angka pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Bogor tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 sebesar 2,20 persen (Gambar 2.13).



Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017

**Gambar 2.13
Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bogor, 2017-2018**

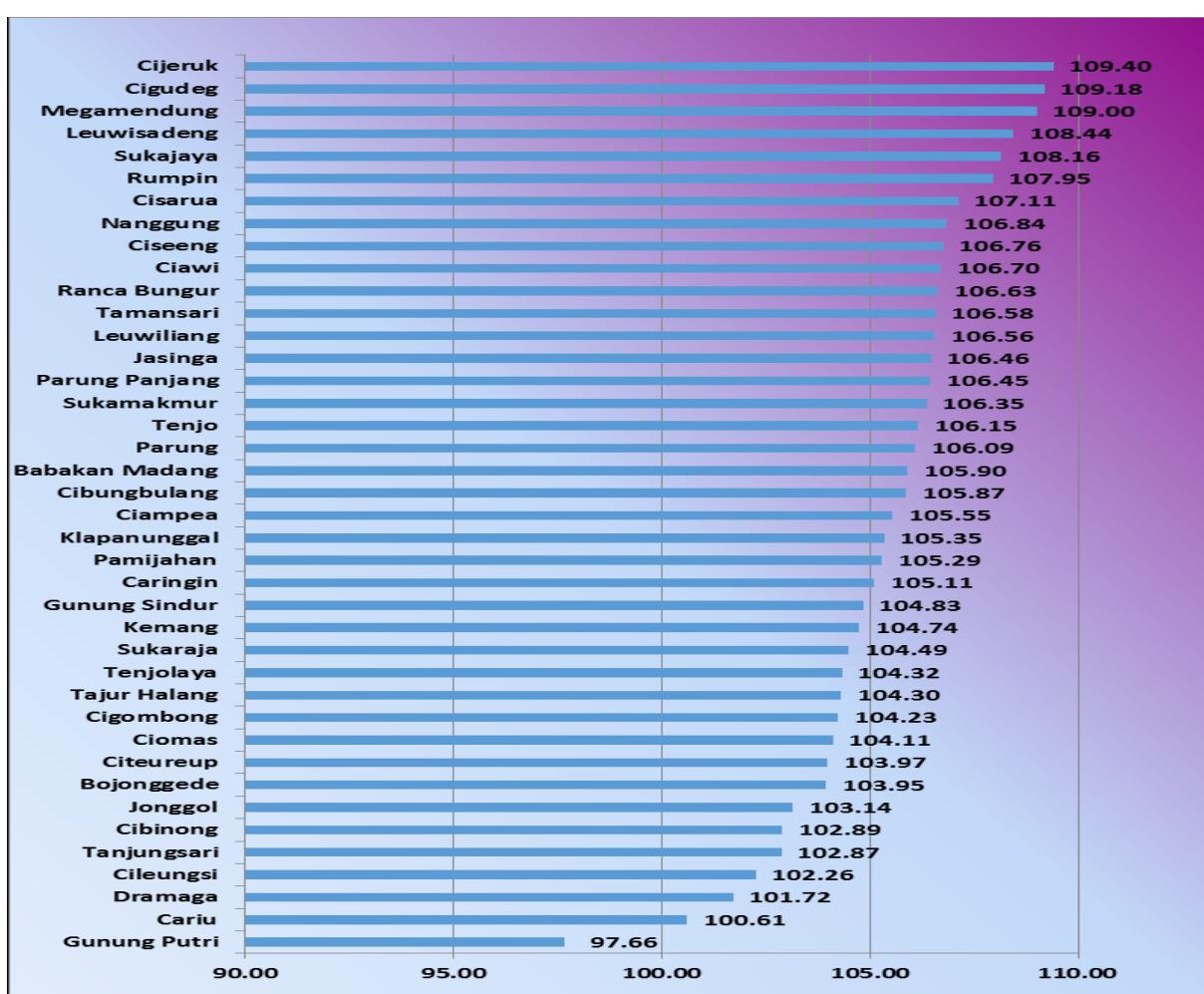
Kecamatan Cibinong, sebagai ibukota Kabupaten Bogor, pertumbuhan penduduk mencapai 3,37 persen. Pertumbuhan penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Gunung Putri, Bojonggede dan Cileungsi masing-masing sebesar 5,01 persen, 4,60 persen dan 4,46 persen. Keempat kecamatan tersebut memiliki pertumbuhan penduduk lebih tinggi dibanding pertumbuhan penduduk rata-rata Kabupaten Bogor (2,20%).

Secara keseluruhan ada 11 kecamatan dengan pertumbuhan penduduk di atas pertumbuhan rata-rata kabupaten Bogor (2,28%) diantaranya Kecamatan Gunung Putri (5,01%), Bojonggede (4,60%), Cileungsi (4,46%), Cibinong (3,37%), Gunung Sindur (3,06%), Kelapanunggal (3,01%), Parung (2,97%), Tajur Halang (2,92%), Ciomas (2,28%), Babakan Madang (2,26%) dan Kemang (2,22%). Dari gambar di atas juga memperlihatkan bahwa Kecamatan Sukajaya, Jasinga, Nanggung, dan

Tanjungsari memiliki pertumbuhan yang relatif kecil, justru Kecamatan Cariu memperlihatkan pertumbuhan negatif.

➤ **Sex Ratio (Rasio Jenis Kelamin)**

Indikator Demografi selain jumlah dan pertumbuhan penduduk, hal yang perlu diketahui adalah komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Kejadian demografis maupun karakteristiknya berbeda menurut umur dan jenis kelamin baik untuk kelahiran, kematian maupun perpindahan penduduk. *Sex ratio* Kabupaten Bogor pada tahun 2017 sebesar 104, artinya setiap 100 orang perempuan terdapat 104 orang laki-laki. Sebagian besar kecamatan di Kabupaten Bogor memiliki *sex ratio* di atas 100, yang berarti berlaku umum bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan di daerah tersebut. Namun ada satu kecamatan yang nilai *sex ratio*-nya kurang dari 100 yaitu sebesar 97,66 terjadi di Kecamatan Gunung Putri (Gambar 2.14).

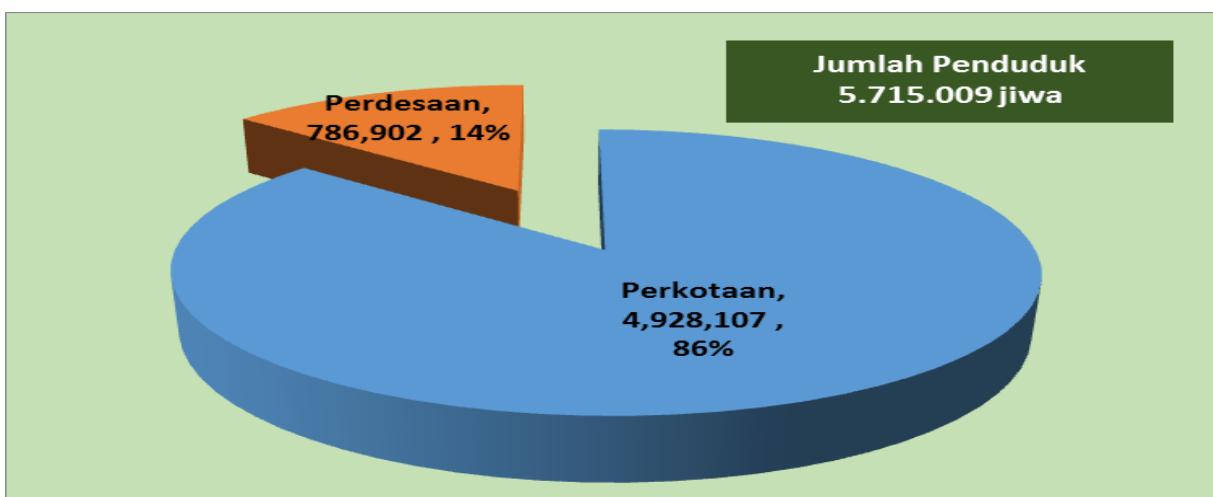


Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017

**Gambar 2.14
Sex ratio Kabupaten Bogor Menurut Kecamatan Tahun 2017**

➤ Distribusi Penduduk

Distribusi penduduk dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas dan kemudahan akses suatu wilayah. Jika dilihat menurut tipe daerah, daerah dibagi menjadi 2 tipe, yaitu daerah perkotaan dan daerah perdesaan. Menurut Peraturan Kepala BPS Nomor 37 tahun 2010, *Daerah Perkotaan* didefinisikan sebagai suatu wilayah administratif setingkat desa/kelurahan yang *memenuhi persyaratan* tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan sejumlah fasilitas perkotaan, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya. Sedangkan *daerah perdesaan* didefinisikan sebagai suatu wilayah administratif setingkat desa/kelurahan yang *belum memenuhi persyaratan* tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan sejumlah fasilitas perkotaan, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum dan sebagainya (Gambar 2.8).



Sumber : Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017

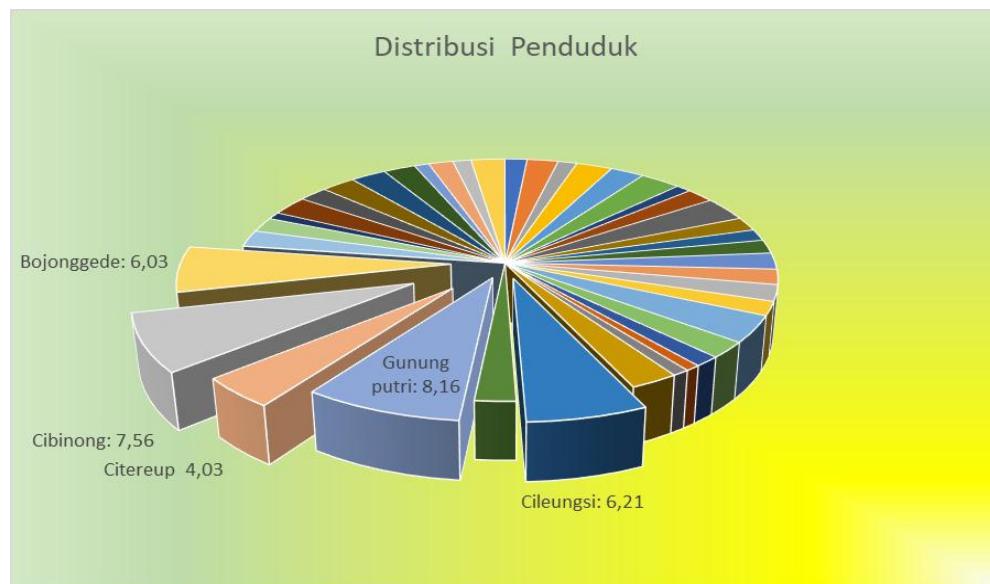
**Gambar 2.15
Jumlah dan Distribusi Penduduk menurut Tipe Daerah di Kabupaten Bogor, Tahun 2017**

Gambar di atas memperlihatkan jumlah penduduk di Kabupaten Bogor untuk daerah perkotaan sebanyak 4.928.107 jiwa atau 86 persen jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk di daerah perdesaan yang hanya sebanyak 786.902 jiwa (14%).

Pada tahun 2016, distribusi penduduk terbesar berada di Kecamatan Gunung Putri sebesar 7,94 persen, kemudian Kecamatan Cibinong sebesar 7,47 persen. Ini memberi petunjuk bahwa Kecamatan Gunung Putri masih menjadi tujuan sebagai kawasan industri sekaligus tujuan tempat

pemukiman dan Kecamatan Cibinong memiliki daya tarik karena merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Bogor.

Distribusi penduduk dapat kita lihat pada Gambar 2.16 dimana ada 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Gunung Putri, Cibinong, Cileungsi Bojonggede dan Citereup dengan distribusi penduduk di atas 4,06 persen penduduk Kabupaten Bogor. Kemudian Ada 4 (empat) kecamatan dengan distribusi penduduk terendah dengan distribusi penduduk kurang dari 1 persen penduduk Kabupaten Bogor yaitu Kecamatan Cariu, Tanjungsari, Rancabungur, dan Sukajaya.

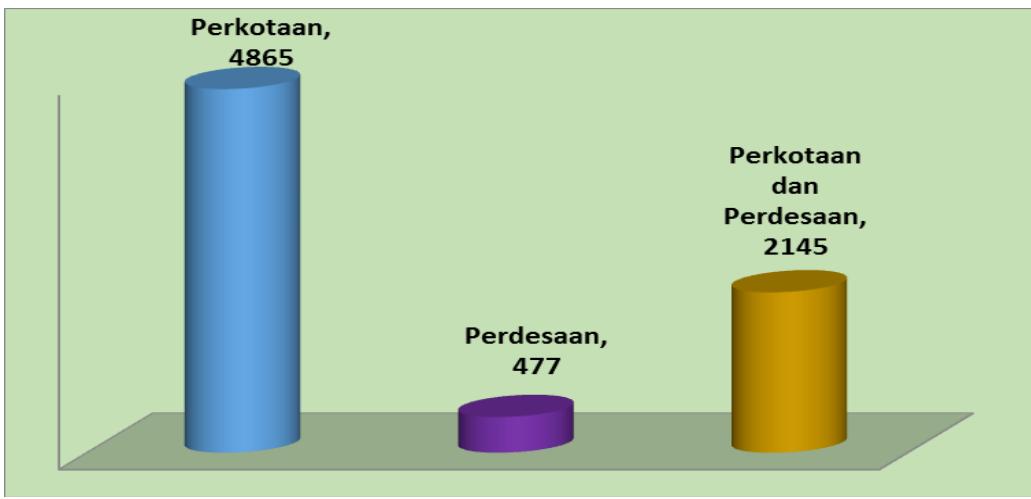


Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017

**Gambar 2.16
Distribusi Penduduk Kabupaten Bogor Menurut Kecamatan, Tahun 2018**

➤ **Kepadatan Penduduk**

Kepadatan penduduk mencerminkan banyaknya penduduk tiap satuan luas wilayah dalam km^2 . Luas wilayah yang dimaksud adalah luas wilayah yang dimungkinkan penduduk bermukim atau hanya luas daratan tidak termasuk laut ataupun perairan seperti sungai, waduk atau setu. Kepadatan penduduk yang tinggi cenderung memperlambat pendapatan per kapita melalui tiga cara, yaitu :

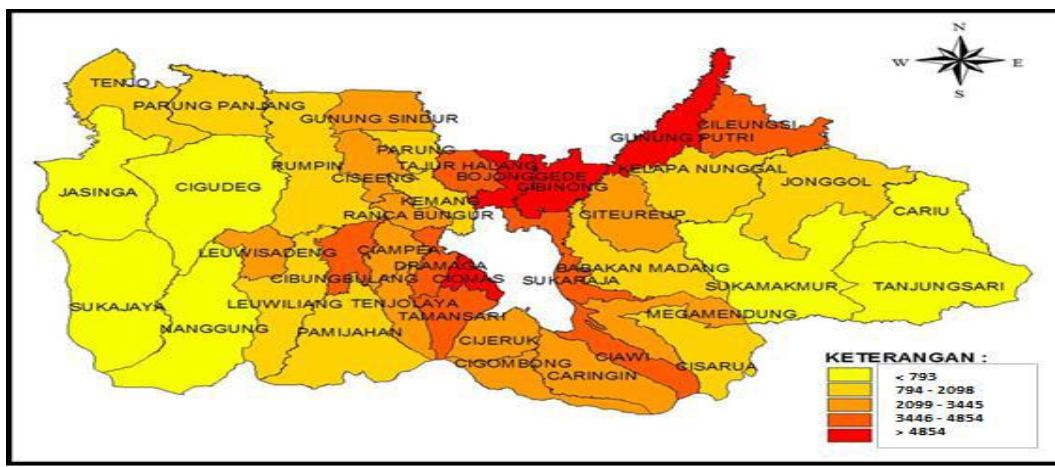


Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017

Gambar 2.17
Kepadatan Penduduk menurut Tipe Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2017

- 1) memperberat beban penduduk pada lahan;
- 2) menaikkan barang konsumsi karena kekurangan faktor pendukung untuk menaikkan penawaran;
- 3) memerosotkan akumulasi modal, karena dengan tambah anggota keluarga biaya meningkat.

Gambar 2.17 menggambarkan kepadatan penduduk menurut daerah perkotaan dan daerah perdesaan. Pada gambar tersebut terlihat kepadatan penduduk di daerah perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perdesaan. Pada tahun 2017 kepadatan penduduk di daerah perkotaan mencapai 4.865 jiwa/km², sedangkan di daerah perdesaan 477 jiwa/km² atau dengan komposisi perkotaan dan perdesaan 10:1. Peta kepadatan penduduk disajikan pada Gambar 2.18. Jika diperhatikan peta kepadatan penduduk, terlihat bahwa kepadatan sedang hingga tinggi berada di kecamatan yang terletak di sekitar Kota Bogor sehingga membentuk seperti cincin. Kepadatan penduduk ini jika tidak dikendalikan akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Jhingan (2008) mengemukakan pengaruh buruk kepadatan penduduk yang tinggi terhadap perekonomian yang dalam hal ini pendapatan per kapita. Kondisi ini akan semakin parah apabila persentase anak-anak pada keseluruhan penduduk tinggi, karena anak-anak hanya menghabiskan dan tidak menambah produk, dan jumlah anak yang menjadi tanggungan keluarga lebih besar daripada jumlah mereka yang menghasilkan, sehingga pendapatan per kapita menjadi rendah.



Sumber : Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017

**Gambar 2.18
Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Bogor, Tahun 2017**

Pada Tabel 2.14 juga dapat kita lihat bahwa kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Bojonggede dengan tingkat kepadatan 12.419 jiwa/km². Kemudian diikuti oleh Kecamatan Ciomas dengan tingkat kepadatan 9.916 jiwa/km². Kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Tanjungsari dengan tingkat kepadatan 327 jiwa/km². Kemudian diikuti oleh Kecamatan Sukajaya dengan tingkat kepadatan 371 jiwa/km².

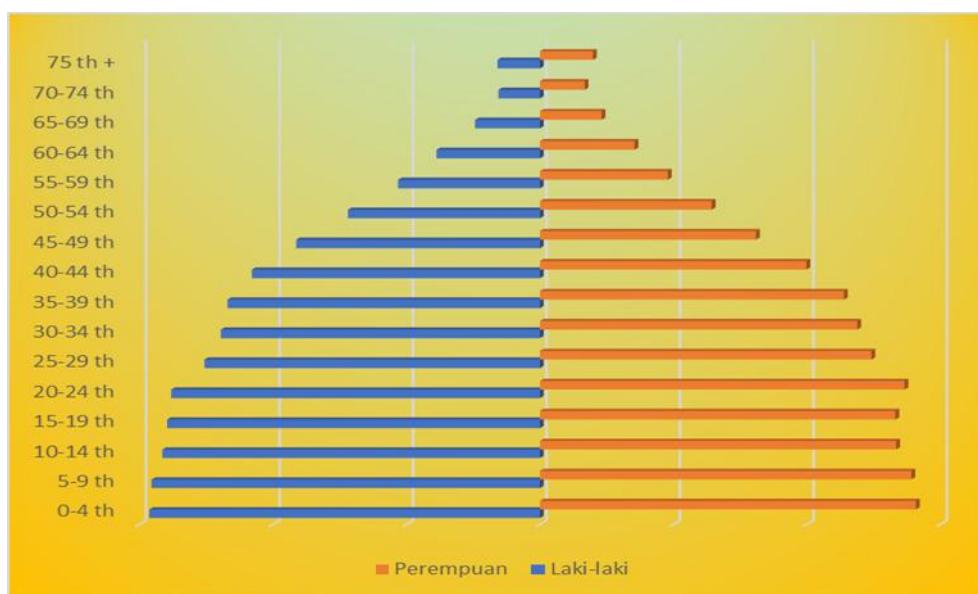
**Tabel 2.14
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bogor Tahun 2018**

No.	Kecamatan	Kepadatan Penduduk	No.	Kecamatan	Kepadatan Penduduk
1	Nanggung	548	21	Tanjungsari	327
2	Leuwiliang	1.353	22	Jonggol	1.102
3	Leewisadeng	2.117	23	Cileungsi	5.143
4	Pamiyahans	1.141	24	Kelapa Nunggal	1.300
5	Cibungbulang	3.498	25	Gunung Putri	7.826
6	Ciampea	4.895	26	Citeureup	3.423
7	Tenjolaya	1.437	27	Cibinong	9.468
8	Dramaga	4.436	28	Bojong Gede	12.419
9	Ciomas	9.916	29	Tajur Halang	4.122
10	Tamansari	3.100	30	Kemang	3.392
11	Cijeruk	1.857	31	Ranca Bungur	2.411
12	Cigombong	2.239	32	Parung	5.728
13	Caringin	1.636	33	Ciseeng	2.812
14	Ciawi	2.530	34	Gunung Sindur	2.751
15	Cisarua	1.701	35	Rumpin	1.034
16	Megamendung	1.743	36	Cigudeg	713
17	Sukaraja	4.791	37	Sukajaya	371
18	Babakan Madang	1.381	38	Jasinga	669
19	Sukamakmur	470	39	Tenjo	868
20	Cariu	535	40	Parung Panjang	1.878

Sumber : Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017

➤ Piramida Penduduk

Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur dapat disajikan dalam bentuk piramida penduduk seperti terlihat pada Gambar 2.12. Piramida Penduduk Kabupaten Bogor tergolong penduduk muda (*expansive*) menuju “transisi”. Adapun ciri-ciri Piramida *Expansive* adalah: (1) Sebagian besar berada pada kelompok penduduk muda, (2) Kelompok usia tua jumlahnya sedikit, (3) Tingkat kelahiran bayi tinggi, (4) Pertumbuhan penduduk tinggi.



Sumber : Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017

**Gambar 2.19
Piramida Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur,
Tahun 2018**

Piramida Kabupaten Bogor gemuk di tengah menunjukkan penduduk Kabupaten Bogor tergolong penduduk usia produktif dan jika dilihat proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih dari 60 persen (66,81%). Hal ini sekaligus menunjukkan angka beban tanggungan tergolong rendah (Gambar 2.19).

➤ Dependency Ratio

Penyajian data penduduk menurut kelompok umur seringkali disederhanakan menjadi tiga kelompok, yaitu kurang dari 15 tahun, 15-64 tahun dan 65 tahun atau lebih. Penggolongan seperti ini antara lain untuk melihat struktur penduduk “tua” atau “muda”. Penduduk dikatakan “muda” apabila proporsi penduduk usia kurang dari 15 tahun sekitar 40 persen

atau lebih, sebaliknya dikatakan "tua" apabila proporsi penduduk pada usia 65 tahun ke atas di atas 10 persen dari total penduduk.

Implikasi tingginya jumlah penduduk usia produktif mengindikasi bahwa permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Bogor merupakan pekerjaan rumah yang harus mendapat perhatian serius. Penduduk usia produktif dan tidak produktif erat kaitannya dengan rasio beban ketergantungan (*Burden of Dependency Ratio*). Rasio beban ketergantungan merupakan perbandingan antara penduduk tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan penduduk produktif (berusia 15-64 tahun).

Tabel 2.15
Jumlah Penduduk Kabupaten Bogor Menurut Kelompok Umur dan
Angka Ketergantungan, Tahun 2017

Kelompok Umur (1)	Jumlah (2)	Distribusi (%) (3)	Angka Ketergantungan (4)
0-14 tahun	1,671,644	29.25	43.69
15-64 tahun	3,826,113	66.95	
65+ tahun	217,252	3.80	5.68
Total	5,715,009	100.00	49.37

Sumber : Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017

Rasio ketergantungan anak merupakan perbandingan anak (penduduk usia 0-14 tahun) terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun). Rasio ketergantungan lanjut usia merupakan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas) terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun). Rasio beban ketergantungan Kabupaten Bogor tertera pada Tabel 2.14. Hasil proyeksi penduduk menunjukkan bahwa rasio ketergantungan anak di Kabupaten Bogor tahun 2017 sebesar 43,69 persen, dan rasio ketergantungan lanjut usia sebesar 5,68 persen atau secara keseluruhan angka beban ketergantungan Kabupaten Bogor sebesar 49,37 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa untuk setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung sebanyak 50 penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas).

2.1.5. Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

a. Daya Dukung Penyedia Bahan Pangan

Penentuan status daya dukung penyedia pangan dilakukan berdasarkan hasil perhitungan ambang batas, yaitu dengan menyelisihkan ambang batas terhadap jumlah penduduk eksisting, nilai selisih yang negatif menunjukkan bahwa status DDLH pangan wilayah tersebut telah melampaui.

Perhitungan data dukung pangan menggunakan Permen LH No. 17 tahun 2009 tentang Daya Dukung Lingkungan Hidup dengan pendekatan produksi beras. Daya dukung pangan ditinjau dari komoditas beras dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, jumlah produksi padi dalam BPS Kabupaten Bogor. Total produksi padi 2017 mencapai **547.233 Ton**, dengan konversi Gabah Kering Giling/GKG ke beras sebesar 62,74% maka diperkirakan produksi beras mencapai **336.262 ton**. Sedangkan angka konsumsi beras (kg/orang/tahun) sebesar 86,23 maka kebutuhan pangan di Provinsi Jawa Barat adalah **697.809 ton**. Dengan demikian Kabupaten Bogor memiliki nilai daya dukung pangan sebesar **0,70** atau mengalami defisit beras sebesar **361.557** ton. Informasi ini menjadi perhatian karena pertumbuhan penduduk memberikan tekanan terhadap konversi lahan pertanian.

Tabel 2.16
Perbandingan jumlah penduduk dan luas lahan sawah di Kabupaten Bogor

Tahun	Jumlah penduduk (Jiwa)	Luas Lahan sawah (Ha)
2010	4.340.060	48.484
2015	5.331.149	45.799
2016	5.459.668	44.547
2017	5.715.009	47.154
Proyeksi 2023	6.918.277	42.394

Sumber : Data Dinas Pertanian dan kehutanan, Data BPS

Prediksi daya dukung pangan di Kabupaten Bogor tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan proyeksi jumlah penduduk serta laju konversi lahan pangan. Berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk, maka jumlah penduduk Kabupaten Bogor tahun 2023 diperkirakan

mencapai 6.918.277 jiwa sedangkan luas lahan sawah dengan laju konversi lahan pangan rata-rata sebesar 3,9%, maka luas lahan sawah pada tahun 2023 diperkirakan menjadi 42.394 Ha. Berdasarkan asumsi tersebut maka daya dukung pangan tiap kecamatan di Kabupaten Bogor tahun 2023 dapat diprediksi sebagai berikut.

**Tabel 2.17
Daya dukung pangan beras Kabupaten Bogor tahun 2017**

No	Kecamatan	Produksi beras (ton)	Penduduk (jiwa)	Konsumsi beras (ton)	DDL Pangan	Status
1	Nanggung	15.691	87.207	7.520	2,09	Suplus
2	Leuwiliang	16.055	121.597	10.485	1,53	Suplus
3	Leuwisadeng	9.859	74.504	6.424	1,53	Suplus
4	Pamijahan	26.524	141.443	12.197	2,17	Suplus
5	Cibungbulang	8.141	133.222	11.488	0,71	Defisit
6	Ciampea	4.618	159.258	13.733	0,34	Defisit
7	Tenjolaya	10.935	58.739	5.065	2,16	Suplus
8	Dramaga	1.613	110.068	9.491	0,17	Defisit
9	Ciomas	2.538	176.599	15.228	0,17	Defisit
10	Tamansari	4.335	103.409	8.917	0,49	Defisit
11	Cijeruk	4.808	86.982	7.500	0,64	Defisit
12	Cigombong	4.842	101.757	8.775	0,55	Defisit
13	Caringin	8.092	124.584	10.743	0,75	Defisit
14	Ciawi	5.727	115.749	9.981	0,57	Defisit
15	Cisarua	1.626	123.397	10.641	0,15	Defisit
16	Megamendung	4.297	106.544	9.187	0,47	Defisit
17	Sukaraja	219	201.435	17.370	0,01	Defisit
18	Babakan Madang	1.131	121.831	10.505	0,11	Defisit
19	Sukamakmur	29.352	79.210	6.830	4,3	Suplus
20	Cariu	20.544	46.216	3.985	5,16	Suplus
21	Tanjungsari	22.084	51.844	4.471	4,94	Suplus
22	Jonggol	28.908	141.569	12.207	2,37	Suplus
23	Cileungsi	4.145	331.605	28.594	0,14	Defisit
24	Klapanunggal	7.727	117.470	10.129	0,76	Defisit
25	Gunungputri	356	430.592	37.130	0,01	Defisit
26	Citeureup	1.525	227.375	19.607	0,08	Defisit
27	Cibinong	544	412.256	35.549	0,02	Defisit
28	Bojonggede	203	320.800	27.663	0,01	Defisit
29	Tajurhalang	549	119.583	10.312	0,05	Defisit
30	Kemang	1.040	109.013	9.400	0,11	Defisit
31	Rancabungur	984	53.891	4.647	0,21	Defisit
32	Parung	302	138.807	11.969	0,03	Defisit
33	Ciseeng	1.602	112.237	9.678	0,17	Defisit
34	Gunungsindur	1.466	127.699	11.011	0,13	Defisit
35	Rumpin	16.431	139.452	12.025	1,37	Suplus
36	Cigudeg	18.896	125.305	10.805	1,75	Suplus
37	Sukajaya	11.873	57.805	4.985	2,38	Suplus
38	Jasinga	16.014	96.595	8.329	1,92	Suplus
39	Tenjo	12.623	71.211	6.141	2,06	Suplus
40	Parungpanjang	12.833	128.530	11.083	1,16	Suplus

Sumber : Kabupaten Bogor dalam Angka, 2017 dan diolah

Tabel 2.18
Daya Dukung Pangan (beras) Kabupaten Bogor tahun 2023

Kecamatan	Produksi beras (Ton)	Penduduk (Jiwa)	Konsumsi beras (Ton)	DDL Pangan 2023	Status
Nanggung	14.577	93.131	10.617	1,37	Surplus
Leuwiliang	14.915	127.521	14.537	1,03	Surplus
Leuwisadeng	9.159	80.428	9.169	1,00	Surplus
Pamijahan	24.641	147.367	16.800	1,47	Surplus
Cibungbulang	7.563	139.146	15.863	0,48	Defisit
Ciampea	4.290	165.182	18.831	0,23	Defisit
Tenjolaya	10.159	64.663	7.372	1,38	Surplus
Dramaga	1.498	115.992	13.223	0,11	Defisit
Ciomas	2.358	182.523	20.808	0,11	Defisit
Tamansari	4.027	109.333	12.464	0,32	Defisit
Cijeruk	4.467	92.906	10.591	0,42	Defisit
Cigombong	4.498	107.681	12.276	0,37	Defisit
Caringin	7.517	130.508	14.878	0,51	Defisit
Ciawi	5.320	121.673	13.871	0,38	Defisit
Cisarua	1.511	129.321	14.743	0,10	Defisit
Megamendung	3.992	112.468	12.821	0,31	Defisit
Sukaraja	203,451	207.359	23.639	0,01	Defisit
Babakanmadang	1.051	127.755	14.564	0,07	Defisit
Sukamakmur	27.268	85.134	9.705	2,81	Surplus
Cariu	19.085	52.140	5.944	3,21	Surplus
Tanjungsari	20.516	57.768	6.586	3,12	Surplus
Jonggol	26.856	147.493	16.814	1,60	Surplus
Cileungsi	3.851	337.529	38.478	0,10	Defisit
Klapanunggal	7.178	123.394	14.067	0,51	Defisit
Gunungputri	330,724	436.516	49.763	0,01	Defisit
Citeureup	1.417	233.299	26.596	0,05	Defisit
Cibinong	505,376	418.180	47.673	0,01	Defisit
Bojonggede	188,587	326.724	37.247	0,01	Defisit
Tajurhalang	510,021	125.507	14.308	0,04	Defisit
Kemang	966	114.937	13.103	0,07	Defisit
Rancabungur	914,136	59.815	6.819	0,13	Defisit
Parung	280,558	144.731	16.499	0,02	Defisit
Ciseeng	1.488	118.161	13.470	0,11	Defisit
Gunungsindur	1.362	133.623	15.233	0,09	Defisit
Rumpin	15.264	145.376	16.573	0,92	Defisit
Cigudeg	17.554	131.229	14.960	1,17	Surplus
Sukajaya	11.030	63.729	7.265	1,52	Surplus
Jasinga	14.877	102.519	11.687	1,27	Surplus
Tenjo	11.727	77.135	8.793	1,33	Surplus
Parungpanjang	11.922	134.454	15.328	0,78	Defisit

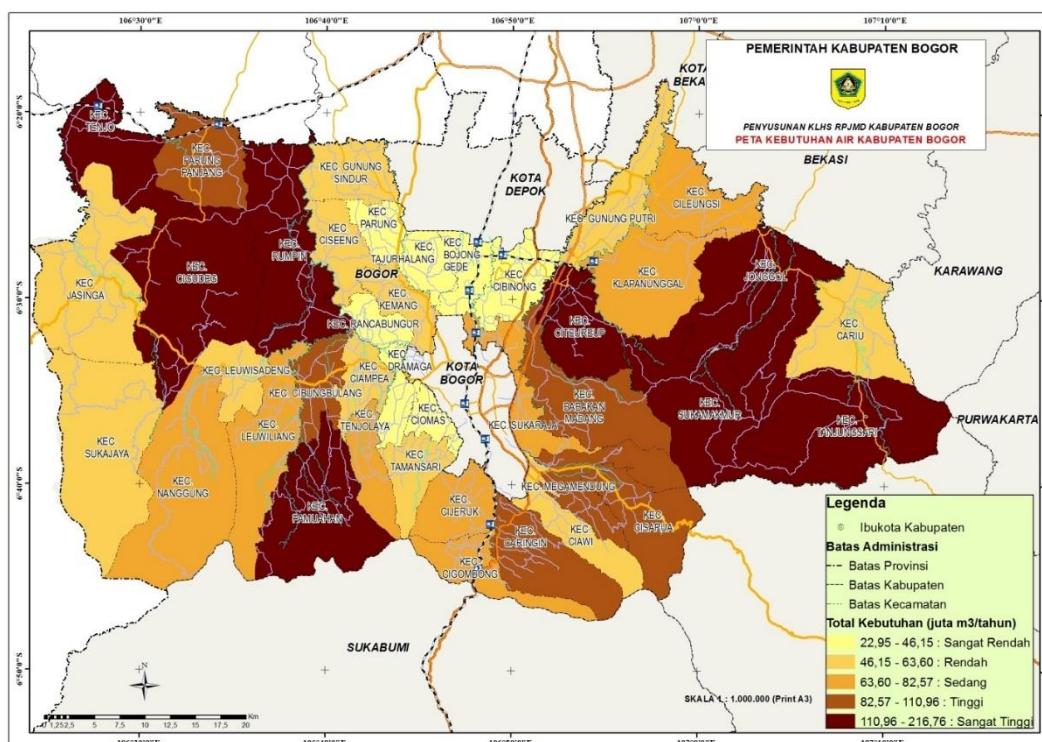
Sumber : Hasil Analisis, 2018

Wilayah kecamatan yang memiliki basis kegiatan ekonomi industri, perdagangan dan jasa mengalami defisit pangan seperti Kecamatan Cibinong, Citeureup, Cileungsi, Gunungputri, Bojonggede dan Parung. Sementara 9 kecamatan dengan surplus daya dukung pangan besar dengan nilai di atas 2 meliputi kecamatan Nanggung, Pamijahan, Tenjolaya, Sukamakmur, Cariu, Tanjungsari, Jonggol, Sukajaya dan Tenjo. Wilayah

kecamatan lain yang daya dukung pangannya surplus dengan angka antara 1 – 2, meliputi Leuwiliang, Leuwisadeng, Rumpin, Cigudeg, Jasinga dan Parungpanjang. Sementara berdasarkan hasil analisis daya dukung tahun 2023, terjadi penambahan jumlah kecamatan yang mengalami defisit pangan yaitu Kecamatan Rumpin dan Kecamatan Parungpanjang.

b. Daya Dukung Penyedia Air

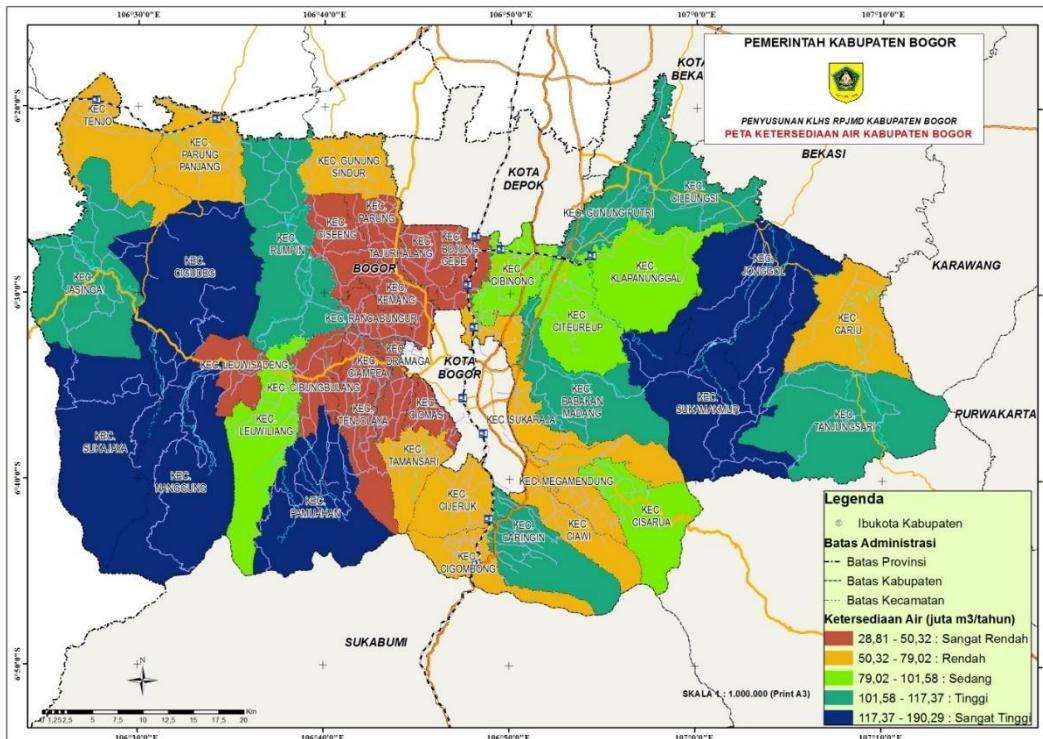
Perhitungan serta analisis daya dukung lingkungan dan ambang batas jasa ekosistem penyedia air, didahului dengan menghitung kebutuhan dan ketersediaan jasa ekosistem penyedia air. Sumber daya air yang digunakan berasal dari air permukaan. Setelah itu, kebutuhan air yang diperhitungkan adalah kebutuhan air domestik oleh penduduk, kebutuhan air untuk keperluan irigasi lahan pertanian tertentu, dan kebutuhan air untuk industri. Pola spasial kebutuhan air total di Kabupaten Bogor ditunjukkan pada Gambar 2.20, dapat dilihat bahwa kebutuhan paling besar tersebar di sebagian besar wilayah perkabupatenan Kabupaten Bogor yaitu pada Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Tanjungsari, dan Kecamatan Jonggol.



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023

Gambar 2.20

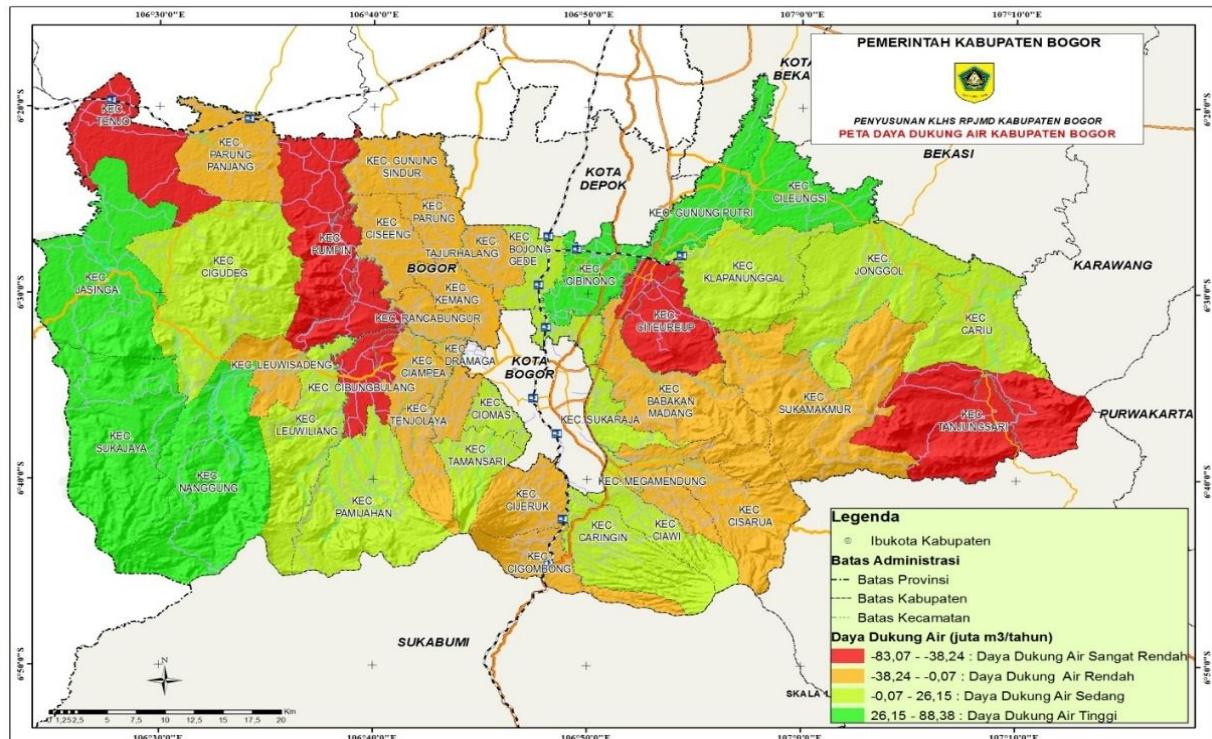
Kebutuhan air bersih di Kabupaten Bogor tahun 2017



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023

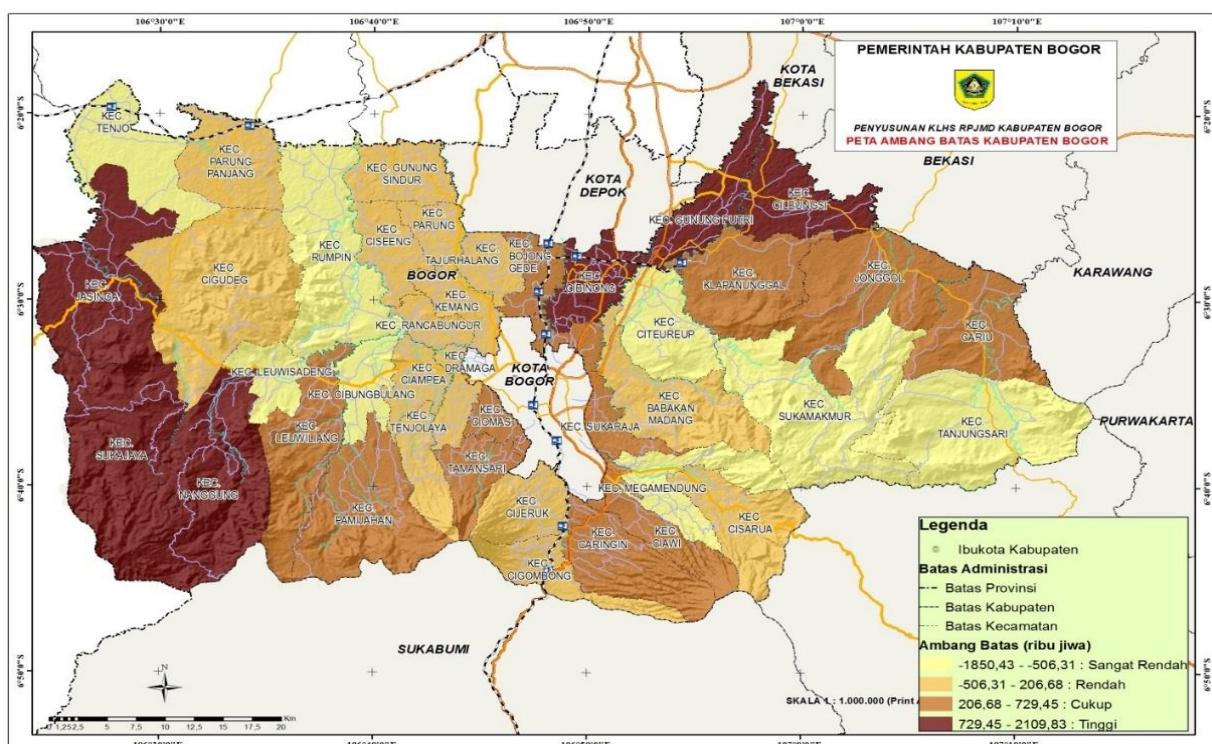
Gambar 2.21
Ketersediaan air bersih di Kabupaten Bogor tahun 2017

Selisih ketersediaan air dapat bernilai negatif maupun positif, dengan ketersediaan air bernilai negatif menunjukkan bahwa kebutuhan air bersih suatu wilayah lebih besar dibandingkan ketersediaannya sehingga lingkungan hidup wilayah tersebut tidak mampu lagi mendukung kebutuhan air bersih penduduk di atasnya. Secara visual, selisih antara ketersediaan dengan kebutuhan air bersih di Kabupaten Bogor bernilai positif yang hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan air bersih di Kabupaten Bogor mampu mendukung kebutuhan penduduk Kabupaten Bogor akan air bersih seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.22 dan Tabel 2.19.



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023

Gambar 2.22
Peta selisih ketersediaan air bersih di Kabupaten Bogor Tahun



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023

Gambar 2.23
Pola Spasial Sebaran Ambang Batas Daya Dukung Air Kabupaten Bogor tahun 2017.

Berdasarkan hasil perhitungan ambang batas dapat disimpulkan bahwa daerah yang memiliki ambang batas tinggi berada di wilayah

kecamatan Nanggung, Kecamatan Sukajaya, dan Kecamatan Cibinong. Sedangkan ambang batas terendah tersebar di wilayah Kecamatan Tenjo dan Kecamatan Tanjungsari. Daerah dengan ambang batas rendah rentan terhadap kelangkaan air dimasa mendatang khususnya jika terdapat pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang signifikan serta adanya dampak perubahan iklim.

Tabel 2.19
Ketersediaan, kebutuhan, dan selisih air bersih per kecamatan di Kabupaten Bogor

No	Kecamatan	Ketersediaan (m ³ /tahun)	Kebutuhan domestik (m ³ /tahun)	Kebutuhan Lahan (m ³ /tahun)	Kebutuhan Industri (m ³ /tahun)	Selisih (m ³ /tahun)
1	Nanggung	165.095.636,31	3.820.236,00	70.026.454,96	3.924.344,07	87.324.601,29
2	Leuwiliang	93.745.026,00	5.359.017,60	62.228.394,59	4.116,45	26.153.497,36
3	Leuwisadeng	37.857.784,80	3.271.290,60	58.818.120,57	912.491,22	-25.144.117,59
4	Pamijahan	151.185.029,27	6.216.227,40	134.205.467,14	396.232,27	10.367.102,46
5	Cibungbulang	48.877.349,54	5.862.411,00	84.205.695,18	38.199,04	-41.228.955,68
6	Ciampea	46.101.765,38	7.029.330,60	54.998.974,23	1.338.642,36	-17.265.181,81
7	Tenjolaya	47.583.636,28	2.587.090,80	60.890.762,99	3.939.453,24	-19.833.670,74
8	Dramaga	38.182.135,75	4.867.012,20	41.221.847,77	38.157,65	-7.944.881,87
9	Ciomas	43.270.787,49	7.920.047,40	14.275.980,75	763.669,31	20.311.090,03
10	Tamansari	64.388.177,14	4.595.145,60	45.188.302,39	884.547,13	13.720.182,02
11	Cijeruk	75.386.742,30	3.853.918,20	72.963.041,39	309.224,81	-1.739.442,10
12	Cigombong	73.616.444,18	4.541.622,00	61.729.901,32	9.423.984,03	-2.079.063,17
13	Caringin	113.752.763,95	5.506.185,60	85.159.824,11	132.111,13	22.954.643,10
14	Ciawi	65.319.079,43	5.143.302,60	47.986.559,16	26.310,15	12.162.907,52
15	Cisarua	89.478.102,51	5.458.093,20	84.069.870,79	59.218,29	-109.079,77
16	Megamendung	69.469.685,98	4.715.858,40	82.604.355,09	12.743.450,75	-30.593.978,27
17	Sukaraja	76.582.363,50	9.005.236,20	61.332.918,90	24.325,17	6.219.883,23
18	Babakan Madang	108.676.720,10	5.462.692,20	96.044.155,49	9.461.654,81	-2.291.782,40
19	Sukamakmur	190.297.411,83	3.484.158,60	211.667.463,93	1.612.107,86	-26.466.318,56
20	Cariu	79.023.907,57	2.011.339,80	58.875.550,05	148.897,05	17.988.120,68
21	Tanjungsari	112.946.016,83	2.270.679,60	177.751.772,79	60.909,89	-67.137.345,46
22	Jonggol	174.271.438,00	6.319.945,80	155.711.941,52	622.687,73	11.616.862,96
23	Cileungsi	117.377.611,75	15.216.733,20	49.191.559,12	7.883.984,85	45.085.334,57
24	Klapanunggal	101.580.567,02	5.309.348,40	77.225.948,38	35.007,82	19.010.262,41
25	Gunungputri	108.848.571,37	19.871.884,80	40.192.507,50	340.167,22	48.444.011,85
26	Citeureup	91.761.785,80	10.139.349,60	125.231.234,25	414.789,32	-44.023.587,37
27	Cibinong	92.677.419,51	18.703.213,20	18.849.076,16	254.780,94	54.870.349,21
28	Bojonggede	50.325.884,13	14.740.758,60	23.623.166,67	6.158,38	11.955.800,47
29	Tajurhalang	42.957.682,97	5.399.313,60	40.739.643,22	17.826,63	-3.199.100,48
30	Kemang	44.865.450,19	4.886.065,20	51.231.571,78	2.424.065,33	-13.676.252,11
31	Rancabungur	28.815.212,82	2.376.588,00	35.179.055,50	218.499,84	-8.958.930,52
32	Parung	37.410.320,37	6.271.021,20	28.673.740,57	4.346.647,30	-1.881.088,70
33	Ciseeng	45.137.540,55	5.001.916,20	45.901.724,01	60.381,65	-5.826.481,31
34	Gunungsindur	61.663.084,38	5.774.504,40	55.899.923,47	62.080,41	-73.423,90
35	Rumpin	113.028.075,97	6.152.367,00	143.557.269,70	1.560.077,12	-38.241.637,85
36	Cigudeg	143.562.782,57	5.517.792,60	134.559.252,68	74.870,54	3.410.866,76
37	Sukajaya	148.687.972,74	2.532.691,20	57.166.220,10	608.717,41	88.380.344,02
38	Jasinga	108.918.690,65	4.231.649,40	59.068.381,43	303.954,22	45.314.705,59
39	Tenjo	60.119.583,89	3.140.372,40	139.845.639,20	212.773,58	-83.079.201,29
40	Parungpanjang	72.306.613,46	5.750.983,80	84.090.396,76	939,98	-17.535.707,08
Total		3.435.152.854,271	250.317.394,20	3.032.183.665,61	65.690.456,95	86.961.337,51

Sumber: Hasil Analisis, 2019

c. Daya Tampung Beban Pencemar

Wilayah Kabupaten Bogor terbagi dalam lima DAS terpanjang di Kabupaten Bogor yaitu DAS Cisadane, DAS Ciliwung, DAS Cidurian, DAS Cikeas dan DAS Cileungsi. Sungai-sungai utama di Kabupaten Bogor yaitu Sungai Ciliwung, Sungai Cisadane, Sungai Cikeas, Sungai Cipaeh, Sungai Cileungsi, Sungai Cijere, Sungai Ciluar, Sungai Kali Angke, Sungai Kali

Baru, Sungai Cikaniki, Sungai Cipamingkis dan Sungai Cibeet. Sungai tersebut dimanfaatkan sebagai penyuplai air untuk keperluan irigasi. Selain itu, digunakan sebagai sumber air bersih untuk kegiatan sehari-hari seperti minum, memasak, mencuci dan mandi.

Akumulasi bahan pencemar pada DAS Ciliwung dan DAS Cisadane mengubah kondisi fisik maupun kimia dari air sungai sehingga kehidupan dalam air tergantung pada kondisi dasar aliran. Hal tersebut berdampak pada keanekaragaman ekosistem air berkurang, dan terjadi ketidakseimbangan ekologi lingkungan karena tidak semua spesies toleran dengan perubahan lingkungan.

Pemantauan kualitas air sungai dapat diketahui dari beberapa parameter, diantaranya parameter BOD, COD, DO, total fosfat, fecal coliform, TSS, dan lain-lain.

Beberapa parameter seperti BOD, H₂S, *Chlorin bebas*, COD nilainya telah melampaui baku mutu artinya beban limbah domestik dan industri cukup tinggi terhadap pencemaran air sungai. Perubahan nilai parameter kualitas air sungai pada tahun 2015 dan nilai parameter air sungai pada tahun 2016 cenderung sama, artinya beberapa parameter kunci telah melampaui baku mutu dan paramater lainnya masih di bawah baku mutu.

Aktivitas domestik dan industri disepanjang sungai serta adanya dinamika aliran menimbulkan perubahan kualitas dan kuantitas sungai secara signifikan. Semakin tinggi aktivitas domestik dan industri disepanjang sungai, maka perubahan kualitas air akan semakin signifikan.

Sejalan dengan kegunaan dan fungsi sungai sebagai sumber air baku air bersih, obyek wisata, saluran drainase makro perkotaan dan sebagai ekosistem yang harus dilestarikan, maka diperlukan upaya untuk menjaga kuantitas, kontinuitas, dan kualitas, sehingga dilakukan pemantauan sungai di Kabupaten Bogor secara periodik. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air pada beberapa sungai di Kabupaten Bogor menunjukkan *trend* peningkatan beberapa parameter fisik maupun kimia air.

Parameter TSS yang tidak sesuai baku mutu terdapat pada Sungai Cikeas, Sungai Cipaeh, Sungai Cileungsi, Sungai Cijere, Sungai Cikaniki, dan Sungai Cipamingkis. Parameter Sulfida yang tidak sesuai baku mutu terdapat pada Sungai Cikeas, Sungai Cipaeh, dan Sungai Cibeet. Parameter Klorin Bebas yang tidak sesuai baku mutu terdapat pada Sungai Cikeas,

Sungai Cileungsi, Sungai Cijere, Sungai Ciluar, Sungai Cikaniki, dan Sungai Cibeet.

Parameter Nitrit yang tidak sesuai baku mutu terdapat pada Sungai Cikeas, Sungai Cipaeh, Sungai Cileungsi, Sungai Ciluar, dan Sungai Kali Angke. Parameter Oksigen Terlarut (DO) yang tidak sesuai baku mutu terdapat pada Sungai Cikeas, Sungai Cipaeh, Sungai Cileungsi, Sungai Cijere, Sungai Ciluar, Sungai Kali Baru, Sungai Cikaniki, Sungai Cipamingkis, dan Sungai Cibeet.

Parameter Tembaga yang tidak sesuai baku mutu terdapat pada Sungai Cikeas. Parameter BOD yang tidak sesuai baku mutu terdapat pada Sungai Cikeas, Sungai Cipaeh, Sungai Cileungsi, Sungai Cijere, Sungai Ciluar, Sungai Kali Angke, Sungai Kali Baru, Sungai Cikaniki, Sungai Cipamingkis, dan Sungai Cibeet. Parameter COD yang tidak sesuai baku mutu terdapat pada Sungai Cikeas, Sungai Cipaeh, Sungai Cileungsi, Sungai Cijere, Sungai Ciluar, Sungai Kali Angke, Sungai Kali Baru, Sungai Cikaniki, Sungai Cipamingkis, dan Sungai Cibeet. Parameter Detergen yang tidak sesuai baku mutu terdapat pada Sungai Cipaeh, Sungai Cileungsi, Sungai Kali Baru, dan Sungai Cibeet.

Parameter Minyak dan Lemak yang tidak sesuai baku mutu terdapat pada Sungai Cileungsi. Parameter Seng yang tidak sesuai baku mutu terdapat pada Sungai Ciluar. Parameter Phenol yang tidak sesuai baku mutu terdapat pada Sungai Kali Angke dan Sungai Cipamingkis. Parameter Kromium Heksa yang tidak sesuai baku mutu terdapat pada Sungai Cileungsi.

Parameter Mercury yang tidak sesuai baku mutu terdapat pada Sungai Cikaniki. Parameter Sianida yang tidak sesuai baku mutu terdapat pada Sungai Cipamingkis. Parameter Total *Coliform* yang tidak sesuai baku mutu terdapat pada Sungai Kali Baru. Pada Tabel di bawah ini dapat dilihat parameter fisika dan biologi kualitas air sungai di Kabupaten Bogor, sebagai berikut.

Tabel 2.20
Kualitas Air Sungai Berdasarkan Parameter Fisika dan Biologi di Kabupaten Bogor Tahun 2016

No	Parameter	Nama Sungai									
		Cikeas	Cipaeah	Cileungsi	Cijere	Ciluar	Kali Angke	Kali Baru	Cikaniki	Cipamingkis	Cibeet
	Fisika										
1	TSS	***	***	***	***				***	***	
2	Sulfida	***	***								***
3	Klorin Bebas	***		***	***	***			***		
4	Nitrit	***	***	***		***	***				
5	Oksigen terlarut (DO)	***	***	***		***		***	***		***
6	Tembaga	***									
7	BOD	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
8	COD	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
9	Deterjen		***	***				***			
10	Minyak dan Lemak			***							
11	Seng										
12	Phenol						***				
13	Kromium Heksa										
14	Mercury										
15	Sianida										
16	Sulfida										
	Biologi										
17	Total Coliform							***			

Keterangan :*** = tidak sesuai baku mutu.

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, 2017

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Sesuai amanat Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, data yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan adalah data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah, sehingga data yang disajikan dalam aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum akan sama dengan yang dikelola dalam SIPD.

Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui kondisi kesejahteraan di Kabupaten Bogor adalah melalui pengukuran pencapaian indikator-indikator yang tertuang dalam Permendagri 86 tahun 2017. Komponen-komponen indikator tersebut yaitu:

➤ Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan di Kabupaten Bogor sampai dengan tahun 2018 mencapai Rp. 148,96 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 6,21 persen dari tahun sebelumnya. Nilai dan kontribusi sektor usaha dalam PDRB setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, untuk melihat perkembangan nilai dan kontribusi sektor usaha dalam PDRB periode tahun 2013-2018 disajikan pada Tabel 2.15.

Dari tabel 2.21. dapat dijelaskan bahwa PDRB Kabupaten Bogor atas harga konstan setiap tahunnya mengalami peningkatan yaitu Rp. 110,68 triliun pada tahun 2013, Rp. 117,34 triliun pada tahun 2014, Rp. 124,48 triliun pada tahun 2015, Rp. 132,08 triliun pada tahun 2016, Rp. 140,25 triliun pada tahun 2017, terus meningkat menjadi Rp 148,96 triliun pada tahun 2018.

**Tabel 2.21
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bogor
Tahun 2013-2018 atas Dasar Harga Konstan (Triliun)**

No.	Sektor	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6,00	5,43	6,15	5,24	6,40	5,14	6,80	5,15	7,12	5,07	7,35	4.93
2.	Pertambangan dan Penggalian	3,50	3,16	3,60	3,07	3,60	2,89	3,52	2,66	3,60	2,57	3,66	2.46
3.	Industri Pengolahan	61,61	55,6	64,79	55,22	68,24	54,82	71,93	54,46	75,97	54,17	80,13	53.79

No.	Sektor	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
		(Rp)	%										
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,21	0,19	0,22	0,19	0,21	0,17	0,197	0,15	0,198	0,14	0,20	0.13
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,11	0,13	0,11	0,14	0,11	0,15	0,11	0,16	0,11	0,17	0.11
6.	Konstruksi	9,22	8,33	10,22	8,71	11,17	8,98	12,26	9,29	13,20	9,42	14,49	9.73
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,41	13,02	15,14	12,90	15,88	12,76	17,08	12,93	18,30	13,05	19,62	13.17
8.	Transportasi dan Pergudangan	3,20	2,90	3,47	2,95	3,81	3,06	4,09	3,10	4,45	3,17	4,18	3.23
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,66	2,41	2,81	2,40	3,04	2,44	3,29	2,49	3,55	2,53	3,79	2.55
10.	Informasi dan Komunikasi	2,02	1,83	2,39	2,04	2,80	2,25	3,05	2,31	3,35	2,39	3,70	2.48
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,57	0,51	0,59	0,50	0,63	0,51	0,66	0,50	0,70	0,50	0,75	0.50
12.	Real Estate	0,91	0,82	0,98	0,83	1,04	0,84	1,11	0,84	1,15	0,82	1,18	0.79
13.	Jasa Perusahaan	0,22	0,19	0,23	0,20	0,25	0,20	0,27	0,20	0,29	0,20	0,31	0.21
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,92	1,74	1,93	1,64	2,05	1,65	2,14	1,62	2,23	1,59	2,35	1.58
15.	Jasa Pendidikan	1,82	1,64	2,14	1,82	2,37	1,90	2,46	1,87	2,69	1,92	2,89	1.94
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,46	0,42	0,56	0,48	0,65	0,53	0,70	0,53	0,74	0,52	0,79	0.53
17.	Jasa lainnya	1,82	1,65	1,99	1,70	2,18	1,76	2,36	1,78	2,55	1,82	2,77	1.86
PDRB		110,68		117,34		124,48		132,08		140,25		148,96	

Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

Secara umum kontribusi sektor dalam PDRB harga konstan relatif tetap atau tidak berubah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Beberapa sektor yang tumbuh sepanjang tahun adalah sektor konstruksi, Sektor Transportasi dan Pergudangan, Sektor Informasi dan Komunikasi, serta Sektor Jasa lainnya. Sementara itu sektor yang relatif turun sepanjang tahun adalah sektor Pertambangan dan Penggalian serta sektor Industri Pengolahan, sektor Pengadaan Listrik dan Gas. Kontribusi tertinggi terhadap PDRB Kabupaten Bogor atas dasar harga konstan tahun 2013 untuk tahun 2018 adalah sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 53,79 persen, sedangkan yang terkecil kontribusi sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku di Kabupaten Bogor pada tahun 2018 mencapai Rp. 221,55 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 9,72 persen dari tahun sebelumnya (Tabel 2.22).

Tabel 2.22
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bogor
Tahun 2013-2018 atas Dasar Harga Berlaku (Triliun)

No .	Sektor	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
		(Rp)	%										
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7,46	5,49	8,15	5,39	9,09	5,41	9,95	5,39	9,09	5,28	11.41	5.15
2.	Pertambangan dan Penggalian	4,11	3,02	4,53	2,99	4,71	2,80	5,18	2,80	5,65	2,80	6.15	2.77
3.	Industri Pengolahan	75,30	55,41	83,23	55,02	92,00	54,73	99,94	54,12	108,43	53,70	117.99	53.26
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,18	0,14	0,21	0,14	0,23	0,14	0,24	0,13	0,26	0,13	0.28	0.13
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,14	0,10	0,15	0,10	0,17	0,10	0,19	0,10	0,21	0,10	0.24	0.11
6.	Konstruksi	11,59	8,53	13,86	9,16	15,47	9,20	17,63	9,55	19,39	9,60	22.01	9.93
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,79	13,83	20,16	13,33	21,88	13,01	24,18	13,09	26,83	13,29	29.72	13.42
8.	Transportasi dan Pergudangan	4,09	3,01	4,80	3,17	6,01	3,58	6,86	3,71	7,56	3,74	8.39	3.79
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,40	2,50	3,81	2,52	4,29	2,55	4,79	2,59	5,30	2,63	5.79	2.62
10.	Informasi dan Komunikasi	2,02	1,49	2,38	1,57	2,79	1,66	3,08	1,67	3,55	1,76	4.06	1.83
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,66	0,49	0,72	0,48	0,81	0,48	0,93	0,50	1,04	0,52	1.15	0.52
12.	Real Estate	1,10	0,81	1,21	0,80	1,32	0,79	1,44	0,78	1,57	0,78	1.68	0.76
13.	Jasa Perusahaan	0,24	0,18	0,27	0,18	0,31	0,18	0,34	0,19	0,38	0,19	0.43	0.19
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,21	1,62	2,35	1,55	2,72	1,62	2,99	1,62	3,31	1,64	3.65	1.65
15.	Jasa Pendidikan	2,02	1,48	2,48	1,64	2,86	1,70	3,11	1,68	3,47	1,72	3.88	1.75
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,52	0,38	0,62	0,41	0,79	0,47	0,89	0,48	0,98	0,49	1.06	0.48
17.	Jasa lainnya	2,07	1,52	2,35	1,55	2,65	1,57	2,95	1,60	3,33	1,65	3.66	1.65
	PDRB	135,88		151,28		168,09		184,68		201,93		221.55	

Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

Dari Tabel 2.22 sektor ekonomi yang menunjukkan Nilai Tambah Bruto (NTB) terbesar pada tahun 2018 adalah sektor industri pengolahan yang mencapai Rp. 117,99 triliun atau memiliki andil sebesar 53,26 persen terhadap total PDRB. Berikutnya sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp.29,72 triliun (13,42 persen). Sedangkan sektor yang memiliki peranan relatif kecil adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar Rp. 0,24 triliun (0,11 persen).

Secara keseluruhan kontribusi semua sektor dalam PDRB harga berlaku terus meningkat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.

Tabel 2.23
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bogor Atas Dasar
Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2013-2018

No.	Sektor	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	18,76	6,62	9,33	2,40	11,46	4,09	9,50	6,26	7,15	4,59	6.97	3.27
2.	Pertambangan dan Penggalian	4,83	2,88	10,26	2,88	3,8	-0,03	10,01	- 2,38	9,07	2,45	8.85	1.55
3.	Industri Pengolahan	9,31	4,36	10,54	5,17	10,53	5,32	8,64	5,41	8,49	2,45	8.81	5.48
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	-2,77	3,92	14,40	5,73	9,58	-5,17	4,12	- 4,19	10,23	0,48	6.55	0.97
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11,91	3,75	4,12	3,25	15,59	9,88	11,42	7,36	12,00	6,61	13.51	5.65
6.	Konstruksi	21,32	10,85	19,57	10,94	11,64	9,29	13,96	9,76	9,99	7,66	13.51	9.71
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,93	9,94	7,32	5,04	8,50	4,91	10,51	7,57	10,97	7,15	10.78	7.20
8.	Transportasi dan Pergudangan	24,1	10,80	17,32	8,17	25,25	9,84	14,09	7,44	10,17	8,81	11.04	8.11
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16,70	9,50	12,24	5,49	12,65	8,20	11,50	8,20	10,80	7,78	9.25	6.99
10.	Informasi dan Komunikasi	10,64	9,57	17,91	18,38	17,08	17,21	10,51	8,86	15,12	9,87	14.42	10.28
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	16,55	10,54	9,20	3,74	12,84	7,60	14,17	4,84	12,22	5,14	10.21	6.61
12.	Real Estate	15,24	5,83	9,75	7,32	9,73	6,48	8,98	6,42	8,47	3,65	7.02	3.04
13.	Jasa Perusahaan	12,46	8,08	10,78	6,58	13,96	8,15	11,53	7,55	12,20	7,45	11.72	8.39
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,43	-2,12	6,41	0,19	15,97	6,46	9,73	4,23	10,71	4,31	10.34	5.46
15.	Jasa Pendidikan	17,55	10,35	22,86	17,81	15,47	10,66	8,55	4,08	11,76	9,34	11.87	7.24
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,62	6,68	21,12	20,15	25,96	17,35	13,05	6,40	10,01	5,70	8.18	7.72
17.	Jasa lainnya	10,59	8,03	13,50	9,35	12,77	9,55	11,53	7,83	12,79	8,32	10.02	8.36
	PDRB	12,93	6,14	11,33	6,01	11,11	6,09	9,87	6,10	9,34	6,19	9.72	6.21

Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

Sektor usaha yang memiliki proporsi laju pertumbuhan terbesar pada struktur perekonomian Kabupaten Bogor tahun 2018 (berdasarkan harga konstan) adalah sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Kontruksi, sektor Jasa Perusahaan, sektor Jasa lainnya, sektor Transportasi dan Perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat

Kabupaten Bogor didominasi oleh sektor sekunder dan tersier seperti sektor Informasi dan Komunikasi, yang mencapai pertumbuhan 9,57 persen pada tahun 2013, tahun 2014 sebesar 18,38 persen, 17,21 persen pada tahun 2015, tahun 2016 sebesar 8,86, 9,87 persen pada tahun 2017 serta pada tahun 2018 sebesar 10,28 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi dengan penerapan SNA 2008 dan tahun dasar 2010, berdasarkan *time series* dari tahun 2012-2018, terlihat bahwa secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor berada pada kisaran 5-6 persen. Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara teknis merupakan pertumbuhan dari volume produk yang dihasilkan pada tahun 2013 mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif yang ditandai oleh pertumbuhan sebesar 6,14%, atau meningkat 0,13% dari Tahun 2012 sebesar 6,01%. Namun demikian pertumbuhan tersebut masih terpaut 0,19% di bawah Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat sebesar 6,33% dan terpaut 0,43% diatas LPE Nasional sebesar 5,71%. Untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 LPE Kabupaten Bogor diatas Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat dan Nasional. Kemudian pada Tahun 2018 capaian LPE Kabupaten Bogor sebesar 6,21% sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.24.

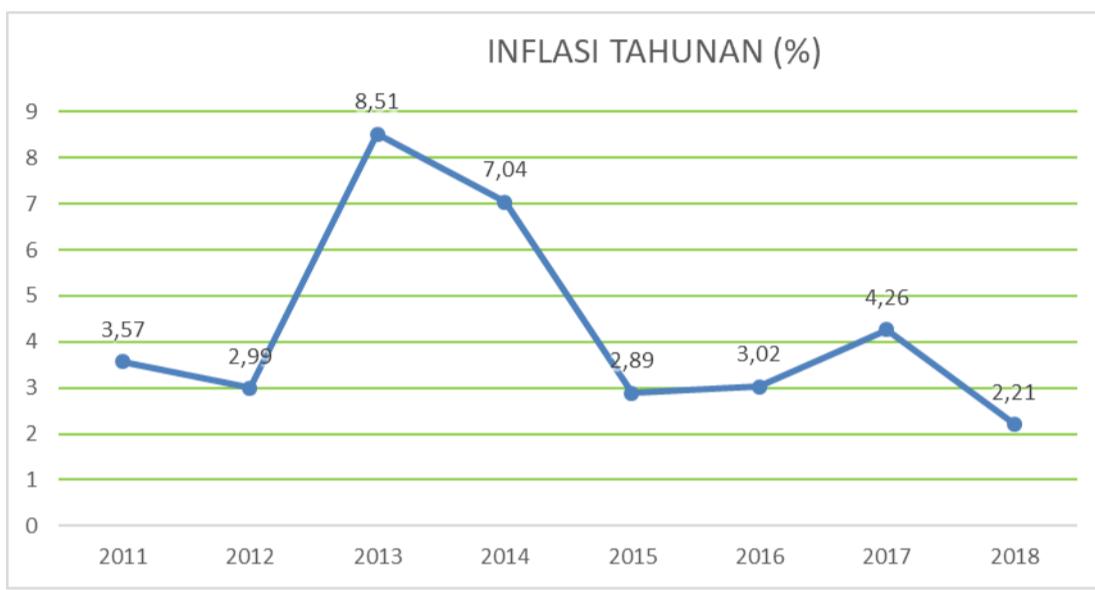


Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018

Gambar 2.24
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2012-2018 (%)

➤ Laju Inflasi

Pada tahun 2013 terjadi inflasi Kabupaten Bogor sebesar 8,51 persen, naik dari inflasi tahun sebelumnya yang sebesar 2,99 persen, walaupun meningkat namun nilai ini masih digolongkan sebagai inflasi ringan (di bawah 10 persen per tahun). Pada tahun 2014 inflasi kembali turun menjadi 7,04 persen dan pada tahun 2015 turun lagi menjadi 2,89 persen, sedangkan mulai tahun 2016 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan berturut-turut sebesar 3,02 persen dan 4,26 persen serta untuk tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 2,21. (Gambar 2.25).



Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018

**Gambar 2.25
Nilai Inflasi Rata-rata Kabupaten Bogor Tahun 2011-2018**

Inflasi Kalender Januari-September 2018 di Kabupaten Bogor hanya sebesar 2,58 persen hampir sama dengan inflasi Gabungan 7 (tujuh) kota Jawa Barat yang sebesar 2,30 persen. Inflasi tertinggi di Kabupaten Bogor terjadi pada bulan Januari yaitu sebesar 0,83 persen sedangkan gabungan 7 (tujuh) kota di Jawa Barat tertinggi terjadi di bulan Januari juga yaitu sebesar 0,83 persen.

**Tabel 2.24
Inflasi Kabupaten Bogor dan Gabungan 7 Kota Jawa Barat periode Januari – September Tahun 2018 (2012=100)**

Kab/Kota	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Jan-Sept 2018	Jan-Sept 2017
Kab. Bogor	0,83	0,18	0,15	0,00	0,66	0,24	0,56	-0,13	-0,28	2,58	2,04
Gab Jawa Barat	0,83	0,36	0,29	-0,04	0,28	0,47	0,37	-0,01	-0,18	2,30	-1,04

Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018

Inflasi terendah di Kabupaten Bogor terjadi pada bulan September yaitu deflasi sebesar -0,28 persen sedangkan Gabungan 7 (Tujuh) kota di Jawa Barat terendah terjadi di bulan September yaitu deflasi sebesar -0,18 persen.

➤ PDRB per Kapita

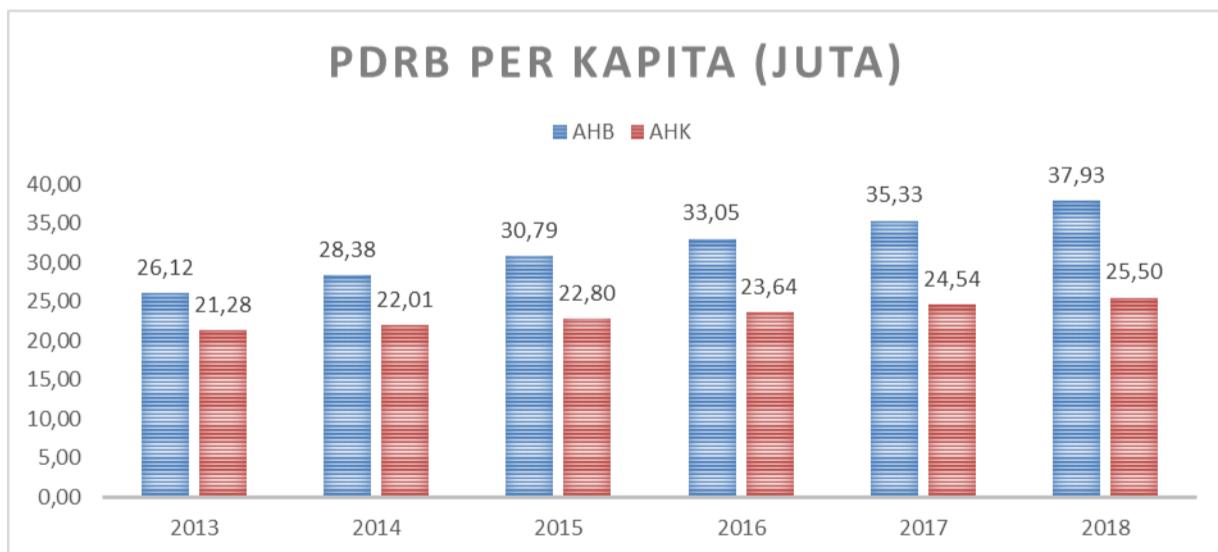
Indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro salah satunya adalah pendapatan per kapita per tahun. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. PDRB per kapita dapat dijadikan pendekatan untuk indikator pendapatan per kapita.

**Tabel 2.25
PDRB per Kapita Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018**

PDRB/ kapita	2013	2014	2015	2016	2017	2018
AHB	26.120.667,39	28.376.717,64	30.788.546,18	33.053.641,24	35.332.605,13	37.930.316,78
AHK	21.277.049,58	22.009.450,25	22.799.997,60	23.638.204,41	24.540.831,98	25.502.783,26

Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018

PDRB per kapita Kabupaten Bogor berdasarkan harga berlaku yang menggambarkan besarnya nilai tambah domestik bruto per penduduk secara nominal mampu tumbuh sebesar 45,21 persen dalam kurun waktu enam tahun dimana pada tahun 2018 diprediksi mencapai 37,93 juta rupiah. Gambar 2.14. memperlihatkan PDRB per kapita Kabupaten Bogor atas dasar harga berlaku dan harga konstan.



Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018

**Gambar 2.26
PDRB per Kapita Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 (Juta)**

Namun tidak demikian dengan tingkat pertumbuhan nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan yang menggambarkan pendapatan ril penduduk Kabupaten Bogor, dimana tingkat pertumbuhannya termasuk kecil yaitu hanya sekitar 19,86 persen dalam kurun waktu enam tahun terakhir dimana pada tahun 2018 mencapai 25,50 juta rupiah.

➤ Indeks Gini

Rasio Rasio Gini merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Rasio Gini diukur pada skala 0-1 dimana 0 menunjukkan tidak ada kesenjangan sosial dan angka 1 dimana tingkat kesenjangan sosial mencapai titik maksimal. Rasio Gini Kabupaten Bogor pada tahun 2013 dengan nilai 0,38 dan menurun pada tahun 2018 dengan nilai 0,34 (Tabel 2.26).

**Tabel 2.26
Indeks Gini Di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018**

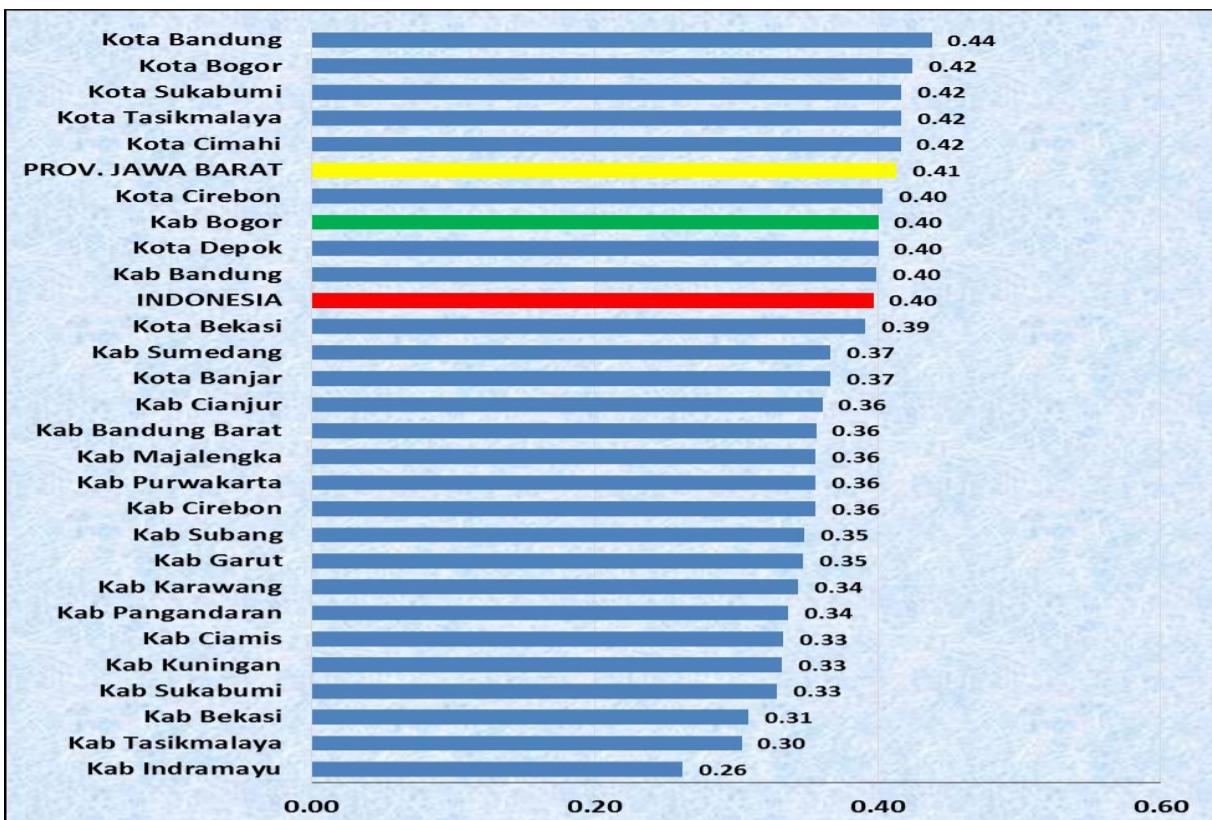
Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indeks Gini	0,38	0,39	0,42	0,40	0,40	0,34

Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018

Indeks Gini dengan nilai 0,40 sudah mendekati titik rawan, karena jika sudah berada pada level 0,5 gini ratio ini akan menimbulkan banyak kecemburuhan sosial di masyarakat, bahkan bisa berpotensi terjadinya kerusuhan yang artinya ada ketidakstabilan politik dan imbasnya ke ekonomi. Indikator *Gini Ratio* tidak bisa ditetapkan menjadi target tahunan, sebab akan membutuhkan waktu yang lama untuk mengubah koefisien *gini ratio*. Karena itu persentase penduduk di atas garis kemiskinan menjadi indikator yang bisa ditetapkan setiap tahun.

Gambar 2.27 menunjukkan sebaran gini rasio kabupaten/kota se Jawa Barat tahun 2016. Jika dilihat sebarannya se Jawa Barat, pada tahun 2016 angka gini ratio tertinggi terdapat di Kota Bandung (0,44), kemudian Kota Bogor (0,42) dan Kota Sukabumi 0,42. Sedangkan angka gini rasio terkecil terdapat di Kabupaten Indramayu (0,26), Kabupaten Tasikmalaya (0,30), Kabupaten Bekasi (0,31), Kabupaten Sukabumi (0,33) dan Kabupaten Kuningan (0,33).

Gini ratio Kabupaten Bogor (0,40) berada di atas Indonesia (0,40) dan dibawah Provinsi Jawa Barat (0,41).



Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2017

Gambar 2.27

Gini ratio menurut Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

➤ Indeks Ketimpangan Williamson

Untuk mengetahui ketimpangan pembangunan antar kecamatan yang terjadi pada suatu wilayah, dapat dianalisis dengan menggunakan indeks ketimpangan regional (*regional inequality*) yang dinamakan indeks ketimpangan Williamson.

Rumus indeks Williamson adalah:

$$I_w = \frac{\sqrt{\sum_i (y_i - \bar{y})^2 (\frac{f_i}{n})}}{\bar{y}}$$

Dimana:

I_w = nilai indeks Williamson

y_i = PDRB per kapita Kecamatan-i

\bar{y} = PDRB per kapita Kabupaten

f_i = Jumlah Penduduk Kecamatan-i

n= Jumlah Penduduk Kabupaten

i = 1,2,3,...,x

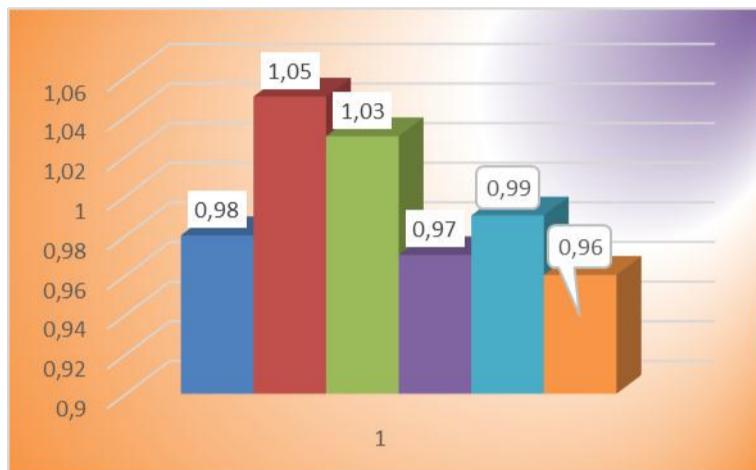
Kriteria penilainnya adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai I_w menjauhi 0 (nol), menunjukkan bahwa tingkat disparitas regional atau tingkat ketimpangan pembangunan yang

terjadi antar kecamatan di Kabupaten Bogor semakin besar (kemerataan antar kecamatan semakin memburuk)

2. Jika nilai I_w mendekati 0 (nol), menunjukkan bahwa tingkat disparitas regional atau tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi antar kecamatan di Kabupaten Bogor semakin kecil (kemerataan antar kecamatan semakin membaik)

Hasil penghitungan Indeks Williamson Kabupaten Bogor.



Sumber: Buku Saku Final Bappedalitbang Tahun 2018

**Gambar 2.28
Indeks Williamson Kabupaten Bogor 2013-2018**

Dari perhitungan yang dilakukan, didapatkan hasil dari indeks Williamson dari tahun 2013 hingga tahun 2018 menunjukkan angka sekitar 1. Hal ini menandakan tingginya ketidakmerataan pendapatan yang terjadi di Kabupaten Bogor. Nilai indeks Williamson yang melebihi nilai maksimum menurut teorinya ini, disebabkan adanya beberapa daerah yang memiliki *hyper PDRB* per kapita di atas PDRB per kapita Kabupaten Bogor dibandingkan daerah lainnya. Beberapa daerah ini adalah Kecamatan Klapanunggal, Cileungsi dan Citeureup. Tingginya PDRB per kapita yang sangat mencolok pada ketiga kecamatan ini, disebabkan sumbangan sektor-sektor dalam PDRB yang bersifat padat modal. Kategori padat modal tersebut adalah Kategori industri pengolahan. Hal ini terlihat pada tahun 2018, kategori industri pengolahan menyumbang sebesar 85,16 % dari total PDRB Kecamatan Klapanunggal. Sedangkan untuk Kecamatan Cileungsi pada tahun 2018, industri pengolahan menyumbang 77,65 % dari total PDRB Kecamatan Cileungsi dan kategori industri pengolahan, Kecamatan Citeureup memberikan kontribusi sebesar 75,70 % dari total PDRB Kecamatan Citeureup.

Secara makro, sumbangan sektor industri di Kabupaten Bogor menduduki peringkat pertama dalam PDRB 2018, dengan nilai sebesar

53,70%. Sumbangan PDRB yang sangat besar di sektor industri ini, ternyata tidak sebanding dengan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bogor. Dalam sektor industri hanya mampu menyerap 19,39% tenaga kerja di Kabupaten Bogor. Tingginya sumbangsih sektor padat modal (sektor industri) dengan sedikitnya menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan sektor lain yang padat karya, menjadi penyebab utama terjadinya kesenjangan pendapatan/disparitas pendapatan di Kabupaten Bogor. Hal ini dikarenakan sektor padat modal hanya terjadi di kecamatan tertentu, yang mampu menghasilkan PDRB per kapita yang sangat tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Sedangkan kecamatan lain lebih ke arah sektor yang dominan dalam menyerap tenaga kerja meskipun menyumbangkan nilai PDRB daerah yang kecil.

Dengan nilai PDRB yang tidak terlalu besar pada sektor ini, menyebabkan PDRB per kapita yang didapat di beberapa kecamatan di Kabupaten Bogor, tidak sebesar yang didapat pada kecamatan dengan sektor industri yang lebih berperan. Hal inilah yang menyebabkan adanya kesenjangan antar kecamatan di Kabupaten Bogor, yaitu adanya ketidakseimbangan pembangunan yang terjadi antardaerah. Dalam pandangan lain, nilai dari Indeks Williamson yang melebihi angka 1 ini, disebabkan ketidaksempurnaan suatu metode perhitungan dari indeks Williamson ini. Tidak adanya asumsi yang menyertai dalam suatu rumusan perhitungan indeks Williamson ini, menyebabkan indeks yang dihasilkan tidak bisa menghasilkan nilai antara 0 sampai 1.

➤ **Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan**

Perkembangan persentase penduduk di atas garis kemiskinan pada periode 2013-2018 tampak berfluktuasi dari tahun ke tahun seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018

Gambar 2.29
Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan di Kabupaten Bogor
Tahun 2013-2018

Persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bogor masih berada di atas Provinsi Jawa Barat, namun berada di bawah Nasional. Jika dilihat dari perubahan penurunan persentase jumlah penduduk miskin antara tahun 2016-2017, dapat dilihat bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Bogor menurun sebesar 0,35 persen. Provinsi Jawa Barat menurun sebesar 0,94 persen, dan nasional menurun sebesar 0,58 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Bogor dapat menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,35 persen, namun penurunan ini masih di bawah besarnya angka penurunan provinsi Jawa Barat dan Nasional.

➤ Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia sebagai insan dan sumberdaya pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dilakukan pada seluruh siklus hidup manusia. Upaya tersebut dilandasi oleh pertimbangan bahwa pembangunan manusia yang baik merupakan kunci bagi tercapainya kemakmuran bangsa. Selama periode 2013-2018 berbagai program yang telah dilaksanakan dapat meningkatkan sumberdaya manusia Kabupaten Bogor yang ditandai dengan meningkatnya kesehatan, kesejahteraan dan pendidikan masyarakat.

Gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan atas fokus kesejahteraan sosial dapat diketahui melalui IPM. Realisasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bogor mencapai 69,61 poin pada

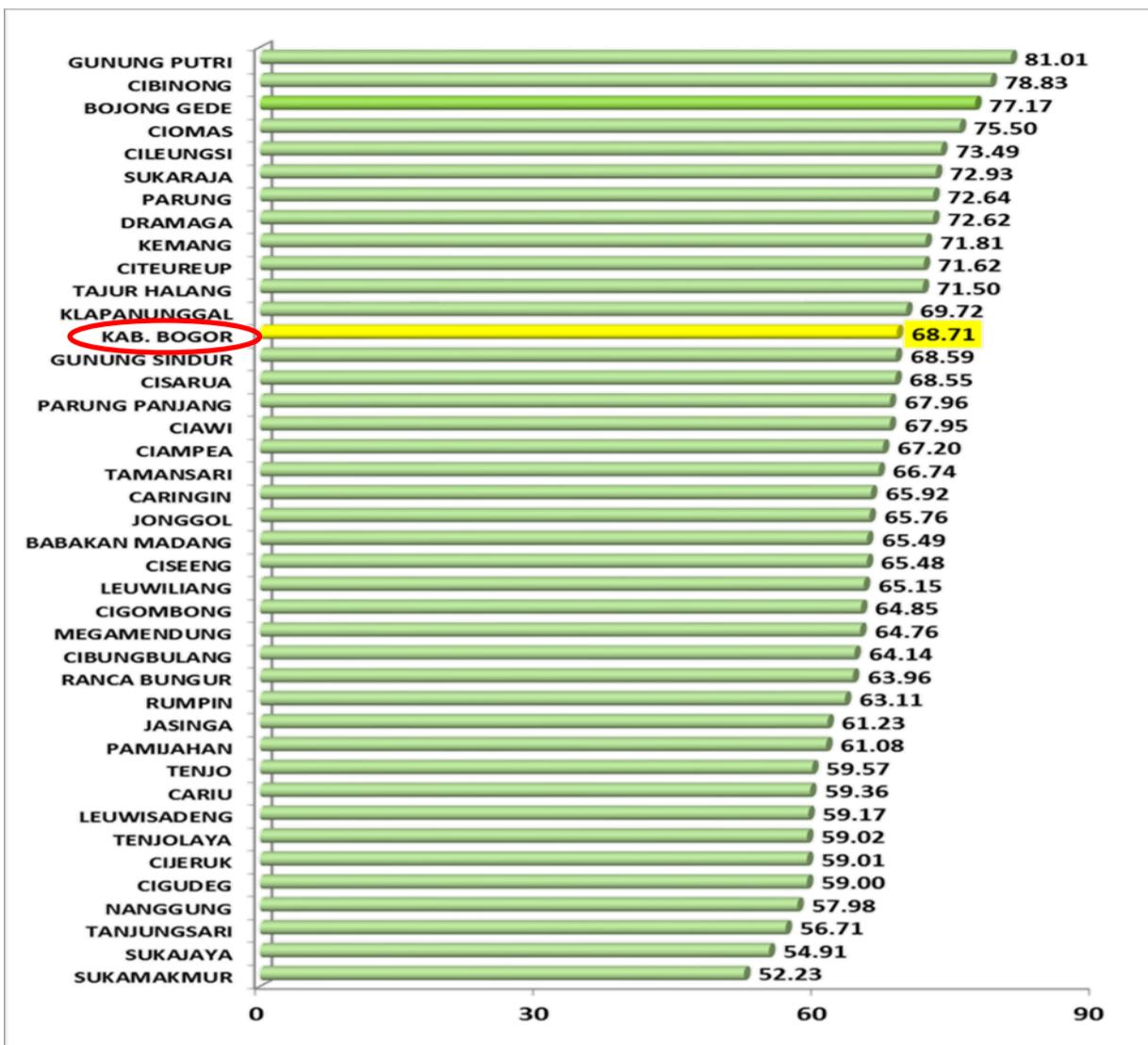
tahun 2018. Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasinya lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu sebesar 66,74. Hal ini disebabkan adanya peningkatan realisasi dari seluruh komponen IPM, baik komponen pendidikan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), kesehatan (angka harapan hidup) maupun komponen ekonomi (pengeluaran per kapita per tahun). Angka IPM sebesar 69,61 di atas, sesuai dengan klasifikasi UNDP termasuk dalam kelompok masyarakat sejahtera sedang/menengah. Realisasi komponen pembentuk IPM berdasarkan data BPS yaitu (Tabel 2.27) :

Tabel 2.27
Realisasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat
Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No	Indikator	Realisasi Kinerja					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Indeks Pembangunan Manusia (Komposit)	66,74	67,36	67,77	68,32	69,13	69,81
	Komponen IPM terdiri dari;						
	a Angka Harapan Hidup (AHH)	70,47	70,49	70,59	70,65	70,70	70,96
	b Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk 7 th +	11,68	11,81	11,83	12,05	12,43	12,55
	c Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk 25 th +	7,40	7,74	7,75	7,83	7,84	7,94
	d Pengeluaran per kapita per tahun (Rp ribu)	9.041	9.066	9.368	9.537	9.901	9.901

Sumber : IPM Kabupaten Bogor Tahun 2018

Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor tahun 2017, IPM tertinggi dicapai oleh Kecamatan Gunung Putri yaitu 81,01 poin, di atas IPM Kabupaten Bogor. Adapun kecamatan dengan capaian IPM terendah adalah Kecamatan Sukamakmur yaitu 52,23 poin. Capaian IPM tahun 2017 pada masing-masing kecamatan disajikan pada Gambar 2.30.



Sumber : IPM Kecamatan Kabupaten Bogor Tahun 2017

**Gambar 2.30
IPM Kecamatan Kabupaten Bogor Tahun 2017**

➤ **Harapan Lama Sekolah (HLS)**

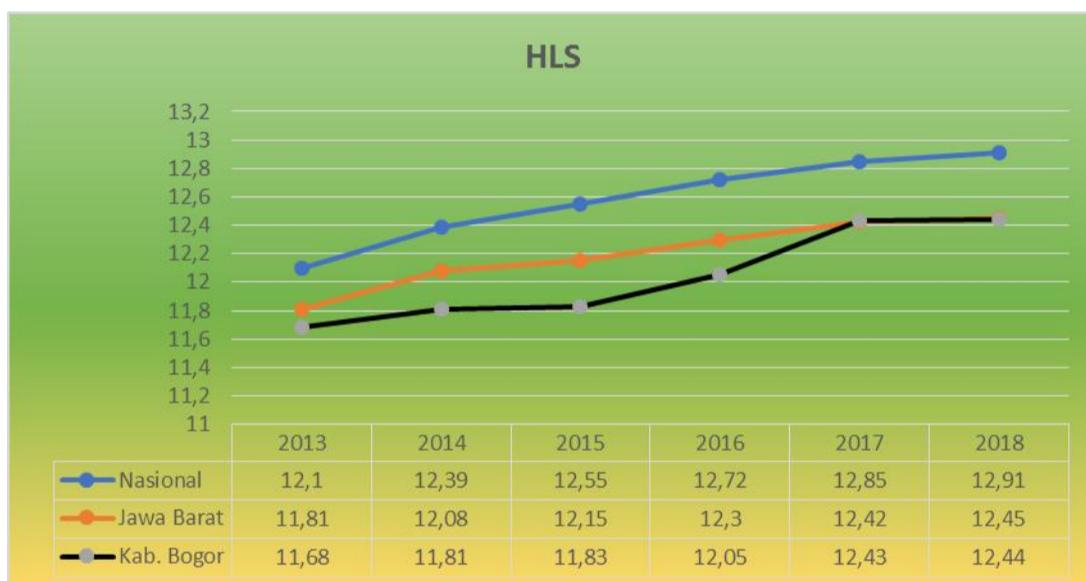
Aspek pendidikan yang menjadi perhatian dalam pembangunan manusia dicerminkan oleh HLS. HLS dihitung dari penduduk usia 7 tahun ke atas. Ini merupakan indikator yang mengukur input dari dimensi pengetahuan. HLS mengasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Tabel 2.28
Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,68	11,81	11,83	12,05	12,43	12,55

Sumber: IPM Kabupaten Bogor Tahun 2017

Tabel 2.22 menunjukkan HLS Kabupaten Bogor pada periode tahun 2013-2018 secara perlahan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini berarti selama kurun 2013 hingga 2018 Kabupaten Bogor mampu meningkatkan HLS sebesar 0,87 tahun atau rata-rata per tahun sebanyak 0,15 tahun. Sementara itu, tren peningkatan HLS dari tahun ke tahun dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Sumber: IPM Kabupaten Bogor Tahun 2018

Gambar 2.31
Perbandingan HLS Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Nasional

Berdasarkan data yang ada di dalam gambar 2.31 diketahui bahwa Capaian HLS penduduk usia 7 tahun ke atas tahun 2013 sebesar 11,68 tahun. Artinya, pada tahun 2013 penduduk Kabupaten Bogor berumur 7 tahun yang memasuki sekolah berpeluang harapan lama bersekolah mencapai 10,28 tahun atau setara SMA kelas 10. Pada tahun 2017 HLS Kabupaten Bogor mencapai 12,43 tahun. Meskipun setiap tahun HLS terus meningkat, namun HLS Kabupaten Bogor masih berada di bawah HLS Provinsi dan Nasional, kecuali tahun 2017 HLS Kabupaten Bogor lebih tinggi dari Provinsi. Selanjutnya pada Tahun 2018 capaian HLS Kabupaten Bogor sebesar 12,44 dengan posisi di bawah capaian Provinsi dan Nasional.

➤ Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Komponen pendidikan lainnya yaitu rata-rata lama sekolah (RLS). Pada penghitungan IPM metode baru cakupan usia untuk RLS mengalami pergeseran dari 15 tahun ke atas menjadi 25 tahun ke atas, tentunya ini mempengaruhi nilai IPM yang dihasilkan. Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama bersekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah. Ukuran ini mengatasi masalah kekurangan estimasi dari TPT yang tidak mengakomodir kelas tertinggi yang pernah dicapai individu, tetapi jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya. Sehingga nilai dari jumlah tahun bersekolah menjadi terlalu tinggi kelebihan estimasi atau bahkan terlalu rendah (underestimate).



Sumber: IPM Kabupaten Bogor Tahun 2018

Gambar 2.32

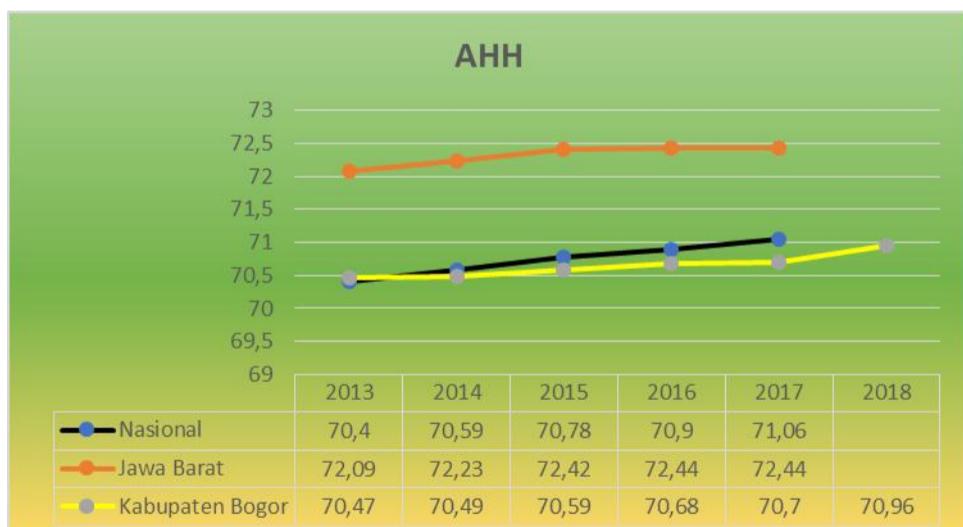
Perbandingan HLS Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Nasional

Berdasarkan data pada Gambar 2.32 ditunjukkan bahwa RLS Kabupaten Bogor tahun 2012-2017 cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012, RLS di Kabupaten Bogor hanya mencapai 7,27 tahun. Kemudian terus meningkat hingga mencapai 7,85 tahun pada tahun 2017. RLS kabupaten Bogor masih dibawah RLS Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2017 RLS Provinsi Jawa Barat sebesar 8,14 tahun.

Target rata-rata lama sekolah 2017 sebesar 7,80 sementara dengan realisasi 7,84, menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor telah melebihi target yang telah direncanakan sebesar 0,04. Jika dilihat dari tingkat pertumbuhan rata-rata lama sekolah, dengan RLS 2016 sebesar 7,83 dan RLS 2017 sebesar 7,84 menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan sebesar 0,13 artinya telah terjadi pertumbuhan RLS di Kabupaten Bogor >0 .

➤ **Angka Usia Harapan Hidup**

Angka Harapan Hidup Saat Lahir (e0) adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Perkembangan komponen-komponen IPM selama periode 2012-2017 cenderung mengalami peningkatan. Perkembangan AHH Kabupaten Bogor mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. AHH Kabupaten Bogor pada tahun 2012 mencapai 70,34 tahun, kemudian terus meningkat secara perlahan hingga pada tahun 2017 mencapai 70,68 tahun. Pertumbuhan angka harapan hidup penduduk Kabupaten Bogor sebesar 0,36, artinya telah terjadi pertumbuhan > 0 . Sementara jika dibandingkan dengan target AHH tahun 2017 sebesar 70,94 sedangkan realisasi tahun 2017 sebesar 70,70 artinya, realisasi lebih kecil dari target yang telah ditetapkan. Meskipun AHH setiap tahunnya terus meningkat AHH Kabupaten Bogor masih berada dibawah AHH Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Pertumbuhan AHH Kabupaten Bogor dapat dilihat pada Gambar 2.33.



Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor, 2018

Gambar 2.33
Angka Harapan Hidup Kabupaten Bogor 2013-2018

➤ **Persentase Balita Gizi Buruk**

Penanganan balita gizi buruk yang merupakan salah satu pelayanan layanan urusan bidang kesehatan salah satunya ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dalam penanganan balita gizi buruk. Hingga tahun 2017, jumlah balita gizi buruk sebanyak 0,0138 persen. Kemudian pada tahun 2018, jumlah balita gizi buruk sebesar 0,0185. Adapun perkembangan kondisi balita gizi buruk di Kabupaten Bogor dalam kurun waktu tahun 2012-2018 disajikan dalam Gambar 2.34.



Sumber : LKPJ Kabupaten Bogor Tahun 2018

**Gambar 2.34
Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Bogor 2012-2018**

➤ **Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah bagian dari penduduk usia kerja, 15 tahun ke atas yang mempunyai pekerjaan selama seminggu yang lalu, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panenan atau cuti. Di samping itu, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja.

Indikator ini mengukur jumlah angkatan kerja usia 15 tahun ke atas per jumlah penduduk usia kerja 15 - 64 tahun. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin tinggi kemampuan suatu daerah menyediakan akses bagi penduduk terhadap lapangan kerja, dan semakin tinggi pula kemampuan daerah tersebut untuk melaksanakan otonomi daerah yang diamanatkan oleh aturan perundang-undangan. Adapun tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bogor pada tahun 2013-2018 sebagai berikut:

Tabel 2.29
Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka
di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No.	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	63,60	61,86	60,14	59,75	64,07	62,71
2.	Tingkat pengangguran terbuka (%)	7,87	7,65	7,48	9,62	9,55	9,08

Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Bogor relatif fluktuatif. Pada tahun 2013 nilai TPAK Kabupaten Bogor 63,60 persen dan menurun pada tahun 2014 menjadi 61,86 persen. Pada tahun 2015 nilai TPAK menjadi 60,14 persen. Sedangkan di tahun 2016 turun menjadi 59,75 persen serta di tahun 2017 kembali naik menjadi 64,07 persen, dan pada tahun 2018 menjadi 62,71 persen.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bogor relatif fluktuatif sepanjang tahun 2013-2017. Pada tahun 2013 tingkat pengangguran terbuka 7,87 persen dan menurun pada tahun 2014 menjadi 7,65 persen. Pada tahun 2015 tingkat pengangguran terbuka 7,48 persen. Sedangkan tahun 2016 naik menjadi 9,62 persen serta di tahun 2017 turun kembali menjadi 9,55 persen dan pada tahun 2018 menjadi 9.08.

➤ Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Kabupaten Bogor memiliki potensi pertanian yang cukup besar, hal ini dapat dilihat dari persentase kontribusi sektor pertanian terhadap capaian PDRB Kabupaten Bogor.

Tabel 2.30
Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap
PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No.	URAIAN	Dasar	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase kontribusi sektor pertanian (total) terhadap PDRB (%)	ADH Berlaku	4,10	3,96	3,81	3,82	3,74	3,65
		ADH Konstan	4,54	4,38	4,31	3,57	3,54	3,43

Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2018

Persentase kontribusi sektor pertanian peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bogor berdasarkan harga berlaku pada tahun 2018 mencapai 3,65 persen dan berdasarkan harga konstan mencapai 3,43 persen. Persentase kontribusi sektor pertanian peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bogor pada tahun 2018 baik berdasarkan harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan kontribusi sektor pertanian peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB

Kabupaten Bogor tahun 2013. Di mana pada tahun 2013 persentase kontribusi sektor pertanian peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bogor berdasarkan harga berlaku mencapai 4,10 persen dan berdasarkan harga konstan mencapai 4,54 persen.

➤ **Kontribusi Produksi Kelompok Petani**

Persentase kontribusi produksi kelompok petani mengikuti pola persentase kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman bahan makanan). Hal ini disebabkan karena kelompok petani lebih banyak bergerak dibidang tanaman pangan dan palawija.

Tabel 2.31
Persentase Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap
PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No.	URAIAN	Dasar	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	ADH Berlaku	2,54	2,1	3,73	3,82	3,74	3,65
		ADH Konstan	2,66	2,08	4,31	3,57	3,54	3,43

Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2018

Persentase kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB Kabupaten Bogor berdasarkan harga berlaku pada tahun 2018 mencapai 3,65 persen dan berdasarkan harga konstan mencapai 3,43 persen. Persentase kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB Kabupaten Bogor pada tahun 2018 baik berdasarkan harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB Kabupaten Bogor tahun 2013. Di mana pada tahun 2013 persentase kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB Kabupaten Bogor berdasarkan harga berlaku mencapai 2,54 persen dan berdasarkan harga konstan mencapai 2,66 persen.

➤ **Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB**

Keberhasilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada tahun 2017 dalam peningkatan kunjungan wisatawan dari rencana 7.100.000 orang, terealisasi 7.300.134 orang atau 102,82% disebabkan oleh bertambahnya objek wisata yang ada di Kabupaten Bogor. Kondisi ini mempengaruhi kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Bogor.

Tabel 2.32
Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No.	URAIAN	Dasar	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	ADH Berlaku	3,13	3,30	3,30	4,79	4,79	4,84
		ADH Konstan	3,24	3,24	3,24	3,29	3,29	3,32

Sumber : Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2018

Pada tahun 2013 kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Bogor atas dasar harga berlaku sebesar 3,13 persen, dan meningkat pada tahun 2018 angka kontribusinya menjadi 4,84. Sementara itu persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Bogor atas dasar harga konstan relatif sama sepanjang tahun 2013-2018 dengan kontribusi sebesar 3,24-3,32 persen.

➤ **Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB**

Sektor perdagangan (perdagangan besar dan eceran) mempunyai kontribusi cukup signifikan terhadap perolehan nilai PDRB Kabupaten Bogor, yaitu berkontribusi kedua paling besar setelah sektor perindustrian. Pada tahun 2018 kontribusi sektor perdagangan terhadap capaian PDRB Kabupaten Bogor berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 29,72 triliun dan berdasarkan harga konstan mencapai Rp 19,62 triliun. Adapun jumlah PDRB Kabupaten Bogor tahun 2018 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 221,55 triliun dan berdasarkan harga konstan mencapai Rp 148,96 triliun. Dengan demikian dapat diketahui bahwa persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Bogor tahun 2018 sebesar 13,42 persen berdasarkan harga berlaku dan 13,17 persen berdasarkan harga konstan.

Tabel 2.33
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga berlaku (%)	13,83	13,33	13,01	13,09	13,29	13,42
2.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga konstan (%)	13,02	12,90	12,76	12,93	13,05	13,17

Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2018

➤ **Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB**

Sektor perindustrian di Kabupaten Bogor berkontribusi paling besar terhadap perolehan nilai PDRB Kabupaten Bogor. Pada tahun 2018 persentase kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB Kabupaten Bogor

berdasarkan harga berlaku mencapai 53,26 persen dan berdasarkan harga konstan mencapai 53,79 persen. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai persentase kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB Kabupaten Bogor selama kurun waktu tahun 2013-2018.

**Tabel 2.34
Kontribusi Sektor Industri terhadap
PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018**

No	URAIAN	Dasar	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	ADH Berlaku	55,41	55,02	54,73	54,12	53,70	53,26
		ADH Konstan	55,66	55,22	54,82	54,46	54,17	53,79

Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2017

Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2013-2017) persentase kontribusi sektor ini mengalami penurunan baik berdasarkan harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan. Persentase kontribusi sektor perindustrian pada tahun 2013-2017 berdasarkan harga berlaku masing-masing sebesar 55,41%, 55,02%, 54,73, 54,12% dan 53,70% serta berdasarkan harga konstan mencapai 55,66%, 55,22%, 54,82%, 54,46% dan 54,17%.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Kondisi daerah Kabupaten Bogor terkait aspek daya saing daerah dapat dilihat dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

➤ Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Indikator pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Untuk lebih jelasnya pengeluaran konsumsi RT per kapita atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.35
Jumlah Pengeluaran Konsumsi RT per Kapita
di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2017

No.	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Total pengeluaran konsumsi RT per kapita sebulan (rupiah)	822.801	924.109	1.263.655	1.369.902	1.435.960

Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2017

Pengeluaran konsumsi rata-rata rumah tangga per kapita sebulan di Kabupaten Bogor setiap tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 mencapai Rp 822.801, sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp. 613.158 menjadi Rp. 1.435.960.

➤ **Nilai Tukar Petani**

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani. Nilai Tukar Petani dapat dihitung dengan membandingkan faktor produksi dengan produk, yaitu perbandingan antara indeks yang diterima (It) petani dan yang dibayar (Ib) petani.

Tabel 2.36
Nilai Tukar Petani di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No.	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Nilai tukar petani (%)	101,37	99,60	101,17	101,32	100,10	103,18

Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

Nilai tukar petani (NTP) pada tahun 2013-2018 sangat fluktuatif di Kabupaten Bogor. Pada tahun 2013 NTP sebesar 101,37 persen dan turun pada tahun 2014 dengan nilai 99,6 persen dan naik lagi pada tahun 2015 menjadi 101,17 persen dan 2016 101,32 persen, pada tahun 2017 sebesar 100,10 persen, dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan lagi sebesar 103,18 persen.

➤ **Rasio Ketergantungan**

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena

secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan adalah perbandingan jumlah penduduk usia <15 tahun dan >64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun.

**Tabel 2.37
Rasio Ketergantungan di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Rasio ketergantungan (%)	56,73	56,57	53,66	51,78	49,37	50,39

Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

Rasio ketergantungan di Kabupaten Bogor kurun waktu 2013-2018 berkisar antara 49,37 s/d 56,73. Pada tahun 2013 rasio ketergantungan total sebesar 56,73 artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 57 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 56,73 ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 51,89, dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 4,84. Dari indikator ini terlihat bahwa pada tahun 2013 penduduk usia kerja di Indonesia masih dibebani tanggung jawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Gambaran umum kondisi daerah aspek pelayanan umum dapat dilihat dari 2 (dua) fokus layanan, yaitu fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan.

2.4.1. Layanan Urusan Wajib Dasar

Layanan urusan wajib Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terdiri dari :

A. Pendidikan (SD/SMP)

Sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pendidikan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

➤ Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Angka pendidikan anak usia dini adalah jumlah siswa pada jenjang TK/RA/penitipan anak dibandingkan dengan jumlah anak pada rentang usia 4-6 tahun. Dari tabel 2.33 dapat dilihat bahwa angka pendidikan anak usia dini di Kabupaten Bogor terus mengalami relatif naik, hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Kabupaten Bogor menyadari akan pentingnya pendidikan terhadap anak yang dimulai sedini mungkin. Berikut disajikan perkembangan angka pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Bogor. Persentase jumlah siswa PAUD/TK/RA terhadap jumlah anak usia 4-6 tahun di tahun 2013 sebesar 31,10%. Persentasenya terus naik di tahun 2014 dan 2015 berturut-turut sebesar 37,69% dan 41,42%. Sedangkan di tahun 2016 turun menjadi 38,51% serta naik menjadi 42,85% di tahun 2017. Tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 43,28% atau sebesar 0,43 dari tahun 2017.

Tabel 2.38
Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Bogor
Tahun 2013-2018

No.	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Pendidikan Anak Usia Dini (%)	31,10	37,69	41,42	38,51	42,85	43,28

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

➤ **Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV**

Salah satu komponen penting dalam aspek pelayanan wajib pendidikan adalah adanya peningkatan kualifikasi guru. Pada tahun 2018, persentase guru yang telah memenuhi kualifikasi mengajar yang ditandai dengan terpenuhinya latar belakang pendidikan (S1) tercatat mengalami peningkatan sebesar 2,34 persen dibandingkan dengan tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya kualifikasi guru di Kabupaten Bogor, akan berdampak positif pada peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai kondisi angka kelulusan siswa, angka melanjutkan dan angka guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-VI di Kabupaten Bogor per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2013-2018.

Tabel 2.39
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	68,86	71,54	71,49	85,63	80,63	82,97

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

➤ **Sekolah Dengan Kondisi Bangunan Baik**

Ketersediaan sekolah dengan kondisi bangunan baik merupakan salah satu indikator dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bogor. Pada tahun 2018, ketersediaan sekolah dengan kondisi bangunan baik untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, masing-masing sebesar 1,53% dan 2,26% dibandingkan tahun 2017. Berikut secara lengkap disajikan data ketersediaan sekolah dengan kondisi bangunan baik di Kabupaten Bogor per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2013-2018.

Tabel 2.40
Persentase Sekolah Pendidikan Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No.	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)	57,05	59,43	62,38	86,21	87,42	88,95

No.	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%)	63,98	65,46	67,95	87,68	89,87	92,13

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

➤ Rasio Guru/Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai rasio guru/murid di Kabupaten Bogor per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2013-2018.

Tabel 2.41
Rasio Guru dan Murid berdasarkan Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rasio Guru/Murid SD/MI	380,61	396,00	397,51	408	412	413
2	Rasio Guru/Murid SMP/MTs	370,54	373,08	365,93	418	500	512

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

Selama kurun waktu tahun 2013-2018 rasio ketersediaan guru di Kabupaten Bogor per 10.000 untuk SD/MI mengalami kenaikan sedangkan untuk SMP/MTs mengalami fluktuatif. Pada tahun 2013, rasio guru terhadap murid SD/MI di Kabupaten Bogor adalah 380,61. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa setiap 10.000 murid akan dilayani guru SD/MI sebanyak $380,61 \approx 381$ atau setiap 1 guru SD/MI melayani (mengajar) 26,27 ≈ 26 murid SD. Pada tahun yang sama, rasio guru terhadap murid SMP/MTs di Kabupaten Bogor adalah 370,54. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa setiap 10.000 murid akan dilayani guru SD/MI sebanyak $370,54 \approx 371$ atau 1 guru SMP/MTs melayani (mengajar) 26,99 ≈ 27 murid SMP. Sedangkan di tahun 2018 rasio guru terhadap murid SD/MI adalah 413. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa setiap 10.000 murid akan dilayani guru SD/MI sebanyak 413 atau setiap 1 guru SD/MI melayani (mengajar) 24,21 ≈ 24 murid SD. Pada tahun yang sama, rasio guru terhadap murid SMP/MTs adalah 512. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa setiap 10.000 murid akan dilayani guru SD/MI sebanyak 512 atau 1 guru SMP/MTs melayani (mengajar) 19 murid SMP.

B. Kesehatan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kesehatan dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

➤ Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per Satuan Penduduk

Puskesmas, Poliklinik dan Pustu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan.

**Tabel 2.42
Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu dan Penduduk
di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018**

No.	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Rasio Puskesmas,Poliklinik dan Pustu per satuan penduduk	1 :9.718	1 :9.383	1 : 13.847	1:15.266	1 : 16.053	1 : 16.053

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

Rasio puskesmas, poliklinik dan Pustu per satuan penduduk menunjukkan penurunan yang relatif tinggi setiap tahunnya, dimana pada tahun 2013 memiliki rasio 1: 9.718 dan pada tahun 2018 hanya memiliki rasio 1 : 13.808. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya jumlah poliklinik yang sangat signifikan juga pertambahan penduduk.

➤ Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter dan dokter spesialis di Indonesia belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk Indonesia. Selain itu distribusi dokter dan dokter spesialis tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan.

**Tabel 2.43
Rasio dokter per satuan penduduk (per 1000)
di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018**

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Rasio dokter per satuan penduduk	1: 3.923	1: 4.016	1 : 4.760	1 : 3.869	1 : 3.737	1 : 3.820

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

Jumlah dokter di Kabupaten Bogor relatif stabil dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Pada tahun 2013 rasio dokter per satuan penduduk dengan nilai 1 : 3.923, artinya 1 dokter menangani 3.923

penduduk . Pada tahun 2016 rasio naik menjadi 1 : 3.869 yang artinya satu dokter melayani 3.869 penduduk. Kemudian pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 mengalami trend yang menunjukkan hasil yang positif dari tahun-tahun sebelumnya, dengan masing-masing capaian pertahun 1 : 3.737 dan 1 : 3.820. Walaupun capaian tersebut masih jauh dari standar pelayanan terpadu dengan perbandingan satu dokter melayani 2.500 penduduk.

➤ **Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk**

Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk.

Tabel 2.44
Jumlah Tenaga Medis dan Penduduk di Kabupaten Bogor
Tahun 2013-2018

No.	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	1 : 2.667	1 : 2.730	1 : 4.063	1 : 3.352	1 : 2508	1 : 2563

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

Jumlah tenaga medis di Kabupaten Bogor sangat fluktuatif mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Adapun secara berturut-turut capaian rasio tenaga medis per satuan penduduk di Kabupaten Bogor pada Tahun 2014 sebesar 1 : 2.730. Kemudian pada Tahun 2015 sebesar 1 : 4.063, lalu pada Tahun 2016 mencapai perbandingan 1 : 3.352. Selanjutnya pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 mengalami trend dengan menunjukkan hasil yang lebih positif dari tahun-tahun sebelumnya, dengan masing-masing capaian pertahun 1 : 2.508 dan 1 : 2.563.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

➤ **Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik**

Jaringan jalan yang baik memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai. Kebijakan pembangunan yang tidak bertumpu pada pengembangan terhadap kompatibilitas dan optimalisasi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya fisik (buatan) akan sulit mencapai pembangunan

yang berkelanjutan. Ini sering kita alami dengan terjadinya banjir di jalur-jalur utama ekonomi yang disebabkan oleh pembangunan yang kurang memperhatikan kapasitas sumber daya alam sehingga fungsi sistem sungai dan drainase tidak memadai. Ini juga telah kita alami dengan terjadinya *bottleneck* (jaringan jalan yang menyempit) di berbagai jaringan transportasi yang disebabkan oleh pembangunan yang tidak memperhatikan tata guna lahan sehingga kapasitas sumber daya fisik (buatan) tidak lagi mampu menampung perjalanan barang dan manusia yang dihasilkan oleh tata guna lahan.

Kinerja jaringan berdasarkan kondisi dengan terminologi baik, sedang, sedang rusak, rusak dan rusak berat. Terminologi ini didasarkan pada besarnya persentase tingkat kerusakan dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Kondisi Baik (B) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan $\leq 6\%$), sehingga arus lalu-lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan desain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan.
- b. Kondisi Sedang (S) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi sedang menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 6 s/d 10%). Kerusakan yang ada belum (atau sedikit saja) menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus pergerakan lalu-lintas.
- c. Kondisi Sedang Rusak (SR) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi sedang menuju rusak menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 10% s/d 16%). Kerusakan yang ada mulai menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus pergerakan lalu-lintas, sehingga kendaraan harus mengurangi kecepatannya.
- d. Kondisi Rusak (R) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi rusak menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 16% s/d 20%). Kerusakan yang ada sudah sangat menghambat kelancaran arus pergerakan lalu-lintas, sehingga kendaraan harus berjalan secara perlahan-lahan, mengurangi kecepatannya, kadang kala harus berhenti akibat adanya kerusakan atau hambatan pada permukaan perkerasan.

- e. Kondisi Rusak Berat (RB) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi rusak berat menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan > 20%). Kerusakan yang ada sudah sangat parah dan nyaris tidak dapat lagi dilewati oleh kendaraan roda empat, atau hanya dapat dilewati dengan kecepatan sangat rendah.

Tabel 2.45
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi
di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No	Kondisi Jalan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Proporsi Kondisi Jalan dalam keadaan Baik	0,7626	0,7140	0,7443	0,7397	0,8488	0,8641

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

Proporsi kondisi jaringan jalan baik tertinggi pada tahun 2013 dengan nilai 0,7626, kemudian menurun di tahun 2014 dengan nilai 0,714. Pada tahun 2015 proporsi jaringan jalan baik naik kembali menjadi 0,7443. Terjadi penurunan lagi pada tahun 2016 menjadi 0,7397. Sedangkan di tahun 2017 mengalami kenaikan lagi menjadi 0,8488 dan tahun 2018 menjadi 0,8641 meningkat dari tahun sebelumnya.

➤ **Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Pekerjaan Umum**

Pembangunan aspek pelayanan umum urusan pekerjaan umum mencakup beberapa komponen penting, baik berupa panjang jalan Kabupaten Bogor dalam kondisi baik serta komponen yang mendukungnya seperti drainase jalan dan trotoar jalan. Selain itu juga yang menjadi fokus pembangunan urusan pekerjaan umum adalah pembangunan turap penahan longsor dan perbaikan jaringan irigasi. Secara umum kinerja pelayanan umum pada urusan pekerjaan umum dapat dilihat pada Tabel 2.46.

Tabel 2.46
Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Pekerjaan Umum
di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No .	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (%)	76,26	71,40	74,43	73,97	84,88	86,41
2.	Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (%)	31,38	21,03	21,67	23,79	30,00	30,00
3.	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	2,23	2,80	2,80	3,13	2,80	2,80

No .	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	(%)						
4.	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)	4,50	4,50	4,50	4,50	22,47	N/A
5.	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	39,09	37,76	37,76	36,24	36,52	36,52
6.	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota (%)	84,90	69,40	69,40	76,10	82,09	N/A
7.	Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)	63,50	47,35	37,19	58,12	63,57	67,74

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

➤ Rasio Jaringan Irigasi

Pengertian jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier.

Dari ketiga kelompok jaringan tersebut, yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkapnya. Rasio perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya di Kabupaten Bogor tertuang dalam tabel berikut :

**Tabel 2.47
Rasio Jaringan Irigasi
di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018**

No	Irigasi	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Rasio Jaringan Irigasi	0,4434	0,049	0,050	0,046	0,0491	0,049

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

Proporsi panjang jaringan irigasi dengan luas lahan budidaya relatif berfluktuatif sepanjang tahun. Pada tahun 2013 rasio panjang jaringan irigasi dengan luas lahan budidaya sebesar 0,4434 dan di tahun 2018 menurun menjadi 0,049.

➤ Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tempat pemakaman milik/dikuasai pemerintah daerah yang disediakan untuk umum yang berada dibawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan pemerintah daerah. Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat yang pengelolaannya

dilakukan oleh yayasan/badan sosial/badan keagamaan. Tempat Pemakaman Khusus (TPK) adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.

Tabel 2.48

Rasio Tempat Pemakaman Umum dan Penduduk Tahun 2013-2017

No.	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rasio pemakaman umum per satuan penduduk	219	214	209	204	273

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

Rasio pemakaman umum per satuan penduduk pada tahun 2013 di Kabupaten Bogor bernilai 219 per 1000 penduduk yang artinya setiap satu unit lahan pemakaman berbanding dengan 4 orang penduduk. Kondisi ini naik sampai dengan tahun 2017 dengan rasio 273 per 1000 penduduk yang artinya satu unit lahan pemakaman nantinya berbanding 4 orang penduduk.

➤ **Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB**

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau kota merupakan kawasan perlindungan, yang ditetapkan dengan kriteria :

- a. Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi;
- b. berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan
- c. didominasi komunitas tumbuhan.

Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Tabel 2.49

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No.	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	0,2640	0,2716	0,2976	0,2604	0,2831	0,3594

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

Ruang terbuka hijau di Kabupaten Bogor berfluktuasi sepanjang tahun 2013-2017. Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah berHPG/HGB pada tahun 2013 sebesar 0,264, kemudian meningkat pada tahun 2014 menjadi 0,2716 dan meningkat lagi pada tahun 2015 menjadi 0,2976. Tetapi pada tahun 2016 menurun menjadi 0,2604 sedangkan di tahun 2017 naik lagi menjadi 0,2831 dan di tahun 2018 meningkat lagi menjadi 0,3594.

➤ **Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan**

Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

**Tabel 2.50
Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan
di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2017**

No.	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan	0,2180	0,2382	0,2639	0,3115	0,3351

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan di Kabupaten Bogor meningkat terus sepanjang tahun 2013-2017. Pada tahun 2013 nilai rasio 0,2180 yang artinya dari 100 unit rumah di Kabupaten Bogor hanya 21 unit yang ber-IMB. Pada tahun 2017 rasio meningkat menjadi 0,3351 yang artinya dari 100 unit rumah di Kabupaten Bogor hanya 33 unit yang ber-IMB.

➤ **Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya**

Ruang publik yang berubah peruntukannya adalah jumlah ruang publik yang berubah fungsi. Berikut disajikan persentase ruang publik yang berubah peruntukannya di Kabupaten Bogor mulai dari tahun 2013-2017.

Tabel 2.51
Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya
di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2017

No.	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Ruang publik yang berubah peruntukannya (%)	5,00	5,00	4,50	4,50	4,50

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

Pada tahun 2017 ruang publik yang berubah peruntukannya di Kabupaten Bogor mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2013. Pada tahun 2017 persentasenya 4,50% yang artinya dari total ruang publik yang ada, sekitar 4,50 % berubah peruntukannya.

➤ **Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tata ruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW.

Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang. Adapun yang dimaksud dengan struktur pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan secara hierarkis dan saling berhubungan satu dengan lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang adalah tata guna tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya dalam wujud penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya.

Tabel 2.52
Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Ketaatan terhadap RTRW (%)	84,13	86,65	86,50	87,50	70,00	81,40

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

Indikator ini mengukur kemampuan suatu daerah untuk mengikuti RTRW yang menjadi dasar bagi :

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional maupun daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional maupun daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional maupun daerah.

Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin taat suatu daerah pada RTRW, dan semakin tinggi kemampuan daerah tersebut untuk menyelenggarakan otonomi. Analisis terhadap indikator ini belum dapat dilaksanakan karena belum terdokumentasinya data terkait luas tata guna tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya dalam wujud penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya di Kabupaten Bogor.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

➤ **Rasio rumah layak huni**

Rasio rumah layak huni terus meningkat namun kecil dalam kurun waktu 2013-2018. Di tahun 2013 mencapai 0,2310 dan di tahun 2018 sebesar 0,2523, artinya dari tahun 2013-2018 terdapat 15,62%-24,73% rumah yang layak huni di Kabupaten Bogor.

**Tabel 2.53
Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018**

No.	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Rasio rumah layak huni	0,2310	0,2326	0,2370	0,2403	0,2473	0,2523

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

➤ **Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh**

Secara bertahap persentase lingkungan pemukiman kumuh terus berkurang dimulai tahun 2013 sebesar 0,32% dan diakhir tahun 2018 sebesar 0,23%.

**Tabel 2.54
Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh di Kabupaten Bogor
Tahun 2013-2018**

No.	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase Lingkungan pemukiman kumuh (%)	0,32	0,281	0,258	0,295	0,290	0,230

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

E. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

➤ **Penanganan Bencana**

Aspek penilaian pelayanan penanggulangan bencana kebakaran ditetapkan dalam standar pelayanan minimal (SPM) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 yang mengacu pada 2 aspek penilaian yaitu Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran dan Tingkat Waktu Tanggap (*Respon Time*) Penanggulangan Kebakaran. Dengan kondisi jumlah mobil pemadam kebakaran dan jumlah wilayah manajemen

kebakaran (WMK) serta jumlah Pos Pemadam Kebakaran saat ini, maka cakupan pelayanan kebakaran di Kabupaten Bogor tahun 2013-2017 baru mencapai angka 89% dengan Tingkat Waktu Tanggap (*Respon Time*) penanggulangan kebakaran rata-rata 18,6 menit dan 20,27 menit untuk tahun 2018 (standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 adalah 15 menit). Berikut secara lengkap disajikan data mengenai cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Bogor selama kurun waktu tahun 2013-2018.

**Tabel 2.55
Penanganan Bencana di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018**

NO.	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%)	88%	88%	89%	89%	89%	89%
2.	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (menit)	45	44	36	35,25	18,6	20,27
3.	Persentase gedung yang sudah dilengkapi alat pemadam kebakaran					80%	90%
4.	Persentase desa/kelurahan siaga bencana kebakaran					82%	46%
5.	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi		80%	85%	80%	80%	

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

F. Sosial

➤ Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Permasalahan bidang sosial terlihat dengan kecenderungan meningkatnya jumlah dan jenis Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PMKS). Hal ini tampak dari merebaknya kasus-kasus permasalahan sosial, seperti perdagangan manusia (*trafficking*), HIV, AIDS, dan penyalahgunaan narkoba. Peran serta masyarakat dalam penanganan permasalahan sosial masih terlihat rendah akibat pola pikir masyarakat yang masih menganggap tabu untuk mengungkap permasalahan sosial yang

berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat. Pemerintah Kabupaten Bogor telah melakukan penanganan dan bantuan terhadap PMKS tahun 2013-2018 sebagai berikut :

Tabel 2.56
Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial
di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No.	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial (%)	0,26	0,25	0,37	0,39	0,42	0,47

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial meningkat sepanjang tahun yaitu 0,26 persen tahun 2013 dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 0,37 persen. Pada tahun 2018 naik menjadi 0,47 persen.

2.4.2. Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

➤ Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Tabel 2.57
Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No.	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Rasio KDRT (%)	0,00004	0,000039	0,000038	0,000037	0,000036	0,000035

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

Persentase kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Bogor relatif sangat kecil. Tahun 2013 persentase kekerasan dalam rumah tangga hanya 0,00004 persen, dan tahun 2014 turun menjadi 0,000039 persen, tahun 2015 hanya 0,000038 persen dan tahun 2016 menurun menjadi 0,000037 persen, di tahun 2017 turun sebesar 0,000036 persen dan pada tahun 2018 mengalami penurunan lagi sebesar 0,000035 persen.

B. Pangan

➤ Ketersediaan Pangan Utama

Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang wajib diperhatikan oleh pemerintah daerah. Kejadian rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial. Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Bogor pada tahun 2018 (digambarkan oleh Konsumsi Normatif per Kapita terhadap Ketersediaan Bersih Serealia), terdapat sebanyak 25 Kecamatan belum swasembada, hanya 15 Kecamatan yang termasuk swasembada pangan. Regulasi ketahanan pangan di Kabupaten Bogor sebagai pedoman tata laksana keamanan, mutu dan gizi pangan serta ketersediaan pangan utama dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 2.58
Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018**

No.	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Ketersediaan pangan utama (%)	87,44	60,33	57,00	87,44	61,75	63,00

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

C. Lingkungan Hidup

➤ Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani

Salah satu masalah yang dihadapi kota-kota di Indonesia khususnya di Kabupaten Bogor adalah masalah persampahan. Salah satu masalah persampahan yang cukup rumit dalam penyelesaiannya adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas tempat pembuangan sampah akhir (TPSA) yang layak, baik secara teknis maupun non teknis. Keberadaan TPSA selain dapat menampung timbulan sampah yang dihasilkan juga harus dapat meminimalisasi bahaya yang mungkin timbul akibat penimbunan sampah tersebut. Adapun persentase penanganan sampah di Kabupaten Bogor tertera pada Tabel 2.127.

**Tabel 2.59
Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani
di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018**

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase jumlah sampah yang tertangani (%)	39,05	58,92	61,37	60,77	64,56	65,05

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

Persentase jumlah sampah setiap tahunnya relatif meningkat, hal ini dikarenakan tiap tahunnya selalu ada penambahan armada pengangkut sampah. Pada tahun 2013 persentase jumlah sampah yang ditangani 39,05 persen, pada tahun 2018 nilainya meningkat menjadi 65,05 persen.

D. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

➤ Penduduk yang sudah terdaftar dalam catatan sipil

Indikator ini dapat menggambarkan tertib administrasi kependudukan. Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte Nikah. Bila dilihat selama kurun waktu 5 tahun (tahun 2013-2018), jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akta Kelahiran dan Akta Nikah rata-rata mengalami peningkatan. Peningkatan ini menggambarkan bahwa telah meningkat pula kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas diri/administrasi kependudukan. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai kepemilikan administrasi kependudukan (KTP, KK, Akta Kelahiran dan Akta Nikah) selama kurun waktu tahun 2013-2018.

Tabel 2.60
Rasio Penduduk ber-KTP, Akte Kelahiran, Akte Nikah di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No.	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rasio penduduk ber - KTP per satuan penduduk	0,724	0,7241	0,7244	0,7248	0,850	1,000
2	Rasio bayi ber-akte kelahiran	0,62	0,615	0,615	0,615	1,14	1,25
3	Rasio pasangan ber-akte nikah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

E. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

➤ Persentase Koperasi Aktif

Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Semakin besar jumlah persentase ini maka akan semakin besar pelayanan penunjang yang dimiliki daerah dalam menggerakkan perekonomian melalui koperasi.

Tabel 2.61
Rasio Koperasi Aktif di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase koperasi aktif (%)	67,64	69,44	71,65	69,9	74,75	31,61

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

Persentase koperasi aktif di Kabupaten Bogor pada Tahun 2013-2018 menunjukkan capaian yang mengalami fluktuasi di setiap tahunnya. Persentase koperasi aktif pada tahun 2013 sebesar 67,64 persen dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 71,65 persen, tetapi di tahun 2016 turun menjadi 69,9 persen dan naik lagi di tahun 2017 menjadi 74,75 persen. Dan pada tahun 2018 menjadi 31,61 persen.

F. Penanaman Modal

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

➤ Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah nilai investasi investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan jumlah realisasi nilai proyek investasi berupa PMDN dan nilai proyek investasi PMA yang telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Banyaknya investasi PMDN berskala nasional dengan banyaknya investasi PMA berskala nasional dihitung dari total nilai investasi yang telah terealisasi pada suatu periode tahun pengamatan.

Tabel 2.62
Jumlah nilai investasi berskala nasional (trilyun) di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (triliun)	8,2	13	13,8	11,1	7,2	8,69
2.	PMA (triliun)	5,3	3,3	4,9	1,5	2,5	5,05
3.	PMDN (triliun)	2,9	9,7	8,9	9,6	1,8	3,64

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

Nilai investasi di Kabupaten Bogor mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 nilai realisasi investasi berskala nasional sebesar 8,2 trilyun, hasil dari kontribusi PMA sebesar 5,3 trilyun dan 2,9 trilyun PMDN, mengalami kenaikan cukup signifikan hingga tahun 2015 sebesar 13,8 trilyun investasi berskala nasional hasil dari kontribusi PMA sebesar 4,9 trilyun dan 8,9 trilyun PMDN. Terjadi penurunan lagi hingga 2017 yaitu menjadi 7,2 trilyun

untuk skala nasional, akan tetapi di tahun 2018 mengalami peningkatan kembali menjadi 8,69 triliun. Kenaikan dan penurunan yang signifikan ini berkaitan erat dengan masuknya investor baru dengan jumlah nilai investasi yang sangat besar atau perpanjangan investasi yang nilainya relatif lebih kecil.

G. Pemuda dan Olahraga

➤ Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Persentase organisasi pemuda yang aktif menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam mendorong dan memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam menyalurkan aspirasi dan kemampuannya dalam penyelenggaraan pembangunan. Organisasi pemuda yang dimaksud pada bagian ini adalah binaan pemerintah dan bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah.

Tabel 2.63
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kabupaten Bogor
Tahun 2013-2018

No	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif (%)	28,57	88,75	88,75	90	85,71	85,71

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

Pada tahun 2013, persentase organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Bogor adalah 28,57%, angka ini mengalami peningkatan sampai 4 tahun sesudahnya, yaitu 88,75% di tahun 2014, 88,75% di tahun 2015, 90% di tahun 2016, serta 85,71% di tahun 2017 dan tahun 2018.

H. Kebudayaan

Indikator kebudayaan di Kabupaten Bogor dapat dilihat tabel di bawah ini :

Tabel 2.64
Kebudayaan di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	31	45	50	50	35	35

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

➤ Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Kondisi daerah Kabupaten Bogor terkait dengan urusan kebudayaan yang lainnya adalah dapat dilihat dari indikator kinerja benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Pada tahun 2017 dan tahun 2018 hanya 35 benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di

Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, dalam rangka pelestarian budaya, salah satu langkah yang dapat dilaksanakan pemerintah daerah adalah revitalisasi kawasan dan situs cagar budaya. Sebelum dilakukan revitalisasi dan pelestarian situs serta kawasan cagar budaya, harus dilakukan penetapan sebagai situs dan kawasan cagar Kabupaten dan Nasional. Sosialisasi atau seminar yang ditujukan kepada masyarakat juga perlu dilakukan agar masyarakat dapat menjaga dan melestarikan budaya yang merupakan kekayaan Kabupaten Bogor.

I. Perpustakaan

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat di mana di dalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistem tertentu, dengan tujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan.

➤ Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun

Pengunjung perpustakaan adalah pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam satu (1) tahun. Pengunjung perpustakaan dihitung berdasar pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasar data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung.

Tabel 2.65
Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun
di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	0,00675	0,00763	0,01505	0,01519	0,01307	0,0129

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun di Kabupaten Bogor berfluktuasi dari tahun 2013-2017. Tahun 2013 jumlah pengunjung perpustakaan 0,00675 artinya perbandingan jumlah kunjungan orang ke perpustakaan selama 1 tahun dengan jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani sebesar 1:148, kemudian naik pada tahun 2014 menjadi 0,00763. Tahun 2015 dan 2016 jumlah pengunjung naik menjadi 0,01505 dan 0,01519. Sedangkan di tahun 2017 dan 2018 jumlah pengunjung terus menurun menjadi 0,01307 sebesar 0,0129.

➤ Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Kabupaten Bogor dapat digambarkan di bawah ini :

Tabel 2.66
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah
di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	37,09	32,14	36,76	36,76	36,06	36,18

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

Kondisi daerah Kabupaten Bogor terkait dengan urusan perpustakaan salah satunya dapat dilihat dari jumlah koleksi buku yang tersedia. Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan atau mengetahui perkembangan jumlah koleksi buku yang mengarah kepada peningkatan kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Bogor. Semakin banyak koleksi buku yang tersedia menggambarkan semakin baik dalam pembentukan SDM yang berkualitas di suatu daerah. Di tahun 2018 koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah sebesar 36,18 yang artinya berdasarkan data dari Dinas Arsip dan Perpustakaan bahwa ada 13.010 judul buku yang tersedia dibanding dengan 35.963 koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah.

2.4.3. Layanan Urusan Pilihan

A. Pariwisata

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pariwisata salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

➤ Kunjungan Wisata

Kunjungan wisata di Kabupaten Bogor dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.67
Jumlah Kunjungan Wisata
di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No.	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kunjungan wisata (jiwa)	4.130.125	4.975.939	4.992.320	8.625.229	7.138.555	7.513.209

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

Jumlah obyek wisata yang ada di Kabupaten Bogor sejak tahun 2013-2018 sebanyak lebih kurang 46 obyek. Jumlah kunjungan ke-46 obyek wisata tersebut sebanyak 7.138.555 orang pada tahun 2017, dan pada tahun 2018 menjadi 7.513.209 orang. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (tahun 2013-2016), di mana pada tahun 2014 jumlah yang berkunjung ke-46 obyek sebanyak 4.975.939 orang, pada tahun 2013 sebanyak 4.130.125 orang. Dari data tersebut dapat diketahui rata-rata jumlah pengunjung pada masing-masing obyek wisata

sebanyak 845.814 orang pada tahun 2014, sebanyak 16.381 orang pada tahun 2015, sebanyak 3.632.909 orang pada tahun 2016 dan menurun sebanyak 1.486.674 orang di tahun 2017 dan naik pada tahun 2018.

B. Pertanian

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pertanian salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

➤ **Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar**

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar dihitung dari produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton) dibagi luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha) dikali seratus persen. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar cenderung turun dari tahun ke tahun, selengkapnya diperlihatkan pada tabel berikut :

Tabel 2.68
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar
di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No.	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (%)						
	- Padi Sawah	60,41	63,94	63,66	64,25	60,33	63,25
	- Padi Gogo	33,87	33,82	32,69	33,36	34,82	32,58
	- Produktivitas palawija (ku/ha)	167,56	171,64	175,2	170,68	294,75	172,02
	- Produktivitas sayuran (ku/ha)	106,69	107,22	107,76	108,30	115,12	116,05

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar di Kabupaten Bogor terdiri dari :

1. Padi Sawah pada tahun 2013 mencapai 60,41 ton/ha. Produktivitas padi sawah ini cenderung naik sampai tahun 2015 dengan produktivitas di tahun 2014 sebesar 63,94 ton/ha dan tahun 2015 dengan produktivitas mencapai 63,26 ton/ha. Sedangkan di tahun 2016 naik menjadi 64,25 ton/ha dan tahun 2017 turun menjadi 60,33 ton/ha, pada tahun 2018 mengalami kenaikan lagi menjadi 63,25 ton/ha
2. Padi Gogo pada tahun 2013 mencapai 33,87 ton/ha. Produktivitas padi gogo ini cenderung turun sampai tahun 2015 dengan produktivitas di tahun 2014 sebesar 33,82 ton/ha dan tahun 2015 dengan produktivitas mencapai 32,69 ton/ha. Sedangkan di tahun 2016 naik menjadi 33,36

ton/ha dan tahun 2017 naik menjadi 34,82 ton/ha, pada tahun 2018 mengalami penurunan lagi menjadi 32,58 ton/ha.

3. Produktivitas Palawija pada tahun 2013 mencapai 167,56 ku/ha. Produktivitas palawija ini cenderung naik sampai tahun 2015 dengan produktivitas di tahun 2014 sebesar 171,64 ku/ha dan tahun 2015 dengan produktivitas mencapai 175,2 ku/ha. Sedangkan di tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 170,68 ku/ha dan tahun 2017 naik lagi menjadi 294,75 ku/ha, pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 172,02 ton/ha.
4. Produktivitas Sayuran pada tahun 2013 mencapai 106,69 ku/ha. Produktivitas palawija ini cenderung naik sampai tahun 2018 dengan produktivitas di tahun 2014 sebesar 107,22 ku/ha dan tahun 2015 dengan produktivitas mencapai 107,76 ku/ha, tahun 2016 sebesar 170,68 ku/ha, tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 115,12 ku/ha, pada tahun 2018 juga naik menjadi 116,05 ku/ha.

➤ **Cakupan Binaan Kelompok Petani**

Cakupan bina kelompok tani adalah jumlah petani yang mendapatkan binaan/bantuan dari pemerintah daerah dibagikan dengan jumlah seluruh kelompok tani.

Tabel 2.69
Cakupan Bina Kelompok Petani di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No.	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Cakupan bina kelompok petani (%)	2,69	3,34	2,63	3,10	3,34	3,40

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

Cakupan binaan kelompok tani setiap tahunnya sangat berfluktuasi. Cakupan pada tahun 2013 sebesar 2,69 persen, pada tahun 2014 sebesar 3,34 persen dan pada tahun 2015 turun menjadi 2,63 persen, pada tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami kenaikan yaitu : tahun 2016 menjadi 3,10 persen, di tahun 2017 menjadi 3,34 persen dan 2018 menjadi 3,40 persen.

C. Perdagangan

➤ **Eksport Bersih Perdagangan**

Nilai eksport bersih perdagangan di Kabupaten Bogor pada tahun 2017 mencapai US\$ 1.091.075.555,67. Nilai ini mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2013-2016. Pada tahun 2013 mencapai US\$ 919.956.537,21 pada tahun 2014 menjadi US\$ 928.741.773,45. Berikut

secara lengkap disajikan data mengenai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Bogor selama kurun waktu tahun 2013-2017.

**Tabel 2.70
Ekspor Bersih Perdagangan (US\$) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2017**

No	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Eksport Bersih Perdagangan (US\$)	919.956.537,21	928.741.773,45	967.018.119,05	927.132.432	1.091.075.555,67

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

➤ **Cakupan Binaan Kelompok Pedagang/Usaha Informal**

Cakupan binaan kelompok pedagang/usaha informal adalah jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapat bantuan binaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dibagikan dengan total kelompok pedagang/usaha informal. Pada tahun 2017 cakupan binaan kelompok pedagang/usaha informal di Kabupaten Bogor mencapai 57,63%. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai cakupan binaan kelompok pedagang/usaha informal di Kabupaten Bogor selama kurun waktu tahun 2013-2017.

**Tabel 2.71
Cakupan Binaan Kelompok Pedagang/Usaha Informal
di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2017**

No	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	49,88	56,49	56,30	57,60	57,63

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2013-2016) cakupan binaan kelompok pedagang/usaha informal mengalami fluktuatif. Persentase cakupan binaan kelompok pedagang/usaha informal pada tahun 2013-2016 di Kabupaten Bogor masing-masing sebesar 49,88%, 56,49%, 56,30%, dan 57,60%.

F. Perikanan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kelautan dan perikanan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

➤ **Produksi Perikanan dan Konsumsi Ikan**

Produksi perikanan merupakan hitungan dari jumlah produksi ikan (ton) dibagi dengan target daerah (ton). Di Kabupaten Bogor pada tahun 2018 produksi perikanan mencapai 122.131 ton atau 100,24% dari target

daerah yang ditetapkan sebesar 121.731 ton. produksi ini terus meningkat sejak tahun 2013-2017. Adapun jumlah konsumsi ikan pada tahun 2018 mencapai 29,53 Kg/Kap/Thn atau 100,24% dari target daerah yang ditetapkan sebesar 29,46 Kg/Kap/Thn. konsumsi ini meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Bogor, dimana pada tahun 2013 konsumsi ikan mencapai, pada tahun 2014 mencapai 25,18 Kg/Kap/Thn, tahun 2015 dan 2016 masing-masing 26,41 Kg/Kap/Thn dan 27,65 Kg/Kap/Thn. Sedangkan di tahun 2017 dan 2018 masing masing sebesar 28,34 Kg/Kap/Thn dan 29,53 Kg/Kap/Thn.

**Tabel 2.72
Jumlah Produksi dan Konsumsi Ikan
di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018**

No.	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Produksi perikanan (%)	88.811	108.829	112.782	117.567	120.412	122.131
2.	Konsumsi ikan (%)	23,97	25,18	26,41	27,65	28,34	29,53

Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018

Keseluruhan capaian pembangunan Pemerintah Kabupaten Bogor sebagaimana telah diuraikan pada bab ini, disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.73
Capaian Indikator Kinerja Penyeleenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
	Aspek Kesejahteraan Masyarakat							
	Pertumbuhan PDRB							
1	Pertumbuhan PDRB (AHB)	14,36	12,66	12,13	9,87	9,34	9,73	Bappedalitbang
2	Pertumbuhan PDRB (AHK)	6,04	6,01	5,93	6,10	6,19	6,30	Bappedalitbang
3	Laju inflasi	184,62	(17,27)	(75,28)	64,94	6,97	3,35	Bappedalitbang
	Inflasi	8,51	7,04	1,74	2,87	3,07	2,21	Bappedalitbang
	PDRB per Kapita							
4	PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp.)	26,12	28,38	30,79	33,05	35,33	37,93	Bappedalitbang
5	PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rp.)	21,28	22,01	22,8	23,64	24,54	25,5	Bappedalitbang
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku (triliun)	135,89	151,28	168,09	184,68	201.900	221,547	Bappedalitbang
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga konstan (triliun)	38,74	41,07	124,48	132,08	140,25	148,959	Bappedalitbang
6	Indeks Gini	0,38	0,39	0,42	0,4	0,4	0,34	Bappedalitbang
7	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	0,98	1,05	1,03	0,96	0,99	0,96	Bappedalitbang

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
8	Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	9,54	8,91	8,96	8,83	8,57	7,14	Bappedalitbang
9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	66,74	67,36	67,77	68,32	69,13	69,61	Bappedalitbang
11	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk 25 th + (Angka Rata-rata Lama Sekolah)	7,4	7,74	7,75	7,83	7,84	7,89	Disdik
12	Angka Usia Harapan Hidup	70,47	70,49	70,59	70,65	70,7	70,96	Dinkes
13	Persentase balita gizi buruk	0,021	0,0202	0,019	0,017	0,0102	0,0185	Dinkes
14	Cakupan Desa Siaga Aktif	51,80	60,14	63,36	67,97	73,73	100	Dinkes
15	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	63,60	61,86	60,14	59,75	64,07	62,71	Disnaker
16	Tingkat pengangguran terbuka	7,87	7,65	7,48	9,62	9,55	9,08	Disnaker
17	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	42,17	42,16	42,16	42,16	42,03	41,90	Dinsos
18	Indeks Kepuasan Masyarakat	74,59	75,08	75,98	76,04	77,77	78,57	Setda
19	Persentase PAD terhadap pendapatan	27,58	31,85	33,19	38,37	37,18	38,28	BAPPENDA
24	Opini BPK	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP		BPKAD
25	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	74,70	74,80	77,33	77,00	76,90	86,18	DKP
26	Penguatan Cadangan Pangan	NA	59,64	123,14	167,24	127,30	95,02	DKP
27	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Harga Berlaku	4,10	3,96	3,81	3,82	3,74	3,65	Distanhorbun

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
28	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Harga Konstan	4,54	4,38	4,31	3,57	3.54	3.43	Distanhorbun
29	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB Harga Berlaku	2,54	2,44	1,99	1,46	1.44	1.36	Distanhorbun
30	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB Harga Konstan	2,66	2,68	2,08	1,23	1.25	1.20	Distanhorbun
31	Produksi sektor pertanian	970.540	945.421	837.904	825.416	987.181	974.929	Distanhorbun
32	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Harga Berlaku	0,42	0,29	0,26	0,22	0.22	0.21	Distanhorbun
33	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Harga Konstan	0,48	0,38	0,35	0,26	0.25	0.24	Distanhorbun
34	Produksi sektor perkebunan	0	32.898	36.119	32.241	46.995	38.934	Distanhorbun
35	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB Harga Berlaku	2,54	2,10	3,73	3,82	3.74	3,65	Distanhorbun
36	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB Harga Konstan	2,66	2,08	4,31	3,57	3.54	3.43	Distanhorbun
37	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Harga Berlaku	0,01	0,01	0,01	0,01	0.01	0.01	Distanhorbun

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
38	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Harga Konstan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	Distanhorbun
39	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Harga Berlaku	1,53	1,54	1,7	2,80	2,80	2,80	Disperdagin
40	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Harga Konstan	1,1	1,08	1	2,66	2,57	2,57	Disperdagin
41	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku	3,13	3,30	3,30	4,79	4,79	4,83	Disbudpar
42	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Harga Konstan	3,24	3,24	3,24	3,29	3,29	3,32	Disbudpar
43	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Harga Berlaku			1,54	1,56	1,53	1,53	Diskanak
44	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Harga Konstan			1,55	1,57	1,53	1,53	Diskanak
45	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Harga Berlaku	13,83	13,33	13,01	13,09	13,29	13,91	Disperdagin
46	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Harga Konstan	13,02	12,90	12,76	12,93	13,05	53,79	Disperdagin
47	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Harga Berlaku	55,41	55,02	54,73	54,12	53,70	53,26	Disperdagin

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
48	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Harga Konstan	55,66	55,22	54,82	54,46	54,17	13,17	Disperdagin
	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	822.801	924.109	1.263.655	1.369.902	1.435.960	1.664.919	Bappedalitbang
2	Nilai tukar petani	101,37	99,6	101,17	101,32	100,1	103,18	Distanhorbun
4	Produktivitas total daerah	63,9	NA	76,4	75,08	75,08	74,30	Distanhorbun
5	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	1,38	1,38	1,38	0,96	1,38	1,38	DPMD
6	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	8,03	7,98	7,48	7,13	7,02	6,98	Disperdagin
7	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	2,97	4,92	3,40	3,36	1,96	1,41	Setda
8	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR	1,24	1,36	1,33	1,15	0,98	0,94	Setda
9	Angka kriminalitas yang tertangani	3,70	4,25	4,89	5,63	5,71	5,93	Satpol PP
11	Rasio ketergantungan	56,73	56,57	53,66	51,78	49,37	50,39	Disnaker
	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	Layanan Urusan Wajib Dasar							

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
	Pendidikan							
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	31,10	37,69	41,42	38,51	42,85	43,28	Disdik
2	Angka partisipasi kasar							Disdik
	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	31,10	37,69	41,42	38,51	42,85	43,33	Disdik
	SD/MI/PA	108,71	94,89	90,10	98,14	99,49	97,45	Disdik
	SMP/MTs/PB	95,43	90,20	88,12	94,26	93,24	92,69	Disdik
3	Angka pendidikan yang ditamatkan							
4	Angka Partisipasi Murni							Disdik
	SD/MI/PA	99,02	85,30	81,25	87,47	99,49	88,75	Disdik
	SMP/MTs/PB	85,53	78,91	77,08	72,23	93,24	83,21	Disdik
6	Angka Putus Sekolah							
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0,379	0,267	0,201	0,087	0,065	0,098	Disdik
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	0,954	0,932	0,640	0,113	0,210	0,273	Disdik
7	Angka Kelulusan:							
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	99,81	100	99,73	100	99,83	99,76	Disdik
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	99,99	98,93	100	100	100	99,04	Disdik
8	Angka Melanjutkan (AM):							
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	99,38	101,2	98,54	98,84	98,17	110,41	Disdik
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi	57,05	59,43	62,38	86,21	87,42	88,95	Disdik

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
	bangunan baik							
	Sekolah pendidikan SMP/MTs/SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	63,98	65,46	67,95	87,68	89,87	92,13	Disdik
13	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	68,86	71,54	71,49	85,63	80,63	82,97	Disdik
	Kesehatan							
1	Jumlah Kematian bayi dan neonatal	166	216	199	142	105	109	Dinkes
2	Jumlah Kematian balita	8	20	6	9	8	13	Dinkes
3	Jumlah kematian neonatal		180	169	126	97	105	Dinkes
4	Jumlah kematian ibu	60	71	69	58	59	55	Dinkes
5	Rasio posyandu per satuan balita	8,91	8,91	8,99	8,53	8,92	8,57	Dinkes
6	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	1 : 9.718	1 : 9.383	1 : 13.847	1 : 15.266	1 : 16.053	1:13.808	Dinkes
7	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	1 : 232.353	1 : 193.836	1 : 197.450	1 : 206.940	1 : 204.108	1:200.781	Dinkes
8	Rasio dokter per satuan penduduk	1 : 3.923	1 : 4.016	1 : 4.760	1 : 3869	1 : 3.737	1 : 3.820	Dinkes
9	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1 : 2667	1 : 2730	1 : 4063	1 : 3352	1 : 2.508	1 : 2.563	Dinkes
10	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	76,7	77,93	78,1	85,4	82,5	77,64	Dinkes

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	86,11	87,6	87,9	88,01	92,63	89,29	Dinkes
13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	95,1	95,16	92,4	97,49	81,34	95,49	Dinkes
14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100,00	100,00	100,00	100	100	100	Dinkes
15	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	92,28	95,73	101,54	95,21	90,37	93,17	Dinkes
16	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	2,11	1,91	1,25	0,68	0,9	0,5	Dinkes
17	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	25,38	31,28	31	35,66	53,43	27,79	Dinkes
18	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	92,08	91,61	8360	83,61	91,66	97,66	Dinkes
19	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	157,61	151,38	176	166	196	232	Dinkes
20	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	1,5	0,6	0	0,9	1	1	Dinkes
21	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	75,53	72,32	72,96	68,8	73,88	63,34	Dinkes
22	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program	90	93	97	89	91	97,15	Dinkes

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
	DOTS							
23	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100	100	Dinkes
30	Penderita diare yang ditangani	13.467	163.904	159.407	159.405	130.488	159.500	Dinkes
31	Angka kejadian Malaria	0	0	0	0	0	0	Dinkes
32	Tingkat kematian akibat malaria	0	0	0	0	0	0	Dinkes
33	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	0	0	0	0	0	0	Dinkes
34	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	0	0	0	0	0	0	Dinkes
35	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,001	0,018	0,019	0,021	0,025	0,025	Dinkes
36	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	0	0	0	0	0	0	Dinkes
37	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	20,82	100	100	100	3,45	80,7	Dinkes
39	Cakupan kunjungan bayi	94,36	96,03	96,1	96,21	95,85	94,16	Dinkes
40	Cakupan puskesmas	252,5	252,5	252,5	252,5	252,5	252,5	Dinkes
41	Cakupan pembantu puskesmas	30,18	30,18	30,18	35,02	28,05	30,05	Dinkes

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
42	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	84,51	86,8	93,54	102,33	98	99	Dinkes
43	Cakupan pelayanan nifas	87,47	88,73	88,1	97,83	94,4	98,3	Dinkes
44	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	46,23	41,49	42,08	43,33	50,08	64,89	Dinkes
45	Cakupan pelayanan anak balita	77,42	79,49	79,69	81,95	91,05	84:43:00	Dinkes
46	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	93,8	94,84	94,84	100	100	100	Dinkes
47	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	90,23	78,78	91	91	82,5	89,5	Dinkes
48	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	55,15	66,09	70,09	88,47	88,47	89,67	Dinkes
49	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100	100	100	100	100	100	Dinkes
50	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	100	100	100	100	100	Dinkes
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
	Pekerjaan Umum							
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,7626	0,7140	0,7443	0,7397	0,8488	0,8641	DPUPR

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
2	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	76,26	71,4	74,43	73,97	84,88	86,41	DPUPR
4	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4		0,00033	0,00031	0,00028	0,00027	0,00027	DPUPR
5	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	76,26	71,40	74,43	73,97	84,88	86,41	DPUPR
7	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	31,38	21,03	21,67	23,79	30,00	30,00	DPUPR
8	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	2,23	2,80	2,88	3,13	2,80	2,80	DPUPR
9	Persentase rumah tinggal bersanitasi	68,00	72,58	68,15	64,65	69,83	68,53	DPUPR
11	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	39,09	37,76	37,76	36,24	36,52	36,8	DPUPR
14	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	63,50	47,35	37,19	58,12	63,57	67,74	DPUPR
15	Rasio Jaringan Irigasi	0,4434	0,4900	0,5001	0,4607	0,0491	0,0491	DPUPR
16	Persentase penduduk berakses air minum	4,19	44,19	44,1	47,8	51,5	57,3	DPUPR
17	Persentase areal kawasan kumuh	0,32	0,28	0,26	0,295	0,290	0,230	DPKPP

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
19	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	21,9	21,4	20,9	20,4	27,3	33,37	DPKPP
20	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	0,95	0,94	0,92	2,46	3,26	2,42	Setda
	Penataan Ruang:							
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	0,264	0,2716	0,2976	0,2604	0,2831	0,3594	DPUPR
2	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	0,2180	0,2382	0,2639	0,3115	0,3351	0,3640	DPKPP
3	Ketaatan terhadap RTRW	84,13	86,65	86,50	87,50	70,00	70,00	DPUPR
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							
1	Rasio rumah layak huni	0,231	0,2326	0,237	0,2403	0,2473	0,2523	DPKPP
2	Rasio permukiman layak huni	0,9967	0,9971	0,9976	0,9957	0,9975	0,9983	DPKPP
4	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	95,29	95,87	96,83	97,57	99,30	99,08	DPKPP
8	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	29,32	37,30	49,51	67,66	88,21	88,92	DPKPP
9	Persentase pemukiman yang tertata	8,025	8,034	8,044	8,053	24,459	25,841	DPKPP
11	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0,32	0,28	0,26	0,295	0,290	0,230	DPKPP

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
13	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	47,70%	53,69%	59,22%	60,14%	62,21%	62,67%	DPKPP
	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat							
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	108,75	10	10	10	10	10	Satpol PP
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	15,37	74,83	86,22	90,06	93,89	97,73	Satpol PP
9	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	88%	88%	89%	89%	89%	89%	Damkar
10	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	45	44	36	35,25	18,6	20,27	Damkar
12	Persentase Penegakan PERDA	15,37	72,09	76,51	82,72	87,92	93,13	Satpol PP
	Sosial							
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	0,26	0,25	0,37	0,39	0,42	0,47	Dinas Sosial
7	Persentase PMKS yang tertangani	0,26	0,25	0,37	0,39	0,42	0,44	Dinsos
8	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	0,26	0,25	0,37	0,39	17,27	30,45	Dinsos

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
9	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	164,00	164,00	164,00	164,00	190,00	190,00	Dinsos
10	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	0,24	4,94	8,73	9,73	4,73	4,73	Dinsos
11	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	0,24	4,94	8,73	9,73	4,73	4,73	Dinsos
12	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	0,26	0,25	0,37	0,39	17,27	30,45	Dinsos
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar							
	Tenaga Kerja							
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	159	153	325	200	176	153	Disnaker
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	54	41	45	70	15	51	Disnaker
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	22,97	105,36	116,67	100	112	117,63	Disnaker
4	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis	400	590	800	900	380	420	Disnaker

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
	kompetensi							
5	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	100	65	230	98	49	0	Disnaker
6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	0	0	0	0	0	60	Disnaker
7	Kualitas Tenaga Kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)	190,84	198,18	205,52	198,18	198,18	198,18	Disnaker
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	16,4	16,86	17,33	17,82	7:26	18,83	DP3AP2KB
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	20	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	DP3AP2KB
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	44,55	45,44	46,35	47,28	1157:16:48	49,2	DP3AP2KB
4	Rasio KDRT	0,00004	0,000039	0,000038	0,000037	0,00036	0,0035	DP3AP2KB
7	Partisipasi angkatan kerja perempuan	50,15	51,15	52,18	53,22	54,28	55,37	DP3AP2KB
	Pangan							
1	Ketersediaan pangan utama	NA	NA	57	87,44	61,75	63,00	DKP

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	NA	133,15	104,14	121,38	113,06	122,97	DKP
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	NA	113,67	95,50	104,00	111,96	102,26	DKP
4	Ketersediaan protein perkapita	NA	152,63	112,78	138,75	114,16	143,68	DKP
5	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	NA	54,84	90,91	87,5	NA	91	DKP
6	Rawan Ketersediaan Pangan	NA	5	25	26,7	32,5	37,5	DKP
7	Rawan Rumah Tangga Miskin	NA	10	22,5	24,48	27,5	30	DKP
8	Rawan Akses Jalan	NA	7,5	12,5	26,7	35	32,5	DKP
9	Rawan Akses Listrik	NA	2,5	2,5	6,68	5	7,5	DKP
10	Rawan Gizi Kurang	NA	10	25	28,93	30	37,5	DKP
11	Rawan Akses Air Bersih	NA	17,5	27,5	44,5	47,5	62,5	DKP
12	Rawan Akses Fasilitas Kesehatan	NA	2,5	7,5	8,9	10	12,5	DKP
13	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	NA	93,24	80,98	95,82	81,56	91	DKP
	Pertanahan							
1	Persentase luas lahan bersertifikat	26,5	26,83	26,83	26,83	49,35	55,73%	DPKPP
2	Penyelesaian kasus tanah Negara	0	0	0	0	0	0	DPKPP
3	Penyelesaian izin lokasi	69,75	65,89	64,79	62,58	41,34	60,1	DPMPTSP

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
	Lingkungan Hidup							
1	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL	64,57	73,17	65	100	98	94,29	DLH
2	Penegakan hukum lingkungan	75,00	54,84	93,33	118,33	120	138,35	DLH
3	Pencemaran status mutu air	98,73	100	100	97,56	92,13	0	DLH
4	Jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis persyaratan pengendalian pencemaran udara	100	100	100	98,68	92,31	93,41	DLH
5	Tempat Pembuangan Sampah Persatuan Penduduk		23,16	23,53	23,89	68,24	66,77	DLH
6	Ratio Tempat Pembuangan Sampah Per satuan Penduduk		5,89	6,13	2,38	3,42	4,46	DLH
7	Persentase Penanganan Sampah		58,92	61,37	60,77	64,56	65,05	DLH
8	Persentase jumlah sampah yang tertangani	39,05	58,92	61,37	60,77	64,56	68,35	DLH
9	Tingkat Pengawasan Pencemaran Status Mutu Air	60	85	87	86,83	92,13	91,01	DLH
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
1	Rasio penduduk berKTP per satuan	0,724	0,724	0,724	0,725	0,850	1,000	Disdukcapil

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
	penduduk							
5	Rasio bayi berakte kelahiran	0,62	0,615	0,615	0,615	1	1	Disdukcapil
6	Rasio pasangan berakte nikah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Disdukcapil
7	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	TIDAK ADA	Disdukcapil					
8	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	SUDAH	100	100	100	100	101	Disdukcapil
9	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	72,39	71,93	80,22	87,70	100,00	107,16	Disdukcapil
11	Cakupan penerbitan akta kelahiran	61,51	59,57	71,82	72,11	85,02	92,23	Disdukcapil
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik				0,96	0,96	0,96	DPMD
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	78,37	88,91	90,87	93,15	95,43	97,71	DPMD
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	112,47	112,47	112,47	112,47	112,47	112,47	DPMD
4	Persentase LSM aktif	25,25	26,57	31,42	32,96	33,12	34,24	Kesbangpol
5	Persentase LPM Berprestasi	6	6	6	4	4	4	DPMD
6	Persentase PKK aktif	100	100	100	100	100	100	DPMD
7	Persentase Posyandu aktif	100	100	100	100	100	100	DPMD

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
8	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	100	100	100	100	100	100	DPMD
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2,54	2,48	2,48	2,34	2,28	2,22	DP3AP2KB
2	Total Fertility Rate (TFR)	2,44	2,44	2,61	2,61	2,61	2,61	DP3AP2KB
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,89	1,89	1,87	1,86	1,83	1,81	DP3AP2KB
4	Ratio Akseptor KB	0,7301	0,7310	0,7545	0,7334	0,7376	0,7378	DP3AP2KB
5	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	73,01	73,10	75,45	73,74	73,76	73,78	DP3AP2KB
6	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	4,87	4,81	4,2	4,05	1,81	1,88	DP3AP2KB
7	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	17,32	17,03	14,86	14,89	15,45	17,42	DP3AP2KB
8	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	9,18	9,58	13,43	14,26	14,14	10,41	DP3AP2KB
9	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	N/a	N/a	N/a	15,18	11,19	12,5	DP3AP2KB
10	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	79,01	79,23	79,52	80,63	80,69	77,84	DP3AP2KB

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
11	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	79,47	79,51	79,58	79,09	79,66	76,05	DP3AP2KB
12	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	76,33	76,41	76,53	72,24	74,85	76,12	DP3AP2KB
13	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	29,49	29,26	28,80	28,34	27,59	27,59	DP3AP2KB
14	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	82,37	82,43	82,35	84,2	85,9	72,76	DP3AP2KB
15	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	1	1	1	1	1	1	DP3AP2KB
16	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100	100	100	100	100	100	DP3AP2KB
17	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	76,93	77,43	77,93	77,93	80,22	79,25	DP3AP2KB

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
18	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	100	100	100	100	100	100	DP3AP2KB
19	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100	100	100	100	100	100	DP3AP2KB
	Perhubungan							
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	52.633.046	53,948,872	55,297,594	60,471,360	58.097.035	62.065.440	Dishub
2	Rasio ijin trayek	0,002307	0.002320	0.002334	0.001282	0,001398	0,00123	Dishub
3	Jumlah uji kir angkutan umum	18.987	19.177	19.369	20.135	23,326	40.387	Dishub
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	6	1	0	0	5	1	Dishub
5	Persentase layanan angkutan darat	0,0748389	0,0553567	0,0390784	0,0326119	0,0407307	0,0528	Dishub
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	50,45	39.63%	31.13%	29.63%	22,33	19,62	Dishub
7	Pemasangan Rambu-rambu	44	20.00%	20.00%	45%	9,09	0,65	Dishub
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,001788	0.00163	0.00148	0.001353	0,00124	0,00112	Dishub
9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	15.789.914	16,184,662	16,589,278	17,004,010	17.429.110	17.864.838	Dishub
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	558.450	564	570	575	581,125	586.937	Dishub

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
	Komunikasi dan Informatika							
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	357	350	362	375	395	395	Diskominfo
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	78,93	78,93	78,93	78,93	78,93	78,93	Diskominfo
	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah							
1	Persentase koperasi aktif	67,64%	69,44%	71,65%	69,85%	74,75%	31,61%	DiskopUKM
2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	41,87%	49,07%	56,53%	75,49%	73,86%	75,08%	DiskopUKM
3	Persentase BPR/LKM aktif	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Setda
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	87,77%	99,12%	99,12%	98,98%	98,97%	99,01%	DiskopUKM
	Penanaman Modal							
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	68	72	87	105	98	331	DPMPTSP
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	2,9	9,72	8,92	9,68	1,84	3,64	DPMPTSP
3	Rasio daya serap tenaga kerja	19	28	33	61	77	77	DPMPTSP
4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (miliar rupiah)	363,12	234,76	-8,23	8,52	-81,03	98,40	DPMPTSP

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
	Kepemudaan dan Olah Raga							
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	28,57	35,71	42,86	50,00	85,71	85,71	Dispora
2	Persentase wirausaha muda		17,39	17,39	21,74	21,74	21,74	Dispora
3	Cakupan pembinaan olahraga	71,667	75,00	75,00	75,00	100	100	Dispora
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	45,09	45,09	45,09	45,98	53,57	54,57	Dispora
5	Cakupan pembinaan atlet muda	2,31	2,51	2,70	2,89	2,89	2,89	Dispora
6	Jumlah atlet berprestasi	5	664	82	20	115	115	Dispora
7	Jumlah prestasi olahraga	1	2	9	2	7	7	Dispora
	Statistik							
1	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	tidak ada	Bappedalitbang
2	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappedalitbang
	LAYANAN URUSAN PILIHAN							
	Pariwisata							
1	Kunjungan wisata		4.975.939	4.992.320	8.625.229	6.944.804	7.173.278	Disbudpar
	Kebudayaan							
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	8	9	8	9	7	9	Disbudpar

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	31	95	50	145	35	35	Disbudpar
	Perpustakaan							
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	0,00675	0,00763	0,01505	0,01519	0,01307	0,0129	DIAP
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	37,09	32,14	36,76	36,76	36,18	36,18	DIAP
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	DIAP
4	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	0,68	0,76	1,51	1,52	1,31	1,29	DIAP
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	10.661	11.417	11.790	11.790	13.010	13.010	DIAP
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	2	2	2	2	2	4	DIAP
	Karsipan							
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	92,31	91,03	100	100	100	100	DIAP
2	Peningkatan SDM pengelola karsipan	7	5	5	5	6	8	DIAP
	Pertanian							

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB							
	- Harga Berlaku	4,10	3,96	3,81	3,82	3,74	3,65	Distanhorbun
	- Harga Konstan	4,54	4,38	4,31	3,57	3,54	3,43	Distanhorbun
2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB							
	- Harga Berlaku	2,54	2,44	1,99	1,46	1,44	1,36	Distanhorbun
	- Harga Konstan	2,66	2,68	2,08	1,23	1,25	1,2	Distanhorbun
3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB							
	- Harga Berlaku	0,42	0,29	0,26	0,22	0,22	0,21	Distanhorbun
	- Harga Konstan	0,48	0,38	0,35	0,26	0,25	0,24	Distanhorbun
4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB							
	- Harga Berlaku	2,54	2,10	3,73	3,82	3,74	3,65	Distanhorbun
	- Harga Konstan	2,66	2,08	4,31	3,57	3,54	3,43	Distanhorbun
5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar							
	- padi sawah	60,41	63,94	63,66	64,25	60	63,25	Distanhorbun
	- padi gogo	33,87	33,82	32,69	33,3	34,82	32,58	Distanhorbun
	- Produktivitas palawija (ku/ha)	167,56	171,64	175,2	170,68	294,75	172,02	Distanhorbun
	- Produktivitas sayuran (ku/ha)	106,69	107,22	107,76	108,30	115,12	116,05	Distanhorbun

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
6	Cakupan bina kelompok petani	2,686	3,34	2,63	3,10	3,57	4,04	Distanhorbun
	Energi dan Sumber Daya Mineral							
1	Persentase rumah tangga pengguna listrik	82,65	91,04	97,25	98,18	98,76	99,11	DPKPP
2	Rasio ketersediaan daya listrik	90,03	96,48	97,25	98,18	98,76	99,11	DPKPP
3	Persentase pertambangan tanpa ijin	100	100	100	100	100	100	Satpol PP
	Perdagangan							
1	Ekspor Bersih Perdagangan (USD)	919.956.537,21	928.741.773,45	967.018.119,05	927.132.432	1.040.253.730,70	1.518.619.551,65	Disperdagin
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	49,88	56,49	56,30	57,60	57,63	57,68	Disperdagin
	Perindustrian							
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	86,36	86,20	88,78	82,18	83,37	84,78	Disperdagin
	Transmigrasi							
1	Persentase transmigran swakarsa	0	0	0	0	0	0	Disnaker
	Kelautan dan Perikanan							

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
1	Produksi perikanan	100,24	100,43	100,24	101,25	101,22	100,33	Diskanak
2	Konsumsi ikan	23,97	25,18	26,41	27,65	28,34	29,53	Diskanak
PENUNJANG URUSAN								
Perencanaan Pembangunan								
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Tidak ada	Bappedalitbang					
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Tidak Ada	Bappedalitbang
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappedalitbang
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Bappedalitbang
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD		100	100	100	100	100	Bappedalitbang
KEUANGAN								
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
2	Persentase SILPA terhadap APBD	13,48	11,29	16,27	19,29	9,32	7,73	BPKAD

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
3	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	3,83	5,25	4,84	2,60	0,86	-	BPKAD
4	Persentase belanja pendidikan (20%)	32,92	33,20	29,97	25,43	26,59	29,16	BPKAD
5	Persentase belanja kesehatan (10%)	13,55	14,29	16,69	18,48	18,52	16,52	BPKAD
6	Perbandingan antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung							BPKAD
7	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	1,62	1,69	1,44	1,57	1,82	1,77	BPKAD
8	Penetapan APBD	Tidak Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BPKAD
		10 Januari 2013	8 Januari 2014	31 Desember 2014	31 Desember 2015	30 Desember 2016	29 Des 2017	BPKAD
	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan							
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	15	15	15	15	15	15	BKPP
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2,832366976	2,022949847	8,374384236	1,20792897	1,001924601	1,001924601	BKPP
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan	5,75	6,74	4,89	6,49	6,23	6,23	BKPP

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
	struktural							
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	41	41	41	41	37	37	BKPP
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	6.744	7.549	7.376	7.286	5.565	5.565	BKPP
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	12.704	12.628	12.568	12.045	12.064	12.064	BKPP
	PENGAWASAN							
1	Persentase tindak lanjut temuan	100	100	100	100	100	100	Inspektorat
2	Persentase pelanggaran pegawai	28	10	43	43	37	-	Inspektorat
3	Jumlah temuan BPK	68,17	68,17	58,19	67,58	66,84	81,49	Inspektorat
	SEKRETARIAT DEWAN							
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Setwan

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	PD PENANGGUNG JAWAB
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Setwan
3	Terintegrasi program program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Setwan

2.5 Evaluasi Terhadap RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 sampai dengan tahap ke-3 (Periodisasi Tahun 2005-2018)

Berdasarkan dokumen RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025, misi dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025 belum mencantumkan kondisi capaian kinerja pada awal tahun (2005) serta kondisi target capaian pada akhir tahun rencana (2025). Dengan demikian, seluruh sasaran pokok yang merupakan penjabaran dari masing-masing misi tidak dapat dinilai/dievaluasi berdasarkan kuantitasnya, baik untuk tahun 2011 maupun tahun 2015. Kondisi ini akan terjadi pada tahapan evaluasi tahun 2021 serta tahun 2026, karena masing-masing sasaran pokok belum memperhitungkan target capaian kuantitatif.

Di sisi lain, sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025 belum mencantumkan indikator kinerja dan target indikator kinerja yang ingin dicapai oleh sasaran tersebut.

Sehubungan dengan tidak ditetapkannya indikator dan target kinerja yang akan dicapai dari masing-masing sasaran pokok pada masing-masing misi, maka ketercapaian kinerja RPJPD Kabupaten Bogor tidak dapat dihitung. Akibat tidak ditetapkannya indikator kinerja dan target kinerja sasaran pokok RPJMD mulai tahun 2005-2018, maka hal-hal yang terjadi adalah :

- a. Penetapan visi dan misi RPJMD pada masing-masing periode tidak berdasarkan sasaran pokok RPJMD yang ingin dicapai.
- b. Tidak adanya konsistensi antar periode, karena masing-masing tidak terikat pada target yang ingin dicapai. Periode masa bhakti setelahnya tidak dapat membuat target pencapaian periode sebelumnya yang mungkin belum tercapai dan harus dilanjutkan demi mewujudkan target jangka panjang.
- c. Tidak dapat menentukan target pencapaian kinerja, apakah rendah, sedang atau tinggi terhadap target sasaran pokok RPJPD.

Evaluasi RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 dengan data dan informasi seadanya ditampilkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.74
Evaluasi Terhadap RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor				Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Bogor terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor (%)				Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD kabupaten/kota	Usulan Tindak Lanjut	
1	2	3	4	5				6				7				8	9	10
				2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020-2025	2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020 - 2025	2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020 - 2025	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
Misi1 Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas	Terwujudnya masyarakat yang berakhhlak mulia dan bermoral berdasarkan falsafah negara Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang ditunjukkan dengan kesolehan individu dan kesolehan sosial dalam perilaku sehari-hari	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data											
	Meningkatnya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak											

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor				Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Bogor terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor (%)				Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD kabupaten/kota	Usulan Tindak Lanjut	
1	2	3	4	5				6				7				8	9	10
				2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020-2025	2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020 - 2025	2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020 - 2025	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
	tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat, yang ditunjukkan dengan meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Melek Huruf (AMH), tingkat partisipasi pendidikan, Angka Harapan Hidup (AHH), status gizi anak serta menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan angka kesakitan	ditetapkan dalam RPJPD	ditetapkan dalam RPJPD	ada data	ada data	ada data	ada data											

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor				Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Bogor terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor (%)				Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD kabupaten/kota	Usulan Tindak Lanjut	
1	2	3	4	5				6				7				8	9	10
				2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020-2025	2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020 - 2025	2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020 - 2025	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
	Terwujudnya sumberdaya manusia yang berdaya saing yang ditunjukkan dengan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data											

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor				Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Bogor terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor (%)				Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD kabupaten/kota	Usulan Tindak Lanjut	
1	2	3	4	5				6				7				8	9	10
				2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020-2025	2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020 - 2025	2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020 - 2025	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
	Terkendalinya pertumbuhan penduduk beserta persebarannya dan tercapainya keseimbangan antara jumlah penduduk terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungannya	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data											
	Meningkatnya kompetensi, penempatan, perlindungan dan pengawasan tenaga kerja	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data											

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor				Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Bogor terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor (%)				Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD kabupaten/kota	Usulan Tindak Lanjut	
1	2	3	4	5				6				7				8	9	10
				2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020-2025	2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020 - 2025	2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020 - 2025	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
	Meningkatnya kualitas hidup lansia, kesejahteraan para penyandang masalah sosial serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data											
	Meningkatnya ketahanan budaya, jatidiri masyarakat dan terimplementasinya nilai luhur budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data											

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor				Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Bogor terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor (%)				Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD kabupaten/kota	Usulan Tindak Lanjut	
1	2	3	4	5				6				7				8	9	10
				2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020-2025	2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020 - 2025	2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020 - 2025	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
Misi 2 Terwujudnya perekonomian rakyat yang maju	Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di sektor industri dan perdagangan serta didukung oleh pertanian yang tangguh dan pariwisata yang berbasis masyarakat	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data											

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor				Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Bogor terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor (%)				Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD kabupaten/kota	Usulan Tindak Lanjut	
1	2	3	4	5				6				7				8	9	10
				2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020-2025	2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020 - 2025	2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020 - 2025	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
	Meningkatnya daya tahan dan daya saing dunia usaha di Kabupaten Bogor, terutama Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) serta tumbuhnya wirausaha baru	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data											

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor				Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Bogor terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor (%)				Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD kabupaten/kota	Usulan Tindak Lanjut	
1	2	3	4	5				6				7				8	9	10
				2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020-2025	2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020 - 2025	2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020 - 2025	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
	Meningkatnya pelayanan jaringan infrastruktur transportasi yang andal dan terintegrasi serta terwujudnya kemudahan dan efisiensi bagi pergerakan orang, barang dan jasa	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data											
	Meningkatnya pelayanan jaringan irigasi untuk pemenuhan kebutuhan air bagi pertanian	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data											

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor				Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Bogor terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor (%)				Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD kabupaten/kota	Usulan Tindak Lanjut	
1	2	3	4	5				6				7				8	9	10
				2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020-2025	2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020 - 2025	2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020 - 2025	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
	Terwujudnya pengendalian pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan untuk kemajuan perekonomian daerah	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data											
	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana dasar permukiman sesuai dengan lingkungan yang sehat dan layak huni, baik di perkotaan maupun di perdesaan	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data											

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor				Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Bogor terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor (%)				Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD kabupaten/kota	Usulan Tindak Lanjut	
1	2	3	4	5				6				7				8	9	10
				2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020-2025	2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020 - 2025	2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020 - 2025	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
	Terpenuhinya kebutuhan energi listrik bagi seluruh masyarakat	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data											
	Meningkatnya jangkauan pelayanan jaringan komunikasi dan teknologi informasi (telematika) yang efisien dan modern ke seluruh wilayah	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data											

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor				Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Bogor terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor (%)				Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD kabupaten/kota	Usulan Tindak Lanjut	
1	2	3	4	5				6				7				8	9	10
				2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020-2025	2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020 - 2025	2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020 - 2025	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
	Meningkatnya pemanfaatan sumber-sumber energi alternatif dan terbarukan, seperti energi hidro, surya, angin, panas bumi dan bio -energi lainnya untuk pembangunan daerah	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data											
	Terjaminnya ketersediaan kebutuhan pangan masyarakat	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data											

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor				Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Bogor terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor (%)				Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD kabupaten/kota	Usulan Tindak Lanjut	
1	2	3	4	5				6				7				8	9	10
				2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020-2025	2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020 - 2025	2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020 - 2025	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
	Meningkatnya investasi di daerah, perluasan lapangan kerja, nilai tambah produk unggulan Kabupaten Bogor disertai dengan meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat dan pendapatan per kapita masyarakat, sehingga menurunnya jumlah pengangguran terbuka dan penduduk miskin di Kabupaten Bogor	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data											

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor				Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Bogor terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor (%)				Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD kabupaten/kota	Usulan Tindak Lanjut	
1	2	3	4	5				6				7				8	9	10
				2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020-2025	2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020 - 2025	2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020 - 2025	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
Misi 3 Terwujudnya Kabupaten Bogor yang TEGAR BERIMAN (Tertib, Segar, Bersih, Indah, Mandiri, Aman dan Nyaman) dan Berkelanjutan	Meningkatnya penegakan hukum demi terwujudnya stabilitas keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta tercapainya situasi dan kondisi yang kondusif bagi keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Bogor	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data											

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor				Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Bogor terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor (%)				Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD kabupaten/kota	Usulan Tindak Lanjut	
1	2	3	4	5				6				7				8	9	10
				2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020-2025	2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020 - 2025	2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020 - 2025	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
	Meningkatnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam mentaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data											
	Tercapainya penataan ruang yang memperhatikan keseimbangan antara fungsi lindung dan fungsi budidaya	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data											

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor				Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Bogor terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor (%)				Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD kabupaten/kota	Usulan Tindak Lanjut	
1	2	3	4	5				6				7				8	9	10
				2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020-2025	2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020 - 2025	2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020 - 2025	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
	Terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan dan keindahan dalam pengaturan tata ruang dan tata hijau kawasan	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data											
	Meningkatnya kualitas lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data											

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor				Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Bogor terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor (%)				Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD kabupaten/kota	Usulan Tindak Lanjut	
1	2	3	4	5				6				7				8	9	10
				2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020-2025	2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020 - 2025	2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020 - 2025	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
	Meningkatnya kemampuan untuk mendayagunakan segenap potensi daerah dan potensi masyarakat untuk mencapai kemandirian daerah	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data											
	Terciptanya suasana aman dan nyaman dalam lingkungan permukiman, wilayah dan daerah	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data											

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor				Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Bogor terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor (%)				Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD kabupaten/kota	Usulan Tindak Lanjut	
1	2	3	4	5				6				7				8	9	10
				2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020-2025	2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020 - 2025	2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020 - 2025	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
	Meningkatnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam serta pelestarian fungsi lingkungan hidup yang berkelanjutan	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data											

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor				Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Bogor terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor (%)				Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD kabupaten/kota	Usulan Tindak Lanjut	
1	2	3	4	5				6				7				8	9	10
				2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020-2025	2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020 - 2025	2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020 - 2025	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
	Terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam setempat untuk mewujudkan nilai tambah sosial, ekonomi, budaya dan menjadi modal dasar pembangunan daerah	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data											

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor				Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Bogor terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor (%)				Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD kabupaten/kota	Usulan Tindak Lanjut	
1	2	3	4	5				6				7				8	9	10
				2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020-2025	2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020 - 2025	2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020 - 2025	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
Misi 4 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang didukung oleh kondisi politik yang demokratis	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data											

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor				Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Bogor terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor (%)				Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD kabupaten/kota	Usulan Tindak Lanjut	
1	2	3	4	5				6				7				8	9	10
				2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020-2025	2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020 - 2025	2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020 - 2025	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
	Meningkatnya profesionalisme aparatur, efisiensi birokrasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bermuara kepada peningkatan pelayanan publik, sehingga terwujud pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data											

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor				Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Bogor terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor (%)				Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD kabupaten/kota	Usulan Tindak Lanjut	
1	2	3	4	5				6				7				8	9	10
				2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020-2025	2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020 - 2025	2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020 - 2025	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
	Meningkatnya penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang menjamin terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data											
	Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data											

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor				Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Bogor terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor (%)				Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD kabupaten/kota	Usulan Tindak Lanjut	
1	2	3	4	5				6				7				8	9	10
				2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020-2025	2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020 - 2025	2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020 - 2025	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
	Meningkatnya transparansi dan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik, dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang efisien dan modern	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ditetapkan dalam RPJPD	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data											
Rata-rata capaian kinerja (%)																		
Predikat Kinerja																		
<p>Sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional:</p> <ol style="list-style-type: none"> Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab 																		

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor				Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Bogor terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Bogor (%)				Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD kabupaten/kota	Usulan Tindak Lanjut			
1	2	3	4	5				6				7				8	9	10		
				2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020-2025	2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020 - 2025	2005 - 2009	2010 - 2014	2015 - 2019	2020 - 2025	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
2. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera																				
3. Terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan																				
4. Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri																				
5. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan																				
6. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari																				
7. Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional																				
8. Terwujudnya peranan Indonesia yang meningkat dalam pergaulan dunia internasional																				
Usulan tindak lanjut dalam RPJPD Kabupaten/kota:																				

Sumber : Evaluasi terhadap RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025

2.6 Pencapaian Suistanable Development Goals (SDGs)

Sebagai komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan secara nasional dan global seperti diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan, maka Pemerintah Kabupaten Bogor membuat Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs untuk periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023. Penyusunan RAD SDGs Kabupaten Bogor ini selain memperhatikan prinsip dasar pembangunan berkelanjutan yaitu people, planet, prosperity, peace, dan partnership, juga mengacu dan memperhatikan: (1) Sasaran, dan arah kebijakan Perubahan RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025; (2) Sembilan prioritas pembangunan (Nawacita) yang ada dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019; (3) Rancangan Akhir KLHS RPJMD Kabupaten Bogor 2018-2023; dan (4) Prioritas Pembangunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2019 sebagai bahan acuan untuk RPJMD 2018-2023 setelah pelantikan Bupati Baru. Pelaksanaan RAD SDGs Kabupaten Bogor tahun 2018 menjadi gambaran awal pencapaian target indikator dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Pencapaian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penyusunan RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2018-2023, guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Adapun capaian indikator SDGs Jawa Barat tahun 2018 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.75
Capaian Indikator SDGs Kabupaten Bogor Tahun 2018

No TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2018
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	8,57 % penduduk miskin
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	0,03%
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	87,73%
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	91,95%

No TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2018
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,4	keuangan mikro.	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	703,061 (100%)
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	70,70
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	73,96

No TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2018
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	99,49
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	93,24
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(j)	Percentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	85,02

No TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2018
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(k)	Percentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	99,11 %
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	16,30%
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	SOSIAL	2,1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	12.448(2,16%)
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	SOSIAL	2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	32,90% (Hasil Riskesdas 2018)

No TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2018
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	SOSIAL	2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	1,88%
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	SOSIAL	2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	6,7%
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	SOSIAL	2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	45,52%
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	SOSIAL	2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Konsumsi Ikan 29,77 Kg/Kapita/Tahun

No TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2018
				menyusui, serta manula.			
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	SOSIAL	2,3	Pada tahun 2030, mengandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	103.18%
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI). Jumlah kematian ibu	55 Kasus
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. *jumlah kematian balita	1 kasus
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. *jumlah kematian Neonatal	94 kasus

No TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2018
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. Jumlah kematian Bayi	15 kasus
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	91,95
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	0,0097%
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	232/ 100.000 penduduk
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	7 orang-

No TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2018
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Filariasis : 145 orang Kusta : 385 orang
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	109.988 (12,10%)
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun.	11.699 (1,83%)
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	993.580 orang
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	696.704 (70,12%)

No TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2018
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	72.752 (10,44%)
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	29.089 orang (2,61%)
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	3.653.791 (total peserta JKN)
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3,8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	80,70 %

No TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2018
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai <i>the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health</i> , yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	3.b.1.(a)	Percentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	100
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	SOSIAL	5,2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksplorasi seksual, serta berbagai jenis eksplorasi lainnya.	5.2.2.(a)	Percentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	54 kasus tertangani 10%
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelaanjutan	LINGKUNGAN	6,1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(a)	Percentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	73,96
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelaanjutan	LINGKUNGAN	6,1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelaanjutan.	73,46

No TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2018
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelaanjutan	LINGKUNGAN	6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	75 sekolah (45 sekolah di desa ODF, 30 sekolah di desa pamsimas)
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelaanjutan	LINGKUNGAN	6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	73,96
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelaanjutan	LINGKUNGAN	6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	22,61
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelaanjutan	LINGKUNGAN	6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	10,34

No TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2018
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	6,3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	ADA IPLT CIBINONG/ UPT SPALD (DPUPR)
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	6,5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	23 GP3A
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	339.931
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	NA

No TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2018
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1.(c)	Percentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	0.63 % (=165/26387)
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	21.400
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	9,08
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	4,79
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	339.931

No TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2018
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	7.173.278
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8,9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	23.231
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antar negara	EKONOMI	10,1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1*	Koefisien Gini.	0,4
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	LINGKUNGAN	11,6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	64,56
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	B

No TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2018
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	90%
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	61,37%
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16,7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	48,31%
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16,9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	85,02%

No TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Target	Target	No. Indikator	Indikator	Capaian 2018
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16,10	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	2
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	EKONOMI	17,1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	= (7.3 T/221.55T) x 100% = 37,18% = 3.29%
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	EKONOMI	17,1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	68,89

Sumber : Rancangan Akhir KLHS RPJMD Tahun 2018-2023

2.7 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pengertian Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi

kewenangan pemerintah kabupaten, meliputi: SPM Pendidikan, SPM Kesehatan, SPM Pekerjaan Umum, SPM Perumahan Rakyat, SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat, dan SPM Sosial.

Pemerintah Kabupaten Bogor telah menerapkan keenam SPM tersebut. Adapun rincian penerapan masing-masing jenis pelayanan dasar melalui program perangkat daerah terkait disajikan pada tabel dibawah.

Tabel 2.76
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Bogor
Tahun 2019

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Realisasi 2019	PD Pengampu
SPM PENDIDIKAN					
1	Pendidikan Dasar	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Utama SD	1 APM SD/MI	89,03%	Dinas Pendidikan
			2 APK SD/MI	97,46%	
			3 Persentase sekolah jenjang SD yang terakreditasi minimal B	82,53%	
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Utama SMP	4 APM SMP/MTs	83,54%	
			5 APK SMP/MTs	92,70%	
			6 Persentase sekolah jenjang SMP yang terakreditasi minimal B	74,21%	
2	Pendidikan Kesetaraan	Program Pendidikan Non-Formal	7 APM Paket A	89,03%	Dinas Pendidikan
			8 APK Paket B	83,54%	
			9 APM Paket A	97,46%	
			10 APK Paket B	92,70%	
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pendidikan Anak Usia Dini	11 APK PAUD	43,71%	Dinas Pendidikan
SPM KESEHATAN					
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program Kesehatan Masyarakat	1 Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	Dinas Kesehatan
			2 Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	
			3 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Realisasi 2019	PD Pengampu
4	Pelayanan kesehatan balita		4 Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	100%	
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		5 Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100%	
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif		6 Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut		7 Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100%	
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	8 Cakupan pelayanan penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar	100%	Dinas Kesehatan
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus		9 Cakupan pelayanan penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat		10 Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%	
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis		11 Cakupan pengobatan semua kasus TB (case detection rate/CDR) yang diobati	83%	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)		12 Cakupan screening HIV pada orang dengan risiko HIV	55%	
SPM PEKERJAAN UMUM					

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Realisasi 2019	PD Pengampu
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Pengembangan Pelayanan Air Minum dan Air Limbah	1 Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	71%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah DOMESTIK	Program Pelayanan Air Limbah	2 Persentase capaian pelayanan air limbah domestik	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

SPM PERUMAHAN RAKYAT

1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Program Penataan Perumahan	1 Cakupan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota		2 Cakupan penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah		

SPM TRANTIBUMLINMAS

1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Program Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Program Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Alam	Cakupan layanan informasi rawan bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Cakupan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Program	Perkiraan Realisasi 2019	PD Pengampu
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	Dinas Pemadam Kebakaran
SPM SOSIAL					
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial serta Pembinaan para Penyandang Disabilitas dan Trauma	1 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	45,00%	Dinas Sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti				
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti				
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti				
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Percentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat tanggap darurat bencana kabupaten	100%	Dinas Sosial

Sumber : Bappedalitbang Kab. Bogor 2019, diolah

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Dalam rangka menyusun perencanaan yang berkualitas dan tepat sasaran, hal mendasar yang wajib diidentifikasi, dirumuskan dan dianalisis oleh Pemerintah Kabupaten Bogor adalah terkait apa saja dan sejauhmana permasalahan-permasalahan daerah yang belum terselesaikan hingga akhir periode perencanaan sebelumnya. Menemukan permasalahan pembangunan menjadi dasar dalam penentuan isu strategis yang akan diselesaikan hingga akhir periode perencanaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, **permasalahan pembangunan** didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Adapun **isu strategis** adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Permasalahan yang dirumuskan terutama mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu : 1) aspek kesejahteraan masyarakat; 2) aspek daya saing daerah; dan 3) aspek pelayanan umum.

3.1 Permasalahan Pembangunan

3.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan aspek kesejahteraan umum, permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan adalah :

1. belum optimalnya kontribusi sektor-sektor produksi daerah terhadap PDRB Kabupaten Bogor. Capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bogor atas dasar harga berlaku pada tahun 2018 sebesar 221,547 triliun sedangkan atas dasar harga konstan mencapai 148,959 triliun.
2. Ketimpangan pendapatan yang dicerminkan oleh capaian indeks gini masih berada pada katagori sedang. Pada tahun 2018 indeks gini Kabupaten Bogor berada di posisi 0,34.
3. Masih tingginya angka kemiskinan akibat masih rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengakses potensi perekonomian. Pada tahun 2018 persentase penduduk dibawah garis kemiskinan sebesar 7,14%.
4. Masih tingginya tingkat pengangguran akibat masih rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengakses lapangan kerja. Pada tahun 2018 tingkat pengangguran terbuka mencapai 9,08%.
5. Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) belum mencapai standar global. Pada tahun 2018 capaian IPM Kabupaten Bogor sebesar 69,61. Hal ini diakibatkan tingkat pendidikan masyarakat masih rendah, dimana rata-rata lama sekolah belum mencapai standar batas tertinggi usia pendidikan dasar (12 tahun), pada tahun 2018 angka RLS mencapai 7,89, sedangkan harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Bogor telah diprediksi dapat melampaui jenjang pendidikan dasar, di tahun 2018 capaiannya 12,51. Di sisi lain, belum optimalnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat sehingga menyebabkan capaian angka harapan hidup masih perlu ditingkatkan, dimana capaian tahun 2018 sebesar 70,96.
6. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan masih belum optimal, dibuktikan dengan capaian indeks kepuasan masyarakat sebesar 78,57 di tahun 2018.
7. Masih terdapat wilayah rawan pangan akibat masih rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengakses dan menyediakan potensi pangan. Hal ini ditunjukkan dengan angka rawan ketersediaan pangan sebesar 37,50 di tahun 2018 serta skor pola pangan harapan sebesar 86,18.

8. Masih kecilnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah. Pada tahun 2018 kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah sebesar 38,28%.
9. Ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hal ini ditunjukan dengan indeks ketimpangan wiliamson pada tahun 2018 sebesar 0,96.

3.1.2 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah masih perlu ditingkatkan berdasarkan beberapa faktor, yaitu :

1. Masih kurangnya desa yang berstatus swasembada. Berdasarkan data terakhir persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa sebesar 0,96%.
2. Masih rendahnya kontribusi nilai ekspor bersih terhadap PDRB. Tahun 2017 rasio ekspor dan impor terhadap PDB sebesar 7,48%.
3. Masih tingginya angka ketergantungan penduduk di bawah dan di luar usia kerja terhadap penduduk usia kerja. Hal ini ditunjukkan dengan rasio ketergantungan di Kabupaten Bogor pada tahun 2018 sebesar 50,39%.
4. Masih rendahnya tingkat pengeluaran konsumsi masyarakat akibat masih rendahnya penghasilan. Hal ini ditunjukan oleh pengeluaran per kapita per tahun sebesar 9,901 juta per tahun.
5. Pembangunan ekonomi daerah masih perlu ditingkatkan. Hal ini ditunjukan dengan Laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,21 %, dan laju inflasi sebesar 2,21%.

3.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan dalam aspek pelayanan umum dijabarkan berdasarkan urusan dan bidang urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bogor, sebagai berikut :

1. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

1.1 Pendidikan

Berdasarkan kewenangan daerah, permasalahan lingkup pelayanan umum bidang urusan pendidikan yang belum terselesaikan adalah belum optimalnya pelayanan pendidikan, terutama dalam hal :

- a. Belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan standar pendidikan nasional. Hal ini bisa dilihat dari jumlah bangunan Sekolah SD/MI dalam kondisi baik pada tahun 2018 yang hanya mencapai 88,95% dan untuk SMP/MTs sebesar 92,13%.
- b. Masih rendahnya cakupan pelayanan pendidikan bagi penduduk usia pra sekolah. Rendahnya cakupan pelayanan pendidikan bagi penduduk usia pra sekolah terlihat dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang baru mencapai 43,28%.
- c. Belum idealnya komposisi guru terhadap murid/rombongan belajar. Tahun 2018 rasio guru/murid SD/MI sebesar 1:413, sedangkan rasio guru/Murid SMP/MTs sebesar 1:512.
- d. Belum terpenuhinya kebutuhan guru berdasarkan standar kualifikasi dan kompetensi. Hal ini ditunjukan dengan data jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebesar 82,97%.

1.2 Kesehatan

Berdasarkan kewenangan daerah, permasalahan lingkup pelayanan umum bidang urusan kesehatan yang belum terselesaikan adalah belum optimalnya pelayanan kesehatan, terutama dalam hal:

- a. Belum optimalnya penanganan terhadap kasus-kasus utama kesehatan masyarakat, seperti gizi buruk, jumlah kematian ibu, bayi dan neotal, penyakit menular dan tidak menular. Pada tahun 2018 Persentase balita gizi buruk sebesar 0,0138%, jumlah kematian ibu sebanyak 55 kasus, jumlah kematian bayi sebanyak 109 kasus.
- b. Belum optimalnya pemenuhan pelayanan kesehatan barbasis pemberdayaan masyarakat sebagai pintu gerbang pelayanan kesehatan pertama sebelum mendapatkan pelayanan dari puskesmas, Hal ini ditunjukan cakupan pembantu puskesmas terakhir tahun 2016 sebesar 35.02%.
- c. Belum optimalnya pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Berdasarkan data terakhir rasio tenaga medis per satuan penduduk sebesar 1 : 3.352 dan rasio dokter per satuan penduduk sebesar 1 : 3.869

- d. Belum optimalnya pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin/kurang mampu. Hal ini ditunjukan dengan cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin tahun 2018 sebesar 26,84%.
- e. Belum optimalnya kinerja pelayanan sdm kesehatan. Hal ini ditunjukan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2018 Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan sebesar 78,22%, RSUD Cibinong sebesar 85,44%, RSUD Ciawi sebesar 69%, RSUD Leuwiliang sebesar 75,89%, dan RSUD Cileungsi sebesar 80,26%
- f. Belum seluruhnya masyarakat Kabupaten Bogor yang terlayani jaminan kesehatan. Data tahun 2017 menunjukan bahwa cakupan pelayanan kesehatan masyarakat sebesar 64,60 %.

1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan kewenangan daerah, permasalahan lingkup pelayanan umum bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang belum terselesaikan adalah sebagai berikut :

- a. Belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur. Hal ini ditunjukan oleh jalan kabupaten kondisi baik sebesar 86,41 %.
- b. Belum optimalnya penanganan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk mendukung pertanian. Pada tahun 2017 persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik sebesar 67,74 %, sedangkan rasio jaringan irigasi sebesar 0,0491 per luas lahan budidaya pertanian.
- c. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa sanitasi lingkungan, air bersih, air minum, pemakaman, dan ruang publik lainnya. Hal ini ditunjukan dengan persentase rumah tinggal bersanitasi sebesar 68,53%, data akses air minum sebesar 4,78 %, rawan akses air bersih sebesar 62,50%, rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk sebesar 1:273.000, rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB sebesar 0,2831, ruang publik yang berubah

peruntukannya 4,50 dan persentase penduduk berakses air minum sebesar 57,3 pada data terakhir.

- d. Masih kurangnya pengawasan terhadap pemanfaatan lahan berdasarkan RTRW. Data tahun 2018 menunjukan bahwa persentase kesesuaian RTRW dengan pembangunan wilayah sebesar 81,40%,ini menunjukan bahwa sisanya masih belum sesuai dengan RTRW.

1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan pelayanan umum dalam bidang urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang belum terselesaikan adalah :

- a. Masih luasnya kawasan permukiman yang belum tertata. Data tahun 2017 menunjukan bahwa Persentase pemukiman yang tertata sebesar 24,45%, hal ini menunjukan bahwa kawasan pembangunan ekonomi daerah masih perlu ditingkatkan karena permukiman yang belum tertata sangat luas.
- b. Masih banyaknya rumah penduduk yang tidak layak huni berdasarkan standar. Hal ini ditunjukan oleh data tahun 2017 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar 8,47%.
- c. Masih banyaknya kawasan kumuh di wilayah perkotaan. Hal ini ditunjukan dengan areal kawasan kumuh perkotaan di Kabupaten Bogor sebesar 0,23 %.
- d. Masih minimnya penanganan dan pemanfaatan PSU (Prasarana dan Sarana Umum). Hal ini ditunjukan oleh cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU sebesar 62,67%.
- e. masih rendahnya persentase bangunan yang berjin. Hal ini ditunjukan oleh rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan sebesar 0,3640.

1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Permasalahan pelayanan umum yang belum terselesaikan adalah :

- a. Belum optimalnya penanggulangan dan pencegahan bencana. Data tahun 2018 menunjukan bahwa tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan wilayah manajemen sebesar 20,27 menit, persentase aparatur pemadam kebakaran yang

memenuhi standar kualifikasi sebesar 80 %, Persentase Mitigasi Bencana yang dilaksanakan 20 %, persentase pemulihan di daerah yang terkena bencana sebesar 96,70 % serta persentase desa/kelurahan siaga bencana kebakaran pada tahun 2017 sebesar 82%.

- b. Masih kurangnya jumlah polisi pamong praja yang mendukung trantibum dan penegakan perda. Data terakhir menunjukan bahwa rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk adalah 0,86.

1.6 Sosial

Permasalahan pelayanan umum di lingkup bidang urusan sosial yang belum terselesaikan adalah belum optimalnya penanganan dan penyelesaian kasus penyandang masalah kesejahteraan sosial dan masalah sosial. Hal ini ditunjukan dengan persentase PMKS yang tertangani sebesar 0,47% pada tahun 2018.

2. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.1 Tenaga Kerja

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan tenaga kerja yang belum terselesaikan adalah :

- a. belum optimalnya upaya fasilitasi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam penyelesaian masalah ketenakagerjaan. Hal ini ditunjukan oleh tingkat pengangguran terbuka sebesar 9,08% dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 62,71%.
- b. belum optimalnya pelayanan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja/pencari kerja. Data 2017 menunjukan bahwa besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi hanya sebanyak 420 tenaga kerja/pencari kerja.

2.2 Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang belum terselesaikan adalah belum optimalnya upaya penanganan kasus-kasus yang menimpa perempuan dan anak baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat. Berdasarkan data terakhir

penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan sebesar 41 kasus.

2.3 Pangan

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan pangan yang belum terselesaikan adalah :

- a. belum optimalnya upaya penurunan kerawanan pangan daerah. Data tahun 2018 menunjukan bahwa rawan ketersediaan pangan sebesar 37,50%.
- b. belum optimalnya upaya dan kebijakan pemenuhan pangan utama daerah. Hal ini ditunjukan dengan ketersediaan pangan utama tahun 2018 sebesar 63,00%.

2.4 Lingkungan hidup

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan lingkungan hidup yang belum terselesaikan adalah :

- a. belum optimalnya penanganan masalah persampahan. Hal ini ditunjukan oleh persentase jumlah sampah yang tertangani sebesar 65,05%.
- b. Berkurangnya daerah resapan air yang memicu terjadinya bencana kekeringan serta kurangnya cadangan air tanah yang dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan ekologi dan ekosistem. Hal ini ditunjukan dengan penggunaan lahan pada zona resapan tahun 2017 sebesar 46.114,61 ha.
- c. masih tingginya pencemaran air, udara, dan tanah. Hal ini ditunjukan dengan beberapa air sungai dan situ atau danau sudah tercemar dengan kadar BOD, COD, dan TSS yang tinggi misalnya Sungai Cikeas, Cipaeah, Cileungsi Cijare, Ciluar, Kali Angke, Kali Baru, Cikaniki, Cipamingkis, dan Cibeet. Sedangkan Danau Yang Tercemar Adalah Danau Kemuning, Telaga Warna, Lido dan Cigudeg. Kemudian untuk kerusakan tanah terdapat di kecamatan Cigudeg, Tenjo, Nanggung, Jasinga, dan Sukajaya. Selanjutnya penurunan kualitas udara di ukur melalui nilai parameter SO₂ sebesar 900 µg/Nm³, NO₂ sebesar 400 µg/Nm³, O₃ sebesar 235 µg/Nm³, dan TSP sebesar 230 µg/Nm³. Penurunan kualitas udara secara sigifikan terjadi di jalan raya alternatif

(perempatan Cikeas), Kecamatan Gunung Putri. Tingginya pencemaran juga ditunjukkan dengan indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 55,71 pada tahun 2017.

2.5 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang belum terselesaikan adalah belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan, sehingga masih banyak penduduk yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan. Hal ini ditunjukkan dengan rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk sebesar 0,85, artinya masih ada 15 %.

2.6 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Permasalahan Belum terpenuhinya kebutuhan infrastruktur desa, masih adanya desa-desa tertinggal yang belum mempunyai akses keluar, belum terencananya program pembangunan di desa secara baik, kurangnya motivasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa, masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap program pembangunan dari pemerintah serta belum bersinerginya antar SKPD dalam pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
2. Masih banyaknya kelembagaan masyarakat yang kinerjanya belum optimal, kurang berkembangnya kelompok ekonomi produktif di perdesaan, masih kurangnya kelembagaan keuangan di desa yang dapat menyediakan modal usaha, belum bersinerginya antar kelembagaan yang ada di perdesaan serta masih rendahnya kapasitas kader pembangunan desa dan anggota kelembagaan masyarakat.
3. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa, masih rendahnya kinerja kelembagaan pemerintah desa, belum tertibnya administrasi desa, perlu adanya pengkajian terhadap status desa yang layak menjadi kelurahan dan masih banyaknya desa yang mempunyai potensi yang masih rendah.

2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang belum terselesaikan adalah:

- a. Belum optimalnya upaya pengendalian penduduk. Hal ini ditunjukan dengan laju pertumbuhan penduduk (LPP) sebesar 2,28 %.
- b. Belum optimalnya pelaksanaan program keluarga berencana dan penyuluhan terhadap masyarakat. Data tahun 2017 menunjukan bahwa *Total Fertility Rate* (TFR) sebesar 2,61 %.

2.8 Perhubungan

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan perhubungan yang belum terselesaikan adalah belum maksimalnya cakupan pelayanan angkutan umum yang masih di bawah 80% serta belum optimalnya penanganan kemacetan di 7 (tujuh) lokasi kemacetan di Kabupaten Bogor yaitu di Cibinong, Cileungsi, Ciawi, Parung, Leuwiliang, Citeureup, dan Laladon.

2.9 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang belum terselesaikan adalah belum optimalnya upaya pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah yang mempengaruhi kualitas lembaga koperasi dan usaha kecil menengah, serta masih rendahnya tingkat kelangsungan hidup koperasi dan usaha kecil menengah. Hal ini ditunjukan dengan persentase koperasi aktif sebesar 31,61% dan jumlah UMK berprestasi sebanyak 10 UMK.

2.10 Penanaman Modal

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan penanaman modal yang belum terselesaikan adalah belum optimalnya upaya peningkatan investasi daerah. Hal ini ditunjukan dengan menurunnya nilai investasi daerah dari 7,2 triliun menjadi 8,69 triliun.

2.11 Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan kepemudaan dan olahraga yang belum terselesaikan adalah :

- a. belum optimalnya pola dan arah pembinaan kepemudaan yang mengakibatkan masih rendahnya tingkat keaktifan organisasi kepemudaan. Data tahun 2018 menunjukan bahwa persentase organisasi pemuda yang aktif sebanyak 85,71%.
- b. masih kurangnya ketersediaan fasilitas pembinaan keolahragaan prestasi dan keolahragaan masyarakat. Hal ini ditunjukan oleh Persentase kecamatan yang mempunyai sarana olahraga dan pemuda untuk umum sebesar 5%.

2.12 Statistik

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan statistik yang belum terselesaikan adalah masih kurangnya koordinasi antar pemangku kewenangan dalam mengintegrasikan sumber data dan informasi serta belum adanya bagian di perangkat daerah yang menangani urusan statistik.

2.13 Kebudayaan

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan kebudayaan yang belum terselesaikan adalah belum optimalnya pengelolaan dan upaya pelestarian budaya daerah. Hal ini bisa dilihat dari jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 35 benda.

2.14 Perpustakaan

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan perpustakaan yang belum terselesaikan adalah :

- a. Program peningkatan minat baca dan minat mengunjungi perpustakaan belum terinformasikan secara luas kepada masyarakat, sehingga tingkat pemanfaatan perpustakaan masih rendah. Hal ini ditunjukan dengan jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun sebesar 1,29 per populasi yang harus dilayani

- b. masih kurangnya jumlah perpustakaan dan koleksi perpustakaan yang dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini ditunjukan dengan rasio perpustakaan persatuan penduduk sebesar 0,04 atau 1 perpustakaan melayani 26.458 penduduk. Jumlah koleksi judul buku perpustakaan juga hanya sebanyak 13.010 buku di seluruh perpustakaan yang ada.

3. Urusan Pilihan

3.1 Kelautan dan Perikanan

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan kelautan dan perikanan yang belum terselesaikan adalah

- a. Minimnya ketersediaan induk ikan konsumsi yang berkualitas, di Kabupaten Bogor baru tersedia sebanyak 3 jenis (Lele, Gurame dan Mas) dari yang seharusnya 6 jenis (Lele, Gurame, Mas, Nila, Patin dan Bawal) induk Ikan.
- b. Menurunnya Produksi Telur sebesar 14,10% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan banyaknya Perusahaan Peternak Ayam Petelur yang memindahkan lokasi usahanya ke daerah lain di luar Kabupaten Bogor
- c. Belum optimalnya pemanfaatan lahan tidur, Luas lahan tidur yang telah dimanfaatkan untuk Hijauan Ternak dan Padang penggembalaan sebesar 58,18% dari luas lahan tidur yang bisa dimanfaatkan sebesar 16.242.068 m².

3.2 Pariwisata

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan pariwisata yang belum terselesaikan adalah :

- a. belum optimalnya promosi dan penyebarluasan informasi destinasi wisata daerah ke tingkat nasional dan internasional yang berdampak pada masih rendahnya kunjungan wisata ke Kabupaten Bogor. Hal ini ditunjukan dengan jumlah kunjungan wisata pada tahun 2017 sebanyak 6.944.804 orang menjadi 7.173.278 orang di tahun 2018.
- b. belum optimalnya upaya pembinaan dan kerjasama kemitraan pelaku pariwisata, sehingga pengelolaan pariwisata belum

terintegrasi dengan baik. Pada tahun 2018 lama kunjungan wisata rata-rata selama 1,56 hari, artinya para wisatawan rata-rata hanya bermalam 1 hari di tempat wisata Kabupaten Bogor.

3.3 Pertanian

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan pertanian yang belum terselesaikan adalah :

- a. belum imbangnya rasio indeks harga yang diterima petani dibagi dengan indeks harga yang dibayar petani, baik untuk faktor produksi maupun konsumsi rumah tangga. Hal ini ditunjukkan dengan nilai tukar petani pada tahun 2018 sebesar 103,18%.
- b. belum optimalnya pembinaan, pengembangan dan kerjasama kemitraan di sektor pertanian. Hal ini ditunjukkan dengan cakupan bina kelompok petani di tahun 2018 sebesar 5,32%, artinya ada 94,68% kelompok petani yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah.
- c. Belum optimalnya produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya, hal ini ditunjukkan dengan capaian di tahun 2018 sebesar 74,30%, artinya ada 25,70% produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar yang gagal panen.

3.4 Perdagangan

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan perdagangan yang belum terselesaikan adalah :

- a. minimnya promosi produk perdagangan daerah sehingga perlu ditingkatkannya volume ekspor daerah, yang pada tahun 2018 mencapai USD 1.518.619.551,65.
- b. masih kurangnya cakupan pembinaan terhadap pelaku usaha perdagangan terutama yang berkaitan dengan kelayakan produk perdagangan. Hal ini ditunjukan dengan cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal sebesar 57,65 %.

4. Urusan Penunjang

4.1 Perencanaan

Permasalahan lingkup bidang urusan perencanaan yang belum terselesaikan adalah belum optimalnya perencanaan yang integratif antar pemangku kepentingan, adanya keterlambatan pengiriman data menyebabkan keterlambatan dalam proses perencanaan.

4.2 Keuangan

Permasalahan lingkup bidang urusan keuangan yang belum terselesaikan adalah masih tingginya angka SiLPA tahun berkenaan dalam proses pelaksanaan program pembangunan daerah. Hal ini ditunjukan oleh persentase SILPA terhadap APBD di tahun 2018 sebesar 9,38%.

4.3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan lingkup kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang belum terselesaikan adalah :

- a. belum terpenuhinya kebutuhan ASN untuk melaksanakan kewenangan daerah, disebabkan oleh jumlah pensiun tiap tahun lebih banyak dari jumlah ASN yang diterima, selain itu rasio jumlah pegawai dibanding dengan hasil analisis kebutuhan formasi sebesar 40,50% di tahun 2018.
- b. belum terpenuhinya kualifikasi dan kompetensi ASN berdasarkan kebutuhan pelaksanaan kewenangan daerah, serta belum terpetakan dengan baik penempatan ASN sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi. Di tahun 2018 persentase ASN yang menduduki jabatan sesuai kompetensi sebesar 64,55 %.

4.4 Penelitian dan pengembangan

Permasalahan yang belum terselesaikan adalah belum optimalnya penyelenggaraan penelitian dan pengembangan daerah yang terintegrasi lintas sektoral. Hasil penelitian dan kajian di setiap perangkat daerah hanya dimanfaatkan oleh intern perangkat daerah bersangkutan saja. Selain itu juga belum optimal dan berkembangnya inovasi daerah di perangkat Daerah maupun masyarakat di Kabupaten Bogor.

5. Urusan Pendukung

5.1 Sekretariat Daerah

Permasalahan yang belum terselesaikan adalah :

- a. belum optimalnya pelaksanaan pengoordinasian antar perangkat daerah
- b. belum optimalnya pelaksanaan fungsi administrasi pemerintah daerah.
- c. belum optimalnya fungsi pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dikarenakan masih ada temuan BPK yang belum ditindaklanjuti.

5.2 Sekretariat DPRD

Permasalahan yang belum terselesaikan adalah belum optimalnya pelaksanaan fasilitasi terhadap DPRD. Hal ini ditunjukan oleh persentase tingkat kepuasan pimpinan dan anggota DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD sebesar 85%.

5.3 Inspektorat

Permasalahan yang belum terselesaikan adalah masih kurangnya tenaga auditor untuk melayani pengawasan dan pembinaan di seluruh perangkat daerah. Saat ini hanya ada 58 orang tenaga pengawas di Inspektorat.

3.2 Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi akumulatif dari sekian banyak permasalahan pembangunan daerah yang menjadi fokus dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kewenangan daerah. Perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Bogor tidak terlepas dari perencanaan pembangunan nasional dan Jawa Barat. Oleh karena itu, isu strategis nasional dan provinsi Jawa Barat merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipedomani sebagai bentuk sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bogor.

Di sisi lain, sebagai bentuk tindak lanjut dari agenda internasional yang disepakati secara internasional, perencanaan pembangunan wajib memperhatikan poin-poin Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau

Sustainable Development Goals (SDG's) sebagai bagian dari substansi perencanaan jangka panjang. Adapun keterkaitan perencanaan pembangunan dengan isu-isu strategis nasional dan provinsi Jawa Barat serta SDG's diuraikan sebagai berikut :

3.2.1 Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025

Penelaahan kebijakan nasional bertujuan untuk mendapatkan butir-butir kebijakan nasional yang berpengaruh langsung terhadap daerah bersangkutan. Hasil telaahan pada dasarnya dimaksudkan sebagai sumber utama bagi identifikasi isu-isu strategis, di samping sumber-sumber lain. Kebijakan yang diidentifikasi dapat berupa peluang atau sebaliknya, tantangan bagi daerah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan datang.

Penelaahan kebijakan nasional untuk tingkat kabupaten/kota dilakukan terhadap dokumen RPJPN dan RPJPD provinsi dan sumber-sumber informasi terkait lain.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 adalah:

INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR

Visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 itu mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Visi pembangunan

nasional tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang ingin dicapai.

Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan nasional sebagai berikut:

1. **Mewujudkan masyarakat berakhhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila** adalah memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.
2. **Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing** adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.
3. **Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum** adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pemberahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuensi, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.
4. **Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu** adalah membangun kekuatan TNI hingga melampui kekuatan esensial minimum serta disegani di kawasan regional dan internasional; memantapkan

kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat; mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontraintelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan, komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.

5. **Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan** adalah meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
6. **Mewujudkan Indonesia asri dan lestari** adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.
7. **Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional** adalah menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola

wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

8. **Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional** adalah memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antarmasyarakat, antarkelompok, serta antarlembaga di berbagai bidang.

Sebagai ukuran tercapainya Indonesia yang maju, mandiri, dan adil, pembangunan nasional dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:

- A. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab ditandai oleh hal-hal berikut:
 1. Terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi iptek.
 2. Makin mantapnya budaya bangsa yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat manusia Indonesia, dan menguatnya jati diri dan kepribadian bangsa.
- B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera ditunjukkan oleh hal-hal berikut:
 1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.

2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.
 3. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Sektor pertanian, dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing global, motor penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.
 4. Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.
 5. Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional.
- C. Terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan ditunjukkan oleh hal-hal berikut:
1. Terciptanya supremasi hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tertatanya sistem hukum nasional yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspiratif. Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan seseorang demi

supremasi hukum dan terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia.

2. Menciptakan landasan konstitusional untuk memperkuat kelembagaan demokrasi.
 3. Memperkuat peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik.
 4. Memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip toleransi, non-diskriminasi, dan kemitraan.
 5. Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintah yang berdasarkan hukum, birokrasi yang professional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta adanya kemandirian nasional.
- D. Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri ditandai oleh hal-hal berikut:
1. Terwujudnya keamanan nasional yang menjamin martabat kemanusiaan, keselamatan warga negara, dan keutuhan wilayah dari ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri.
 2. TNI yang profesional, komponen cadangan dan pendukung pertahanan yang kuat terutama bela negara masyarakat dengan dukungan industri pertahanan yang andal.
 3. Polri yang profesional, partisipasi kuat masyarakat dalam bidang keamanan, intelijen, dan kontra intelijen yang efektif, serta mantapnya koordinasi antara institusi pertahanan dan keamanan.
- E. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan ditandai oleh hal-hal berikut:
1. Tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayah diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antarwilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga.
3. Terpenuhi kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.
4. Terwujudnya lingkungan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

F. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.
2. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional.
3. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.

G. Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Terbangunnya jaringan sarana dan prasarana sebagai perekat semua pulau dan kepulauan Indonesia.
2. Meningkat dan menguatnya sumber daya manusia di bidang kelautan yang didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Menetapkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, aset-aset, dan hal-hal yang terkait dalam kerangka pertahanan negara.
 4. Membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
 5. Mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut.
- H. Terwujudnya peranan Indonesia yang meningkat dalam pergaulan dunia internasional ditandai oleh hal-hal berikut:
1. Memperkuat dan mempromosikan identitas nasional sebagai negara demokratis dalam tatanan masyarakat internasional.
 2. Memulihkan posisi penting Indonesia sebagai negara demokratis besar yang ditandai oleh keberhasilan diplomasi di fora internasional dalam upaya pemeliharaan keamanan nasional, integritas wilayah, dan pengamanan kekayaan sumber daya alam nasional.
 3. Meningkatnya kepemimpinan dan kontribusi Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional dalam rangka mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil dan damai.
 4. Terwujudnya kemandirian nasional dalam konstelasi global.
 5. Meningkatnya investasi perusahaan-perusahaan Indonesia di luar negeri.

Untuk mencapai tingkat kemajuan, kemandirian, serta keadilan yang diinginkan, arah pembangunan jangka panjang selama kurun waktu 20 tahun mendatang sebagai berikut:

- I. MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA, BERMORAL, BERETIKA, BERBUDAYA, DAN BERADAB
1. Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peranagama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan.
 2. Pembangunan dan pemantapan jati diri bangsa ditujukan untuk mewujudkan karakter bangsa dan sistem sosial yang berakar, unik, modern, dan unggul.

3. Budaya inovatif yang berorientasi iptek terus dikembangkan agar bangsa Indonesia menguasai iptek serta mampu berjaya pada era persaingan global.

II. MEWUJUDKAN BANGSA YANG BERDAYA-SAING

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
2. Memperkuat Perekonomian Domestik dengan Orientasi dan Berdaya Saing Global
3. Penguasaan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
4. Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju
5. Reformasi Hukum dan Birokrasi

III. MEWUJUDKAN INDONESIA YANG DEMOKRATIS BERLANDASKAN HUKUM

1. Penyempurnaan struktur politik yang dititikberatkan pada proses pelembagaan demokrasi.
2. Penataan peran negara dan masyarakat dititikberatkan pada pembentukan kemandirian dan kedewasaan masyarakat serta pembentukan masyarakat madani yang kuat dalam bidang ekonomi dan pendidikan.
3. Penataan proses politik yang dititikberatkan pada pengalokasian/representasi kekuasaan.
4. Pengembangan budaya politik yang dititikberatkan pada penanaman nilai-nilai demokratis.
5. Peningkatan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik.
6. Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
7. Pembangunan materi hukum diarahkan untuk melanjutkan pembaruan produk hukum.
8. Pembangunan struktur hukum diarahkan untuk memantapkan dan mengefektifkan berbagai organisasi dan lembaga hukum, profesi hukum, dan badan peradilan sehingga aparatur hukum mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara professional.

9. Penerapan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) dilaksanakan secara tegas, lugas, profesional, dan tidak diskriminatif dengan tetap berdasarkan pada penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM), keadilan, dan kebenaran, terutama dalam penyelidikan, penyidikan, dan persidangan yang transparan dan terbuka.
10. Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi terus ditingkatkan dengan lebih memberikan akses terhadap segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan akses kepada masyarakat terhadap pelibatan dalam berbagai proses pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan nasional.
11. Penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan aparatur negara.

IV. MEWUJUDKAN INDONESIA YANG AMAN, DAMAI DAN BERSATU

1. Keamanan nasional diwujudkan melalui keterpaduan pembangunan pertahanan, pembangunan keamanan dalam negeri, dan pembangunan keamanan sosial yang diselenggarakan berdasarkan kondisi geografi, demografi, sosial, dan budaya serta berwawasan nusantara.
2. Pembangunan pertahanan yang mencakup sistem dan strategi pertahanan, postur dan struktur pertahanan, profesionalisme TNI, pengembangan teknologi pertahanan.
3. Sistem dan strategi pertahanan nasional secara terus menerus disempurnakan untuk mewujudkan sistem pertahanan semesta berdasarkan kapabilitas pertahanan agar secara simultan mampu mengatasi ancaman dan memiliki efek penggentar.
4. Postur dan struktur pertahanan diarahkan untuk dapat menjawab berbagai kemungkinan tantangan, permasalahan aktual, dan pembangunan kapabilitas jangka panjang yang sesuai dengan kondisi geografis dan dinamika masyarakat.
5. Peningkatan profesionalisme Tentara Nasional Indonesia dilaksanakan dengan tetap menjaga netralitas politik dan memusatkan diri pada tugas-tugas pertahanan dalam bentuk operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang melalui

fokus pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan alutsista.

6. Peningkatan kondisi dan jumlah alutsista setiap matra dilaksanakan menurut validasi postur dan struktur pertahanan untuk dapat melampaui kebutuhan kekuatan pertahanan minimal.
7. Pemantapan komponen cadangan dan pendukung pertahanan negara dalam kerangka basis strategi teknologi, dan pembiayaan terus ditingkatkan dalam proses yang bersifat kontinu maupun terobosan.
8. Perlindungan wilayah yurisdiksi laut Indonesia ditingkatkan dalam upaya melindungi sumber daya laut bagi kemakmuran sebesar-besarnya rakyat.
9. Pembangunan keamanan diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme Polri beserta institusi terkait dengan masalah keamanan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.
10. Peningkatan profesionalisme Polri dicapai melalui pembangunan kompetensi pelayanan inti, perbaikan rasio polisi terhadap penduduk, pembinaan sumber daya manusia, pemenuhan kebutuhan alat utama, serta peningkatan pengawasan dan mekanisme kontrol lembaga kepolisian.
11. Peningkatan profesionalisme lembaga intelijen dan kontra intelijen dalam mendekripsi, melindungi, dan melakukan tindakan pencegahan berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang berpengaruh terhadap kepentingan keamanan nasional.

V. MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH MERATA DAN BERKEADILAN

1. Pengembangan wilayah diselenggarakan dengan memerhatikan potensi dan peluang keunggulan sumberdaya darat dan atau laut di setiap wilayah, serta memerhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan daya dukung lingkungan.

2. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-
3. wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai proses industri dan distribusi.
4. Keberpihakan pemerintah ditingkatkan untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengurangi ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain.
5. Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi *inward looking* menjadi *outward looking* sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.
6. Pembangunan kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil diseimbangkan pertumbuhannya dengan mengacu pada system pembangunan perkotaan nasional.
7. Pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan dikendalikan dalam suatu sistem wilayah pembangunan metropolitan yang kompak, nyaman, efisien dalam pengelolaan, serta mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan.
8. Percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah ditingkatkan, terutama di luar Pulau Jawa, sehingga diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai ‘motor penggerak’ pembangunan wilayah-wilayah di sekitarnya maupun dalam melayani kebutuhan warga kotanya.
9. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan didorong secara sinergis (hasil produksi wilayah perdesaan merupakan *backward linkages* dari kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan) dalam suatu ‘sistem wilayah pengembangan ekonomi’.

10. Pembangunan perdesaan didorong melalui pengembangan agroindustri padat pekerja.
11. Rencana tata ruang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan.
12. Menerapkan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif, serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi.
13. Kapasitas pemerintah daerah terus dikembangkan melalui peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, kapasitas keuangan pemerintah daerah, serta kapasitas lembaga legislatif daerah.
14. Peningkatan kerja sama antardaerah akan terus ditingkatkan dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif setiap daerah; menghilangkan ego pemerintah daerah yang berlebihan; serta menghindari timbulnya inefisiensi dalam pelayanan publik.
15. Sistem ketahanan pangan diarahkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan nasional dengan mengembangkan kemampuan produksi dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
16. Koperasi yang didorong berkembang luas sesuai kebutuhan menjadi wahana yang efektif untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif para anggotanya, baik produsen maupun konsumen di berbagai sektor kegiatan ekonomi sehingga menjadi gerakan ekonomi yang berperan nyata dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.
17. Dalam rangka pembangunan berkeadilan, pembangunan kesejahteraan sosial juga dilakukan dengan memberi perhatian yang

lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal, dan wilayah bencana.

18. Pembangunan kesejahteraan sosial dalam rangka memberikan perlindungan pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung disempurnakan melalui penguatan lembaga jaminan sosial yang didukung oleh peraturan-peraturan perundangan, pendanaan, serta sistem nomor induk kependudukan (NIK).
19. Sistem perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak rakyat akan pelayanan sosial dasar.
20. Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya.
21. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berupa air minum dan sanitasi.
22. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi.

VI. MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ASRI DAN LESTARI

1. Mendayagunakan Sumber Daya Alam yang Terbarukan.
2. Mengelola Sumber Daya Alam yang Tidak Terbarukan
3. Menjaga Keamanan Ketersediaan Energi
4. Menjaga dan Melestarikan Sumber Daya Air.
5. Mengembangkan Potensi Sumber Daya Kelautan.
6. Meningkatkan Nilai Tambah atas Pemanfaatan Sumber Daya Alam Tropis yang Unik dan Khas
7. Memerhatikan dan Mengelola Keragaman Jenis Sumber Daya Alam yang Ada di Setiap Wilayah
8. Mitigasi Bencana Alam Sesuai dengan Kondisi Geologi Indonesia.
9. Mengendalikan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
10. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
11. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Mencintai Lingkungan Hidup

VII. MEWUJUDKAN INDONESIA MENJADI NEGARA KEPULAUAN YANG MANDIRI, MAJU, KUAT DAN BERBASISKAN KEPENTINGAN NASIONAL

1. Membangkitkan wawasan dan budaya bahari
2. Meningkatkan dan menguatkan peranan sumber daya manusia di bidang kelautan
3. Menetapkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, aset-aset, dan hal-hal terkait di dalamnya, termasuk kewajiban-kewajiban yang telah digariskan oleh hukum laut *United Nation Convention on the Law Of Sea (UNCLOS) 1982*.
4. Melakukan upaya pengamanan wilayah kedaulatan yurisdiksi dan aset Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Mengembangkan industri kelautan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan.
6. Mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut.
7. Meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di kawasan pesisir.

VIII. MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERPERAN AKTIF DALAM PERGAULAN INTERNASIONAL

1. Peranan hubungan luar negeri terus ditingkatkan dengan penekankan pada proses pemberdayaan posisi Indonesia sebagai negara, termasuk peningkatan kapasitas dan integritas nasional melalui keterlibatan di organisasi-organisasi internasional, yang dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan diplomasi dan hubungan luar negeri dengan memaknai secara positif berbagai peluang yang menguntungkan bagi kepentingan nasional yang muncul dari perspektif baru dalam hubungan internasional yang dinamis.
2. Penguatan kapasitas dan kredibilitas politik luar negeri dalam rangka ikut serta menciptakan perdamaian dunia, keadilan dalam tata hubungan internasional, dan ikut berupaya mencegah timbulnya pertentangan yang terlalu tajam di antara negara-negara yang berbeda ideologi, dan sistem politik maupun kepentingan agar tidak mengancam keamanan internasional sekaligus mencegah munculnya kekuatan yang terlalu bersifat hegemonik-unilateralistik di dunia.

3. Peningkatan kualitas diplomasi di fora internasional dalam upaya pemeliharaan keamanan nasional, integritas wilayah, dan pengamanan kekayaan sumber daya alam, baik daratan maupun lautan, serta antisipasi terhadap berbagai isu baru dalam hubungan internasional yang akan ditangani dengan parameter utamanya adalah pencapaian secara optimal kepentingan nasional.
4. Peningkatan efektivitas dan perluasan fungsi jaringan kerjasama yang ada demi membangun kembali *solidaritas Association of South East Asian Nation* (ASEAN) di bidang politik, ekonomi, kebudayaan, dan keamanan menuju terbentuknya komunitas ASEAN yang lebih solid.
5. Pemeliharaan perdamaian dunia melalui upaya peningkatan saling pengertian politik dan budaya, baik antarnegara maupun antarmasyarakat dunia serta peningkatan kerja sama internasional dalam membangun tatanan hubungan dan kerja sama ekonomi internasional yang lebih seimbang.
6. Penguatan jaringan hubungan dan kerja sama yang produktif antar akto-raktor negara dan aktor-aktor nonnegara yang menyelenggarakan hubungan luar negeri.

3.2.2 Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025

Berdasarkan Perubahan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 maka visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 adalah:

“DENGAN IMAN DAN TAKWA, PROVINSI JAWA BARAT TERMAJUDI INDONESIA”

Perwujudan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat melalui 5 (lima) misi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. Misi sebagai penjabaran dari visi pembangunan jangka panjang memiliki makna yang penting. Setiap pernyataan misi dimaksudkan untuk mewujudkan visi sampai Tahun 2025, misinya yaitu:

Misi Satu : **Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya ilmu dan teknologi, produktif dan berdaya saing**

adalah membangun sumber daya manusia yang sehat jasmani, rohani dan sosial, memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang tinggi, memiliki daya saing, memiliki akhlak mulia, dan menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya, serta memiliki akses terhadap pendidikan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas, terpadu, dan merata di seluruh lapisan masyarakat.

- Misi Dua : **Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah** adalah mengembangkan dan memperkuat perekonomian regional yang berdaya saing global dan berorientasi pada keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif dengan berbasis pada segenap potensi yang ada di daerah, untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pertumbuhan yang tinggi, dan pemerataan yang berkeadilan. Perkembangan ekonomi regional didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai, tenaga kerja yang berkualitas dan produktif, serta regulasi yang mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif.
- Misi Tiga : **Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari** adalah mengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan, serta menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang yang serasi antara kawasan lindung dan budaya, dan antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
- Misi Empat : **Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik** adalah meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi masyarakat; membangun akuntabilitas kepemerintahan yang bertanggung jawab, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), peningkatan efisiensi birokrasi, kemitraan yang serasi antar legislatif dan eksekutif, dan penciptaan stabilitas politik dan konsistensi dalam penegakan hukum.
- Misi Lima : **Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan** adalah mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh,

meningkatkan keberpihakan kepada daerah tertinggal, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana prasarana dasar, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek.

Arah kebijakan pembangunan setiap periode pembangunan dalam kurun waktu 20 tahun akan memberi pedoman bagi pembangunan jangka menengah. Keberhasilan pelaksanaan arah kebijakan pembangunan jangka panjang ditandai oleh hal-hal berikut:

- a. Pengendalian dan penataan kependudukan.
- b. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan.
- c. Penanggulangan pengangguran dan penyelesaian masalah ketenagakerjaan.
- d. Peningkatan peran serta masyarakat terhadap budaya daerah dan penanganan masalah sosial.
- e. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- f. Penanggulangan kemiskinan dan PMKS.
- g. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur
- h. Peningkatan kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah serta pelayanan publik.

3.2.3 Penelaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan kesepakatan internasional terkait pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030, terdapat 17 (tujuh belas) tujuan yang wajib diselesaikan sebagai bagian dari penyelesaian 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu : lingkungan, sosial dan ekonomi. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Keseluruhan tujuan global tersebut adalah :

1. Tanpa kemiskinan, yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun.
2. Tanpa kelaparan, yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.

3. Kehidupan sehat dan sejahtera, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
4. Pendidikan berkualitas, yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
5. Kesetaraan gender, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
6. Air bersih dan sanitasi layak, yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
7. Energi bersih dan terjangkau, yaitu menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Industri, inovasi dan infrastruktur, yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10. Berkurangnya kesenjangan, yaitu mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.
11. Kota dan komunitas berkelanjutan, yaitu menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, yaitu menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Penanganan perubahan iklim, yaitu mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Ekosistem laut, yaitu melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Ekosistem daratan, yaitu melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan, yaitu menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

3.3 Isu-Isu Strategis Kabupaten Bogor

Berdasarkan isu strategis nasional dan Jawa Barat, serta target pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, isu strategis Kabupaten Bogor dirumuskan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang ditunjukkan diantaranya oleh masih tingginya tingkat kemiskinan, masih tingginya angka pengangguran, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) belum mencapai standar global, tingkat pendidikan masyarakat yang masih belum mencapai standar pendidikan wajib belajar, belum optimalnya penyelenggaraan upaya kesehatan, masih terdapatnya ketimpangan pendapatan dan ketimpangan pembangunan wilayah.
2. Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan umum, yang ditunjukkan oleh belum optimalnya pelayanan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kewenangan daerah berdasarkan bidang urusan, diantaranya pelayanan umum bidang urusan lingkungan hidup terkait dengan pengelolaan kebencanaan, penanganan pencemaran dan resapan air.
3. Masih rendahnya daya saing dan produktivitas perekonomian daerah yang ditunjukkan oleh masih kurangnya desa yang berstatus swasembada, masih rendahnya kontribusi nilai ekspor bersih terhadap PDRB, masih tingginya angka ketergantungan penduduk di bawah dan di luar usia kerja terhadap penduduk usia kerja, masih rendahnya tingkat pengeluaran konsumsi masyarakat akibat masih rendahnya penghasilan serta pembangunan ekonomi daerah masih perlu ditingkatkan.

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

4.1 Visi

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, **Visi** didefinisikan sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Mempertimbangkan sejumlah permasalahan dan isu strategis yang diusung, visi yang ditetapkan hingga tahun 2025 adalah :

KABUPATEN BOGOR TERMAJU DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAKWA

Makna yang terkandung dalam slogan visi yang ingin diwujudkan hingga akhir periode, diuraikan sebagai berikut :

Termaju :

Kabupaten Bogor termaju bermakna bahwa di akhir periode diharapkan akan menjadi lebih baik dalam hal pengembangan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kewenangan yang diampu. Wujud termaju ditunjukkan dalam hal :

1. mampu beradaptasi dan cepat tanggap terhadap adanya perubahan kebijakan, baik pusat maupun Jawa Barat, responsif terhadap ide-ide baru dan tanggap terhadap perkembangan teknologi.
2. senantiasa progresif dalam kinerja pelaksanaan program pembangunan.
3. selektif dalam penetapan prioritas dan fokus pembangunan dengan senantiasa memperhatikan pembangunan berkelanjutan.

4. mengutamakan transparansi informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. senantiasa menjadi sumber inspirasi dan alternatif informasi bagi pemerintah dan pemerintah daerah lainnya.
6. inovatif
7. mampu memberikan tingkat kepuasan yang tinggi kepada masyarakat dalam pelayanan publik.
8. Hasil pembangunan yang ramah lingkungan.

Sejahtera :

Kabupaten Bogor sejahtera bermakna bahwa pada kondisi akhir periode, diharapkan masyarakat Kabupaten Bogor dapat merasakan peningkatan kesejahteraan dalam wujud :

1. menurunnya kemiskinan dan pengangguran
2. adanya jaminan kepastian dalam memperoleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesempatan berusaha.
3. meningkatnya kesejahteraan, ketenteraman dan kebahagiaan keluarga.
4. adanya jaminan pemerataan pembangunan baik fisik maupun non fisik.

Iman dan takwa :

Kabupaten Bogor beriman dan bertakwa bermakna bahwa pada kondisi akhir periode, diharapkan akan terwujud masyarakat yang **berkeadaban** dalam bentuk :

1. terjaminnya pelaksanaan peribadatan dan aktivitas sosial masyarakat.
2. terpeliharanya kearifan lokal dan budaya daerah.
3. terpeliharanya suasana aman, tenteram, tertib, damai, saling bekerjasama, dan kerukunan hidup di tengah masyarakat.

4.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan visi hingga tahun 2025, misi yang diemban adalah :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dengan meningkatkan nilai tambah produk dengan inovasi teknologi informasi .
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur daerah dan koneksi antar-wilayah .
4. Mewujudkan Kabupaten Bogor yang TEGAR BERIMAN (Tertib, Segar, Bersih, Indah, Mandiri, Aman dan Nyaman) dan berkelanjutan .
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih .

Bentuk komitmen pelaksanaan misi untuk mewujudkan visi yang ingin dicapai pada akhir periode adalah penekanan kepada seluruh pemangku kepentingan terkait hakikat masing-masing misi yang harus dipedomani dalam melaksanakan seluruh agenda pembangunan daerah. Substansi misi yang perlu dipahami bersama adalah :

Misi -1 Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas

Misi ini ditetapkan dengan memperhatikan bahwa sumberdaya manusia yang berkualitas merupakan representasi Kabupaten Bogor yang sejahtera. Masyarakat Kabupaten Bogor harus terhindar dari kemiskinan, wajib memiliki pekerjaan yang layak untuk peningkatan kualitas kehidupan diri dan keluarga, wajib memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi dan bermutu, sehat jasmani dan rohani, terjamin dari terjadinya resiko yang tidak diharapkan. Dengan demikian, misi ini bermuara pada adanya keinginan untuk mewujudkan keluarga sejahtera, tenteram dan bahagia dengan kualitas sumberdaya manusia yang tinggi.

Misi-2 Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dengan meningkatkan nilai tambah produk dengan inovasi teknologi informasi

Misi ini ditetapkan dengan mempertimbangkan bahwa Kabupaten Bogor adalah kabupaten termaju, sehingga harus menjadi daerah otonomi yang diperhitungkan di tingkat Jawa Barat, nasional, bahkan internasional dengan melihat potensi

sumberdaya alam yang dimanfaatkan secara optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut, sebagai daerah yang letaknya strategis dengan pusat pemerintahan negara, maka setiap pemangku kepentingan wajib berkontribusi untuk merespon dengan cepat terhadap semua bentuk perubahan yang terjadi dengan menjadikan wilayah Kabupaten Bogor sebagai basis pertumbuhan perekonomian daerah yang dibutuhkan di tingkat provinsi, nasional dan internasional. Dengan melaksanakan misi kedua ini, pemangku kepentingan diharapkan dapat menjadikan wilayah Kabupaten Bogor sebagai pusat bisnis dan investasi yang menguntungkan, pusat pilihan produk unggul, serta *trendsetter* informasi.

Misi-3 Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur daerah dan koneksi antar-wilayah

Misi ini ditetapkan dengan mempertimbangkan bahwa untuk mewujudkan kabupaten yang sejahtera, pemenuhan infrastruktur daerah dan terjaminnya koneksi antar wilayah merupakan suatu keharusan karena menjadi pendukung utama pergerakan ekonomi daerah. Dengan mempertimbangkan jangkauan wilayah yang sangat luas, seluruh pemangku kepentingan wajib berkomitmen untuk mendukung upaya terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Misi-4 Mewujudkan Kabupaten Bogor yang TEGAR BERIMAN (Tertib, Segar, Bersih, Indah, Mandiri, Aman dan Nyaman) dan berkelanjutan

Misi ini ditetapkan dengan mempertimbangkan bahwa untuk mewujudkan kabupaten yang berkeadaban, seluruh pemangku kepentingan wajib menciptakan suasana daerah yang bernuansa TEGAR BERIMAN (Tertib, Segar, Bersih, Indah, Mandiri, Aman dan Nyaman) secara kondusif dan berkelanjutan. Masyarakat harus dikondisikan untuk senantiasa merasa aman, damai, hidup dengan motivasi

membangun kerjasama dan keramahtamahan, berkeagamaan dalam keanekaragaman. Setiap pemangku kepentingan wajib bersama-sama mewujudkan lingkungan yang asri dan selaras serta bersinergi dengan upaya mewujudkan kondisi termaju dan sejahtera.

Misi-5 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Misi ini ditetapkan dengan mempertimbangkan bahwa untuk mewujudkan kabupaten termaju, Pemerintah Kabupaten Bogor selaku penyelenggara pemerintahan wajib menciptakan suatu kondisi yang menjamin dan mendukung kelancaran tugas pelayanan terhadap publik secara cepat, tepat, transparan, dan bersahaja. Diharapkan, Pemerintah Kabupaten Bogor siap melakukan upaya-upaya inovatif dan terobosan-terobosan baru yang progresif, namun tetap selektif dengan memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterkaitan kelima misi tersebut dalam mendukung terwujudnya visi dijabarkan dalam Tabel 4.1.

**Tabel 4.1
Keterkaitan Visi dan Misi Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025**

MISI	PERWUJUDAN VISI
Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas	Menurunnya kemiskinan dan pengangguran adanya jaminan kepastian dalam memperoleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesempatan berusaha meningkatnya kesejahteraan, ketenteraman dan kebahagiaan keluarga
Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dengan meningkatkan nilai tambah produk dengan inovasi teknologi informasi	inovatif mampu beradaptasi dan cepat tanggap terhadap adanya perubahan kebijakan, baik pusat maupun Jawa Barat, responsif terhadap ide-ide baru dan tanggap terhadap perkembangan teknologi senantiasa menjadi sumber inspirasi dan alternatif informasi bagi pemerintah dan pemerintah daerah lainnya
Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur daerah dan konektivitas antar-wilayah	adanya jaminan pemerataan pembangunan baik fisik maupun non fisik.

MISI	PERWUJUDAN VISI
Mewujudkan Kabupaten Bogor yang TEGAR BERIMAN (Tertib, Segar, Bersih, Indah, Mandiri, Aman dan Nyaman) dan berkelanjutan	Terjaminnya pelaksanaan peribadatan dan aktivitas sosial masyarakat Terpeliharanya kearifan lokal dan budaya daerah Terpeliharanya suasana aman, tenteram, tertib, damai, saling bekerjasama, dan kerukunan hidup di tengah masyarakat Hasil pembangunan yang ramah lingkungan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Senantiasa progresif dalam kinerja pelaksanaan program pembangunan Selektif dalam penetapan prioritas dan fokus pembangunan dengan senantiasa memperhatikan pembangunan berkelanjutan Mengutamakan transparansi informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Mampu memberikan tingkat kepuasan yang tinggi kepada masyarakat dalam pelayanan publik

Visi dan misi RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 dilaksanakan dalam tahapan-tahapan jangka menengah sesuai dengan periodisasi kepala daerah. Dengan demikian, tindak lanjut dari pelaksanaan visi dan misi pembangunan jangka panjang adalah bahwa seluruh visi dan misi wajib menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada setiap periodisasi kepala daerah.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

5.1 Arah Kebijakan Daerah

Berdasarkan definisi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Rumusan kerangka pikir tersebut dimanifestasikan dalam tahapan-tahapan sesuai dengan periode kepemimpinan asing-masing Bupati/Wakil Bupati.

Pencapaian visi dan misi pembangunan 20 tahun dalam RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 ditempuh melalui 5 (lima) tema besar pada masing-masing tahapan pembangunan sebagaimana disajikan pada Gambar 5.1.



Gambar 5.1
Tema/Fokus Pembangunan Dua Puluh Tahunan

5.1.1 Arah Kebijakan Masa Lalu

Arah kebijakan dalam tahapan RPJPD yang telah dilewati disajikan untuk memberi gambaran terhadap apa yang telah direncanakan pada tahapan-tahapan sebelumnya. Arah kebijakan ini diuraikan sebagai berikut :

1. Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke I (Periode Bupati/Wakil Bupati Tahun 2003-2008)

Tahapan pembangunan pertama Kabupaten Bogor dilaksanakan melalui Renstra Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2003-2008 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004. Mengacu pada pencapaian hasil-hasil pembangunan periode sebelumnya, arah kebijakan pembangunan daerah pada tahap ini ditujukan untuk mendukung tercapainya pelayanan prima demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Bogor yang maju, mandiri, sejahtera berlandaskan iman dan takwa. Prioritas utama pada tahapan ini adalah **peletakan fondasi** untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan; peningkatan kemampuan daya beli masyarakat; peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan peningkatan pelayanan dasar, terutama infrastruktur wilayah dan mitigasi bencana; serta penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke II (Periode Bupati/Wakil Bupati Tahun 2008-2013)

Tahapan pembangunan kedua Kabupaten Bogor dilaksanakan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013. Mengacu pada pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD pertama, maka arah kebijakan pembangunan tahap kedua ditujukan demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Bogor yang bertakwa, berdaya dan berbudaya menuju sejahtera. Prioritas utama pada tahapan ini adalah **penguatan dan pemantapan pembangunan daerah** untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera melalui peningkatan kualitas dan

pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan; peningkatan kemampuan daya beli masyarakat; pemenuhan pelayanan dasar, terutama infrastruktur wilayah untuk percepatan pembangunan di setiap wilayah; pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan serta mitigasi bencana di kabupaten Bogor; reformasi birokrasi sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab.

3. Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke III (Periode Bupati/Wakil Bupati Tahun 2013-2018)

Mengacu pada pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD kedua, maka arah kebijakan pembangunan pada tahap ketiga ditujukan untuk merealisasikan visi dan misi pembangunan daerah melalui pengembangan dan percepatan pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang/urusan pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013, maka arah kebijakan pembangunan ketiga ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Bogor menjadi kabupaten termaju di Indonesia. Prioritas utama pada tahapan ini adalah **pengembangan dan percepatan pembangunan daerah** untuk meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat; meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata; meningkatkan integrasi, koneksitas, kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan; serta meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antardaerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.

5.1.2 Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan ke IV (Periode Bupati/Wakil Bupati Tahun 2018-2023)

Mengacu pada hasil pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan tahapan ketiga, maka arah kebijakan pembangunan

tahap keempat ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban. Prioritas utama pada tahapan ini adalah **optimalisasi seluruh pelaksanaan kewenangan urusan pemerintahan daerah** dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas, ketenteraman dan ketertiban umum, pemerataan pembangunan wilayah, pertumbuhan ekonomi daerah, dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam bingkai kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah, serta sinkronisasi dengan kebijakan nasional dan Jawa Barat. Dalam tahapan keempat ini, seluruh unsur potensi sumberdaya wilayah dan budaya dimanfaatkan sebagai sarana mengintervensi dan menstimulasi keberdayaan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang berkualitas.

Adapun berdasarkan substansi perencanaan jangka panjang yang relevan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini, maka prioritas pembangunan pada tahap keempat ini diuraikan sebagai berikut:

Bidang Urusan Pendidikan. Pembangunan pendidikan diprioritaskan untuk peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH) melalui pemantapan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, serta munculnya sekolah-sekolah unggulan di Kabupaten Bogor.

Bidang Urusan Kesehatan. Pembangunan kesehatan diprioritaskan untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH), penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi, melalui peningkatan persalinan oleh tenaga kesehatan, peningkatan balita gizi baik dan yang diimunisasi lengkap, peningkatan cakupan sanitasi dasar, peningkatan pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan angka kesembuhan penderita penyakit tertentu, penyusunan rancangan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan, dan peningkatan manajemen kesehatan yang akuntabel, serta perintisan jumlah penduduk miskin beserta anggota masyarakat lainnya untuk memasuki program jaminan pemeliharaan kesehatan.

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, diprioritaskan pada penambahan dan peningkatan ruas jalan yang mendukung pariwisata, mantapnya ruang terbuka hijau dan taman-taman kota di setiap wilayah kecamatan. Pembangunan Penataan Ruang diprioritaskan pada terpenuhinya seluruh rencana tata ruang secara detail untuk kota dan kawasan serta daerah yang tumbuh dengan pesat; serta terkendalinya dengan optimal pemanfaatan ruang sesuai dengan kaidah pengelolaan ruang dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, diarahkan pada peningkatan cakupan rumah layak huni dan penataan kawasan kumuh permukiman.

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat, diprioritaskan untuk menangani gangguan trantibum dan penegakan Perda, optimalisasi persatuan dan kesatuan bangsa di Kabupaten Bogor berdasarkan agama, optimalisasi teknologi dan alat deteksi dini terhadap bencana gempa, banjir dan tanah longsor; serta optimalisasi kemampuan aparat, anggota masyarakat dan kelompok masyarakat terampil dalam menangani bahaya bencana alam, pencegahan bencana alam maupun mitigasi bencana serta meningkatnya perlindungan masyarakat dan penanggulangan/penanganan korban bencana alam/kebakaran maupun korban bencana sosial.

Urusan Sosial, diprioritaskan pada berkurangnya secara signifikan jumlah pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat; serta pendapatan per kapita dan upah minimum kabupaten serta upah minimum regional mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum.

Urusan Tenaga Kerja. Pembangunan urusan ketenagakerjaan pada aspek peningkatan kompetensi dan daya saing yang diarahkan untuk peningkatan sarana, prasarana dan memperluas kurikulum yang terkait dengan dunia kerja pada pelatihan tenaga kerja yang berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan.

Selain itu, penumbuhkembangan pelaksanaan hubungan industrial untuk menciptakan produktivitas, kualitas, dan kesejahteraan pekerja.

Untuk transmigrasi diarahkan pada optimalisasi penyelenggaraan program transmigrasi.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pembangunan bidang Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan untuk peningkatan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan, peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak dan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan.

Urusan Pangan, diprioritaskan untuk mempertahankan mantapnya ketahanan pangan, baik produksi maupun distribusi;

Urusan Pertanahan, diprioritaskan pada penataan aset negara dan pemda.

Urusan Lingkungan Hidup. Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup diprioritaskan pada optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup melalui kelayakan AMDAL, UKL/UPL dan RKL/RPL yang bersertifikat dalam kegiatan usaha dan mulai terpenuhinya baku mutu lingkungan yang berlaku; serta semakin optimalnya cakupan revegetasi lahan kritis dan telah menjangkau sebagian besar dari luas lahan kritis yang ada.

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, diprioritaskan pada upaya mewujudkan kemandirian keluarga untuk menuju keluarga kecil berkualitas serta peningkatkan kualitas data kependudukan.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diarahkan pada peningkatan pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa dan potensi ekonomi desa.

Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, diprioritaskan pada pengendalian penduduk alami dengan mengurangi angka kelahiran serta mendorong program keluarga berencana.

Urusan Perhubungan. Pembangunan Perhubungan diprioritaskan pada upaya penambahan jangkauan wilayah pelayanan moda transportasi.

Urusan Komunikasi dan Informatika. Pembangunan Komunikasi dan Informatika diprioritaskan pada pemantapan aksesibilitas masyarakat terhadap teknologi informasi melalui upaya peningkatan jangkauan layanan telekomunikasi di setiap desa/kelurahan.

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Pengembangan KUKM di berbagai sektor perekonomian melalui peningkatan kualitas serta kehandalan sehingga mempunyai daya tawar usaha dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam melakukan aktivitas bisnisnya.

Urusan Penanaman Modal, diprioritaskan pada semakin mantapnya tambahan jumlah maupun laju investasi di wilayah Kabupaten Bogor; dan terus berkembangnya sentra-sentra unggulan yang baru tumbuh di setiap wilayah Kabupaten Bogor.

Urusan Kepemudaan dan Olahraga. Pembangunan urusan kepemudaan diarahkan pada persiapan kemandirian pemuda dalam mensejahterakan dirinya dan masyarakat di sekitarnya tanpa banyak tergantung pada pihak lain. Adapun pengembangan keolahragaan dilakukan melalui perwujudan Kabupaten Bogor sebagai kabupaten yang mampu mencetak atlet berprestasi pada event provinsi dan nasional.

Urusan Kebudayaan. Dalam Pembangunan urusan kebudayaan diprioritaskan pada pelestarian nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Bogor. Upaya yang dilakukan antara lain mengembangkan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat yang dapat dijadikan faktor penyeimbang terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Urusan Perpustakaan, diprioritaskan pada perintisan pengembangan perpustakaan desa/kelurahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Urusan Kearsipan. Pembangunan Kearsipan diprioritaskan pada terciptanya tata pengelolaan karsipan yang terintegrasi (*integrated system*) antara manual dan elektronik pada tingkat PD dan kecamatan.

Urusan Pariwisata, diprioritaskan pada pemasaran dan promosi pariwisata untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang akan berdampak pada investasi, tenaga kerja, kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah.

Urusan Pertanian, diprioritaskan untuk terciptanya kesempatan kerja penuh bagi masyarakat pertanian. Dalam jangka panjang diharapkan seluruh angkatan kerja pertanian mendapatkan pekerjaan penuh sehingga pengangguran terbuka maupun terselubung tidak lagi permanen. Faktor kunci untuk itu adalah meningkatnya kesempatan kerja di pedesaan dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pertanian, khususnya subsistem hilir.

Urusan Perdagangan. Prioritas pembangunan bidang perdagangan diarahkan pada penguatan kerjasama perdagangan dalam negeri, pemberdayaan produk dalam negeri dan penguatan sistem dan jaringan distribusi barang.

Urusan Perindustrian. Pembangunan bidang perindustrian diarahkan untuk memperluas basis kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru yang memiliki keunggulan untuk mendorong pertumbuhan peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja melalui pembangunan sentra-sentra industri, pendekatan sistem kluster di sektor agribisnis dan agroindustri serta meningkatkan keterkaitan industri kecil menengah dengan industri besar dan sektor lainnya.

Urusan Kelautan dan Perikanan, diprioritaskan pada peningkatan produksi dan pemasaran hasil perikanan dan peternakan serta peningkatan daya saing kelembagaan perikanan.

Urusan Perencanaan Pembangunan, diprioritaskan pada optimalisasi peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah dan pengawasan pembangunan daerah yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta optimalisasi ketersediaan data akurat untuk kebutuhan perencanaan pembangunan daerah.

Selain itu, perencanaan pembangunan diarahkan pada upaya yang mendukung semakin mantapnya kenaikan nilai tambah PDRB dan struktur ekonomi telah berada dalam sektor tersier dengan laju pertumbuhan ekonomi yang berada di atas angka inflasi regional dan rata-rata pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Barat; serta pendapatan per kapita dan upah minimum kabupaten serta upah minimum regional mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum.

Urusan Bidang Keuangan. Prioritas pembangunan bidang keuangan diarahkan pada sistem pengelolaan keuangan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik.

Bidang pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi kapasitas pendapatan daerah yang lebih menekankan pada terbangunnya struktur pendapatan yang kokoh, dengan prioritas : (1) optimalisasi kinerja pemungutan pendapatan daerah dari semua sektor pendapatan daerah, baik Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan yang Sah; (2) optimalisasi penerapan sistem informasi manajemen yang berbasis teknologi informasi dalam mengoptimalkan efektifitas administrasi pendapatan daerah; (3) optimalisasi peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur pemungut pendapatan dalam mendorong pengembangan profesionalisme aparatur; (4) optimalisasi pelaksanaan dan penggunaan media sosialisasi sehingga lebih mendorong peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat di bidang pendapatan daerah.

Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Prioritas, pembangunan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan diarahkan pada peningkatan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik dilakukan melalui upaya-upaya peningkatan kualitas sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan serta pengembangan budaya organisasi yang solid.

Urusan Pengawasan, diprioritaskan pada peningkatan pengawasan internal dan peningkatan akuntabilitas kinerja daerah.

5.1.3 Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke V (Periode Bupati/Wakil Bupati Tahun 2023-2025)

Mengacu pada hasil pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan tahapan keempat, maka arah kebijakan pembangunan tahap kelima ditujukan untuk **menyempurnakan pembangunan daerah di seluruh bidang/urusan pemerintahan daerah**. Diharapkan pada akhir periode ini akan terwujud pembangunan daerah yang selaras dengan rencana tata ruang dan wilayah, aspek pendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat terpenuhi dengan baik, dimana fasilitas infrastruktur tersedia dalam kondisi baik dan merata di seluruh wilayah, terkoneksi dengan strategis dan efektif, sehingga dapat mendukung seluruh aktivitas perekonomian masyarakat, tingkat dan kualitas pendidikan masyarakat telah mencapai standar kewenangan daerah bahkan melampaui, kualitas kesehatan masyarakat bertambah tinggi, kemiskinan dan pengangguran menurun drastis, orientasi pembangunan seluruhnya berpihak pada tujuan pembangunan keberlanjutan, terwujud suasana aman, tenteram dan tertib yang memungkinkan seluruh pemangku kepentingan produktif dalam beraktivitas, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan lancar, berorientasi pelayanan publik maksimal mulai dari pelayanan terhadap penduduk baru lahir, pelayanan terhadap segala kebutuhan hidup penduduk, hingga penyiapan pelayanan terhadap penduduk meninggal dunia, dengan didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi yang kekinian.

Bidang Urusan Pendidikan. Pembangunan pendidikan diprioritaskan untuk peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH) melalui pemantapan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, serta munculnya sekolah-sekolah unggulan di Kabupaten Bogor.

Bidang Urusan Kesehatan. Pembangunan kesehatan diprioritaskan untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH), penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi, melalui peningkatan persalinan oleh tenaga kesehatan, peningkatan balita gizi baik dan yang diimunisasi lengkap, peningkatan cakupan sanitasi dasar, peningkatan pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan dasar dan

rujukan, peningkatan angka kesembuhan penderita penyakit tertentu, penyusunan rancangan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan, dan peningkatan manajemen kesehatan yang akuntabel, serta perintisan jumlah penduduk miskin beserta anggota masyarakat lainnya untuk memasuki program jaminan pemeliharaan kesehatan.

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, diprioritaskan pada penambahan dan peningkatan ruas jalan yang mendukung pariwisata, mantapnya ruang terbuka hijau dan taman-taman kota di setiap wilayah kecamatan. Pembangunan Penataan Ruang diprioritaskan pada terpenuhinya seluruh rencana tata ruang secara detail untuk kota dan kawasan serta daerah yang tumbuh dengan pesat; serta terkendalinya dengan optimal pemanfaatan ruang sesuai dengan kaidah pengelolaan ruang dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, diarahkan pada peningkatan cakupan rumah layak huni dan penataan kawasan kumuh permukiman.

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat, diprioritaskan untuk menangani gangguan trantibum dan penegakan Perda, optimalisasi persatuan dan kesatuan bangsa di Kabupaten Bogor berdasarkan agama, optimalisasi teknologi dan alat deteksi dini terhadap bencana gempa, banjir dan tanah longsor; serta optimalisasi kemampuan aparat, anggota masyarakat dan kelompok masyarakat terampil dalam menangani bahaya bencana alam, pencegahan bencana alam maupun mitigasi bencana serta meningkatnya perlindungan masyarakat dan penanggulangan/penanganan korban bencana alam/kebakaran maupun korban bencana sosial.

Urusan Sosial, diprioritaskan pada berkurangnya secara signifikan jumlah pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat; serta pendapatan per kapita dan upah minimum kabupaten serta upah minimum regional mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum.

Urusan Tenaga Kerja. Pembangunan urusan ketenagakerjaan pada aspek peningkatan kompetensi dan daya saing yang diarahkan untuk peningkatan sarana, prasarana dan memperluas kurikulum yang terkait dengan dunia kerja pada pelatihan tenaga kerja yang berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan.

Selain itu, penumbuhkembangan pelaksanaan hubungan industrial untuk menciptakan produktivitas, kualitas, dan kesejahteraan pekerja.

Untuk transmigrasi diarahkan pada optimalisasi penyelenggaraan program transmigrasi.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pembangunan bidang Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan untuk peningkatan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan, peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak dan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan.

Urusan Pangan, diprioritaskan untuk mempertahankan mantapnya ketahanan pangan, baik produksi maupun distribusi;

Urusan Pertanahan, diprioritaskan pada penataan aset negara dan pemda.

Urusan Lingkungan Hidup. Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup diprioritaskan pada optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup melalui kelayakan AMDAL, UKL/UPL dan RKL/RPL yang bersertifikat dalam kegiatan usaha dan mulai terpenuhinya baku mutu lingkungan yang berlaku; serta semakin optimalnya cakupan revegetasi lahan kritis dan telah menjangkau sebagian besar dari luas lahan kritis yang ada.

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, diprioritaskan pada upaya mewujudkan kemandirian keluarga untuk menuju keluarga kecil berkualitas serta peningkatkan kualitas data kependudukan.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diarahkan pada peningkatan pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa dan potensi ekonomi desa.

Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, diprioritaskan pada pengendalian penduduk alami dengan mengurangi angka kelahiran serta mendorong program keluarga berencana.

Urusan Perhubungan. Pembangunan Perhubungan diprioritaskan pada upaya penambahan jangkauan wilayah pelayanan moda transportasi.

Urusan Komunikasi dan Informatika. Pembangunan Komunikasi dan Informatika diprioritaskan pada pemantapan aksesibilitas masyarakat terhadap teknologi informasi melalui upaya peningkatan jangkauan layanan telekomunikasi di setiap desa/kelurahan.

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Pengembangan KUKM di berbagai sektor perekonomian melalui peningkatan kualitas serta kehandalan sehingga mempunyai daya tawar usaha dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam melakukan aktivitas bisnisnya.

Urusan Penanaman Modal, diprioritaskan pada semakin mantapnya tambahan jumlah maupun laju investasi di wilayah Kabupaten Bogor; dan terus berkembangnya sentra-sentra unggulan yang baru tumbuh di setiap wilayah Kabupaten Bogor.

Urusan Kepemudaan dan Olahraga. Pembangunan urusan kepemudaan diarahkan pada penyiapan kemandirian pemuda dalam mensejahterakan dirinya dan masyarakat di sekitarnya tanpa banyak tergantung pada pihak lain. Adapun pengembangan keolahragaan dilakukan melalui perwujudan Kabupaten Bogor sebagai kabupaten yang mampu mencetak atlet berprestasi pada event provinsi dan nasional.

Urusan Kebudayaan. Dalam Pembangunan urusan kebudayaan diprioritaskan pada pelestarian nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal

masyarakat Kabupaten Bogor. Upaya yang dilakukan antara lain mengembangkan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat yang dapat dijadikan faktor penyeimbang terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Urusan Perpustakaan, diprioritaskan pada perintisan pengembangan perpustakaan desa/kelurahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Urusan Kearsipan. Pembangunan Kearsipan diprioritaskan pada terciptanya tata pengelolaan karsipan yang terintegrasi (*integrated system*) antara manual dan elektronik pada tingkat PD dan kecamatan.

Urusan Pariwisata, diprioritaskan pada pemasaran dan promosi pariwisata untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang akan berdampak pada investasi, tenaga kerja, kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah.

Urusan Pertanian, diprioritaskan untuk terciptanya kesempatan kerja penuh bagi masyarakat pertanian. Dalam jangka panjang diharapkan seluruh angkatan kerja pertanian mendapatkan pekerjaan penuh sehingga pengangguran terbuka maupun terselubung tidak lagi permanen. Faktor kunci untuk itu adalah meningkatnya kesempatan kerja di pedesaan dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pertanian, khususnya subsistem hilir.

Urusan Perdagangan. Prioritas pembangunan bidang perdagangan diarahkan pada penguatan kerjasama perdagangan dalam negeri, pemberdayaan produk dalam negeri dan penguatan sistem dan jaringan distribusi barang.

Urusan Perindustrian. Pembangunan bidang perindustrian diarahkan untuk memperluas basis kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru yang memiliki keunggulan untuk mendorong pertumbuhan peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja melalui pembangunan sentra-sentra industri, pendekatan sistem kluster di sektor agribisnis dan agroindustri serta meningkatkan

keterkaitan industri kecil menengah dengan industri besar dan sektor lainnya.

Urusan Kelautan dan Perikanan, diprioritaskan pada peningkatan produksi dan pemasaran hasil perikanan dan peternakan serta peningkatan daya saing kelembagaan perikanan.

Urusan Perencanaan Pembangunan, diprioritaskan pada optimalisasi peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah dan pengawasan pembangunan daerah yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta optimalisasi ketersediaan data akurat untuk kebutuhan perencanaan pembangunan daerah.

Selain itu, perencanaan pembangunan diarahkan pada upaya yang mendukung semakin mantapnya kenaikan nilai tambah PDRB dan struktur ekonomi telah berada dalam sektor tersier dengan laju pertumbuhan ekonomi yang berada di atas angka inflasi regional dan rata-rata pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Barat; serta pendapatan per kapita dan upah minimum kabupaten serta upah minimum regional mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum.

Urusan Bidang Keuangan. Prioritas pembangunan bidang keuangan diarahkan pada sistem pengelolaan keuangan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik.

Bidang pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi kapasitas pendapatan daerah yang lebih menekankan pada terbangunnya struktur pendapatan yang kokoh, dengan prioritas : (1) optimalisasi kinerja pemungutan pendapatan daerah dari semua sektor pendapatan daerah, baik Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan yang Sah; (2) optimalisasi penerapan sistem informasi manajemen yang berbasis teknologi informasi dalam mengoptimalkan efektifitas administrasi pendapatan daerah; (3) optimalisasi peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur pemungut pendapatan dalam mendorong pengembangan profesionalisme aparatur; (4) optimalisasi pelaksanaan dan penggunaan media sosialisasi sehingga

lebih mendorong peningkatan pemahaman dan partsipasi masyarakat di bidang pendapatan daerah.

Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Prioritas, pembangunan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan diarahkan pada peningkatan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik dilakukan melalui upaya-upaya peningkatan kualitas sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan serta pengembangan budaya organisasi yang solid.

Urusan Pengawasan, diprioritaskan pada peningkatan pengawasan internal dan peningkatan akuntabilitas kinerja daerah.

Tabel 5.1
Visi, Misi dan Arah Kebijakan Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2005-2025

Visi	Misi	Arah Kebijakan
Kabupaten Bogor Termaju Dan Sejahtera Berlandaskan Iman Dan Takwa	1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas 2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dengan meningkatkan nilai tambah produk dengan inovasi teknologi informasi 3. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur daerah dan konektivitas antar-wilayah 4. Mewujudkan Kabupaten Bogor yang Tegar Beriman (tertib, segar, bersih, indah, mandiri, aman dan nyaman) dan Berkelaanjutan 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Meningkatkan kualitas SDM 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah 1. Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah 1. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup 2. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

5.1.4 Arah Kebijakan Daerah Menurut RTRW Kabupaten Bogor

Untuk mewujudkan keterpaduan dan sinergitas antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan RPJPD, maka arahan

pembangunan yang telah ditetapkan dalam RTRW menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan substansi dari RPJPD. Oleh karena itu, dalam sub-bab ini akan dijelaskan secara garis besar dari substansi RTRW sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2016-2036. RTRW Kabupaten Bogor disusun berdasarkan pemanfaatan untuk semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang, berbudaya, dan berkelanjutan; asas kebersamaan, kemitraan, keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan umum; asas keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Tujuan penataan ruang wilayah di daerah adalah untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang berkualitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bertumpu pada kegiatan pariwisata, permukiman, industri dan pertanian dalam rangka mendorong perkembangan wilayah yang merata dan berdaya saing menuju Kabupaten Bogor termaju dan sejahtera berdasarkan iman dan takwa. Adapun Kebijakan penataan ruang di daerah meliputi:

- a. perwujudan kawasan lindung dalam rangka optimalisasi fungsi perlindungan regional, dengan strategi meliputi:
 1. menetapkan kawasan lindung sesuai dengan fisik lahan, daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 2. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 3. menerapkan prinsip *zero delta Q policy* pada daerah resapan air;
 4. membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
 5. membatasi perkembangan kawasan terbangun pada *enclave* yang berada di dalam kawasan hutan ataupun yang berbatasan dengan kawasan hutan;

6. membatasi perkembangan kawasan terbangun pada daerah sempadan sungai, situ dan mata air; dan
 7. membatasi pengembangan prasarana wilayah di dalam dan di sekitar kawasan lindung
- b. pengembangan wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan sesuai dengan potensi alam dan budaya setempat yang memiliki daya tarik wisatawan mancanegara dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, dengan strategi meliputi:
1. mengembangkan kawasan wisata alam dengan memanfaatkan potensi alam yang ada tanpa mengurangi fungsi dan daya dukung lingkungan alam;
 2. mengembangkan kawasan wisata budaya dengan tetap menjaga kelestarian budaya setempat dan menyesuaikan dengan kultur yang ada;
 3. mengembangkan kawasan wisata buatan yang berorientasi pasar domestik dan mancanegara secara selektif dengan tetap menjaga fungsi pelestarian alam yang berkelanjutan; dan
 4. penyediaan prasarana pendukung pariwisata sesuai kebutuhan kegiatan pariwisata dengan tetap memperhatikan kemampuan lingkungan setempat.
- c. penyediaan lingkungan permukiman perkotaan yang berkualitas, aman, nyaman dan terkoneksi dengan pusat kegiatan di wilayah Jabodetabek, dengan strategi meliputi:
1. menyediakan fasilitas permukiman yang lengkap dan berkualitas serta berdaya saing terhadap daerah sekitar;
 2. mengembangkan permukiman perkotaan secara intensif dengan mendorong penggunaan tanah yang lebih efisien melalui pembangunan perumahan secara vertikal pada wilayah perkotaan yang cepat tumbuh;
 3. mengembangkan permukiman diprioritaskan kepada hunian yang terintegrasi dengan sistem angkutan massal;
 4. memanfaatkan teknologi ramah lingkungan, energi terbarukan dan efisiensi energi di kawasan permukiman perkotaan;

5. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
 6. mengendalikan jumlah pergerakan transportasi melalui pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi dengan wilayah di sekitar daerah;
 7. mengendalikan tata air melalui pengembangan sistem drainase dan peningkatan fungsi resapan air; dan
 8. mengendalikan dan penataan pertumbuhan kawasan permukiman di daerah rawan bencana dan berfungsi lindung.
- d. pengembangan kawasan peruntukan industri yang bertumpu pada potensi sumber daya lokal yang mampu menghasilkan produk bernilai jual internasional dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan, dengan strategi meliputi:
1. mendorong penyediaan kawasan industri yang dikelola secara terpadu, lengkap dan ramah lingkungan;
 2. mengembangkan dan menata industri rumah tangga melalui pemberian dukungan infrastruktur yang memadai sesuai dengan pola ruang yang dikembangkan;
 3. meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri yang berteknologi tinggi dengan tetap menjaga kualitas lingkungan setempat;
 4. optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia setempat;
 5. pengembangan tematik industri berdasarkan ketersediaan potensi sumber daya yang tersedia;
 6. menyediakan sistem transportasi regional yang handal, cepat dan mudah diakses;
 7. mengendalikan perkembangan kegiatan industri yang memberikan dampak pencemaran lingkungan dan menganggu fungsi resapan air; dan
 8. membatasi pertumbuhan industri di luar kawasan industri.
- e. perwujudan areal pertanian tanaman pangan dan penataan pusat permukiman pedesaan sebagai simpul distribusi hasil pertanian

dalam rangka mendukung upaya ketahanan pangan berkelanjutan, dengan strategi meliputi:

1. menetapkan kawasan pertanian pangan yang berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan di Daerah;
 2. mempertahankan kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
 3. mengembangkan jaringan irigasi teknis dan non teknis untuk menunjang keberlanjutan lahan pertanian pangan;
 4. meningkatkan akses jalan dari sentra produksi pertanian ke pusat pemasaran;
 5. memberlakukan insentif dan disinsentif yang mampu mendukung perkembangan usaha kegiatan pertanian;
 6. mengembangkan kawasan agrobisnis berorientasi agropolitan;
 7. mengembangkan kawasan minapolitan;
 8. mengembangkan fasilitas dan infrastruktur serta permukiman perdesaan yang dapat menunjang budidaya perdesaan dalam rangka mempertahankan luas lahan pertanian dan peningkatan produksi pertanian;
 9. meningkatkan aksesibilitas kawasan permukiman pedesaan terhadap kawasan perkotaan sebagai upaya peningkatan distribusi hasil produksi pertanian;
 10. mengembangkan pusat-pusat jasa, koleksi, dan distribusi produk-produk perdesaan yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi setempat; dan
 11. mengendalikan pertumbuhan permukiman pedesaan yang berada di kawasan lindung.
- f. penataan sistem pusat kegiatan dan pelayanan sarana prasarana wilayah secara berjenjang dan sinergis, dengan strategi meliputi:
1. memantapkan pengembangan 3 (tiga) WP dan 12 (dua belas) SWP dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah;
 2. menetapkan sistem pusat kegiatan PKWp, PKLp, PPK, dan PPLk dan PPLd sesuai standar pelayanan minimal;

3. menata dan mengembangkan sistem jaringan prasarana wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah;
4. memantapkan keterkaitan fungsional antar pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan secara sinergis;
5. mengembangkan sistem jaringan jalan tol, jalan arteri primer, dan kolektor primer serta mengintegrasikan pusat kegiatan nasional, dan pusat-pusat pertumbuhan;
6. mengembangkan sistem transportasi, melalui pengembangan terminal angkutan pada pusat-pusat pertumbuhan di wilayah perkotaan, pengembangan terminal angkutan barang pada kawasan industri dan perdagangan, pengembangan terminal agro pada kawasan sentra produksi pertanian serta keterpaduan moda terhadap moda angkutan massal;
7. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi;
8. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
9. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
10. mempertahankan kelangsungan ketersediaan dan pendistribusian sumber air pertanian dan air bersih perkotaan;
11. meningkatkan jaringan transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi, serta mewujudkan sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi yang optimal;
12. mengembangkan sistem penanganan persampahan melalui penyebaran lokasi pengelolaan sampah di seluruh wilayah secara merata dan memiliki keterkaitan erat dengan sistem transportasi;
13. mengembangkan sarana pemakaman untuk memenuhi kebutuhan tanah kuburan yang diarahkan pada pemanfaatan lahan cadangan tanah pemakaman dan terintegrasi dengan tanah pemakaman masyarakat melalui pengembangan area Tempat Pemakaman Umum (TPU) regional dan lokal di setiap

- wilayah kecamatan, serta pengembangan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) pada kawasan yang dinyatakan memungkinkan secara teknis dan fisik lingkungan, serta tidak berdampak sosial pada lingkungan sekitarnya;
14. pengembangan sarana pendidikan dan olahraga secara merata dan berhirarki sesuai kebutuhan masyarakat; dan
 15. pengembangan sarana peribadatan untuk memenuhi kebutuhan keagamaan masyarakat dengan memperhatikan keharmonisan kehidupan beragama dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat melalui pengembangan prasarana peribadatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
- g. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sesuai dengan kepentingan wilayah dan berdaya saing, dengan strategi meliputi:
1. menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten yang memiliki nilai strategis pertahanan dan keamanan, nilai strategis ekonomi, nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan, serta nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi;
 2. mewujudkan nilai strategis kawasan melalui penyediaan infrastruktur wilayah yang memadai dan sesuai dengan kemampuan lahan yang mampu mewujudkan fungsi kawasan;
 3. mengendalikan pertumbuhan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan nilai strategis kawasan dan/atau yang dapat mengganggu nilai strategis kawasan;
 4. optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan buatan sesuai dengan kemampuan dan fungsi kawasan; dan
 5. mengarahkan pengembangan dan pengendalian kawasan strategis sesuai nilai strategis kawasan melalui penyusunan rencana tata ruang Kawasan Strategis Kabupaten.

Arah pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah daerah sesuai dengan RTRW Kabupaten Bogor melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/ pengembangan daerah beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi

program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan secara rinci dijelaskan dalam dokumen RTRW Kabupaten Bogor. Arah pemanfaatan ruang wilayah berisi indikasi program utama penataan ruang yang meliputi:

- a. perwujudan struktur ruang wilayah;
 1. Perwujudan Pusat Kegiatan, dengan program :
 - a) Perwujudan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek
 - b) Perwujudan PKWp Cibinong
 - c) Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal
 - d) Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan
 - e) Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Kota
 - f) Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Desa
 2. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah, dengan program :
 - a) Jaringan Transportasi Darat
 - b) Transportasi Udara
 3. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Energi, dengan program :
 - a) Peningkatan sarana pembangkit tenaga listrik
 - b) Jaringan transmisi tenaga listrik
 - c) Jaringan pipa minyak dan gas bumi
 4. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi, dengan program :
 - a) Sistem Jaringan Kabel
 - b) Sistem Nirkabel
 5. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air, dengan program :
 - a) Wilayah Sungai
 - b) Daerah Irigasi
 - c) Cekungan Air Tanah dan Wilayah Bukan Cekungan Air Tanah
 - d) Prasarana Air Baku untuk Air Minum
 - e) Pengendalian Banjir

6. Perwujudan Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan, dengan program :
 - a) Pengelolaan Persampahan
 - b) Jaringan Air Limbah
 - c) Jaringan Air Minum
 - d) Jaringan Drainase
 - e) Jalur Evakuasi Bencana
- b. perwujudan pola ruang wilayah;
 1. Perwujudan Kawasan Lindung, dengan program :
 - a) Perwujudan Kawasan Hutan Konservasi
 - b) Perwujudan Kawasan Hutan Lindung
 - c) Perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
 - d) Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat
 - e) Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan
 - f) Kawasan Rawan Bencana Alam
 - g) Kawasan Lindung Geologi
 - h) Kawasan Lindung Lainnya
 2. Perwujudan Kawasan Budidaya, dengan program :
 - a) Perwujudan Kawasan Peruntukkan Hutan Produksi
 - b) Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertanian
 - c) Perwujudan Kawasan Perikanan
 - d) Perwujudan Kawasan Pertambangan
 - e) Perwujudan Kawasan Peruntukkan Industri
 - f) Perwujudan Kawasan Pariwisata
 - g) Perwujudan Kawasan Peruntukkan Permukiman
 - h) Perwujudan Kawasan Lainnya
- c. perwujudan kawasan strategis kabupaten, dengan program :
 1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan
 2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi
 3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

4. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi
5. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Daerah

5.1.5 Arah Kebijakan Daerah Terkait Pembentukan Daerah

Arahan kebijakan daerah terkait pembentukan daerah adalah :

1. Pemerintah daerah dapat melaksanakan penataan daerah berdasarkan desain penataan daerah yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat.
2. Penataan daerah dapat berupa pembentukan daerah dan penyesuaian daerah yang diselaraskan dengan kepentingan strategis nasional.
3. Pemerintah daerah dapat melakukan pembentukan daerah, pembentukan kecamatan, pembentukan kelurahan, pembentukan desa dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

5.2 Sasaran Pokok

Sasaran pokok didefinisikan sebagai rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Sasaran pokok merupakan pedoman utama penyusunan visi kepala daerah (saat mencalonkan diri), meskipun berbeda dengan visi pada setiap tahapan.

5.2.1 Sasaran Pokok Tahapan Masa Lalu (Tahun 2005-2018)

Sasaran pokok yang tertuang dalam dokumen RPJPD Kabupaten Bogor tahun 2005-2025 untuk periode tahun 2005-2018, tidak dituangkan dalam beberapa tahapan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sasaran pokok pembangunan daerah untuk

tahapan sampai dengan tahun 2018 diacu dari setiap misi sebagai berikut:

- a. **Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas**, ditandai oleh hal-hal berikut :
 1. Terwujudnya masyarakat yang berakhhlak mulia dan bermoral berdasarkan falsafah negara Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang ditunjukkan dengan kesolehan individu dan kesolehan sosial dalam perilaku sehari-hari;
 2. Meningkatnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat, yang ditunjukkan dengan meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Melek Huruf (AMH), tingkat partisipasi pendidikan, Angka Harapan Hidup (AHH), status gizi anak serta menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan angka kesakitan;
 3. Terwujudnya sumberdaya manusia yang berdaya saing yang ditunjukkan dengan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan;
 4. Terkendalinya pertumbuhan penduduk beserta persebarannya dan tercapainya keseimbangan antara jumlah penduduk terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungannya;
 5. Meningkatnya kompetensi, penempatan, perlindungan dan pengawasan tenaga kerja;
 6. Meningkatnya kualitas hidup lansia, kesejahteraan para penyandang masalah sosial serta perlindungan terhadap perempuan dan anak;
 7. Meningkatnya ketahanan budaya, jatidiri masyarakat dan terimplementasinya nilai luhur budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.
- b. **Terwujudnya perekonomian rakyat yang maju**, ditandai oleh hal-hal berikut :
 1. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di sektor industri dan perdagangan serta didukung oleh pertanian yang tangguh dan pariwisata yang berbasis masyarakat;

2. Meningkatnya daya tahan dan daya saing dunia usaha di Kabupaten Bogor, terutama Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) serta tumbuhnya wirausaha baru;
3. Meningkatnya pelayanan jaringan infrastruktur transportasi yang andal dan terintegrasi serta terwujudnya kemudahan dan efisiensi bagi pergerakan orang, barang dan jasa;
4. Meningkatnya pelayanan jaringan irigasi untuk pemenuhan kebutuhan air bagi pertanian;
5. Terwujudnya pengendalian pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan untuk kemajuan perekonomian daerah;
6. Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana dasar permukiman sesuai dengan lingkungan yang sehat dan layak huni, baik di perkotaan maupun di perdesaan;
7. Terpenuhinya kebutuhan energi listrik bagi seluruh masyarakat;
8. Meningkatnya jangkauan pelayanan jaringan komunikasi dan teknologi informasi (telematika) yang efisien dan modern ke seluruh wilayah;
9. Meningkatnya pemanfaatan sumber-sumber energi alternatif dan terbarukan, seperti energi hidro, surya, angin, panas bumi dan bio –energi lainnya untuk pembangunan daerah;
10. Terjaminnya ketersediaan kebutuhan pangan masyarakat;
11. Meningkatnya investasi di daerah, perluasan lapangan kerja, nilai tambah produk unggulan Kabupaten Bogor disertai dengan meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat dan pendapatan per kapita masyarakat, sehingga menurunnya jumlah pengangguran terbuka dan penduduk miskin di Kabupaten Bogor.

c. Terwujudnya Kabupaten Bogor yang TEGAR BERIMAN (Tertib, Segar, Bersih, Indah, Mandiri, Aman dan Nyaman) dan Berkelanjutan , ditandai oleh hal-hal berikut :

1. Meningkatnya penegakan hukum demi terwujudnya stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta tercapainya situasi dan kondisi yang kondusif bagi keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Bogor;

2. Meningkatnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam mentaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Tercapainya penataan ruang yang memperhatikan keseimbangan antara fungsi lindung dan fungsi budidaya;
4. Terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan dan keindahan dalam pengaturan tata ruang dan tata hijau kawasan;
5. Meningkatnya kualitas lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat;
6. Meningkatnya kemampuan untuk mendayagunakan segenap potensi daerah dan potensi masyarakat untuk mencapai kemandirian daerah;
7. Terciptanya suasana aman dan nyaman dalam lingkungan permukiman, wilayah dan daerah;
8. Meningkatnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam serta pelestarian fungsi lingkungan hidup yang berkelanjutan;
9. Terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam setempat untuk mewujudkan nilai tambah sosial, ekonomi, budaya dan menjadi modal dasar pembangunan daerah.

d. **Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**, ditandai oleh hal-hal berikut :

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang didukung oleh kondisi politik yang demokratis;
2. Meningkatnya profesionalisme aparatur, efisiensi birokrasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bermuara kepada peningkatan pelayanan publik, sehingga terwujud pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab;
3. Meningkatnya penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang menjamin terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat;
4. Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah;

5. Meningkatnya transparansi dan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik, dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang efisien dan modern.

5.2.2 Sasaran Pokok Tahapan Keempat dan Kelima (Tahun 2018-2025)

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan jangka panjang untuk tahapan keempat, sasaran pokok pembangunan berdasarkan arah kebijakan yang ingin dicapai adalah :

- 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia**, dengan sasaran pokok :
 - a. **Penurunan angka kemiskinan daerah**, dimana hal yang ingin diwujudkan adalah menurunnya jumlah penduduk miskin, melalui pelaksanaan program-program lintas sektoral.
 - b. **Pengurangan angka pengangguran**, dimana hal yang ingin diwujudkan yaitu berkurangnya pengangguran terbuka, seiring dengan meningkatnya daya serap tenaga kerja, terbuka lebarnya lapangan kerja serta meningkatnya mutu tenaga kerja dan pencari kerja. Di sisi lain, pengurangan angka pengangguran diwujudkan dalam bentuk peningkatan wirausaha baru dengan jaminan berusaha dan jaminan pasar bagi produk yang baik/kondusif. Disamping itu, pengurangan angka pengangguran diwujudkan melalui upaya menumbuhkembangkan usaha-usaha mikro, kecil dan menengah yang kuat dan berkualitas.
 - c. **Penurunan ketimpangan pendapatan**, dimana hal yang ingin diwujudkan adalah pembangunan yang merata di semua wilayah dengan penyediaan kebutuhan infrastruktur dan pengembangan potensi-potensi wilayah lokal berbasis pemberdayaan masyarakat dan desa. Diharapkan masyarakat memiliki daya beli yang tinggi
 - d. **Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan**, dimana hal yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dari aspek pendidikan dan kesehatan. Diharapkan dapat terwujud rata-rata lama sekolah yang sesuai

dengan standar kewenangan daerah, harapan lama sekolah yang tinggi, melalui penanganan pendidikan yang berkualitas dan profesional, serta harapan hidup yang tinggi melalui pelayanan upaya kesehatan yang profesional, tepat, siap tanggap dan ramah.

- 2. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup, dengan sasaran pokok : **Peningkatan kualitas lingkungan hidup**, dimana hal yang ingin diwujudkan adalah Kabupaten Bogor yang asri, bersih, indah, dan nyaman. Hal ini diwujudkan melalui upaya selektif dan kontrol yang tinggi terhadap pelaksanaan aktivitas pembangunan, agar terhindar dari pencemaran, baik tanah, air maupun udara, serta berkurangnya daerah resapan air yang memicu terjadinya bencana kekeringan serta kurangnya cadangan air tanah yang dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan ekologi dan ekosistem. Kualitas lingkungan hidup juga diwujudkan melalui pengolahan yang tepat terhadap sampah/sisa produk industri maupun rumah tangga secara terpadu dengan menggunakan hasil-hasil inovasi serta perkembangan teknologi. Wujud lainnya dari peningkatan kualitas lingkungan hidup adalah munculnya taman-taman di setiap wilayah dan kawasan-kawasan strategis yang memiliki multifungsi, baik sebagai sarana pariwisata, edukasi, kesehatan, maupun sebagai penguat kualitas lingkungan hidup.**
- 3. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum, dengan sasaran pokok :**
 - a. peningkatan upaya perwujudan kententeraman dan ketertiban umum**, dimana hal yang ingin diwujudkan adalah terbangunnya budaya tertib di tengah masyarakat sesuai dengan aturan perundang-undangan serta ketentuan adat istiadat lokal yang berlaku, masyarakat hidup rukun dan damai, serta suasana keagamaan/religius yang kondusif tampak dalam ritual peribadatan dan tingkah laku keseharian masyarakat. Hal penting lainnya yang ingin diwujudkan adalah menurunnya angka kriminalitas yang akan mendukung kondusivitas investasi dan pembangunan ekonomi daerah, serta

penanganan pencegahan bencana yang bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

- b. **Penurunan risiko bencana**, dimana hal yang ingin diwujudkan adalah mengurangi bahaya bencana dengan melakukan upaya pencegahan bencana, mengurangi kerentanan bencana melalui mitigasi dan pengalihan, serta meningkatkan kapasitas pengelola kebencanaan melalui upaya kesiapsiagaan bencana.

4. Meningkatkan pemerataan pembangunan, dengan sasaran pokok :

- a. **Peningkatan konektivitas infrastruktur wilayah**, dimana dalam hal ini, yang ingin diwujudkan adalah menurunnya ketimpangan wilayah dengan terpenuhinya aksesibilitas ekonomi masyarakat secara efektif dan efisien, serta terwujudnya kelancaran transportasi perdesaan, perkotaan dan antar daerah.
- b. **Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana permukiman**, dimana dalam hal ini yang ingin diwujudkan adalah terpenuhinya kondisi ideal permukiman masyarakat, baik air bersih, air minum, listrik, sanitasi, limbah, persampahan, pemakaman, serta fasilitas umum dan sosial. Diharapkan di akhir periode akan terwujud penurunan yang signifikan terhadap persentase kawasan permukiman yang kumuh.

5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, dengan sasaran pokok :

- a. **Peningkatan produksi daerah**, dimana yang ingin diwujudkan adalah peningkatan secara signifikan dari kontribusi sektor primer, sekunder dan tersier terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Diharapkan akan terwujud peningkatan daya saing produk yang berkonsekuensi pada upaya peningkatan kualitas produk daerah serta perluasan jangkauan pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri, dengan tetap

memperhatikan kebutuhan internal daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan kualitas produk yang baik.

- b. **Peningkatan investasi daerah**, dimana yang ingin diwujudkan adalah peningkatan investasi daerah, baik PMA, PMDN, maupun investasi BUMD, yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Disamping itu, diharapkan terwujud efek ganda investasi yang juga dapat membangkitkan dan menumbuhsuburkan usaha mikro, kecil dan menegah daerah.

6. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan sasaran pokok :

- a. **Peningkatan kualitas dan kompetensi ASN**, dimana hal yang ingin diwujudkan adalah peningkatan kemampuan teknis dan manajerial seluruh ASN berdasarkan latar belakang pendidikan dan pengalaman.
- b. **Peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan daerah**, dimana hal yang ingin diwujudkan adalah Pemerintah Kabupaten Bogor dapat selalu mempertahankan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), memperoleh nilai sangat baik dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan, serta mendapatkan predikat perencanaan terbaik skala nasional dan Jawa Barat.
- c. **Peningkatan pelayanan publik**, dimana hal yang ingin diwujudkan adalah masyarakat mendapatkan kepuasan dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah. Kepuasan masyarakat diharapkan lahir dari rasa senang karena pelayanan yang ramah dan sopan, cepat dalam proses penyelesaian, efektif dalam proses mendapatkan pelayanan, murah dalam biaya, serta mudah dalam mendapatkan akses informasi seluruh pelayanan publik.
- d. **Peningkatan infrastruktur dan teknologi pelayanan publik (IT Governance)**, dimana hal yang ingin diwujudkan adalah terpenuhi dan terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien, terkoneksi antar sektor berbasis

keunggulan teknologi informatika, dan selalu mengikuti perkembangan teknologi.

Tabel 5.2.
Sasaran Pokok dan Indikator Kinerja Kabupaten Bogor 2005 – 2025

Misi	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	2018-2023	2023-2025	Arah Kebijakan
1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas	1.1 Penurunan angka kemiskinan	Angka kemiskinan	7,14	6,38	5,98	TAHAP I : Peletakan fondasi untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera
	1.2 Pengurangan angka pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	9,08	7,03	6,35	
	1.3 Penurunan ketimpangan pendapatan	Indeks Gini	0,34	0,31	0,31	
	1.4 Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,61	72,07	73,07	
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dengan meningkatkan nilai tambah produk dengan inovasi teknologi informasi	2.1 Peningkatan produksi daerah	Nilai PDRB Berdasarkan Harga Berlaku (triliun)	221,55	308,70	349,70	TAHAP II : Penguatan dan pemantapan pembangunan daerah untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera
	2.2 Peningkatan investasi daerah	Nilai investasi Daerah (triliun)	8,69	11,20	12,40	
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur daerah dan konektivitas antar-wilayah	3.1 Peningkatan konektivitas infrastruktur wilayah	Indeks ketimpangan Williamson	0,96	0,937	0,923	TAHAP III : Pengembangan dan percepatan pembangunan daerah
	3.2 Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana permukiman	Cakupan Penataan Perumahan dan Permukiman Kumuh	46,20	100	100	
4. Mewujudkan kabupaten bogor yang tegar beriman (tertib, segar, bersih, indah, mandiri, aman dan nyaman) dan berkelanjutan	4.1 Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	56,21	58,71	59,71	TAHAP IV : Optimalisasi seluruh pelaksanaan kewenangan urusan pemerintahan daerah
	4.2 Peningkatan upaya perwujudan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum	NA	24,41	21,24	
	4.3 Penurunan risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	152	142	140	
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1 Peningkatan kualitas dan kompetensi ASN	Persentase ASN yang mengikuti diklat formal dan struktural	0,63	0,66	0,68	TAHAP V : menyempurnakan pembangunan daerah di seluruh bidang/urusan pemerintahan daerah
	5.2 Peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan daerah	Nilai AKIP	B	A	A	
	5.3 Peningkatan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,57	82,00	83,00	
	5.4 Peningkatan infrastruktur dan teknologi pendukung pelayanan publik (<i>IT Governance</i>)	Indeks SPBE	NA	3,00	3,00	

5.3 Program Unggulan Daerah

Dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, aparatur pemerintah selain dituntut untuk dapat menjalankannya dengan baik akan tetapi dituntut pula untuk melakukan terobosan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Berkenaan dengan itu program/kegiatan unggulan daerah yang telah dan akan dilakukukan pada periode masa RPJMD dapat disampaikan di bawah ini:

5.3.1 Program Unggulan Daerah Lima Tahunan Ke II (2008-2013)

1. Program Pelopor Pencipta Lapangan Kerja Perdesaan/Kelurahan

Program ini dilaksanakan sebagai salah satu bentuk intervensi sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dalam rangka menciptakan dan memperluas lapangan kerja bagi angkatan kerja muda terdidik, khususnya penganggur terbuka dan setengah terbuka di perdesaan/kelurahan, melalui kegiatan pengembangan usaha mandiri atau wirausaha. Sasaran program ini adalah kaum muda yang belum /tidak bekerja dan/atau sedang mencari pekerjaan atau menganggur, terutama mereka yang berdomisili di perdesaan/kelurahan.

2. Program Gerakan Untuk Membangun Bogor Inisiatif Masyarakat (GUMBIRA)

Konsep dasar Program GUMBIRA adalah sebuah usaha bersama untuk mengakselerasi peningkatan IPM, terutama daya beli masyarakat, melalui pengembangan potensi ekonomi lokal dengan fokus pada pembangunan ekonomi di pedesaan. Sasaran dari Program GUMBIRA adalah individu dan/atau kumpulan individu yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Bogor dan mempunyai kepedulian serta komitmen untuk melakukan berbagai perubahan pembangunan ke arah yang lebih baik di wilayahnya masing-masing. Dengan demikian diharapkan dapat

terwujud pertumbuhan kegiatan ekonomi perdesaan yang berkelanjutan.

3. Program Kepedulian Kepada Kaum Miskin

Tujuan program ini untuk meningkatkan pelayanan bagi penduduk miskin, yang diupayakan melalui pengurangan beban bagi keluarga miskin dan peningkatan pendapatan keluarga miskin. Sasaran dari program ini adalah seluruh penduduk miskin yang telah divalidasi sekaligus telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, sehingga diperoleh kepastian data penduduk miskin di wilayah Kabupaten Bogor. Program ini diaplikasikan melalui program pembangunan yang didanai, baik dari APBD Kabupaten Bogor, APBD Provinsi Jawa Barat, maupun APBN, antara lain dengan meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan serta sarana dan prasarana dasar pemukiman bagi masyarakat miskin, melalui pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, dengan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan beras bagi keluarga miskin (raskin), penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri (PNPM Mandiri), perbaikan gizi masyarakat, pembangunan infrastruktur perdesaan, rehabilitasi rumah tidak layak huni dan lain-lain.

4. Program Kabupaten Bermartabat

Tujuan program ini untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Bogor. Sasaran program ini adalah setiap pelanggaran dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat, baik individu, kelompok maupun badan usaha, seperti masalah PKL, penyerobotan tanah, bangunan liar tanpa IMB, warung remang-remang, tempat berkumpulnya PSK, galian C liar, penyimpangan fungsi ruang dan aspek-aspek pelanggaran peraturan yang berlaku di beberapa wilayah Kabupaten Bogor. Program ini diaplikasikan melalui

Gerakan Nongol Babat (NOBAT), yang melibatkan beberapa OPD yang terkait.

5.3.2 Program Unggulan Daerah Lima Tahunan Ke III (2013-2018)

1. Situ Front City of Cibinong Raya

Dalam rangka memanfaatkan potensi alam yang ada, Kabupaten Bogor mengembangkan *Waterfront City* atau situ front city dengan tujuan mengangkat situ sebagai wajah kota.

Terdapat empat strategi Cibinong Raya dalam tahapan penggalakan *Situ Front City* sebagai arah pengembangan kota, yaitu :

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas situ-situ di Cibinong Raya;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan situ;
- c. Mengarahkan pembangunan dan *layout* kota untuk berorientasi situ;
- d. Meningkatkan daya tarik situ sebagai wajah dan citra kota Cibinong Raya.

Kawasan aplikasi konsep *Situ Front City* direncanakan berperan sebagai pusat ruang terbuka hijau, pusat kegiatan *outdoor* masyarakat (*public open space*), area pengembangan sarana rekreasi dan wisata, maupun area fasilitas infrastruktur publik. Ruang terbuka ini akan menjadi berbeda dari yang lain karena tersebar di berbagai daerah dengan karakteristik yang khas, yaitu dilengkapi dengan lanskap situ.

Pembangunan fisik di sekitar area situ juga akan diarahkan untuk memiliki kearifan dan perhatian terhadap situ. Area pembangunan di sekitar situ dapat berupa pembangunan kawasan bisnis, kawasan pemukiman, maupun kawasan komersial, rekreasi dan wisata. *Layout* desain kota akan mengisyaratkan situ sebagai jantung kota yang diiringi dengan sistem pembangunan yang ramah lingkungan dan tidak merusak tatanan ekosistem yang ada.

2. Pemberian Anugerah Pancaniti Apik

Anugerah Pancaniti Apik adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor kepada desa yang telah berhasil menyusun dokumen rencana pembangunan secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penilaian penghargaan ini diharapkan dapat memberikan dorongan semangat bagi masing-masing desa untuk meningkatkan kualitas dokumen rencana pembangunan dan memperkuat kemitraan dalam perencanaan pembangunan. Selain itu, pemberian penghargaan ini juga dapat memperkuat kerjasama dan kemitraan dengan para pihak dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas.

Pemberian Anugerah Pancaniti Apik menjadi penting dan strategis karena memiliki manfaat ganda (*multiplier effect*), yaitu:

- a. Mendorong Pemerintahan Desa dapat menyusun perencanaan yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Desa;
- b. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa));
- c. Meningkatkan kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Meningkatkan kapasitas Camat dan perangkat Kecamatan sebagai pembina dan pengawas pembangunan Desa.

3. Pelatihan Pemetaan Drone Desa

Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu, desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis, sehingga dapat menjadi cikal bakal landasan yang kuat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Membangun kemandirian desa dalam konteks desa membangun harus dimulai dari proses perencanaan desa yang baik, serta diikuti dengan tata kelola program yang baik. Pembangunan desa yang efektif bukanlah semata-mata lahir dari adanya kesempatan, melainkan adanya proses partisipasi yang dihasilkan melalui musyawarah untuk menentukan kegiatan-kegiatan prioritas pembangunan desa yang sesuai dengan kewenangan desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur dengan jelas mengenai pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Agar pembangunan desa bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan, maka pembangunan desa harus terencana, terkoordinasi, berbatas waktu, serta sesuai dengan kondisi khas masyarakat dan wilayah desa yang bersangkutan. Selain itu pelaksanaan pembangunan desa melibatkan peran aktif masyarakat, perangkat desa, lembaga-lembaga desa, lembaga di tingkat kecamatan dan kabupaten (atau lembaga supra desa).

Salah satu implementasi pembangunan desa yang terencana dan terkoordinasi adalah dengan memanfaatkan penggunaan drone. Kabupaten Bogor bekerjasama dengan Tim Sekolah Drone Desa Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) IPB telah melatih 20 desa sebagai *pilot project* dalam pemanfaatan drone dengan tujuan memberikan pembekalan bagi aparatur desa dalam penyusunan *database* untuk perencanaan pembangunan desa dan kawasan perdesaan dengan memanfaatkan teknologi drone.

Pelatihan tersebut diharapkan aparatur desa dapat:

- a. Merakit dan mengoperasikan pesawat tanpa awak atau drone;
- b. Mengaplikasikan metode riset sosial dalam analisis spasial;
- c. Mengaplikasikan metode interpretasi dan analisis data spasial desa;
- d. Membuat film atau video dokumenter untuk promosi wilayah;
- e. Menyediakan data dan informasi dalam menyusun perencanaan pembangunan desa.

4. GERBANG JUGALA (GERakan PemBANGunan Menuju KeluarGA Hidup LAYAK)

GERBANG JUGALA adalah Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bogor yang dilaksanakan secara terpadu (*REMPUG SAUYUNAN*) dan diharapkan dapat mendorong Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) meningkat kesejahteraannya sehingga mampu mandiri dan menjadi Rumah Tangga Sejahtera. Program Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan mencakup segala aspek dengan didasarkan semangat *silih asah*, *silih asih* dan *silih asuh* menuju hidup layak dengan menguatkan *akhlaq karimah*, peningkatan *pangarti* (wawasan, pendidikan, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan) dan peningkatan harta (kebutuhan primer, sekunder dan tersier).

Tiga Pilar Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yaitu:

- a. *Silih Asah* (Pilar Keagamaan)
 - ❖ Jaminan Pemenuhan Kebutuhan Primer;
 - ❖ Mewajibkan Pria Memberi nafkah kepada diri dan keluarga;
 - ❖ Mewajibkan Kerabat Dekat untuk Membantu Saudaranya;
 - ❖ Mewajibkan Negara untuk Membantu Rakyat Miskin;
 - ❖ Mewajibkan Kaum Muslimin untuk Membantu Rakyat Miskin;
 - ❖ Meningkatkan peran infaq, sodaqoh, jariyah, zakat, hibah, wakaf;
 - ❖ Meningkatkan peran MUI dan Alim Ulama/Pondok Pesantren.

- b. *Silih Asih* (Pilar Kewilayah), terdiri dari tiga wawasan :
- ❖ Wangun Manusia : pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta perubahan pola pikir (*mindset*);
 - ❖ Wangun Kahuripan : mendorong dan memfasilitasi perbaikan lingkungan masyarakat miskin agar dapat menjalankan kehidupan dan usahanya dengan aman, sehat dan nyaman;
 - ❖ Wangun Padumukan : menciptakan wirausaha-wirausaha baru sehingga dapat membuka kesempatan kerja dan mendorong perbaikan pendapatan keluarga dengan pola kemitraan.
- c. *Silih Asuh* (Pilar Budaya/Tradisi)
- ❖ Tradisi Gotong royong;
 - ❖ Tradisi Musyawarah;
 - ❖ Tradisi Mengikuti Kebiasaan Nenek Moyang;
 - ❖ Tradisi Mempercayai Ketokohan;
 - ❖ Tradisi *Anjangsono*;
 - ❖ Tradisi *Andilan*.

Substansi dari PROGRAM GERBANG JUGALA adalah :

- 1) Menjadikan peserta PKH sebagai sasaran inti penanggulangan kemiskinan;
- 2) Mengkoordinir lokasi dan fokus program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang terpadu dengan membentuk Tim Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan (11 SKPD);
- 3) Membangun aplikasi manajemen penanggulangan kemiskinan melalui SMS *Gateway*;
- 4) Membangun lembaga usaha ekonomi dari Tim Pendamping PKH dan TKSK guna memotong mata lantai pemasaran;
- 5) Konsep "1 RTSM 1 Sarjana" dengan mendorong para pendamping PKH untuk memotivasi anak RTSM yang akan mengikuti ujian/lulus SLTA agar melanjutkan kuliah.

5. Desa Mengajar

Desa Mengajar adalah upaya “Pendidikan Berbasis Masyarakat” berupa :

- a. gerakan kolektif, kerjasama antara seluruh komponen yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha; serta
- b. mengoptimalkan semua sumber daya pendidikan yang tersedia di masyarakat/di tingkat desa.

Desa Mengajar :

- a. Menyediakan data *by name by address*/data lengkap tentang warga masyarakat yang belum sekolah, tidak pernah sekolah atau buta aksara, putus sekolah dan warga masyarakat lainnya yang kebutuhan pendidikannya tidak dapat terpenuhi melalui jalur pendidikan formal;
- b. Memiliki kelembagaan pendidikan yang berfungsi dalam memotivasi, memfasilitasi serta mengelola penyelenggaraan pendidikan non formal di desa melalui Program pendidikan kecakapan hidup, program pendidikan anak usia dini, program pendidikan kepemudaan, program pendidikan pemberdayaan perempuan, program pendidikan keaksaraan, program pendidikan keterampilan kerja, program pendidikan kesetaraan;
- c. Memberikan fasilitasi bagi terselenggaranya PNF; dan
- d. Menjalin kerjasama antara pemerintah desa, lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan PNF di desa.

6. Aplikasi SMS *Gateway*

Aplikasi SMS *Gateway* adalah sebuah aplikasi yang mengkoordinir berbagai data dan informasi terkait kasus/kejadian lingkup PMKS dan permasalahan lainnya di masyarakat yang diinput melalui SMS ke server sebagai pusat *database*, yang selanjutnya dilakukan pemilahan dan pengolahan data serta respon dalam waktu singkat (minimal 3 detik) untuk

diberitahukan kembali kepada beberapa pihak yang terkait dengan pokok data tersebut untuk ditindaklanjuti.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar.

Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

Manfaat Aplikasi SMS *Gateway*, yaitu :

- Informasi/laporan kejadian/kasus cepat dan akurat;
- Pemberitahuan cepat dan akurat;
- Komunikasi dan koordinasi cepat, tepat dan akurat;
- Penyimpanan data lebih tertib, rapih, akurat dan cepat (data elektronik);
- Mudah, efektif dan efisien;
- Validasi identitas pelapor;
- Partisipasi meningkat.

5.3.3 Program Unggulan Daerah Lima Tahunan Ke IV dan V (2018-2025)

1. Pengembangan Geopark Pongkor

Dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah Barat Kabupaten Bogor, serta didukung oleh potensi kekayaan sumberdaya alam yang sangat besar, baik dari aspek *geodiversity*, *biodiversity* dan *culture diversity*, Pemerintah Kabupaten Bogor mencanangkan Geopark Pongkor sebagai salah satu solusi pengembangan potensi wilayah dengan tetap melestarikan alam sekaligus upaya untuk menuntaskan permasalahan sosial masyarakat dalam rangka

meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan angka pengangguran. Keberadaan Geopark Pongkor yang telah mendapat sertifikat sebagai Geopark Nasional pada tanggal 30 November 2018 dan diharapkan 2 (dua) tahun ke depan menjadi *Unesco Global Geopark* (UGG) akan memberikan *multiplier effect* bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Geopark pongkor berada di kawasan 15 Kecamatan.

2. Pelestarian dan Pengembangan Budaya Cimande

Kabupaten Bogor memiliki potensi warisan leluhur yang dilestarikan secara turun-temurun terkait upaya pengobatan alternatif/tradisional fisiotherapi, atau lebih banyak dikenal dengan pengobatan patah tulang Cimande. Model pengobatan ini telah dikenal lama oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka melestarikan tradisi serta mengembangkan alternatif pengobatan yang membantu aspek medis, Pemerintah Kabupaten Bogor berupaya untuk mengembangkan warisan tersebut dan menjadikannya sebagai peluang peningkatan kesejahteraan.

Pengobatan tradisional fisiotherapi Cimande ini tidak lepas dari tradisi, budaya beladiri pencak silat Cimande, yakni seperti dua sisi mata uang yang saling mengikat. Ke depan Pencak Silat Cimande juga di dorong untuk menjadi salah satu cabang olah raga dalam Olimpiade dan Bogor khususnya Cimande diharapkan menjadi pusat perguruan Silat di Indonesia bahkan di dunia.

3. Pembangunan Jalan Poros Tengah Timur

Jalan Poros tengah timur merupakan suatu bentuk pengembangan infrastruktur wilayah sebagai alternatif pemecahan masalah transportasi daerah, sekaligus untuk membangkitkan aktivitas ekonomi daerah yang dilaluinya yang menjadi target pembangunan jalan poros tengah timur. *Multiplier effect* dari pembangunan jalan ini selain memberikan bangkitan pertumbuhan ekonomi secara regional akan meningkatkan

interkoneksi antar wilayah sekaligus menjadi alternatif bagi masyarakat yang menuju Cianjur dan Bandung pada saat Puncak-Bogor mengalami kendala lalu lintas, karena membentang dari Babakan Madang Kabupaten Bogor hingga mencapai daerah Cipanas Kabupaten Cianjur.

4. Mendukung Pengembangan Kota Baru Publik Maja

Kota Baru Publik Maja merupakan proyek strategis nasional yang didorong oleh Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan perumahan, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Wilayah Kota Baru Publik Maja meliputi wilayah di Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogor, Dan Kabupaten Tangerang. Untuk mendukung percepatan Kota Baru Publik Maja tersebut, Pemerintah merancang jalan strategis nasional mulai dari wilayah Prumpung hingga wilayah Rangkasbitung, melalui Serpong - Gunung Sindur - Rumpin -Parung Panjang - Tenjo - Maja - Rangkasbitung.

Seiring dengan rencana pengembangan Kota Baru Publik Maja tersebut, diperlukan pendekatan perencanaan pembangunan yang strategis, terutama dalam rangka meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah bagian utara Kabupaten Bogor tersebut, mengingat di satu sisi, kehidupan masyarakat masih tergolong rendah, ketersediaan infrastruktur masih terbatas, namun di sisi lain, wilayah tersebut kaya akan potensi wilayah yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan.

Oleh karena itu, pengembangan Kota Baru Publik Maja di wilayah Kabupaten Bogor menjadi cukup penting dalam mendongkrak nilai ekonomi dan sosial, serta memenuhi kebutuhan akan perumahan bagi masyarakat.

Selain itu, kebijakan antisipasi pertumbuhan kawasan utara Kabupaten Bogor ini menjadi pertimbangan penting dalam mengendalikan privatisasi lahan yang dilakukan oleh para pengusaha Kota Tangerang Selatan, Kab/kota Tangerang, dan

lain-lain, karena harga lahan yang sudah tinggi di daerah tersebut. Seiring hal tersebut, Kebijakan Tata Ruang yang termuat dalam Perda 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor telah mengakomodir kebijakan pengembangan kota baru Maja tersebut. Diharapkan pada tahun 2025, semua pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bogor, dan para pengembang dapat mewujudkan rencana tersebut dengan pengendalian perumahan/ industri yang efektif dan efisien.

5. Pengembangan Situ Front City

Identitas kota menjadi penting ketika muncul kebutuhan akan membentuk ekosistem perkotaan yang baik. Identitas kota dapat mencirikan potensi terdalam suatu kota atau visi ke depan suatu kota yang akan diraih. Sebagai wilayah yang memiliki posisi geografis yang berada di hulu dan tengah kawasan Jabodetabek, Kabupaten Bogor memiliki tujuh Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mempunyai peran konservasi di wilayah hulu. Banyaknya sungai dan adanya 95 situ di seluruh Kabupaten Bogor menjadi tanda bahwa Kabupaten Bogor harus memperhatikan keberadaan potensi-potensi tersebut untuk lebih maju dan terhindar dari bencana.

Oleh karena itu, situ-situ yang ada harus menjadi garda terdepan untuk mencirikan suatu kota / kawasan. Diawali dengan Kota Cibinong, Situ Front City akan dikembangkan melalui pemanfaatan 3 (tiga) situ yang ada, yaitu Situ Pemda-Situ Kabantenan-Situ Cikaret dengan luas + 210 ha, dengan harapan bahwa pengembangan ketiga situ tersebut akan menambah nilai ekonomi situ, yaitu sebagai obyek wisata, olahraga, dan sebagainya. Disamping itu, diharapkan akan meningkatkan nilai sosial, dengan disediakannya ruang-ruang publik untuk interaksi masyarakat kota, serta meningkatnya nilai konservasi alam untuk keberlangsungan pembangunan. Konsep Situ Front City di Kota

Cibinong diharapkan dikembangkan di wilayah lain di luar Kota Cibinong.

Pelaksanaan kelima agenda besar yang tertuang dalam tema “memancang asa Tahun 2025” agar menjadi kabupaten termaju dan sejahtera berlandaskan iman dan takwa, perlu mendapat dukungan dari seluruh pihak, baik Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya. Dukungan tersebut sangat diharapkan berupa kebijakan, dana maupun dukungan lainnya agar seluruh asa ini dapat terlaksana dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bogor khususnya dan masyarakat Indonesia bahkan mancanegara pada umumnya.

BAB VI

PENUTUP

Demikian dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ini disusun sebagai :

1. Pedoman bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk menyusun visi-misi pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ketika belum terdapat dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
3. Acuan dalam penyusunan RPJPD periode berikutnya (tahun 2025-2045).
4. Acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyinergikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, sasaran, dan program/kegiatan masing-masing dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Badan Perencanaan pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, atau penyebutan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melakukan evaluasi terhadap RPJPD dan melaporkannya kepada Bupati Bogor dengan jadwal sebagai berikut :

1. **Pada Bulan Januari Tahun 2020**, berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Bogor dan RKPD Kabupaten Bogor pada tahapan keempat RPJPD berkenaan; dan

2. **Pada Bulan Januari Tahun 2025** berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Bogor dan RKPD Kabupaten Bogor pada tahapan kelima RPJPD berkenaan, sekaligus sebagai laporan evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang Kabupaten Bogor.

Hasil evaluasi RPJPD, dilaporkan oleh Bupati Bogor kepada Gubernur Jawa Barat untuk dinilai, diberikan kesimpulan dan rekomendasi terhadap kinerja RPJPD.

BUPATI BOGOR,



ADE YASIN

MATRIKS SANDINGAN
TERHADAP HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 27 TAHUN 2008 TENTANG
RPJPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2005-2025

NO	URAIAN HASIL KONSULTASI	KETERANGAN JAWABAN/ PERBAIKAN	HALAMAN PERBAIKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A	UMUM			
	1. Penyajian RPJPD Kabupaten Bogor agar disusun sesuai sistematika yang ditetapkan dalam C.1 Penyajian Dokumen RPJPD pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.	Penyajian RPJPD Kabupaten Bogor sudah sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017	Bab I s.d VI	
	2. Pada Konsideran Mengingat, poin 33 agar diubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025.	Sudah diperbaiki pada Raperda Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005 – 2025	Raperda halaman 4	
	3. Perlu diperhatikan bahwa sasaran pokok dan arah kebijakan dalam Perubahan RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 harus selaras dengan arah kebijakan, serta rencana struktur ruang dan rencana pola ruang	Perubahan RPJPD sudah mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor 2016-2036	Bab I s.d VI	

NO	URAIAN HASIL KONSULTASI	KETERANGAN JAWABAN/ PERBAIKAN	HALAMAN PERBAIKAN	KETERANGAN
	wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor 2009-2029. Hasil telaahan struktur dan pola ruang selanjutnya dituangkan ke dalam tabel sesuai format Tabel T.B.27 dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.			
	4. Sesuai dengan bab VI penutup, bahwa RPJPD Kabupaten Bogor harus menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD dan RKPD serta keberhasilan pembangunan Kabupaten Bogor dalam mewujudkan visi dan misi daerah.	Setuju, RPJPD Kabupaten Bogor harus menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD dan RKPD serta keberhasilan pembangunan Kabupaten Bogor dalam mewujudkan visi dan misi daerah	-	
B	BAB I PENDAHULUAN			
	1. Sub Bab 1.2. Dasar Hukum Penyusunan			
	Dalam Sub Bab ini cukup memuat ketentuan yang menjadi landasan hukum penyusunan RPJPD Kabupaten Bogor secara langsung dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	Landasan hukum penyusunan RPJPD Kabupaten Bogor sudah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru	Sub bab 1.2 Halaman I-5 s.d I-8	
C	BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH			
	Penyajian bab ini telah sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, namun terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan, antara lain:			

NO	URAIAN HASIL KONSULTASI	KETERANGAN JAWABAN/ PERBAIKAN	HALAMAN PERBAIKAN	KETERANGAN
	1. Sesuai amanat Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, data yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan adalah data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah. Oleh karena itu, dalam penyajian data diupayakan bersumber dari SIPD.	SIPD hingga saat disusunnya dokumen RPJPD ini berada pada status belum dapat diakses dan diinput. Namun, database yang tercantum dalam SIPD telah disiapkan secara manual dan digunakan dalam penyusunan RPJPD ini.	Sub Bab 2.2 Halaman II-51	
	2. Pada Bab ini perlu dimuat hasil evaluasi analisis capaian RPJPD Kabupaten Bogor sampai dengan tahap ke-3 (Periodisasi Tahun 2005-2018) dengan menggunakan 4 (empat) aspek yaitu: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Juga perlu diperhatikan terkait dengan capaian indikator makro selama perodisasi dimaksud.	Sudah dimuat hasil evaluasi analisis capaian RPJPD Kabupaten Bogor sampai dengan tahap ke-3 (Periodisasi Tahun 2005-2018)	Sub bab 2.5 Halaman II-130 s.d II-153	
	3. Agar ditambahkan sub bab tentang capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG's pada bab II, karena TPB berperan penting sebagai acuan dalam proses perencanaan dan pembuatan kebijakan.	Sudah ditambahkan sub bab tentang capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG's	Sub bab 2.6 Halaman II-154 s.d II-170	
	4. Agar ditambahkan sub bab tentang capaian terhadap Standar Pelayanan Minimal pada bab II.	Sudah ditambahkan sub bab tentang capaian terhadap Standar Pelayanan Minimal	Sub bab 2.7 Halaman II-170 s.d II-174	
D	BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS			

NO	URAIAN HASIL KONSULTASI	KETERANGAN JAWABAN/ PERBAIKAN	HALAMAN PERBAIKAN	KETERANGAN
	DAERAH			
	1. Permasalahan dan isu strategis yang disusun supaya merujuk berdasarkan analisis hasil evaluasi gambaran analisa capaian RPJPD berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah, serta aspek geografi dan demografi, serta capaian indikator makro sebagaimana telah disajikan dalam BAB II, sehingga dapat menjadi dasar perubahan RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025.	Permasalahan sudah disusun merujuk berdasarkan analisis hasil evaluasi gambaran analisa capaian RPJPD	Sub bab 3.1 s.d 3.3	
	2. Dalam hal terdapat perubahan metode perhitungan maupun perubahan jumlah dan jenis sektor, seperti contoh perubahan perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) agar sebaiknya disandingkan sebelum dan sesudah perubahan. Hal ini bertujuan agar mempermudah dalam melihat kondisi awal dan perubahan dari masing-masing indikator dan target periode kinerja Kabupaten Bogor.	Didalam sub bab permasalahan, perhitungan IPM dan perubahan jumlah dan jenis sektor yang mengalami perubahan metode perhitungan hanya ditampilkan tahun terakhir saja sehingga tidak perlu ada sandingan	-	
E	BAB IV VISI DAN MISI DAERAH			
	Penyajian visi dan misi dalam dokumen RPJPD Kabupaten Bogor sangat penting karena keadaan atau cita-cita yang diinginkan dari hasil pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun akan tergambar.	setuju	-	

NO	URAIAN HASIL KONSULTASI	KETERANGAN JAWABAN/ PERBAIKAN	HALAMAN PERBAIKAN	KETERANGAN
F	BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH			
	1. Arah Kebijakan adalah instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan.	setuju	-	
	2. Penyusunan Perubahan Perda RPJPD Kabupaten Bogor agar tetap berpedoman pada RTRW. Hal ini bertujuan agar menjamin arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD selaras dengan arah kebijakan RTRW. Hasil telaahan struktur dan pola ruang selanjutnya dituangkan ke dalam Tabel T.-B.27 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.	Tabel T.-B.27 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 digunakan hanya sebatas kertas kerja, adapun substansi sudah dalam bentuk narasi	Sub bab 5.1.4 Halaman V-5 s.d V-13	
	3. Pada Bab ini perlu disajikan Tabel T-B.2. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai mekanisme analisis arah kebijakan dan sasaran pokok daerah sampai periode sekarang, sehingga dapat menjadi dasar perubahan RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025.	Sudah disajikan dalam Bab II	Bab II Sub bab 2.5 Halaman II-130 s.d II-153	
	4. Pada bab ini perlu dijabarkan tentang arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun berdasarkan bidang urusan.	Sudah dijabarkan berdasarkan bidang urusan	Sub bab 5.1 Halaman V-4 s.d V-15	
	5. Pada bab ini untuk ditambahkan gambar tentang tema/fokus Pembangunan duapuluh tahunan seperti pada gambar G-B.10 Permendagri Nomor 86 tahun 2017.	Sudah ditambahkan gambar tentang tema/fokus Pembangunan duapuluh tahunan	Sub bab 5.1 Halaman V-1	

NO	URAIAN HASIL KONSULTASI	KETERANGAN JAWABAN/ PERBAIKAN	HALAMAN PERBAIKAN	KETERANGAN
	6. Pada bab ini untuk ditambahkan table Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah seperti tabel T-B.50 Permendagri nomor 86 tahun 2017.	Sudah ditambahkan table Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah	Sub bab 5.2 Tabel 5.2 Halaman V-33	
G	LAIN-LAIN			
	Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 supaya disempurnakan sesuai dengan huruf A sampai dengan huruf F tersebut di atas.	Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 sudah disempurnakan	Bab I s.d Bab VI	

**KEPALA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN BOGOR,**

Dr. Ir. Hj. SYARIFAH SOFIAH, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641110 198909 2 002